

LAPORAN KINERJA



0811 7389 062



bpom_bengkulu@pom.go.id



Jl. Depati Payung Negara KM. 13
No. 29 Pekan Sabtu - Bengkulu 38213



2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (Balai POM di Bengkulu) merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan POM Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Laporan Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan dari rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian kegiatan untuk memperoleh hasil capaian kinerja yang optimal. Laporan kinerja disusun secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana aksi dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai POM di Bengkulu dengan Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi misi Organisasi. Laporan Kinerja ini juga menjabarkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi lima elemen pokok komponen penting dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta capaian kinerja.

Laporan kinerja ini dibuat mengacu pada dokumen Renstra 2025-2029 dimana pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target tahun 2025, membandingkan realisasi capaian tahun sebelumnya, dengan unit kerja yang sejenis, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya ke depan, analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan anggaran.

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai di lingkungan Balai POM di Bengkulu demi tercapainya indikator kinerja utama yang berorientasi hasil dan akuntabel serta memberikan outcome bagi program pengawasan obat dan makanan sehingga dapat dirasakan masyarakat. Dalam laporan ini, disajikan rencana kinerja, hasil pencapaian terhadap rencana kinerja, realisasi anggaran yang digunakan, berbagai inovasi untuk mendukung pencapaian kinerja serta berbagai penghargaan yang telah diperoleh selama tahun 2025. Dalam pencapaian ini terdapat beberapa indikator kinerja yang sudah melebihi target yang ditetapkan, namun terdapat juga indikator yang masih membutuhkan upaya khusus untuk pencapaiannya, khususnya indikator yang masih berkelanjutan untuk periode kedepan.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder dan pihak eksternal yang telah bekerjasama sehingga dapat diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 sebesar 91.73 dengan predikat "baik".

Akhir kata, laporan kinerja ini kami harapkan dapat menjadi umpan balik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan kinerja pada tahun mendatang guna mendorong peningkatan pelayanan masyarakat serta pengabdian kepada nusa dan bangsa pada masa yang akan datang.

Bengkulu, 27 Februari 2026
Kepala Balai POM di Bengkulu,



Kodon Tarigan, S.Si, Apt

**PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN
ANGGARAN 2025 PADA BALAI POM DI BENGKULU**

Penanggungjawab : Kodon Tarigan, S.Si,Apt

Koordinator : Nurussaumi, S.AP.,MM

Ketua : Hifdzi Ulil Azmi, S.Farm, Apt

Sekretaris : Kanthi Lestari, SKM., M.AP.

Anggota :1. Silvia Gandarosa, S.Si, Apt, M.Sc
2. Mukhlisah, S.Si., Apt
3. Denton RM Simamora, S.Si
4. Alex Junico Ginting, S.Farm., Apt, M.Sc.
5. Yunika Sary, S.Farm, Apt., M.Si.
6. Yenni Mirawaty, SH.
7. Tuti Amalia As, S.Farm., Apt.
8. Anisa Prima Hilmi, S.Farm., Apt.
9. Sri Muftri Diani Saraan, S.Farm., Apt, MSi.
10. Osah Apriyanti, S.Farm, Apt.
11. Novri Fitriani, S.Farm, Apt.
12. Gomgom Portibi Pakpahan, SH., MH.
13. Ummi Abidah, SE
14. Anita Eka Julya Banjarnahor,S.Si.,M.Sc.
15. Muhammad Dwiki Darmawan N, A.Md

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PENYUSUNAN LAKIP	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
HIGHLIGHT 2025	14
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	21
1.2 Gambaran Umum Organisasi	23
1.3 Struktur Organisasi	25
1.4 Isu Strategis	26
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Renstra	46
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	51
2.3 Perjanjian Kinerja	57
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	71
2.5 Metode Pengukuran	79
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	88
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	364
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	402
3.4 Realisasi Anggaran	416
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	440
4.2 Saran	445
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik perbandingan NKO Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM dalam klaster II.....	89
Gambar 3.2. Pencapaian indikator kinerja Balai POM di Bengkulu dalam Sasaran Strategis 1	97
Gambar 3.3. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis.....	108
Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	116
Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	124
Gambar 3.6. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	132
Gambar 3.7. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel Pangan IRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	141
Gambar 3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional	151
Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan di Tindaklanjuti dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	158
Gambar 3.10. Perbandingan Realisasi Indikator Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	163
Gambar 3.11. Perbandingan dengan Balai POM Kluster II.....	173
Gambar 3.12. Perbandingan realisasi Presentasai Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	179
Gambar 3.13. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis dan target Nasional	89
Gambar 3.14. Perbandingan Realisasi Indikator label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	96

Gambar 3.15. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional	103
Gambar 3.16. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium dengan Balai sejenis dan Target Nasional.	110
Gambar 3.17. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	127
Gambar 3.18. Meningkatnya efektivitas kie di wilayah kerja	133
Gambar 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	135
Gambar 3.20. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional.....	137
Gambar 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	144
Gambar 3.22. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan Balai POM	147
Gambar 3.23. Realisasi Perbandingan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan capaian kinerja Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM lain sejenis	148
Gambar 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	159
Gambar 3.25. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan Balai POM sejenis	161
Gambar 3.26. Penghargaan Juara 2 Desa Kungkai Baru dalam Lomba Desa Pangan Aman Nasional Regional Barat.....	163
Gambar 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	167
Gambar 3.28. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai POM sejenis	169
Gambar 3.29. Penghargaan Juara 3 Pasar kota Medan dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat.....	172
Gambar 3.30. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB dengan Balai POM sejenis	181
Gambar 3.31. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	189

Gambar 3.32. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional.....	190
Gambar 3.33. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan Balai POM sejenis dan target nasional.....	204
Gambar 3.34. Sertifikat predikat Balai Terbaik II kepada Balai POM di Bengkulu dalam kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	207
Gambar 3.35. Sertifikat predikat Balai Terbaik III dalam kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	208
Gambar 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	214
Gambar 3.37. Grafik realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik dibandingkan dengan Balai sejenis dan target nasional.....	216
Gambar 3.38. rata-rata indikator kinerja pada sasaran ini dengan nilai capaian sasaran	224
Gambar 3.39. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai pembangunan ZI tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	227
Gambar 3.40. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional	228
Gambar 3.41. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	236
Gambar 3.42. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional.....	238
Gambar 3.43. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Balai POM setara dan target nasional.....	251
Gambar 3.44. Perbandingan realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPOM Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	258
Gambar 3.45. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional	259
Gambar 3.46. Tampilan depan aplikasi SIBAKTI dan SIARAN yang lahir dari pemanfaatan informasi kinerja secara berkala.....	407

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Nilai Sasaran Strategis Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dalam klaster II.....	90
Tabel 3.2. Pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Bengkulu	93
Tabel 3.3. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026	175
Tabel 3.4. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026	185
Tabel 3.5. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026	198
Tabel 3.6. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026	209
Tabel 3.7. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026	222
Tabel 3.8 Rentang Nilai Pada Penilaian AKIP BPOM	235
Tabel 3.9 Nilai AKIP BPOM Bengkulu tahun 2025.....	235
Tabel 3.10. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026	243
Tabel 3.11 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	364
Tabel 3.12 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.....	380
Tabel 3.13 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	381
Tabel 3.14 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	389
Tabel 3.15 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	391
Tabel 3.16 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja.....	393
Tabel 3.17 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	395

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Bengkulu merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Dalam mendukung misi BPOM, telah ditetapkan 5 tujuan strategis meliputi :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Selain itu, telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan berdasarkan Visi dan Misi BPOM yang ingin dicapai sekaligus sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja. Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dijabarkan dalam bentuk kinerja organisasi dan kinerja anggaran.

Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM mengacu pada hasil perhitungan total nilai pencapaian kinerja yang telah dilakukan normalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja. Nilai pencapaian akhir kinerja Balai POM di Bengkulu mengalami koreksi **10%** disebabkan oleh predikat nilai **AKIP BB (Baik)**. Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Bengkulu tahun 2025 berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh sebesar **91,73**, nilai mengalami penurunan sebesar **13.16** dibandingkan NKO Tahun 2024 sebesar 104.93. Namun, terdapat catatan bahwa perhitungan NKO tahun 2024 berbeda dengan tahun 2025, dimana pada tahun 2025 NKO dipengaruhi oleh Predikat Nilai AKIP Unit kerja dan hanya berasal dari rata-rata capaian indikator kinerja. Sedangkan pada tahun 2024 tidak mempertimbangkan nilai AKIP unit kerja dan berasal dari Nilai Sasaran Strategis (NSS) terhadap masing-masing perspektif.

Pencapaian kinerja tahun 2025 dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil **12 (dua belas)** indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria “**Sangat Baik**”, **9 (sembilan)** indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria “**Baik**”, **1 (satu)** indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria “**Kurang**”, dan **6 (enam)** indikator kinerja dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

Melalui pengukuran kinerja sasaran strategis, maka disimpulkan pernyataan keberhasilan pencapaian kinerja:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 109.45% (Sangat Baik)
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan capaian 102.58% (Sangat Baik)
- c. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 109.79% (Sangat Baik)
- d. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 104.44% (Sangat Baik)
- e. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 109.24% (Sangat Baik)
- f. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan capaian 105.99% (Sangat Baik)
- g. Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium dengan capaian 102.53% (Sangat Baik)
- h. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 106.70% (Sangat Baik)
- i. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 105.26% (Sangat Baik)
- j. Balai POM di Bengkulu berhasil Melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif pada wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 105,26% (Sangat Baik)
- k. Indeks Pelayanan Publik UPT capaian 102. 55% (Sangat Baik)
- l. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM capaian 101. 04% (Sangat Baik)

Secara keseluruhan capaian Balai POM di Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sangat Baik	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan SF dan PO yang ditindaklanjuti stakeholder	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti
	T : 86,50 R : 94,67 C : 109,45	T : 26,00 R : 26,67 C : 102,58	T : 91,00 R : 99,91 C : 109,79	T : 95,75 R : 100,00 C : 104,44
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	Persentase Pemenuhan Lab Pengujian SF dan PO UPT sesuai standar
	T : 90,00 R : 98,32 C : 109,24	T : 91,00 R : 99,92 C : 109,80	T : 100,00 R : 105,99 C : 105,99	T : 75,00 R : 76,19 C : 101,59
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
	T : 87,31 R : 93,16 C : 106,70	T : 95,00 R : 100,00 C : 105,26	T : 4,70 R : 4,82 C : 102,55	T : 2,88 R : 2,906 C : 100,90
Baik	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian K/K Pangan Aman	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti
	T : 100,00 R : 100,00 C : 100,00	T : 90,00 R : 86,81 C : 96,46	T : 14,29 R : 14,29 C : 100,00	T : 50,00 R : 50,00 C : 100,00
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM
	T : 11 R : 11 C : 100,00	T : 1 R : 1 C : 100,00	T : 90,72 R : 88,52 C : 97,57	T : 80,59 R : 78,33 C : 97,20

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM T : 5 R : 5 C : 100,00				
Kurang	Jumlah desa pangan aman T : 3 R : 1 C : 33,33			
Tidak Dapat Disimpulkan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan T : 80,00 R : 91,53 C : 114,41	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan T : 85,00 R : 95,00 C : 111,76	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti T : 87,00 R : 100,00 C : 114,94	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti T : 85,00 R : 94,29 C : 110,93
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi T : 14,12 R : 16,47 C : 116,64	Persentase laporan analisis kejahatan SF dan PO yang diselesaikan sesuai standar T : 90,00 R : 100,00 C : 111,11	

Ket : T = Target ; R = Realisasi ; C = Capaian

Dari 8 Sasaran Kegiatan, terdapat pencapaian sasaran yang tidak maksimal ditunjukkan dengan tidak tercapainya target 100% yaitu pada Sasaran meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 85,01% (Cukup) dan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan NSS 99,65% (Baik).

Pemenuhan sasaran kegiatan efektivitas KIE disebabkan oleh tidak terpenuhinya 1 dari 4 indikator kinerja yaitu **Jumlah** desa pangan aman dengan capaian 33,3%. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan indikator ini adalah adanya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 yang menyebabkan target 3 desa pangan hanya terealisasi 1 desa. Pelaksanaan pemenuhan 2 desa pangan aman berikutnya juga ikut terdampak dengan terkendala kurangnya anggaran. Langkah yang telah dilakukan diantaranya dengan upaya revisi anggaran serta berkoordinasi dengan Badan POM perihal penurunan target. Namun, hingga pengujung tahun 2025 tidak lagi

dapat melakukan perubahan target. Upaya antisipatif ke depan yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian target sejak triwulan 1 tahun 2026 dengan ketersediaan anggaran yang ada pada saat itu.

Kinerja Anggaran

Postur APBN Balai POM di Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp. Rp26.079.443.000,00 yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai POM di Bengkulu Nomor : SP DIPA- 063.01.2.432901/2025 tanggal 24 November 2024.

Dalam pelaksanaannya, postur anggaran BPOM di Bengkulu mengalami dinamika berupa **pemblokiran anggaran**. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara serta tindak lanjut atas **Arahan Presiden** pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 mengenai efisiensi belanja birokrasi, khususnya pada komponen perjalanan dinas. Penyesuaian anggaran tersebut berupa pemblokiran Belanja Barang, khususnya pada Akun Perjalanan Dinas dengan Nilai Nominal Blokir Rp2.583.446.000,- sehingga alokasi Belanja Barang yang bersifat efektif (dapat segera digunakan) berubah dari Rp13.745.567.000 menjadi Rp11.162.121.000. Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, terdapat total pemblokiran anggaran pada BPOM di Bengkulu ditetapkan sebesar Rp12.544.954.000, dengan rincian Pemblokiran belanja barang sebesar Rp8.548.827.000 dan belanja Modal sebesar Rp3.996.127.000 sehingga pagu yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 15.809.391.000. Kemudian Revisi Kedua dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan I sebagai tolok ukur dalam penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Februari 2025.

Memasuki Triwulan II, dilakukan Revisi Ketiga dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.174 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran Badan POM dimana untuk Balai POM di Bengkulu terdapat relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp2.735.382.000,00 untuk tujuan pemulihan kapasitas operasional melalui pembukaan blokir pada 7 (tujuh) Rincian Output (RO) strategis berupa pengembalian sesuai dengan jumlah pagu anggaran awal, termasuk di dalamnya pemulihan alokasi untuk **akun perjalanan dinas** guna mendukung pengawasan lapangan. Hal ini turut mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi krusial yaitu inspeksi dan sampling, pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Revisi Keempat dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan II dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 April 2025 sebagai tolok ukur dalam penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Revisi Kelima dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp. 543.376.000,00 dan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang keperluan perkantoran CASN sebesar Rp.4.782.000,00.

Pada triwulan III, Revisi Keenam dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan III dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Juli 2025 sebagai tolok ukur dalam penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Pada Triwulan IV, Revisi Ketujuh dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan IV dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Oktober 2025 sebagai tolok ukur dalam penilaian IKPA. Revisi Kedelapan dilaksanakan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No KU.02.03.21.10.25.340 tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Tindak Lanjut Hasil Monev Belanja Pegawai Satker Pagu Minus TW III TA 2025 tanggal 15 Oktober 2025 dimana Balai POM di Bengkulu mendapat penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.57.968.000,00 atas kekurangan gaji dan uang makan pegawai tagun 2025. Revisi Kesembilan dilaksanakan sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 03 November 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp24.928.000,00. Revisi Kesepuluh dilaksanakan sesuai Surat Kuasa Pengguna Anggaran Balai BPOM Bengkulu No T-KU.02.01.2B.12.25.1242 tanggal 12 Desember 2025 tentang Pemutakhiran data berkaitan dengan Revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.

Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPOM di Bengkulu telah mengelola total pagu anggaran sebesar Rp25.594.035.000. Berdasarkan dinamika penyesuaian anggaran yang terjadi sepanjang tahun, terdapat kebijakan pemblokiran anggaran sebesar Rp. 9.784.644.000. Hal ini menyebabkan total pagu efektif (setelah blokir) sebesar Rp15.809.391.000 dengan realisasi Rp15.805.718.783 atau sebesar 99,98% dari pagu setelah blokir atau sebesar 61,76% dari pagu sebelum blokir. Efisiensi anggaran yang diperoleh berdasarkan pengukuran rincian output dan sasaran strategis menunjukkan bahwa Balai POM di Bengkulu telah memanfaatkan anggaran yang tersedia secara EFISIEN, didukung data pengukuran efisiensi berikut:

1. Berdasarkan Rincian Output, 19 dari 21 Rincian Output kategori EFISIEN
2. Berdasarkan Sasaran Kegiatan, 6 dari 8 Sasaran Kegiatan kategori EFISIEN
3. Berdasarkan Indikator Kinerja, 24 dari 28 Indikator Kinerja Utama kategori EFISIEN

HIGHLIGHT 2025

Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bengkulu menunjukkan kinerja yang konsisten, inovatif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat melalui berbagai capaian strategis, penghargaan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Launching SIPADEK GALO

Pada **Januari 2025**, Balai POM di Bengkulu meluncurkan inovasi **SI PADEK GALO**, sebagai upaya peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, serta adaptif dalam mendukung pelayanan publik berkualitas.



BPOM Bengkulu Raih Penghargaan atas Kontribusi Luar Biasa dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba

Memasuki **Februari**, Balai POM di Bengkulu meraih **Piagam Penghargaan** atas kontribusi luar biasa dalam pengendalian **Resistensi Antimikroba (AMR)** melalui koordinasi lintas sektor pada kegiatan Semarak Aksi Nyata, sebagai bentuk komitmen menjaga keselamatan kesehatan publik.



SAKA POM Bengkulu Raih Penghargaan SAKA Tergiat Nomor 1, BPOM Bengkulu Relaunching SIBAKTI sebagai Penguatan Sistem Penindakan

Pada Maret 2025, SAKA POM Bengkulu menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan **SAKA Tergiat Nomor 1 tingkat Kwartab Kota Bengkulu** atas peran aktif dalam edukasi masyarakat serta dukungan terhadap pengawasan obat dan makanan.

Capaian tersebut semakin diperkuat dengan dilaksanakannya **Relaunching SIBAKTI (Sistem Barang Bukti Penindakan)**, yang merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya, **BABE BAKTI**. Pengembangan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti hasil penindakan.

SIBAKTI hadir dengan sistem yang lebih terintegrasi, terdigitalisasi, dan user-friendly untuk mendukung proses pencatatan, monitoring, serta pelaporan barang bukti secara lebih tertib dan akuntabel. Melalui relaunching ini, Balai POM di Bengkulu menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam melakukan transformasi digital guna memperkuat tata kelola penindakan.

Sinergi antara pembinaan generasi muda melalui SAKA POM dan penguatan sistem internal melalui SIBAKTI menjadi bukti nyata komitmen Balai POM di Bengkulu dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang profesional, modern, dan berintegritas.



BPOM Bengkulu Hadirkan Layanan Konsultasi Virtual di MPP Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara dan Luncurkan LAPOR PASTI

Pada **April 2025**, Balai POM di Bengkulu menghadirkan layanan konsultasi virtual di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara guna mempermudah pelaku UMKM dan masyarakat memperoleh pendampingan perizinan, informasi keamanan produk, serta layanan pengaduan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor, sebagai wujud komitmen pelayanan publik yang cepat, mudah, dan adaptif.

Pada kesempatan yang sama, Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan launching **LAPOR PASTI (Laporan Pengaduan WBS Internal Terpadu dan Integratif)** sebagai sistem pengaduan internal berbasis digital. LAPOR PASTI dirancang

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi melalui mekanisme pelaporan yang terintegrasi, aman, dan terdokumentasi secara sistematis.

Melalui perluasan layanan virtual dan implementasi LAPOR PASTI, Balai POM di Bengkulu terus memperkuat transformasi digital baik dalam pelayanan eksternal kepada masyarakat maupun dalam penguatan tata kelola internal yang profesional dan berintegritas.



Balai POM dan POLDA Bengkulu Tandatangani Perjanjian Kerjasama dan Musnahkan Produk Ilegal



mencapai **Rp831.796.500**.

Mei 2025, Balai POM di Bengkulu bersama **Polda Bengkulu** menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengawasan dan penindakan obat dan makanan ilegal, sekaligus melakukan pemusnahan barang bukti hasil penindakan dengan nilai temuan

Luncurkan Inovasi SIMPAN KANTOR, BPOM Bengkulu Perkuat Edukasi dan Tata Kelola Digital



Pada **Juni**, Balai POM di Bengkulu berperan aktif dalam pembekalan **Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba (PUPAN)** Tahun 2025 melalui materi Waspada Penyalahgunaan Obat, sebagai wujud sinergi BPOM dan BNN dalam pencegahan. Pada kesempatan yang sama, Balai POM di Bengkulu juga secara resmi meluncurkan inovasi **SIMPAN KANTOR (Sistem Informasi Pemeliharaan Kantor)** Tahun Anggaran 2025. Inovasi ini merupakan sistem digital terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajuan serta pemantauan pemeliharaan inventaris dan sarana prasarana perkantoran.

SIMPAN KANTOR diharapkan mampu mendukung tata kelola internal yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme pencatatan, pelaporan, dan monitoring berbasis sistem. Peluncuran inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Balai POM di Bengkulu dalam mendorong transformasi digital sekaligus memperkuat kinerja organisasi.

Balai POM di Bengkulu Raih Dua Penghargaan Nasional di Bidang Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (+ sertfdidikat)

Dengan sinergi edukasi eksternal melalui pembekalan Duta Anti Narkoba dan penguatan tata kelola internal melalui SIMPAN KANTOR, Balai POM di Bengkulu terus berupaya mewujudkan organisasi yang profesional, inovatif, dan berdaya saing.



Pada **Juli 2025**, Balai POM di Bengkulu meraih **dua penghargaan nasional** dalam Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, yakni Terbaik ke-3 kategori Pemetaan Kerawanan dan Terbaik ke-2 kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan.



BPOM Bengkulu Serahkan Sertifikat Keamanan Pangan kepada PMMI Bengkulu

Di bulan Agustus 2025, Balai POM di Bengkulu menyerahkan sertifikat keamanan pangan kepada kelompok rentan binaan PMMI Provinsi Bengkulu yang telah mengikuti pelatihan dalam inovasi “Percaya Juara Keren”, sebagai bentuk komitmen mendukung kelompok difabel memproduksi pangan sesuai standar serta memfasilitasi pengurusan izin edar melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Mal Pelayanan Publik Kota Bengkulu, guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka



Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan seminar reawareness Gratifikasi dan Anti Penyuapan dengan 2 narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan wujud penguatan manajemen anti penyuapan yang juga merupakan bagian dari komitmen bersama dalam membangun reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Launching INOVASI SIMBA

Di **September**, inovasi digital kembali diluncurkan melalui aplikasi **SIMBA (Sistem Manajemen Permintaan Barang)** untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan permintaan barang secara terintegrasi.



Balai POM di Bengkulu Berhasil Bina Desa dan Pasar Raih Penghargaan Tingkat Nasional



Pada **Oktober 2025**, Provinsi Bengkulu berhasil meraih **dua penghargaan nasional** Regional Barat dalam Lomba Desa dan Pasar Pangan Aman, mencerminkan keberhasilan sinergi BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Balai POM di Bengkulu Torehkan Prestasi Nasional melalui Pelayanan Prima dan Inovasi Unggulan



Memasuki **November**, Balai POM di Bengkulu meraih predikat **Pelayanan Prima** sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 serta masuk **Top 22 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM** melalui inovasi **SALAM PRAMUKA**.

Tutup Tahun 2025 dengan Prestasi dan Inovasi, BPOM Bengkulu Raih Penghargaan dan Luncurkan SIARAN

Sebagai penutup tahun, pada **Desember 2025**, Balai POM di Bengkulu meraih berbagai penghargaan atas **Keterbukaan Informasi Publik** tingkat provinsi dan nasional, serta apresiasi dari **Gerakan Pramuka Bengkulu** atas kontribusi sosial dan pembinaan generasi muda. Pada momentum yang sama, Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan launching inovasi **SIARAN (Sistem Administrasi Risiko Sampling dan Penandaan)**. Inovasi ini dikembangkan sebagai sistem digital terintegrasi untuk mendukung proses administrasi sampling dan penandaan secara lebih sistematis, berbasis risiko, serta terdokumentasi dengan baik. SIARAN hadir untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, memperkuat akurasi data, serta memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Implementasi inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital berkelanjutan Balai POM di Bengkulu dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang profesional, modern, dan adaptif. Dengan capaian penghargaan dan peluncuran inovasi SIARAN, Balai POM di Bengkulu menutup tahun 2025 dengan semangat peningkatan kinerja dan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang unggul dan terpercaya.



Berbagai capaian tersebut menegaskan komitmen Balai POM di Bengkulu dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, inovatif, dan berkelanjutan demi perlindungan kesehatan masyarakat.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan pada awal periode Renstra pada tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan yang diproyeksikan masih akan bertahan hingga tahun berikutnya yaitu:

a. Kejahatan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dan beredarnya produk tanpa izin edar

Dalam era revolusi sosial (society 5.0), e-commerce telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk dalam pembelian obat dan makanan. Kemudahan akses ini, meskipun menguntungkan, membawa risiko signifikan berupa kejahatan siber di bidang obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh BPOM. Produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk ke pasar konsumen. Hal ini

b. Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang diikuti kemudahan akses digital dan media sosial, penyebaran informasi terkait keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan memiliki tantangan sangat besar dengan adanya hoaks dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Hoaks dapat melahirkan persepsi yang keliru bahkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks ini semakin berbahaya ketika menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menyebabkan publik lebih dahulu terpapar mempercayai informasi yang salah sebelum sempat mendapat kebenaran yang sesungguhnya. Dengan kompleksitas ancaman ini, penyebaran hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan informasi salah, melainkan tantangan sistemik yang mengancam kepercayaan publik terhadap sains, kebijakan kesehatan, hingga institusi Badan POM.

c. Risiko Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Pada tahun 2025 seiring dengan adanya program pemerintah makan bergizi gratis (MBG), terdapat berbagai tantangan yang dihadapi berupa risiko keracunan pangan. Data Badan Gizi Nasional, tercatat 11.000-12.000 korban keracunan pangan terjadi pada tahun 2025. BPOM selaku institusi yang melakukan pengawasan pangan menjadi penting dalam melakukan upaya koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pembinaan kepada dapur MBG agar proses penyediaan pangan, distribusi hingga diterima pelajar penerima MBG memenuhi aspek keamanan dan terhindar dari kontaminasi yang dapat muncul.

Pada tahun ini, Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan signifikan dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Tercatat dua insiden KLB KP dengan jumlah korban yang cukup besar. Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu, pada sebuah acara pengajian warga, yang menyebabkan lebih dari 50 orang mengalami gejala keracunan pangan. Kejadian kedua terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah korban lebih dari 400 orang

d. Resistensi antimikroba

Resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian

e. Efisiensi Anggaran

Pengurangan anggaran pada tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadikan tantangan besar dalam upaya melindungi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Dampak yang paling terasa adalah dalam pemenuhan cakupan pengawasan pada fasilitas produksi dan peredaran yang kian kompleks, pelaksanaan kegiatan intelijen dan penindakan kejahatan yang ruang geraknya menjadi lebih dibatasi, serta komunikasi, informasi dan edukasi dengan peserta yang lebih terbatas, wilayah yang diperkecil dan memberikan ancaman penurunan kesadaran masyarakat pada keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan

Selama periode tahun 2020-2024, indeks kesadaran masyarakat di provinsi Bengkulu masih memberikan realisasi yang di bawah target. Pada komponen pembentuk tingkat perilaku masyarakat mempunyai nilai yang paling rendah terutama pada tingkat perilaku terhadap pangan olahan. Tingkat perilaku meliputi masyarakat yang membeli produk dengan kemasan rusak, masih kurangnya membaca informasi label, tidak patuhnya terhadap pemakaian produk sesuai petunjuk, penyimpanan yang tidak sesuai label pada kemasan, membeli tanpa ijin edar, dan kurangnya membaca informasi kedaluwarsa.

Berbagai tantangan dalam peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu dapat menjadi permasalahan besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Hak masyarakat tersebut patut dilindungi oleh Negara dalam program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimotori oleh Badan POM. Balai POM di Bengkulu sebagai unit pelaksana teknis BPOM di Propinsi Bengkulu menyusun rencana strategis tahun 2025-2029 yang pelaporannya dituangkan dalam Laporan Kinerja triwulan dan tahunan berupa akuntabilitas kinerja dan anggaran.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM terdiri atas:

1. 23 (dua puluh tiga) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
2. 30 (tiga puluh) Balai Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. 23 (dua puluh tiga) Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Balai POM di Bengkulu termasuk dalam kategori 30 (tiga puluh) Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Balai POM di Bengkulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai ini dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis dibina oleh Deputi terkait dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Provinsi Bengkulu, Balai POM di Bengkulu melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai POM di Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Secara teknis dibina oleh Deputi terkait dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai POM di Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah kerja Balai POM di Bengkulu mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, yaitu:

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Kabupaten Seluma
6. Kabupaten Kaur
7. Kabupaten Mukomuko

Dalam periode perencanaan 2025–2029, Balai POM di Bengkulu berperan sebagai garda terdepan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Bengkulu melalui pendekatan:

- Pengawasan berbasis risiko
- Penguatan laboratorium pengujian
- Digitalisasi layanan publik
- Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- Penguatan penindakan dan sinergi lintas sektor

Dengan luas wilayah pengawasan dan karakteristik geografis Provinsi Bengkulu yang beragam, Balai POM di Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk Obat dan Makanan yang beredar

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



GAMBAR 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI BENGKULU TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Bengkulu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dengan struktur dan fungsi tersebut, Balai POM di Bengkulu menjalankan peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Bengkulu secara komprehensif, mulai dari aspek preventif, pengawasan rutin, hingga penegakan hukum.

1.4 ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JEJARING LABORATORIUM

Penerapan sistem regionalisasi laboratorium oleh BPOM memberikan peluang strategis bagi BPOM di Bengkulu untuk meningkatkan kinerja pengujian secara lebih efektif dan efisien. Melalui sistem ini, Balai POM di Bengkulu dapat mengalokasikan sumber daya pengujian secara lebih optimal, sehingga kinerja pengujian semakin diperkuat dan beban biaya operasional dapat diminimalkan.

1. Peningkatan Kolaborasi Melalui Jejaring Laboratorium Sejalan dengan strategi nasional BPOM, Balai POM di Bengkulu dapat memanfaatkan jejaring laboratorium untuk mengoptimalkan pengawasan. Contohnya, Balai POM dapat berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) terkait metode uji beberapa parameter yang belum dapat diuji di Bengkulu. Selain itu, jejaring laboratorium juga dapat digunakan untuk berbagi sumber daya pengujian dan meningkatkan kompetensi penguji melalui pelatihan Bersama
2. Dampak Terhadap Kinerja dan Efisiensi Dengan adanya jejaring laboratorium, Balai POM di Bengkulu dapat mengatasi kelemahan internalnya, seperti keterbatasan peralatan pengujian modern dan anggaran yang terbatas terutama dalam pembelian reagen . Jejaring ini dapat melakukan sharing reagen antar laboratorium sehingga dapat memaksimalkan reagen yang tidak terpakai dilaboratorium lain . jejaring ini dapat memastikan bahwa semua sampel dapat diuji sesuai standar, meskipun Balai tidak memiliki semua peralatan yang dibutuhkan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan pengujian, tetapi juga mendukung pencapaian target strategis Balai, seperti meningkatkan persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutu.

3. Strategi Adaptasi Terkini Balai POM di Bengkulu saat ini berupaya mengadaptasi dirinya dengan kondisi jejaring laboratorium yang ada. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan membuat pembagian jadwal penggunaan alat antara laboratorium obat tradisional dan kosmetik, serta merencanakan pengadaan reagen yang tepat waktu untuk mengoptimalkan kinerja pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa Balai secara proaktif memanfaatkan peluang kolaborasi untuk mengatasi tantangan internalnya.

2. ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR)

Antimicrobial Resistance (AMR) atau resistensi antimikroba kini dianggap sebagai salah satu ancaman kesehatan global yang paling mendesak. Sering disebut sebagai "Silent Pandemic", AMR terjadi ketika mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit) berevolusi sehingga **obat**-obatan yang ada tidak lagi ampuh melawannya.

Berikut adalah 5 pilar isu strategis yang mendasari kompleksitas AMR:

1. **ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN KESEHATAN (HEALTH SECURITY)**

AMR secara drastis menurunkan efektivitas pengobatan infeksi umum. Jika tidak dikendalikan, prosedur medis modern seperti operasi besar, transplantasi organ, dan kemoterapi akan menjadi terlalu berisiko karena ketiadaan antibiotik profilaksis yang efektif. Kita terancam kembali ke "era pra-antibiotik" di mana infeksi ringan bisa mematikan.

2. **IMPLEMENTASI PENDEKATAN *ONE HEALTH* YANG KOMPLEKS**

Masalah AMR bersifat lintas sektor. Isu strategisnya terletak pada koordinasi antara:

- Sektor Manusia: Penggunaan antibiotik tanpa resep (swamedikasi) yang masih tinggi.
- Sektor Hewan & Pangan: Penggunaan antimikroba pada ternak dan perikanan yang masuk ke rantai pangan manusia.
- Sektor Lingkungan: Pembuangan limbah medis dan industri farmasi ke perairan yang mempercepat mutasi bakteri di alam liar.

3. **KESENJANGAN RANTAI PASOK DAN INOVASI BARU**

Pengembangan antibiotik baru memerlukan biaya riset yang sangat besar namun memiliki nilai ekonomi rendah bagi industri farmasi (karena penggunaan antibiotik baru justru harus dibatasi agar tidak cepat resisten). Akibatnya, kecepatan bakteri bermutasi jauh melampaui kecepatan penemuan obat baru.

4. BEBAN EKONOMI DAN JAMINAN KESEHATAN

AMR memberikan tekanan luar biasa pada anggaran kesehatan (seperti BPJS di Indonesia). Isu strategisnya meliputi:

- Peningkatan biaya pengobatan karena harus menggunakan obat lini kedua atau ketiga yang jauh lebih mahal.
- Perpanjangan waktu rawat inap (*Length of Stay*) yang meningkatkan beban operasional rumah sakit.
- Kehilangan produktivitas nasional akibat durasi sakit yang lebih lama atau kematian dini.

5. LEMAHNYA REGULASI DAN PENGAWASAN

Isu strategis terkait regulasi dan pengawasan adalah lemahnya penegakan hukum terhadap penjualan antibiotik secara bebas di apotek atau toko obat tanpa resep dokter serta keterbatasan cakupan pengawasan sarana pelayanan kesehatan diseluruh wilayah kerja BPOM. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap penjualan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian (Apotek) semester 1 tahun 2025 terdapat 89,19 % dan pada semester 2 sebesar 66,67 % Apotek yang masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Untuk menjawab isu strategis tersebut, maka Badan POM menetapkan Peta Jalan AMR Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 350 Tahun 2025 pada tanggal 16 Juni 2025 Setiap kegiatan rencana aksi ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Unit kerja di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia dan dijalankan melalui upaya yang masif dan berkesinambungan. Peta jalan ini merupakan langkah strategis dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian AMR yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

5 SASARAN STRATEGIS PETA JALAN AMR TAHUN 2025-2029, antara lain :

1. Advokasi dan Kerjasama, Kolaborasi bersama Badan POM dalam pengawasan peredaran antibiotik di daerah, mencegah terjadinya pengalihan stok /penggunaan antibiotik yang beririsan dengan sektor hewan di daerah (pengawasan di peternakan, poultry, budidaya ikan dan lain-lain)
2. Penguatan Kebijakan, BPOM mendorong koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan AMR dalam bentuk penerbitan surat edaran terkait penggunaan antibiotik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. Peningkatan kapasitas, berupa peningkatan SDM, sarana prasarana Laboratorium dan Sistem Informasi
4. Surveilans, Surveilans *antimicrobial use* (data mutu antimikroba beredar)
5. Intervensi, dapat dilakukan berupa pengawasan peredaran penggunaan antimikroba Peningkatan pemahaman penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab

3. PERCEPATAN PENGEMBANGAN UMKM

Percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu isu strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain simplifikasi regulasi serta peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM, sehingga pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global sekaligus mendorong pergerakan roda perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Bengkulu berperan aktif dalam mendukung percepatan pengembangan UMKM, khususnya di sektor pangan olahan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan yang diselenggarakan pada Rabu–Jumat, 23–25 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam penerapan CPPOB, termasuk pemenuhan persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IPCPPOB) sebagai salah satu prasyarat dalam memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) Pangan Olahan.

Pada pelaksanaan Bimtek CPPOB tersebut, Balai POM di Bengkulu juga menghadirkan narasumber eksternal dari Kantor Bea dan Cukai Bengkulu, yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu, Drs. Koen Rachmanto. Kehadiran narasumber ini memberikan wawasan tambahan kepada peserta terkait peluang ekspor produk pangan olahan UMKM, sehingga memperkaya materi bimbingan teknis serta membuka perspektif pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya hingga ke pasar internasional.

Kegiatan Bimtek CPPOB ini merupakan bagian dari rangkaian pendampingan UMKM yang berkelanjutan. Dalam rangkaian tersebut, Agent of Change Balai POM di Bengkulu turut berperan sebagai pendamping dalam kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB bagi pelaku UMKM pangan olahan di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam membantu pelaku usaha memahami proses penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan CPPOB. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 19 dan 20 November 2025.

Selain itu, Balai POM di Bengkulu juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bengkulu Utara yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 18–19 Juni 2025. Pada kegiatan tersebut, Balai POM di Bengkulu menyampaikan materi terkait perizinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Balai POM di Bengkulu juga berkontribusi dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Pelaku UMKM yang dilaksanakan pada 20 November 2025 dengan menyampaikan materi mengenai tata cara registrasi izin edar pangan olahan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Balai POM di Bengkulu secara konsisten mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM pangan olahan agar mampu memenuhi ketentuan regulasi, meningkatkan mutu dan keamanan produk, serta memperluas akses pasar.

4. PEREDARAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN SECARA DARING

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), memperkirakan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia yang terus meningkat. Data terakhir tahun 2023, pengguna e-commerce di Indonesia tercatat 58,63 juta orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 sejumlah 38,72 juta dan diproyeksikan pada tahun 2029 mencapai 99,1 juta orang. Data dan proyeksi ini menunjukkan tingginya pemanfaatan e-commerce/marketplace untuk pembelian produk, termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini menandakan peningkatan adopsi belanja daring dan pergeseran perilaku konsumen dari konvensional menuju pembelian dan transaksi digital seiring dengan disrupsi teknologi yang memberikan peran besar pada e-commerce dan jasa pengiriman.

Platform e-commerce yang menggunakan sistem user-generated content (UGC) mempermudah pengguna untuk menjual produk ilegal dan tanpa izin edar, termasuk produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ancaman ini tidak hanya berupa penipuan daring, tetapi juga penjualan produk yang melanggar hukum. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Balai POM di Bengkulu, yang tidak hanya harus mengawasi produk lokal tetapi juga produk yang masuk melalui e-commerce. Perubahan perilaku konsumen di era digital saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi oleh BPOM di Bengkulu dalam lima tahun ke depan. Masyarakat kini semakin terbiasa melakukan pembelian produk melalui platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan marketplace, di mana pengawasan terhadap legalitas dan keamanan produk relatif lebih sulit dilakukan dibandingkan jalur distribusi konvensional.

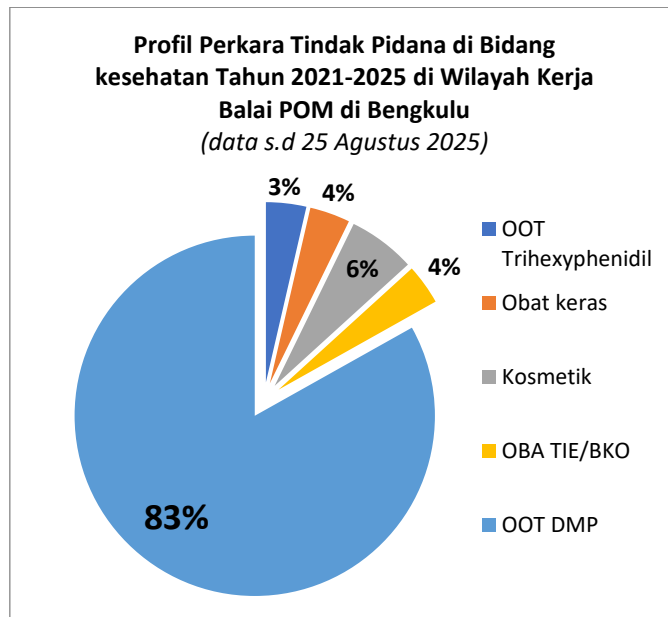
Platform e-commerce yang menggunakan sistem user-generated content (UGC) mempermudah pengguna untuk menjual produk ilegal dan tanpa izin edar, termasuk produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Konsumen juga semakin tertarik pada produk yang menawarkan kepraktisan, hasil instan, dan harga murah, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas atau keamanan produk tersebut. Hal ini turut menyebabkan produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk ke pasar konsumen melalui pembelian daring. Di sisi lain, tren penggunaan produk alami, herbal, suplemen kesehatan yang bersifat suportif kesehatan dan kosmetik sedang naik daun juga menimbulkan tantangan tersendiri, karena banyak dari produk tersebut diproduksi oleh pelaku usaha kecil tanpa melalui proses registrasi di BPOM, produk impor yang masuk tanpa jalur resmi, serta produk palsu.

Perubahan perilaku konsumen ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat terkait cara memverifikasi izin edar suatu produk dan masih minimnya budaya "cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Selain itu, penyebaran informasi yang tidak valid atau hoaks terkait produk kesehatan di media sosial turut membentuk opini publik yang keliru, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk legal yang telah melalui pengawasan BPOM. Jika tidak ditangani secara komprehensif, perubahan perilaku konsumen ini berpotensi meningkatkan risiko konsumsi produk berbahaya, menghambat efektivitas pengawasan, serta melemahkan peran BPOM sebagai lembaga perlindungan konsumen. Oleh karena itu, BPOM di Bengkulu perlu merumuskan strategi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perilaku konsumen, termasuk memperkuat literasi publik, pengawasan digital, serta kolaborasi dengan platform distribusi online.

Permasalahan peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) mengandung Dekstrometorfan yang masuk secara daring

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tahun 2021-2025 pada 7 wilayah kerja Balai POM di Bengkulu, tercatat dari 83 perkara di bidang Kesehatan, 69 diantaranya atau 83% adalah perkara mengedarkan sediaan farmasi OOT Dekstrometorfan. Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi wilayah terbanyak dengan 31 perkara.



Gambar 1.2 Profil perkara tindak pidana di bidang Kesehatan tahun 2021-2025 di wilayah kerja BPOM di Bengkulu

Seluruh perkara yang tercatat melibatkan peredaran obat yang sebenarnya telah memiliki izin edar resmi dengan registrasi obat bebas terbatas. Namun, penyalahgunaan terjadi akibat peredaran tidak rasional, tanpa pembatasan, dan konsumsi berlebihan yang disengaja untuk menimbulkan efek/reaksi obat tidak diinginkan (ROTD) berupa efek mabuk maupun halusinasi. Hal ini menegaskan adanya ancaman serius terhadap aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi.

Tingginya peredaran OOT mengandung Dekstrometorfan tidak terlepas dari dampak globalisasi dimana internet dan perangkat komunikasi, mempercepat interaksi dan integrasi antara individu, perusahaan, dan negara di seluruh dunia. Fenomena ini semakin nyata melalui platform e-commerce/marketplace yang mempermudah pertukaran barang dan jasa, termasuk dalam transaksi OOT Dekstrometorfan yang telah menjangkau konsumen lebih luas dan praktis meningkatkan permintaan layanan jasa pengiriman atau ekspedisi.

Data SIPP menunjukkan bahwa dari 69 perkara mengedarkan sediaan farmasi OOT Dekstrometorfan, sebagian besar sumber perolehan OOT Dekstrometorfan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu diperoleh dari pembelian daring melalui marketplace (61 %) yaitu Shopee (48%) dan Lazada (13%). Selain itu, sumber perorangan mencatatkan 14%, Facebook 1% dan tidak disebutkan dalam SIPP 25%. Adapun jasa pengiriman yang digunakan tercatat pada 31 perkara dengan J&T pada posisi teratas (55%), diikuti SPX (26%), Ninja (7%), JNE dan LEX ID masing-masing 6%. Sebagian besar fakta ini diperkuat dengan temuan Balai POM

di Bengkulu saat pengawasan di jasa pengiriman Januari-Desember 2024 berhasil mengidentifikasi dan mengamankan sedikitnya 398 paket berisi OOT sejumlah 556.593 pcs (tablet/sachet) dengan nilai lebih dari Rp 511.429.500 melalui jasa ekspedisi.

5. PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis nasional dalam peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu melaksanakan rangkaian kegiatan koordinasi, advokasi, pendampingan teknis, serta pengawasan keamanan pangan secara berkelanjutan. Beberapa tahapan pengawasan MBG adalah :

A. KOORDINASI AWAL DAN ADVOKASI PROGRAM

Koordinasi awal dimulai pada Desember 2024 melalui pertemuan antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu, Gloria Erysa Meilinda Situmorang, S.Tr.AP., M.A., bersama Wakil Kepala SPPG, Tsaniyah Wulandari, S.Si., M.Han., dengan Kepala BPOM di Bengkulu, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. Pertemuan tersebut membahas persiapan awal pelaksanaan Program MBG di Kota Bengkulu, termasuk mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan siap saji serta prosedur pengambilan dan pengujian sampel makanan sesuai ketentuan.

Pada tahap awal, Program MBG direncanakan menjangkau enam sekolah dengan jumlah penerima manfaat sekitar 3.000 siswa, yaitu TK Kartika II-16, SD Negeri 73 Kota Bengkulu, SD Negeri 61 Kota Bengkulu, SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, SMP Negeri 14 Kota Bengkulu, dan SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. BPOM di Bengkulu menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program melalui pengawasan keamanan pangan.

B. PENDALAMAN KOORDINASI DAN PERSIAPAN TEKNIS

Sebagai tindak lanjut koordinasi awal, pada 10 Januari 2025 dilaksanakan pertemuan lanjutan antara SPPG Kota Bengkulu dan BPOM di Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Kepala SPPG menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Program MBG serta meminta dukungan BPOM untuk memastikan kelancaran program. Disampaikan bahwa penyiapan makanan bergizi akan dilakukan di tiga lokasi dapur, yaitu Kodim, Tebeng, dan Singaran Pati. BPOM di Bengkulu menyatakan kesiapan memberikan dukungan melalui pengujian cepat

terhadap potensi cemaran bahan berbahaya serta pengujian parameter mikrobiologi guna memastikan kebersihan dan keamanan pangan.

C. PENDAMPINGAN TEKNIS SARANA PENYIAPAN PANGAN

Sebagai bentuk pendampingan teknis di lapangan, pada 14 Januari 2025 Kepala Balai POM di Bengkulu bersama tim melakukan peninjauan salah satu lokasi pengelola MBG di Jalan Garuda 2, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, BPOM melakukan penilaian terhadap kondisi sarana penyiapan makanan serta memberikan rekomendasi perbaikan agar sarana memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim SPPG dari lokasi pengelola lainnya, yaitu Tebeng, Sukaraja, dan Argamakmur, sehingga seluruh pengelola dapur memperoleh masukan secara langsung sebagai bagian dari persiapan sarana masing-masing.

D. PELUNCURAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM

Program Makan Bergizi Gratis secara resmi diluncurkan pada 17 Februari 2025 bertempat di SLB Negeri 1 Kota Bengkulu dan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu. Kepala Balai POM di Bengkulu turut hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memantau langsung pelaksanaan distribusi makanan bergizi kepada siswa.

Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 13 sekolah di Kota Bengkulu dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/ sederajat menerima manfaat Program MBG. Dalam rangka memastikan keamanan pangan, tim Balai POM di Bengkulu melakukan pengujian cepat menggunakan *rapid test kit* terhadap makanan yang disediakan di lokasi. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel makanan untuk pengujian mikrobiologi di laboratorium, termasuk pengujian lanjutan di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Hasil uji cepat menunjukkan tidak ditemukannya bahan berbahaya seperti boraks, formalin, methanil yellow, rhodamin B, maupun arsen, sementara hasil pengujian mikrobiologi masih dalam proses.

E. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PROGRAM

Dalam rangka penguatan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan Program MBG, pada 7 Oktober 2025 Balai POM di Bengkulu mengikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Program MBG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu bersama Tim Pemantauan dan Peninjauan Lapangan Sekretariat Dukungan Kabinet (Setneg) RI. Dalam forum tersebut, BPOM menyoroti pentingnya pemenuhan aspek mutu dan keamanan pangan di tengah keterbatasan jumlah dapur MBG.

Selanjutnya, pada 9 Oktober 2025 Balai POM di Bengkulu melaksanakan audiensi bersama Anggota Komisi III DPD RI, Apt. Destita Khairilisani, serta Satgas MBG Provinsi Bengkulu. Dalam audiensi tersebut ditegaskan bahwa pengawasan mutu dan keamanan pangan merupakan aspek krusial dalam menjamin keberhasilan Program MBG, mengingat sasaran program adalah kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Pada 24 Oktober 2025, Kepala Balai POM di Bengkulu hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Program MBG yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional. BPOM menyampaikan materi terkait pengendalian potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik pada seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan.

F. PENGAWASAN SARANA DAN PENGUATAN SINERGI DAERAH

Sebagai tindak lanjut konkret, pada periode Agustus–September 2025 Balai POM di Bengkulu melaksanakan pengawasan langsung terhadap delapan sarana SPPG, yang terdiri atas lima sarana di Kota Bengkulu serta masing-masing satu sarana di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik (CPPSB).

Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui penerimaan kunjungan Ketua SPPG Regional Provinsi Bengkulu beserta tim pada 4 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pengawasan dapur mitra SPPG berbasis risiko serta kebutuhan dukungan BPOM dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada mitra dan tim pelaksana.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Balai POM di Bengkulu juga memperkuat sinergi lintas sektor melalui partisipasi Kepala Balai POM di Bengkulu sebagai narasumber dalam Dialog Interaktif LPP RRI “*Bengkulu Pagi Ini*” pada 5 Desember 2025 dengan tema “*Gotong Royong Membangun Generasi Emas*”. Dalam kegiatan tersebut, BPOM bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam menjamin keamanan pangan bagi kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BPOM menekankan peran pengawasan keamanan pangan melalui pendampingan teknis kepada dapur SPPG, penerapan standar higiene sanitasi, serta dukungan pengujian laboratorium sebagai upaya pencegahan risiko kejadian keracunan pangan.

6. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender, juga dikenal sebagai integrasi gender, merujuk pada usaha untuk memasukkan perspektif dan kebutuhan gender dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, program, atau proyek. Tujuan utama dari pengarusutamaan gender adalah mencapai kesetaraan gender dan mengurangi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, hal tersebut sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Dalam rangka penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan dari Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan serta sejalan dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2025-2029, Balai POM di Bengkulu telah menerima Sertifikat penghargaan atas komitmen nyata untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.

7. REFORMASI BIROKRASI (WBK/WBBM)

Reformasi birokrasi adalah upaya terstruktur dan komprehensif untuk melakukan pembaharuan mendasar pada sistem pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan tujuan mewujudkan aparatur negara yang profesional, berintegritas, efisien, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Lingkup reformasi birokrasi mencakup perubahan pada kelembagaan, SDM, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, dan pola pikir birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Balai POM di Bengkulu senantiasa menerapkan dan melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai strategi inti dan komitmen menjalankan Reformasi Birokrasi (RB), yang bertujuan menciptakan unit kerja bersih dari KKN, melayani dengan prima, dan berkinerja tinggi menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Wujud implementasi zona integritas berfokus pada perbaikan sistem, proses, dan SDM untuk dampak

langsung ke masyarakat, serta menegaskan integritas sebagai fondasi utama RB yang efektif.

8. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi

Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi sebagaimana SK Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 merupakan penerapan system mutu terintegrasi yang mengacu dari berbagai persyaratan standar nasional dan internasional, termasuk yang telah diadopsi oleh SNI yaitu :

- a. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu;
- b. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- c. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. SNI ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- e. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi;
- f. SNI ISO 17034:2016 Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan; dan
- g. SNI ISO/IEC 17043:2023 Persyaratan Umum Uji Profisiensi Laboratorium

Penerapan sistem ini juga tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sistem Manajemen POM Terintegrasi terus dibangun menuju penerapan sistem manajemen yang terintegrasi (*Integrated Management System*) yang meliputi integrasi proses (*Integrated Process*), integrasi risiko (*Integrated Risk*), dan integrasi audit (*Integrated Audits*).

Penerapan Sistem Manajemen POM terintegrasi bagi Balai POM di Bengkulu bersifat mutlak dan sudah menjadi bentuk komitmen penerapan standar mutu nasional dan internasional. Implikasinya, sertifikasi atas penerapan sistem manajemen berstandar internasional ISO dapat dilaksanakan secara selektif sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja dan bersifat sukarela/voluntary. Adapun penerapan dan akreditasi sistem manajemen laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian bersifat mutlak (*mandatory*) bagi laboratorium pengujian sebagai upaya penjaminan kualitas hasil pengujian Obat dan Makanan.

9. STUNTING DI PROVINSI BENGKULU

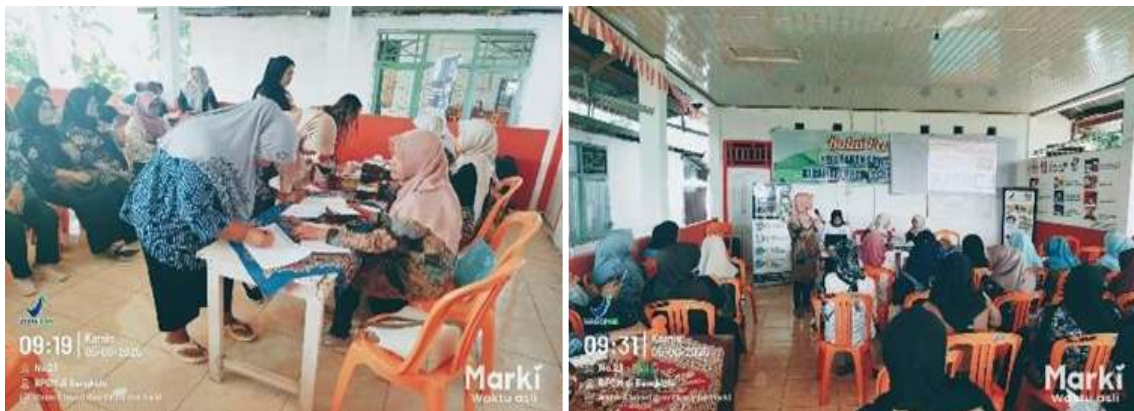
Target Secara Nasional prevalensi stunting pada tahun 2025 adalah 18,8%. Pencapaian target ini membutuhkan upaya keras dan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk dapat

menurunkan kasus stunting di Bengkulu. Stunting menjadi sangat penting untuk ditanggulangi disebabkan dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang serta berdampak buruk untuk anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam menghadapi isu ini, peran Balai POM di Bengkulu adalah dengan melakukan pengawasan pangan fortifikasi, intervensi keamanan pangan desa dengan program “Desa Pangan Aman”, Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah/PJAS.

Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan KIE Tematik dalam Upaya Konvergensi Penanganan Stunting, tahun 2025 telah dilaksanakan di 7 (tujuh) Desa dan Kelurahan tersebar di 5 (lima) lokasi yaitu di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu.

Di Kab Kaur dilaksanakan di Desa Benteng Harapan dan Desa Kepahiang, di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan di Desa Taba Lagan, di Kab Seluma dilaksanakan di Desa Sari Mulya dan Desa Talang Tinggi, di Bengkulu Utara dilaksanakan di Desa Pasar Kerkap dan di Kota Bengkulu dilaksanakan di Kelurahan Sawah Lebar Baru, dengan total jumlah peserta sebanyak 269 orang.

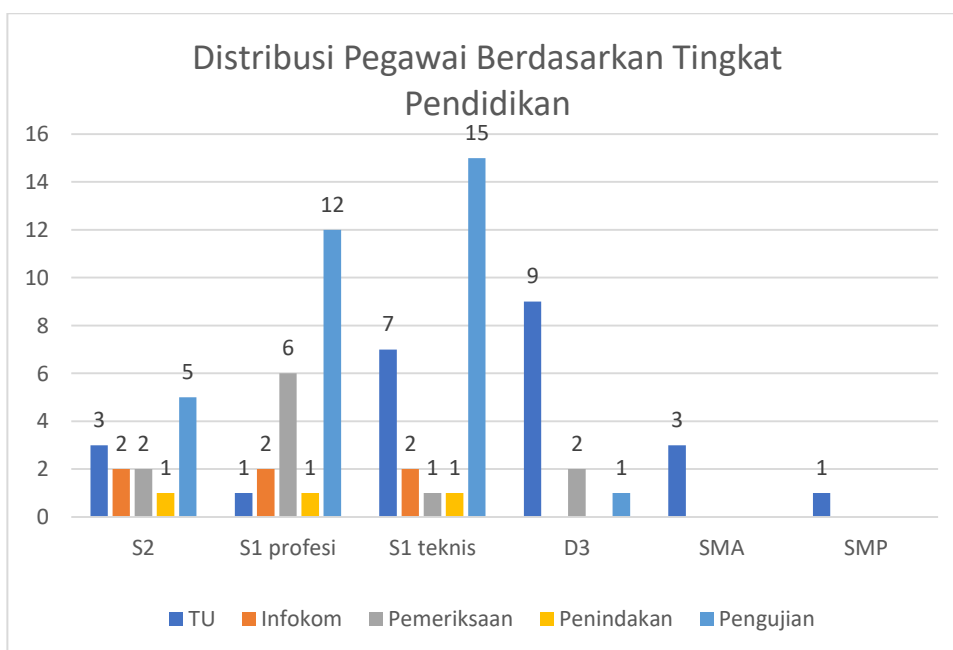




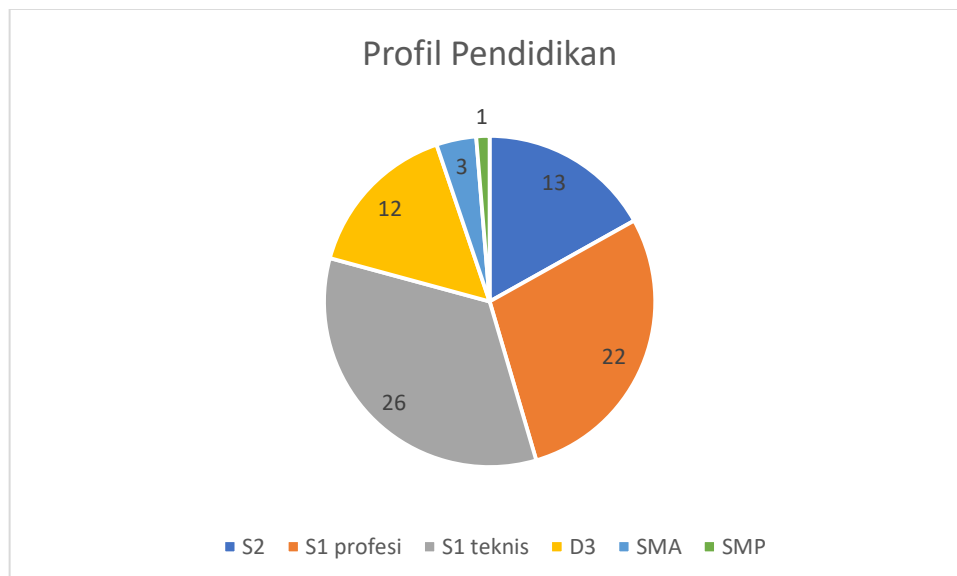
1.5 SUMBER DAYA

1.5.1 INTERNAL SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Balai POM di Bengkulu per 31 Desember tahun 2025 sebanyak 77 dengan persentase laki - laki sebesar 32,47% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 67,53%. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan jumlah terbesar pada Pendidikan strata-1 atau setingkat dengan jumlah 42 orang (54,55%) dan pegawai dengan Pendidikan S1 Profesi dan S2 sebanyak 35 orang (45,45%). Proporsi penempatan pegawai tersebut menyebar di 5 substansi dan satu orang Kepala Balai. Dilihat dari tingkat Pendidikan dan distribusi pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



GAMBAR 1. 3 DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PER DESEMBER 2025



GAMBAR 1. 4 PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sepanjang tahun 2025 terdapat 5 orang pegawai yang menjalani masa purnabakti, terdiri atas 1 orang dari substansi Infokom (Februari 2025), 1 orang dari substansi Pengujian (April 2025), 1 orang dari substansi Penindakan (April 2025), 1 orang dari substansi Pemeriksaan (Juni 2025) dan 1 orang dari substansi Tata Usaha (Desember 2025).

1.5.2. SUMBER DAYA LAINNYA

Balai POM di Bengkulu mempunyai dua gedung kantor dan bangunan serta satu rumah dinas dengan rincian:

1. Kantor Balai POM di Bengkulu di Jalan Depati Payung Negara KM 13 No. 29 Kel. Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas 12.480 m² dengan luas bangunan laboratorium 1.500 m² dan luas bangunan kantor 1.200 m²
2. Kantor Balai POM di Bengkulu di Jalan Batang Hari no. 1 Padang Harapan seluas 3.045 m² dengan luas bangunan 1.227 m²
3. Rumah dinas Kepala Balai POM di Bengkulu dengan luas tanah 600 m² dan luas bangunan 134.5 m² yang beralamat di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu.

Status Kepemilikan tanah kantor Balai POM di Bengkulu dan Rumah Dinas sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Balai POM di Bengkulu memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang sudah terakreditasi ISO/IEC 17025:2015. Selain itu Balai POM di Bengkulu dalam mewujudkan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan telah mempunyai system manajemen mutu berstandar ISO 9001:2015 yang telah tersertifikasi.

Keunggulan Balai POM di Bengkulu:

1. Ikut berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik Satu Pintu di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.
2. Laboratorium Spesifik Rujukan Pengujian Dioksan secara GC MS dilingkungan laboratorium regional Padang (sebelum menjadi regional Medan).
3. Laboratorium Spesifik Rujukan Pengujian Bahan Tambahan Pangan dilingkungan laboratorium regional Medan.
4. Laboratorium Spesifik Rujukan Pengujian Asetaldehid secara GC MS dilingkungan laboratorium regional Medan.
5. Sebagai Laboratorium rujukan spesifik yang dapat melakukan pengujian DNA Porcine di Provinsi Bengkulu.
6. Sebagai Laboratorium rujukan spesifik yang dapat menguji Tembakau Gorilla dalam upaya mengurangi penyalahgunaan obat dan narkoba psikotropika dan zat adiktif di Provinsi Bengkulu.
7. Pendampingan Sertifikasi produk unggulan SMK di Kota Bengkulu dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan muda dan mandiri yang membangun struktur ekonomi produktif melalui inovasi "Percaya Juara" Balai POM di Bengkulu.
8. Pelaksanaan Pelatihan *In House Training* Terkait Pengujian Pangan, Mikrobiologi dan Obat Tradisional bersama dengan Civitas Akademik Universitas Bengkulu.
9. Pengembangan kemitraan bersama civitas akademika sebagai peningkatan kompetensi sumber daya manusia unggul dengan menjadi tempat untuk melaksanakan PKL mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta serta Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Bengkulu.
10. Aktif dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat bersinergi dengan lintas sektor terkait yang ditandai dengan realisasi perkara sebesar 120 % dibandingkan dengan target yang telah ditentukan untuk perkara golongan obat-obat tertentu (OOT).
11. Aktif melakukan komunikasi informasi dan edukasi terkait dengan keamanan dan mutu obat dan makanan kepada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi negeri melalui inovasi "Poli Pintar" dan "Joko Paman"
12. Aktif berkontribusi dalam kegiatan kepramukaan dengan turut serta memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

1.6. ANGGARAN

Balai POM di Bengkulu memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp26.079.443.000,00. Selama periode berjalan, telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 10 (Sepuluh) kali yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Revisi Pertama dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp.15.683.967.000,00;
2. Revisi Kedua dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan I dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Februari 2025;
3. Revisi Ketiga dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.174 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran Badan POM dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp2.735.382.000,00;
4. Revisi Keempat dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan II dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 April 2025.
5. Revisi Kelima dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai *Existing* dan Anggaran CASN TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp543.376.000,00 dan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang keperluan perkantoran CASN sebesar Rp.4.782.000,00.
6. Revisi Keenam dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan III dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Juli 2025.
7. Revisi Ketujuh dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan IV dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Oktober 2025.
8. Revisi Kedelapan dilaksanakan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No KU.02.03.21.10.25.340 tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Tindak Lanjut Hasil Monev Belanja Pegawai Satker Pagu Minus TW III TA 2025 tanggal 15 Oktober 2025 dimana Balai POM di Bengkulu mendapat penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.57.968.000,00.
9. Revisi Kesembilan dilaksanakan sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 03 November 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp24.928.000,00.
10. Revisi Kesepuluh dilaksanakan sesuai Surat Kuasa Pengguna Anggaran Balai BPOM Bengkulu No T-KU.02.01.2B.12.25.1242 tanggal 12 Desember 2025 tentang Pemutakhiran data berkaitan dengan Revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.

Secara rinci perubahan anggaran pada DIPA Balai POM di Bengkulu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025		Perubahan
	Anggaran Awal	Pagu anggaran	

		efektif	
Belanja pegawai	5.974.051.000	5.483.861.000	490.190.000
Belanja barang	13.745.567.000	7.961.832.000	5.783.735.000
Belanja Modal	6.359.825.000	2.363.698.000	3.996.127.000
Jumlah Belanja	26.079.443.000	15.809.391.000	10.270.052.000

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.490.190.000 karena dilakukan revisi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN Badan POM TA 2025. Realisasi Belanja Modal Lainnya Balai POM di Bengkulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp458.640,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode
2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.4.782.000 karena dilakukan revisi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belanja barang keperluan perkantoran untuk PPPK di Balai POM di Bengkulu TA 2025.

Dukungan terhadap visi misi Presiden dan tujuan organisasi.

Balai POM di Bengkulu berperan dalam mendukung misi Presiden yang tertuang dalam "Asta Cita" terutama pada Asta Cita ke-4 dalam diantaranya adalah :

1. Memperkuat pembangunan melalui kesetaraan gender dan penyandang disabilitas, yang mana telah dibuatkan secara khusus pelayanan publik ramah kelompok rentan dan penyandang disabilitas, diantaranya meliputi loket pelayanan publik dan Loker Prioritas, area tunggu prioritas yang dilengkapi dengan kursi dorong, kruk dan walker. Selain itu ruang layanan juga sudah dilengkapi dengan jalur disabilitas, tempat parkir khusus disabilitas, toilet khusus disabilitas.





2. Memperkuat pembangunan di bidang kesehatan, hal ini telah tertuang juga dalam visi misi BPOM dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Dimana dari visi tersebut Balai POM di Bengkulu telah berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap sampel Sediaan Farmasi berisiko dimana dari target 86.50 dapat terealisasi sebesar 94.67. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengawasan, pengendalian risiko, serta upaya pencegahan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berdampak pada meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko sediaan farmasi yang tidak aman atau tidak bermutu.

Dalam mewujudkan pangan olahan yang bermutu guna memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat melalui pengawasan terhadap Pangan Olahan berisiko, dari target yang ditetapkan telah terlampaui pada tahun 2025. Hal ini merupakan wujud komitmen dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas di wilayah kerja BPOM di Bengkulu.

3. Berperan dalam Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing, hal ini telah dibuktikan dengan jumlah UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, dimana kinerja BPOM di Bengkulu sudah melampaui target pada tahun 2025. UMKM yang didampingi terdiri dari UMKM Pangan Olahan, UMKM OBA dan UMKM Kosmetika.

4. Meningkatkan pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang dilakukan dengan pencapaian indeks pelayanan publik dengan kriteria "prima", pembangunan zona integritas, implementasi SAKIP dan kinerja anggaran yang sudah dilakukan dengan baik dan implementasi manajemen risiko di BPOM Bengkulu dengan kriteria "sangat baik".

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Fondasi pembangunan tahun **2025–2029** merupakan landasan awal dari upaya transformasi pembangunan nasional. Periode ini memiliki 8 prioritas nasional dan dirancang untuk menguatkan transformasi pembangunan, dengan sasaran utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Hal ini akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk mencapai target sebagai negara maju dan mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045**. Adapun secara hirarki pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Adapun penjelasan dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Balai POM di Bengkulu. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Balai POM di Bengkulu berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan

olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Balai POM di Bengkulu mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Balai POM di Bengkulu adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi).



Tujuan BPOM 2025-2029

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Tujuan yang telah ditetapkan Balai POM di Bengkulu tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2025-2029 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Kinerja dan 28 (duapuluh delapan) indikator kinerja yang telah dilengkapi dengan target kinerja, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM Di Bengkulu 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01. Persentase sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.50	88.00	89.25	90.50	91.75
		02. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00
		03. Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00
		04. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		05. Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
		06. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
		07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	87,5	88.50	90.00	91.50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
		08. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
		09. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75	96.75	97.75	98.50	99.25
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.00	92.20	93.20	94.20	95.20
		12 .Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	28.57	42.86	57.14	71.43
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	2.1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	67.00	67.00	83.00	83.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31	88.18	89.06	89.93	90.8
		3.2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	12	13	14	15
		3.3 Jumlah desa pangan aman	3	6	6	7	7
		3.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.12	29.41	48.24	69.41	92.94
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	6.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	efektif di wilayah kerja UPT						
7	Layanan Publik UPT yang prima	7.1 Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.1 Nilai Pembangunan ZI	90.72	90.97	91.22	91.47	91.72
		8.2 Nilai AKIP UPT	80.59	81.30	81.50	81.70	82.00
		8.3 Nilai Kinerja Anggaran UPT	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		8.4 Indeks Manajemen Risiko UPT	2.88	3.30	3.40	3.60	3.80

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan periode Renstra 2025-2029 sehingga menjadikan baseline untuk capaian kinerja selanjutnya.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Sebagai komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, **Balai POM di Bengkulu** telah menetapkan landasan operasional melalui **Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025**. Dokumen ini secara resmi disahkan dengan **Nomor PR.02.02.2B.09.24.1200 pada tanggal 20 September 2024**.

Dokumen RKT tersebut merupakan dokumen strategis yang mengintegrasikan seluruh elemen perencanaan dalam satu kesatuan yang terukur. Di dalamnya, tertuang rumusan **Sasaran kegiatan** yang ingin dicapai, yang kemudian diturunkan ke dalam **Indikator Kinerja** serta **Target** sebagai tolok ukur keberhasilan Balai POM di Bengkulu pada tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 1.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	di wilayah kerja UPT	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	kerja UPT	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	11
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.50
		Nilai AKIP UPT BPOM	80.15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2

Terdapat perbedaan antara RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disebabkan fungsi dan waktu penetapan yang berbeda dalam siklus SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). RKT Balai POM di Bengkulu yang telah ditetapkan tanggal 20 September 2024 sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran. **Perjanjian Kinerja (PK)** merupakan wujud komitmen atau "janji" antara pimpinan unit kerja (Kepala Balai) dengan atasan langsungnya (Kepala Badan POM) untuk mewujudkan target tertentu dalam tahun berjalan. PK disusun setelah dokumen anggaran (DIPA) tersedia menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah :

Tabel 1.3 .Matriks Perubahan RKT dan PK tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (PK Revisi)	Target RKT	Target PK Revisi	Justifikasi
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	86.5	Terdapat perbedaan nomenklatur dan target , pada RKT Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26	Terdapat perubahan nomenklatur, pada RKT sarana pelayanan pada PK menjadi Fasilitas pelayanan
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	80	Terdapat perubahan target dan nomenklatur, pada RKT Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100	tetap
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	85	Terdapat perbedaan target dan perubahan nomenklatur, pada RKT Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100.00	91	Terdapat perubahan target dan nomenklatur, pada RKT Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu
	07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	87	Terdapat perbedaan target dan Sasaran Kinerja, pada RKT masuk sasaran kinerja Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (pada PK sasaran tersebut dihilangkan)
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	85	Terdapat perbedaan target dan Sasaran Kinerja , pada RKT masuk sasaran kinerja Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (pada PK sasaran tersebut dihilangkan)
	09 - Persentase fasilitas distribusi	100.00	95.75	Terdapat perbedaan target dan nomenklatur, pada RKT Persentase

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (PK Revisi)	Target RKT	Target PK Revisi	Justifikasi
	Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	90	Terdapat perbedaan target dan Sasaran Kegiatan (pada RKT masuk Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan) yang mana sasaran ini dihilangkan.
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00	91	Terdapat perbedaan target dan Sasaran Kegiatan (pada RKT masuk Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan) yang mana sasaran ini dihilangkan.
	12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan		90	Indikator baru,yang sudah disesuaikan dengan kebijakan terbaru pemerintah
	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT	-	100	Indikator baru,yang sudah disesuaikan dengan kebijakan terbaru pemerintah
	14- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.10	75	Terdapat perbedaan target dan Sasaran Kegiatan (pada RKT masuk Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT) yang mana sasaran ini dihilangkan.
	15-Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kab/kota pangan aman		14.29	Indikator baru,yang sudah disesuaikan dengan kebijakan terbaru pemerintah
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	50.00	Terdapat perbedaan target dan nomenklatur indikator kinerja, pada RKT Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	96.85	87.31	Perbedaan pada target

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (PK Revisi)	Target RKT	Target PK Revisi	Justifikasi
masing wilayah kerja UPT	wilayah kerja UPT			
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11.00	11	tetap
	03 - Jumlah desa pangan aman	3.00	3	tetap
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1	tetap
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00	14.12	Perbedaan pada target dan definisi operasional
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100.00	95	Berbeda target
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	14.00	90	Berbeda target
Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.7	tetap
Terwujudnya tata kelola	01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.50	90.72	Berbeda target

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (PK Revisi)	Target RKT	Target PK Revisi	Justifikasi
pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.15	80.59	Berbeda target
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91.00	5	Berbeda target dan Definisi operasional
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.20	2.88	Berbeda target

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, setiap entitas akuntabilitas wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk komitmen nyata dalam mencapai target organisasi. Teknis penyusunan, pelaporan, hingga tata cara reviu nya dilaksanakan merujuk pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, guna memastikan bahwa setiap indikator dan target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Balai bersifat terukur, akuntabel, dan selaras dengan tujuan instansi pemerintah.

Penetapan dokumen Perjanjian Kinerja dibuat melalui aplikasi simetris yang dapat diakses pada https://simetris.pom.go.id/e_planning/ pada menu *E-Planning*. Anggaran yang dikelola pada tahun 2025 sebesar **Rp 26.079.443.000**, dimana anggaran tersebut beberapa kali mengalami perubahan/ revisi. PK pada awal tahun dapat di sajikan sebagai berikut :

Tabel 1.4 .Matriks Perjanjian PK tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91
		07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.80
		12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	
		13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT	-
		14- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.1
		15-Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kab/kota pangan aman	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
6	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.72
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.59
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.88

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, maka Balai POM di Bengkulu telah melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang meliputi :

1. Perubahan jumlah sasaran kegiatan semula 9 menjadi 8 , terdapat pengurangan pada sasaran kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dimana indikatornya di gabung pada sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”.
2. Penambahan 3 indikator baru, sehingga menambah jumlah indikator, semula 25 indikator menjadi 28 indikator. Penambahan 3 indikator tersebut adalah :
 - a) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
 - b) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
 - c) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Selain revisi pada point diatas, PK juga mengalami revisi atas penyesuaian target dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada triwulan sebelumnya, dimana berdasarkan hasil monev sampai dengan bulan Juli 2025 terdapat 5 indikator yang mengalami perubahan target, disebabkan realisasi pada bulan B01 sd B07 sudah

tercapai melebihi target atau di prediksi pada akhir tahun tidak akan tercapai, indikator tersebut adalah :

Tabel 1.5 Matriks perubahan PK tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)	Target PK Revisi	Justifikasi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.75	86.5	Target Tahun 2025 sebesar 85.75% sudah tercapai pada triwulan I, dan trend yang telah melampaui target akhir tahun, yang memungkinkan capaian kinerja terlalu tinggi sehingga hasilnya tidak dapat disimpulkan . Target sudah disetujui oleh pengampu berdasarkan hasil Rapat kesepakatan target dengan pengampu tanggal 24-26 Juni 2025
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26	tetap
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	tetap
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	tetap

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)	Target PK Revisi	Justifikasi
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	tetap
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	91	tetap
		07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	tetap
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	tetap
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88	95.75	target diturunkan disebabkan Cakupan wilayah Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tidak dapat dipenuhi untuk target sarana di kabupaten sesuai dengan target kajian risiko sarana yang ditetapkan dan sebagian kecil sarana akan dilakukan pemeriksaan secara daring.
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	90	Jika dilihat dari capaian indikator sudah diatas target RAPK atau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)	Target PK Revisi	Justifikasi
					target tahunan. Sehingga dikhawatirkan realisasi kriteria " tidak dapat disimpulkan" atau anomali.
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.80	91	Jika dilihat dari capaian indikator sudah diatas target RAPK atau target tahunan. Sehingga dikhawatirkan realisasi kriteria " tidak dapat disimpulkan" atau anomali.
		12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan		90	Penambahan indikator
		13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT	-	100	Penambahan indikator
		14- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.1	75	Jika dilihat dari capaian indikator sudah diatas target RAPK atau target tahunan. Sehingga dikhawatirkan realisasi kriteria " tidak dapat disimpulkan" atau anomali.
		15-Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kab/kota pangan aman		14.29	Penambahan indikator

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)	Target PK Revisi	Justifikasi
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	50.00	tetap
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31	87.31	tetap
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	11	tetap
		03 - Jumlah desa pangan aman	3	3	tetap
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	tetap
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	14.12	Terdapat perubahan definisi operasional
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	95	tetap
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	90	tetap
6	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.7	tetap
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.72	90.72	tetap
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.59	80.59	tetap
		03 - Nilai Kinerja	5	5	tetap

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK (Awal)	Target PK Revisi	Justifikasi
		Anggaran UPT BPOM			
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.88	2.88	tetap

Dari ke 6 indikator yang mengalami perubahan target dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, target semula sebesar 85.75% dinaikkan menjadi 86.50%. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Indikator ini sudah tercapai pada triwulan I tahun 2025 sebesar 90.47% sehingga capaian sebesar 105.50%. Terdapat trend kenaikan sehingga pada bulan Juni realisasi sebesar 96.63 dengan capaian 112.69%. Frekuensi Penetapan target indikator ini flat setiap bulan sehingga akan berpengaruh terhadap capaian sampai pada akhir tahun, sehingga berdasarkan dari hasil monev setiap bulan oleh Balai POM di Bengkulu target harus dinaikkan.
 - a. Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.01.01.21.06.25.237 tanggal 23 Juni 2025 tentang Berkenaan dengan adanya penyusunan target pada renstra periode 2025-2029 maka kenaikan target melalui mekanisme “ Desk Pembahasan Kesepakatan Target IKU UPT tahun 2025-2029” yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2025 sehingga target disepakati menjadi 86.5%.
2. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, indikator ini jika dibandingkan dengan target awal mengalami penurunan target sebesar 1.13 % dimana target semula sebesar 96.88 % menjadi 95.75 %. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian, Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang

terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer, Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

- a. Berdasarkan hasil monev sampai triwulan I realisasi masih dibawah target yaitu 87.85% dengan capaian 90.68%. Hal ini dikhawatirkan tidak tercapai pada akhir tahun, disebabkan adanya efisiensi anggaran serta cakupan wilayah pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tidak dapat dipenuhi untuk target sarana di kabupaten sesuai dengan target kajian risiko sarana yang ditetapkan dan sebagian kecil sarana akan dilakukan pemeriksaan secara daring.
 - b. Mekanisme perubahan target melalui mekanisme “ Desk Pembahasan Kesepakatan Target IKU UPT tahun 2025-2029” yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2025 sehingga di sepakati target menjadi 95.75%.
3. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, indikator ini jika dibandingkan dengan target awal mengalami kenaikan target sebesar 15 % dimana target semula sebesar 75 % menjadi 90 %. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan angkutan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - a. Realisasi indikator ini pada bulan Maret sebesar 100 % atau capaian sebesar 133.33% (dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”), hal ini disebabkan rendahnya target yang ditetapkan pada awal tahun sehingga harus dinaikkan targetnya. Mekanisme perubahan target melalui mekanisme “ Desk Pembahasan Kesepakatan Target IKU UPT tahun 2025-2029” yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2025 sehingga di sepakati target menjadi 90%.
4. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, indikator ini jika dibandingkan dengan target awal mengalami kenaikan target sebesar 3.2 % dimana target semula sebesar 87.80 % menjadi 91 %. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan

obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi indikator ini pada bulan Maret sebesar 105 % atau capaian sebesar 119.59% (dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”), hal ini disebabkan rendahnya target yang ditetapkan pada awal tahun sehingga harus dinaikkan targetnya. Mekanisme perubahan target melalui mekanisme “ Desk Pembahasan Kesepakatan Target IKU UPT tahun 2025-2029” yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2025 sehingga di sepakati target menjadi 91%.

5. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, indikator ini jika dibandingkan dengan target awal mengalami kenaikan target sebesar 3.90 % dimana target semula sebesar 71.1 % menjadi 75 %. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Balai POM di Bengkulu berada level tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi, dimana SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

- 1) Standar Ruang Lingkup;
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
- 4) Standar Metode yang terverifikasi.

Hasil Asessment dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional nilai Pemenuhan Laboratorium untuk Balai POM di Bengkulu pada triwulan I sebesar 73.9% dengan capaian sebesar 123.17% (dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”), hal ini disebabkan rendahnya target yang ditetapkan pada awal tahun sehingga harus dinaikkan targetnya. Mekanisme perubahan target melalui mekanisme “ Desk Pembahasan

Kesepakatan Target IKU UPT tahun 2025-2029” yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2025 sehingga di sepakati target menjadi 75%

Atas beberapa revisi terhadap indikator diatas, Perjanjian Kinerja Balai POM di Bengkulu setelah di revisi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Perjanjian Kinerja BPOM di Bengkulu setelah revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK Revisi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91
		07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK Revisi
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91
		12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90
		13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75
		15-Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kab/kota pangan aman	14.29
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.12
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target PK Revisi
	UPT		
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.72
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.59
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.88

Alokasi Anggaran BPOM Per Program sebagai berikut :

Tabel 1.7 Anggaran Per Program Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Anggaran awal (Rp)	Pagu anggaran efektif (Rp)
1	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 14,905,392,000	6.897.961.000
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 11,174,051,000	8.911.430.000
	Total	Rp 26,079,443,000	15.809.391.000

Anggaran awal Balai POM di Bengkulu tahun 2025 sebesar Rp.26.079.443.000,00 sesuai DIPA awal nomor **SP DIPA- 063.01.2.432991/2025 tanggal** 02 Desember 2024. Selama periode berjalan, telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 10 (Sepuluh) kali yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Revisi Pertama dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp.15.683.967.000,00;

2. Revisi Kedua dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan I dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Februari 2025;
3. Revisi Ketiga dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.174 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran Badan POM dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp2.735.382.000,00;
4. Revisi Keempat dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan II dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 April 2025.
5. Revisi Kelima dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp543.376.000,00 dan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang keperluan perkantoran CASN sebesar Rp.4.782.000,00.
6. Revisi Keenam dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan III dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Juli 2025.
7. Revisi Ketujuh dilakukan dalam rangka Revisi Rencana Penarikan Dana Triwulan IV dari POA Awal ke Kanwil DJPB Bengkulu pada Tanggal 14 Oktober 2025.
8. Revisi Kedelapan dilaksanakan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No KU.02.03.21.10.25.340 tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Tindak Lanjut Hasil Monev Belanja Pegawai Satker Pagu Minus TW III TA 2025 tanggal 15 Oktober 2025 dimana Balai POM di Bengkulu mendapat penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.57.968.000,00.
9. Revisi Kesembilan dilaksanakan sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 03 November 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp24.928.000,00.
10. Revisi Kesepuluh dilaksanakan sesuai Surat Kuasa Pengguna Anggaran Balai BPOM Bengkulu No T-KU.02.01.2B.12.25.1242 tanggal 12 Desember 2025 tentang Pemutakhiran data berkaitan dengan Revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.8 Pembagian Alokasi Anggaran Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp 5.720.912.000,-
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp 4.170.000,-
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Rp 4.059.669.000,-
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp 54.347.000,-
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp 229.080.000,-
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp 210.132.000,-
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	Rp 30.885.000 ,-
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Rp 15.770.248.000,-
	Total	Rp. 26,079,443,000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Untuk Pencapaian sasaran dan indicator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) di dukung oleh anggaran dan kegiatan yang terdapat dalam Daftar DIPA. PK harus di monitoring pencapaiannya secara berkala yang termuat dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan target kinerja per bulan dan anggaran perindikator kinerja. Penyusunan RAPK dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja terintegrasi (SIMETRIS) yang terdapat pada simetris.pom.go.id. RAPK Balai POM di Bengkulu sebagai berikut:

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Tabel 1.9 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET												Anggaran
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B07	B 08	B 09	B1 0	B1 1	B12	
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 –Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	85. 75	85. 75	85. 75	85. 75	85. 75	85. 75	85 .75	8 6.5	86 .5	86 .5	86. 5	86.5	515,395,000
	02-Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO												26	45,000,000
	03 –Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	166,723,200
	04-Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83,361,600
	05-Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	83,361,600

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET												Anggaran
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B07	B 08	B 09	B1 0	B1 1	B12	
	06- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasanSediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang itindaklanjuti Oleh stakeholder	10	20	25	91	91	91	91	91	91	91	91	91	7,474,500
	07 – Persentase Sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,983,000
	08- Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,457,500
	09- Persentase fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	96. 88	96. 88	96. 88	96. 88	96. 88	96. 88	96.8 8	95.7 5	95.7 5	95.7 5	95. 75	95.75	112,314,900

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET												Anggaran
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B07	B 08	B 09	B1 0	B1 1	B12	
	10- Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	112,314,900
	11 – Persentase klan sediaan farmasi dan Pangan olahan yang Diawasi sesuai ketentuan	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	91	91	91	91	91	74,876,600
	12 - Persentase label produk Tembakau dan/atau Rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								90	90	90	90	90	37,438,300
	13- Persentase pemenuhan Target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	37,438,300
	14- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			60	60	60	65	65	65	74.5	74.5	74.5	75	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET												Anggaran
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B07	B 08	B 09	B1 0	B1 1	B12	
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	15 –Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												14.29	4,170,000
	01 –Persentase Produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan		10	15	20	25	30	35	35	50	50	50	50	
03- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01-Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	3,010,454,000
	02- Jumlah sekolah yang Melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	20	25	45	65	65	72.5	75	75	100	11	474,948,000
	03 – Jumlah desa pangan aman	5	5	5	25	60	60	70	100	100	100	100	3	1,282,474,000
	04 –Jumlah pasar pangan Aman berbasis komunitas	5	5	5	25	60	60	70	100	100	100	100	1	143,383,000
04 -Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	01 – Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	10	20	30	35	40	45	50	65	66	70	78	14.12	54,347,000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET												Anggaran
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B07	B 08	B 09	B1 0	B1 1	B12	
keamanan dan mutu	CPPOB pangan													
05- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	30	60	60	60	60	80	90	95	95	95	95	229.080.000
06 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	210.132.000
07- Layanan Publik UPT yang Prima	01- Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	30.885.000
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - 01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.72	4.208.805.000
	02- Nilai AKIP UPT BPOM												80.59	169.800.000
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	10.630.675.000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET												Anggaran
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B07	B 08	B 09	B1 0	B1 1	B12	
	04 – Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.88	80.000.000

RAPK Balai POM di Bengkulu pada tahun 2025 mengalami 2 kali Revisi, diantaranya yaitu :

1. Revisi I dengan usulan surat nomor B-PR.04.02.2B.05.25.423 tanggal 26 Mei 2025, dimana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilakukan pada triwulan I, terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami perubahan target B4-B11, diantaranya yaitu :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Indikator ini mempunyai target tahunan sebesar 91%. Berdasarkan manual IKU, target kumulatif dengan progres perbulan yaitu B1 10%,B2 20%,B3 25%, B4 30% dan seterusnya hingga B12 91%.

Adanya finalisasi IKU kemudian ada perubahan target menjadi flat sama setiap bulannya sehingga perlu adanya revisi RAPK. Usulan untuk B4-B11 yaitu 91 untuk setiap bulannya.

- b. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, Indikator ini berdasarkan hasil monev triwulan I, target yang ditetapkan mulai B1 10%, B2 30%, B3 60%, B4 80%. Realisasi baru pada B4 sebesar 30 %, disebabkan ada kendala terkait penetapan kasus menjadi “Pro Justicia”. Hal ini akan berpengaruh terhadap capaian pada RHPK untuk bulan-bulan selanjutnya sehingga perlu di lakukan revisi terhadap RHPK.
- c. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Target indikator ini pada RAPK semula kumulatif, B3-B5 sebesar 60%, B6-B8 65%, B9-B11 70% dan B12 sebesar 71.1%. Adanya finalisasi pada manual IKU sehingga target harus disesuaikan menjadi Target B4-B5 diisi B3, target B7-B8 diisi target B6, dan seterusnya.

2. Revisi RAPK yang ke II dengan surat nomor B-PR.04.02.2B.07.25.710 tanggal 28 Juli 2025 terhadap indikator sebagai berikut :

- a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, hal ini disebabkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi pada bulan Juni sebesar 33.33% dari target 30% sehingga capaian sebesar 111.1%. Dikhawatirkan capaian ini akan berpengaruh terhadap capaian pada B7 sd B12 sehingga harus di lakukan revisi RAPK.
- b. Jumlah Desa Pangan Aman, hal ini disebabkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi pada bulan Juni sebesar 80% dari target 60% sehingga capaian sebesar 133.33%. Dikhawatirkan capaian ini akan

- berpengaruh terhadap capaian pada B8 sd B12 sehingga harus di lakukan revisi RAPK.
- c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, hal ini disebabkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi pada bulan Juni sebesar 80% dari target 60% sehingga capaian sebesar 133.33%. Dikhawatirkan capaian ini akan berpengaruh terhadap capaian pada B7 sd B12 sehingga harus di lakukan revisi RAPK.
 - d. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, hal ini disebabkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi pada bulan Juni sebesar 68.33% dari target 45 % sehingga capaian sebesar 151.84%. Dikhawatirkan capaian ini akan berpengaruh terhadap capaian pada B7 sd B12 sehingga harus di lakukan revisi RAPK.

2.5 METODE PENGUKURAN

Manajemen kinerja membutuhkan adanya pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala hingga diperoleh realisasi dan capaian. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dimana prinsip pengukuran kinerja yaitu :

1. Menggunakan indikator kinerja yang terukur: indikator kinerja, baik untuk program maupun kegiatan, harus ditetapkan secara spesifik dan terukur untuk menilai keberhasilan secara objektif.
2. Memperhatikan akuntabilitas kinerja: pengukuran kinerja menjadi bagian dari SAKIP untuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Dasar untuk perbaikan kinerja: hasil pengukuran kinerja menjadi dasar untuk merencanakan dan melakukan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.
4. Menjadi alat pengambilan keputusan: data dan informasi dari hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan kebijakan lainnya.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan target Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan manual IK mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra di Lingkungan BPOM. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

a. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Normalisasi capaian indikator kinerja
Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
 - (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
 - (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
- b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Mekanisme pengukuran kinerja :

1. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*Raw Data*) dengan tertib.
Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.
2. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

- a) periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan).
 - b) apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.
3. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *ePerformance*. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final berdasarkan hasil rapat evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja, sehingga telah dipastikan tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
 4. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b) *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten;
 - c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
 5. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-Performance*. Verifikasi dilakukan per triwulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaporan kinerja. Jika berdasarkan hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran kinerja dan dokumen pendukung, hasil pengukuran kinerja akan dikembalikan kepada Penanggung Jawab Data pada Satuan Kerja/Unit Kerja melalui aplikasi SIMETRIS untuk dilakukan perbaikan dan dikirimkan kembali sebelum batas waktu verifikasi berakhir.

b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1) Jenis NKO

a) NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Keterangan :

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 3 Capaian Indikator Kinerja, yaitu dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
 - b) Jika capaian kinerja setiap indikator =110% maka tidak dilakukan normalisasi.
- (2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut :

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(2) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$$

- (3) Total Capaian Perjanjian Kinerja Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.
- (4) Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Perhitungan NKO periodik dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*.

Dalam pengukuran kinerja juga dilakukan pengukuran terhadap target jangka menengah, dengan membandingkan realisasi dengan target jangka menengah dimana penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila rata-rata capaian indikator kinerja s.d. tahun ke-3 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila rata-rata capaian indikator kinerja s.d. tahun ke-3 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila rata-rata capaian indikator kinerja s.d. tahun ke-3 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Analisis pencapaian tujuan dengan mendeskripsikan faktor penghambat atau faktor pendukung pencapaian tujuan beserta rekomendasi perbaikan atau upaya peningkatan kinerja.

a. Pengukuran Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja

Dipergunakan untuk menghitung kemampuan suatu anggaran sebagai input dapat menghasilkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang didukung anggaran tersebut. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu yang lebih sedikit yang dinyatakan sebagai capaian input namun menghasilkan output capaian kinerja yang sama atau lebih besar akan memberikan efisiensi penggunaan anggaran. Perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ RencanaCapaianinput}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE=1). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Mekanisme Pengukuran Kinerja

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Proses pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Balai POM dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Balai POM di Bengkulu telah menunjuk 1 orang pegawai fungsional perencana muda sebagai penanggung jawab data kinerja Balai POM di Bengkulu secara keseluruhan (PIC Data) sebagaimana Surat Keputusan yang disahkan oleh Kepala Balai POM di Bengkulu.
2. Ketua tim pengampu indikator kinerja melakukan penginputan data pada link internal capaian kinerja pada <https://bit.ly/Monev-RHPK-BPOM-Bengkulu-Tahun2025>. Input data berupa:
 - a. Raw data (data mentah) perhitungan setiap indikator kinerja hingga menghasilkan realisasi kinerja
 - b. Perhitungan capaian kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target
 - c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja terhadap triwulan sebelumnya.
 - d. Rekomendasi perbaikan untuk periode bulan berikutnya serta isian tindak lanjut rekomendasi bulan sebelumnya
3. Penginputan data dibatasi sampai tanggal 5 pada bulan berikutnya, setelah itu link pengisian akan dikunci guna penarikan data.
4. Jika terjadi kesalahan data, ketua Tim melaporkan dan menghubungi PIC data untuk membuka kembali link, jika disetujui, ketua Tim dapat melakukan perubahan data dengan menuliskan justifikasi perubahan.

5. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan serta capaian kinerja masing masing indikator sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
6. Data yang sudah terverifikasi selanjutnya oleh PIC data melakukan penginputan pada e monev (<https://simetris.pom.go.id/rhpk/>) sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
7. Data kinerja juga digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance.
8. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun dengan membuat laporan triwulanan yaitu laporan interim dan evaluasi internal.

Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan yang diterapkan Balai POM di Bengkulu memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya capaian kinerja.
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan atau sasaran.
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran.
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja.
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

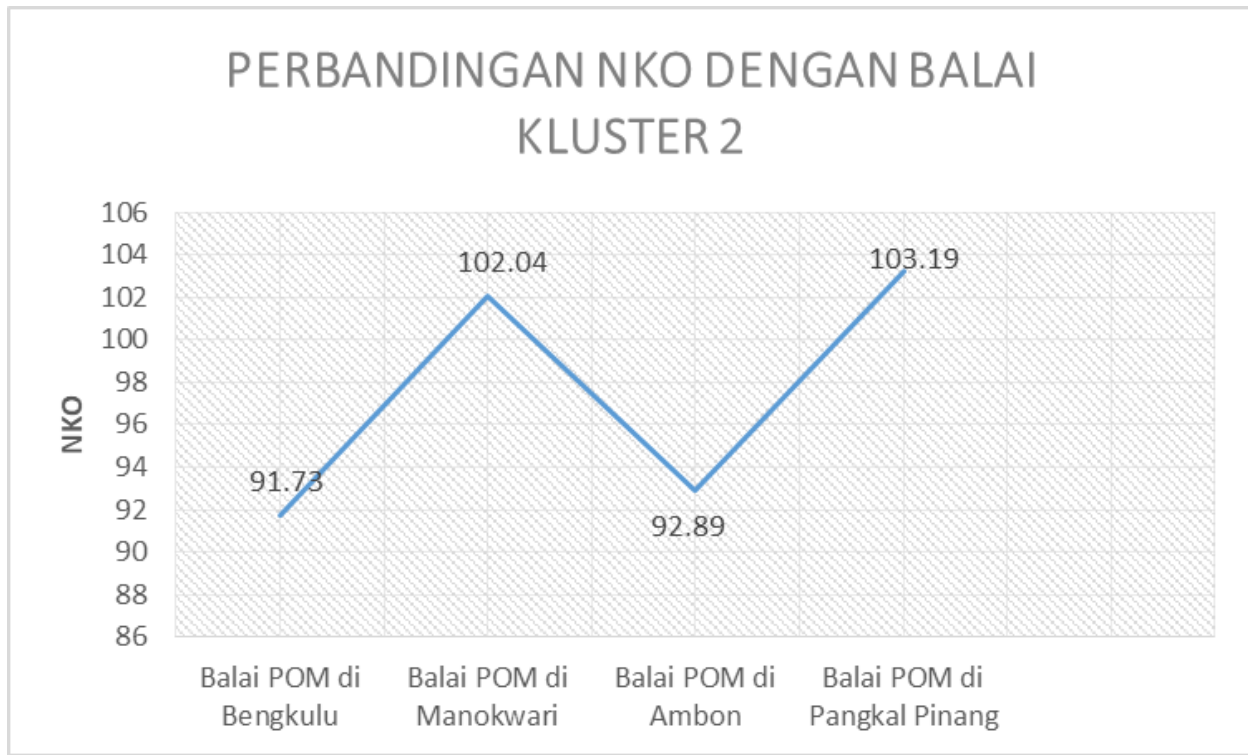
Balai POM di Bengkulu melakukan pengumpulan data secara periodik terhadap indikator kinerja utama dengan membandingkan antara target dan realisasi. Dalam laporan ini juga memberikan gambaran atas kesimpulan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama. Pelaksanaan metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi simetris yang terintegrasi antara *e-planning* dan *e-performance* melalui <https://simetris.pom.go.id/>.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 Tahun 2024 terdapat perubahan Penilaian Kinerja Organisasi dimana sebelumnya menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) menjadi *Logical Framework* untuk periode Renstra 2025-2029.

Balai POM di Bengkulu memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2025 sebesar **91.73** kriteria “**Baik**”. Capaian ini merupakan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2025 terhadap 28 indikator kinerja dengan rata-rata sebesar 102.63%. Dari 28 indikator tersebut terdapat **6 (enam)** indikator yang mempunyai nilai diatas 110% sehingga harus dinormalisasi menjadi 110% sehingga rata-rata nilai indikator kinerja sesudah normalisasi menjadi 101.93%. Indikator dengan kriteria **sangat baik** sebanyak 12 (dua belas) indikator, kriteria **Baik 9 (sembilan)** indikator dan ada **1(satu) indikator kriteria kurang**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 dan Peraturan BPOM Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dimana Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja. Berdasarkan nota dinas nomor PI.04.71.7.01.26.21 tanggal 29 Januari 2026, hasil evaluasi AKIP Balai POM di Bengkulu tahun 2025 sebesar 78.33 dengan predikat BB (Sangat Baik) sehingga koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 10% yang mengakibatkan NKO Balai POM di Bengkulu setelah dikoreksi terhadap capaian nilai AKIP menjadi **91.73**.

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan Balai Cluster II



Gambar 3.1. Grafik perbandingan NKO Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM dalam kluster II

Jika dibandingkan dengan Balai POM dalam kluster II yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Sestama Badan POM Nomor PR.09.01.2.01.26.71 tanggal 26 Januari 2026, realisasi Balai POM di Bengkulu memiliki NKO paling rendah. Hal ini disebabkan oleh capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan keseluruhan sebesar 1,08, dengan komponen capaian kinerja penurunan sebesar 2.28 dari 17.65 (2024) menjadi 15.37 (2025). Selain adanya penurunan tersebut, juga disebabkan adanya faktor koreksi nilai atas capaian AKIP. Dari ke 4 Balai dalam kluster II terdapat 2 Balai POM yang nilainya dikoreksi -10% yaitu Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon. Balai POM di Manokwari dan Balai POM Pangkal Pinang tidak mengalami koreksi nilai disebabkan hasil evaluasi AKIP diatas 80.

Pada tahun 2025 dimana merupakan tahun pertama dari pkerjalanan renstra 2025-2029, capaian dari beberapa sasaran kinerja Balai POM di Bengkulu juga unit kerja pada kluster II dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perbandingan Nilai Sasaran Strategis Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dalam klaster II

No	Sasaran Kinerja	BPOM Bengkulu	BPOM Manokwari	BPOM Ambon	BPOM Pangkal Pinang	Nasional
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106.02	102.79	104.57	104.51	102.46
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	100	0	0	110
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	85.01	101.07	100.99	100.15	97.92
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110	100	100	110	110
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105.25	100	103.33	102.78	105.61

No	Sasaran Kinerja	BPOM Bengkulu	BPOM Manokwari	BPOM Ambon	BPOM Pangkal Pinang	Nasional
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110	110	110	104.44	107.23
7	Layanan Publik UPT yang prima	102.55	102.34	105.16	102.98	110
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98.95	99.78	98.99	99.76	97.27

Dilihat dari tabel diatas pada sasaran kinerja Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Seluruh UPT melampaui target (>100). BPOM Bengkulu (106.02) menjadi yang tertinggi, bahkan di atas rata-rata Nasional (102.46). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium berjalan sangat optimal. Efektifnya pengawasan juga tercermin dari pengawasan terhadap risiko-risiko kesehatan yang terjadi di masyarakat akibat peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman dan bermutu, diantaranya Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dalam pelaporan pelayanan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan penanganan efek Samping Obat (ESO), penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan, serta pengendalian resistensi antimikroba atau *Antimicrobial Resistance* (AMR).

Pada sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang terdiri dari 1 indikator kinerja, hanya Balai POM di Bengkulu dan Manokwari yang memiliki indikator pada sasaran tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua daerah memiliki sarana produksi pangan fortifikasi. Capaian pengawasan telah mencapai 100%, bahkan secara nasional juga sudah terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa sarana produksi pangan fortifikasi yang berada pada masing-masing wilayah UPT sudah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai regulasi.

Balai POM di Bengkulu juga dituntut untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, sehingga dituntut

untuk meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi ke masyarakat melalui berbagai media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu.

Pertumbuhan ekonomi yang baik mendukung daya saing masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan, dimana peran BPOM di Bengkulu memberikan upaya pendampingan *regulatory* kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memenuhi persyaratan izin untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Hal ini sudah dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu dengan ketercapaian sasaran kinerja “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, yang mana realisasi Balai POM di Bengkulu sudah melebihi target tahun 2025. Begitu juga terhadap Balai POM di Manokwari, Balai POM di Ambon dan Balai POM di Pangkal Pinang dengan capaian rata-rata 100%.

Dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu melalui sasaran kinerja Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, Balai POM di Bengkulu berperan dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan dan mencari bukti yang terjadi guna menemukan tersangka pelanggaran kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan KUHAP. Selain itu Balai POM di Bengkulu juga berperan dalam melakukan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan melakukan kegiatan patroli siber dan penjejak digital (profiling siber) berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Realisasi tahun 2025 sudah optimal dengan capaian 100%, begitu pula dengan unit pada kluster II kluster lainnya.

BPOM di Bengkulu berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Realisasi sasaran ini sebesar 102.55% dengan kategori Pelayanan Prima dimana ini merupakan komitmen untuk terus ditingkatkan dengan terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari sasaran kinerja tersebut diatas, maka telah ditetapkan indikator kinerja yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian indikator tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Bengkulu

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian	Capaian Dinormalisasi	Bobot Nilai AKIP	Capaian Final	Nilai NKO	Predikat NKO
								91.73	Baik
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	94.67	109.45	Sangat Baik	109.45	90	98.51		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26.67	102.58	Sangat Baik	102.58	90	92.32		
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91.53	114.41	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik	100	90	90		
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	95	111.76	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	99.91	109.79	Sangat Baik	109.79	90	98.81		
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.29	110.93	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		

Indikator	Targe t	Realis asi	Capai an	Predikat Capaian	Capaian Dinormalis asi	Bobot Nilai AKIP	Capaian Final	Nilai NKO	Predik at NKO
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75	100	104.44	Sangat Baik	104.44	90	94		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.32	109.24	Sangat Baik	109.24	90	98.32		
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99.92	109.8	Sangat Baik	109.8	90	98.82		
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	86.81	96.46	Baik	96.46	90	86.81		
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.99	105.99	Sangat Baik	105.99	90	95.39		
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75	76.9	102.53	Sangat Baik	102.53	90	92.27		
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100	Baik	100	90	90		
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	Baik	100	90	90		

Indikator	Targe t	Realis asi	Capai an	Predikat Capaian	Capaian Dinormalis asi	Bobot Nilai AKIP	Capaian Final	Nilai NKO	Predik at NKO
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31	93.16	106.7	Sangat Baik	106.7	90	96.03		
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	11	100	Baik	100	90	90		
Jumlah desa pangan aman	3	1	33.33	Kurang	33.33	90	30		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik	100	90	90		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.12	16.47	116.64	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	100	105.26	Sangat Baik	105.26	90	94.73		
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.82	102.55	Sangat Baik	102.55	90	92.3		
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.72	88.52	97.57	Baik	97.57	90	87.81		
Nilai AKIP UPT BPOM	80.59	78.33	97.2	Baik	97.2	90	87.48		
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	Baik	100.0	90	90.0		
Indeks Manajemen	2.88	2.91	101.0	Sangat	101.04	90	90.94		

Indikator	Targe t	Realis asi	Capai an	Predikat Capaian	Capaian Dinormalis asi	Bobot Nilai AKIP	Capaian Final	Nilai NKO	Predik at NKO
Risiko UPT BPOM			4	Baik					

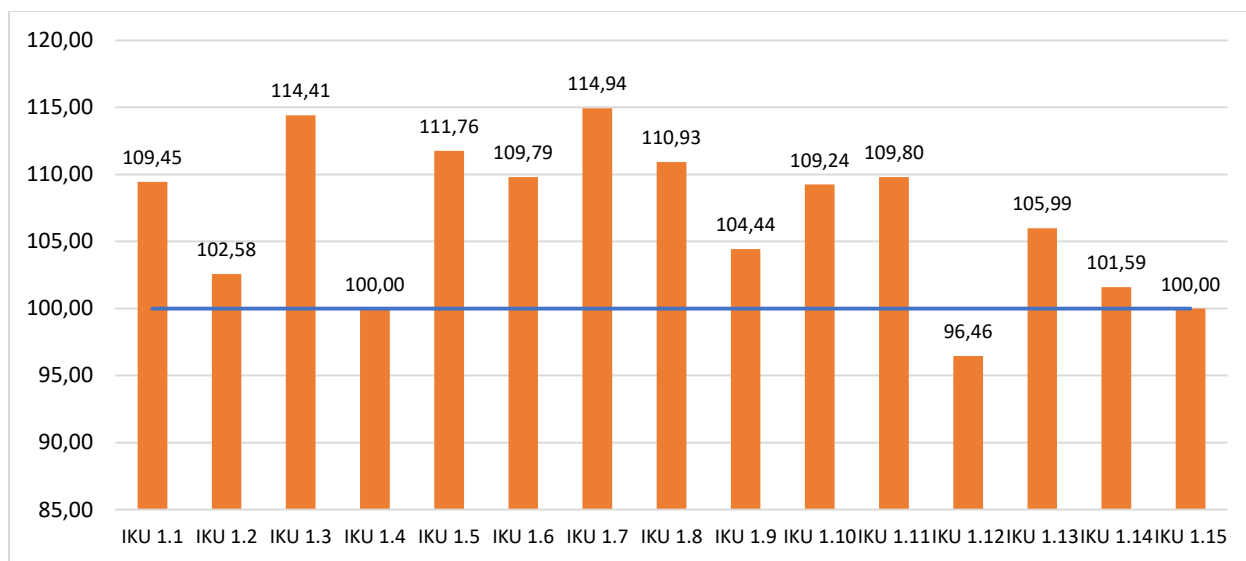
Jumlah indikator pada tahun 2025 adalah 28 indikator. Rincian capaian indikator adalah 12 (dua belas) kriteria sangat baik dengan range $100\% < x = 110\%$, 9 (sembilan) indikator kriteria baik dengan range $90\% < x = 100\%$, 6 (enam) indikator kriteria tidak dapat disimpulkan dengan range $>110\%$, dan 1 (satu) indikator kriteria Kurang $<60\%$. Uraian per masing-masing indikator secara rinci seperti di bawah ini.

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN
PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Balai POM di Bengkulu memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam **pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, BPOM di Bengkulu berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu. Efektivitas pengawasan diwujudkan melalui 15 indikator kinerja yang diukur pada tahun 2025 sebagai berikut.



Gambar 3.2. Pencapaian indikator kinerja Balai POM di Bengkulu dalam Sasaran Strategis 1

Keterangan:

- IKU 1.1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.2 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- IKU 1.3 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
- IKU 1.5 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- IKU 1.7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.9 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- IKU 1.11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- IKU 1.12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- IKU 1.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT
- IKU 1.14. Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- IKU 1.15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Dari grafik di atas, 14 dari 15 Indikator kinerja telah memenuhi target ditunjukkan dengan capaian lebih besar atau sama dengan 100%, hanya 1 indikator kinerja yang tidak terpenuhi target dengan capaian di bawah 100% yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis 1 sebesar **106,76% (Sangat Baik)** yang diperoleh melalui rata-rata capaian 15 indikator kinerja yang diukur.

IKSS 1.1 PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERESIKO YANG DITINDAK LANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Cara perhitungan dan Formula untuk perhitungan Persentase sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu $= (A+B+C+D)/4$

Dimana:

- A. Persentase Sampel obat beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - B. Persentase Sampel obat bahan alam beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - C. Persentase Sampel Suplemen kesehatan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - D. Persentase Sampel kosmetika beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Pengukuran selengkapny dapat dilihat pada data di bawah ini:

Rincian penjelasan untuk indikator seperti di bawah ini:

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh melalui perhitungan masing-masing komponen Persentase Sampel berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan sebagai berikut:

A. Persentase Sampel obat beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= a+b+c+d+e$$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$$

Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	A2	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
194,00	194,00	100,00	194,00	194,00	100,00	100,00	194,00	100,00	30,00

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$$

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%).$$

Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	B1	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang dimaksud	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud	C1	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
194,0	194,0	100,0	194,0	194,0	100,0	20,0	205,0	205,0	100,0	20,0

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$$

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$.

Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud 2	D2	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan sampai dengan pedoman sampling sampai dengan periode yang dimaksud	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
205,0	205,0	100,0	205,0	205,0	100,0	20,0	4,0	4,0	100,0	10,0

Perhitungan Persentase Sampel obat beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	E Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
30,00	20,00	20,00	20,00	10,00	100,00

B. Persentase Sampel obat bahan alam beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan $= (a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan $= (a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

$a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} \times) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT} \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya} \times 100\%$

Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan
						$(A1+A2)/2$
166,00	166,00	100,00	140,00	231,00	60,61	80,30

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji
1	2	$B=1/2 \times 100$	1	2	$C=1/2 \times 100$
140,00	231,00	60,61	231,00	231,00	100,00

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut
1	2	$D = 1/2 \times 100$	1	2	$E = 1/2 \times 100$
231,0	231,00	100,00	35,00	35,00	100,00

Perhitungan Persentase Sampel obat bahan alam beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

% Pemenuhan Target Pengawasan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Kesesuaian parameter uji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan]]
A	B	C	D	E	(A s.d E) / 5
80,30	60,61	100,00	100,00	100,00	60,61

C. Persentase Sampel Suplemen kesehatan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan= $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan $= (a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan
41,00	41,00	100,00	39,00	57,00	68,42	84,21

b.Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

c.Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji
39,00	57,00	68,42	57,00	57,00	100,00

d.Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e.Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut
57,00	57,00	100,00	35,00	35,00	100,00

Perhitungan Persentase Sampel Suplemen Kesehatan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

% Pemenuhan Target Pengawasan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Kesesuaian parameter uji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel SK Berisiko yang Ditindaklanjuti i Sesuai Ketentuan]]
A	B	C	D	E	(A s.d E) / 5
84,21	68,42	100,00	100,00	100,00	90,53

D. Persentase Sampel kosmetika beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan
312,00	312,00	100,00	435,00	436,00	99,77	99,89

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel $\times 100\%$)

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
312,00	312,00	100,00	436,00	436,00	100,00

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut
436,00	436,00	100,00	53,00	53,00	100,00

Perhitungan Persentase Sampel Kosmetika beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

% Pemenuhan Target Pengawasan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Kesesuaian parameter uji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan]]
A	B	C	D	E	(A s.d E) / 5
99,89	100,0	100,0	100,00	100,00	99,98

Pengukuran Realisasi Persentase sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata:

- A. Persentase Sampel obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (100%)
- B. Persentase Sampel obat bahan alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (88,18%)
- C. Persentase Sampel Suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (90,53%)
- D. Persentase Sampel kosmetika berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (99,98%)

Sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 94,67%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	94,67	109,45	Sangat baik

Realisasi Persentase Sediaan farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 94,67% dibandingkan dengan target sebesar 86,50% diperoleh capaian sebesar 109,45% dengan kesimpulan **sangat baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

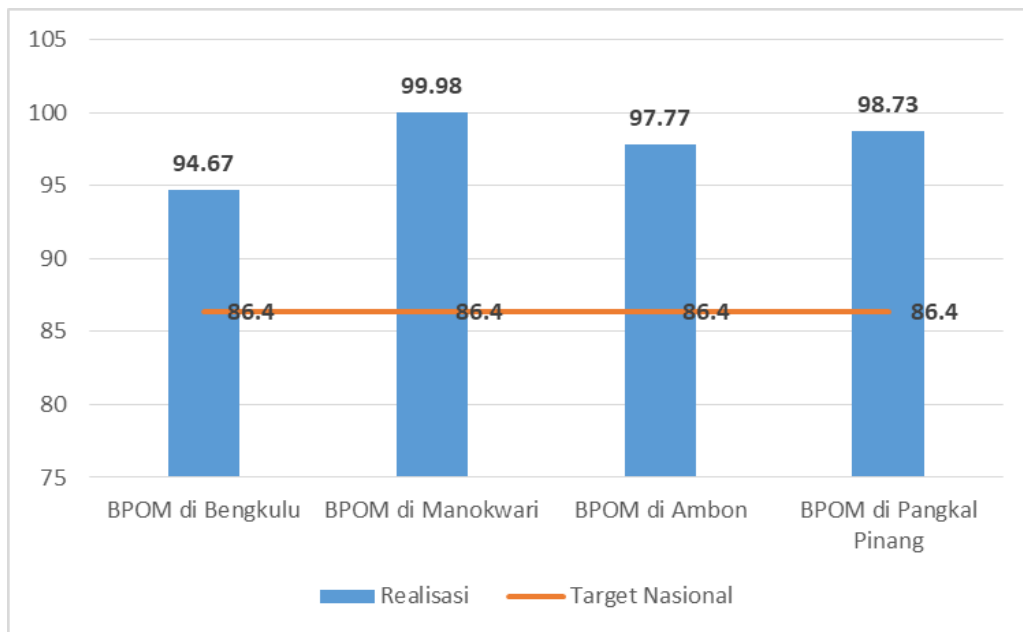
Pada tahun 2025 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan indikator kinerja pada tahun 2025. Pada tahun 2024 indikator kinerja adalah persentase obat yang memenuhi syarat sedangkan pada tahun 2025 indikator kinerjanya adalah Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	94.67	103.18	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi tahun 2025 terhadap target jangka menengah atau periode akhir renstra 2025-2029 (91,75%), diperoleh capaian 103,18% atau kriteria tercapai/melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target tahun 2026-2029 memerlukan penyesuaian sebagaimana data 2025 yang akan dijadikan baseline.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.3. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis.

Berdasarkan grafik di atas capaian Realisasi indikator kinerja Balai POM di Bengkulu berada pada urutan ke-4, setelah Balai POM Ambon, Balai POM Pangkal Pinang dan yang tertinggi adalah Balai POM di manokwari. Jika dibandingkan dengan target Nasional realisasi Balai POM di Bengkulu mempunyai capaian dibawah realisasi Nasional, sedangkan untuk Balai POM Pangkal Pinang, Balai POM di Ambon, dan Balai POM di Manokwari berada diatas Target Nasional,

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Analisis Penyebab keberhasilan ketercapaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Personel pengujian yang kompeten dalam pengujian, ditunjukkan dengan pelatihan dasar SNI 17025:2017, pelatihan teknis dan verifikasi metode.
- Ketersediaan alat yang terstandar (Machine) dan cukup mengcover pengujian. Walaupun terjadi kerusakan alat microwave di pertengahan tahun menyebabkan antrian antar laboratorium, namun hal ini dapat diatasi dengan masih terdapatnya alat microwave di laboratorium Pangan.
- Adanya inovasi Simpan Kantor (Sistem Informasi untuk Permintaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) sehingga permintaan pemeliharaan dapat diketahui trackingnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, permintaan pemeliharaan masih diajukan secara yaitu melalui srikandi sehingga tracking proses pengadaan jasa pemeliharaan sulit dipantau.

- Terjaminnya ketersediaan reagen, bahan operasional, suku cadang dan bahan lainnya (Material) dikarenakan fleksibilitas pelaksanaan anggaran. Fleksibilitas pelaksanaan anggaran di tahun 2025 dikarenakan semua keperluan laboratorium dapat diadakan melalui e-katalog (inaproc). Hal ini sangat berbeda dengan pengadaan yang mengandalkan paket besar (pengadaan dengan cara lelang). Baku pembanding pun dapat dibeli dari pihak eksternal dengan mengutamakan spesifikasi sesuai dengan metode analisis. Reagensia dan baku pembanding dapat sharing dengan balai lain serta dari P3OMN, memungkinkan efisiensi dan percepatan penggunaan reagen tersebut untuk pengujian sesuai dengan pedoman sampling.
- Dukungan Money/Anggaran yang memadai. Walaupun terjadi efisiensi atas dasar instruksi presiden di awal tahun 2025 namun penganggaran untuk PDD tidak dipotong secara signifikan. Pemotongan pada anggaran perjalanan dinas tidak membuat perubahan yang signifikan dikarenakan dapat diatasi dengan mengikuti secara daring. Hal ini terjadi salah satunya pada kegiatan reakreditasi KAN yang membuat pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Efisiensi anggaran pada kegiatan tersebut tidak menghalangi Balai POM di Bengkulu sukses mendapatkan Resertifikasi ISO KAN 17025:2017 pada bulan Juni 2025
- Measurement/Monitoring Evaluasi, adanya monev bulanan yang membuat identifikasi permasalahan capaian kinerja lebih cepat diketahui
- Dukungan dari teknisi berbagai alat sehingga dapat memecahkan masalah pada instrumen. Adanya Balai Kalibrasi dari P3OMN juga merupakan bentuk dukungan dalam memastikan alat yang digunakan memenuhi persyaratan.

Berkaitan dengan risiko yang telah dipetakan pada awal tahun, telah dilakukan pengendalian atas risiko overwork Penggunaan Microwave sebagai alat preparasi pengujian Logam untuk komoditi Pangan, OBA, SK, OK, dan Kosmetik yang berpotensi menyebabkan kerusakan alat sehingga mengganggu pencapaian *Time Line* Pengujian. Pengendalian dilakukan melalui :

1. Membuat Jadwal pemakaian alat laboratorium
2. Melakukan pemeliharaan dan pengecekan alat microwave secara berkala 1 tahun 2x
3. Pemeliharaan Internal dilakukan secara berkala setiap 3 bulan
4. Perencanaan pengadaan alat baru khusus microwave tahun 2026

Walaupun pengendalian dilakukan, kejadian risiko yaitu kerusakan microwave di laboratorium kosmetik tetap terjadi, namun risiko dapat diatasi dengan membuat jadwal pemakaian alat microwave laboratorium pangan, sehingga tujuan organisasi tetap tercapai bahkan sangat baik dibuktikan dengan realisasi 109.45%.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan rincian output adalah QIA.002 (bobot 100%) dengan

jumlah output sebanyak 715 produk, dimana sampai pada bulan Desember 2025 telah selesai dilakukan sampling dan pengujiannya. Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung diantaranya:

- Pengujian sampel rutin sediaan farmasi sebagian besar telah memenuhi SLA pengujian yaitu 15 Hari Kerja.
- Adanya program Inovasi Simpan Kantor yaitu sistem informasi yang memfasilitasi pengajuan pemeliharaan hingga tracking proses pengajuan pemeliharaan tersebut. Dengan adanya inovasi ini, pemeliharaan yang awalnya tidak dapat ditracking menjadi dapat ditracking sehingga pemeliharaan bisa menjadi lebih efektif.
- Pelatihan internal yang dilakukan pada semua komoditi obat mampu meningkatkan serta menjaga kompetensi penguji, diantaranya :

Pelatihan internal :

1. In House Training Obat dengan judul Verifikasi Metode Tropikamida dalam sediaan tetes mata secara Spektrofotometri UV VIS dan verifikasi metode Dextrose dalam sediaan infus secara polarimetri pada bulan Juli 2025.
2. In House Training Kosmetik dengan judul Verifikasi Metode Analisis Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT pada bulan Juli 2025
3. In House Training Bidang Kimia Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kuasi “Verifikasi Metode Penentuan Kandungan n-Heksana dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Mass” pada bulan Oktober 2025
4. Workshop Refreshment ISO 17025 : 2017 Evaluasi Estimasi Ketidakpastian Pengujian pada bulan Mei 2025,

Pelatihan Eksternal :

1. Pelatihan Bidang Kimia Obat Bahan Alam di Balai Besar POM di Samarinda pada bulan Oktober 2025.
- Pelaksanaan kegiatan verifikasi metode analisis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada awal tahun dan terealisasi sepenuhnya untuk seluruh metode yang direncanakan, diantaranya:

Obat :

1. Verifikasi metode Disolusi Amlodipin dalam sediaan tablet secara KCKT
2. Verifikasi metode Disolusi Furosemida dalam sediaan tablet secara KCKT
3. Verifikasi metode Disolusi kaptopril dalam sediaan tablet secara KCKT
4. Verifikasi metode Disolusi Hidroklorthiazid dalam sediaan tablet secara KCKT
5. Verifikasi metode Disolusi Simvastatin dalam sediaan tablet secara KCKT
6. Verifikasi metode Penetapan kadar Amlodipin besilat sediaan tablet secara KCKT
7. Verifikasi metode Penetapan kadar Furosemida sediaan tablet secara KCKT
8. Verifikasi metode Penetapan kadar Kaptopril sediaan tablet secara KCKT

9. Verifikasi metode Penetapan kadar Piroksikam sediaan tablet secara Spektrofotometri
10. Verifikasi metode Penetapan kadar Haloperidol sediaan tablet secara KCKT
11. Verifikasi metode Penetapan kadar Paracetamol sediaan tablet secara KCKT

Obat Bahan Alam :

1. Verifikasi metode analisis Identifikasi Antalgin, Kofein, Klorfeniramin Maleat Dan Diazepam Dalam Obat Tradisional Sediaan Padat Secara Kromatografi Lapis Tipis Dan Spektrofotodensitometri
2. Verifikasi metode analisis Identifikasi Irbesartan, Losartan, Telmisartan dan Valsartan dalam Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi – Photo Diode Array (PDA)
3. Verifikasi metode analisis Identifikasi dan Penetapan Kadar Lovastatin dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat Mengandung Ekstrak Red Yeast Rice secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array

Kosmetik :

1. Verifikasi metode analisis Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
 2. Verifikasi metode analisis Identifikasi Klobetasol pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
 3. Verifikasi metode analisis Identifikasi Acid Yellow 11 (CI18820) pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
 4. Verifikasi metode analisis Identifikasi Methanil Yellow (CI 13065), Fat Brown B (CI 12010) dan Naphthol Blue Black (CI 20470) dalam Produk Kosmetik secara KCKT-PDA
 5. Verifikasi metode analisis Identifikasi Phenol pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
 6. Verifikasi metode analisis Identifikasi Eritrosin B (Acid Red 51) CI 45430 pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
 7. Verifikasi metode analisis Identifikasi Basic blue 26 (CI 44045) pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
 8. Verifikasi metode analisis Identifikasi pewarna CI 11680 pada sediaan Kosmetik secara KCKT PDA
- Pelaksanaan verifikasi instrumen dilakukan melalui kegiatan kalibrasi oleh PPPOMN, kalibrasi oleh penyedia, serta verifikasi internal yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan terealisasi sebesar 100%. Verifikasi instrumen tersebut meliputi peralatan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), Spektrofotometri UV Vis, AAS, GC MS serta peralatan pendukung seperti timbangan, disolusi, BSC, *fume hood*, *water purifier*, dan pH meter.
 - Pelaksanaan kalibrasi alat, cek antara timbangan, dan kegiatan verifikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik, guna menjamin hasil pengukuran yang dihasilkan oleh peralatan

- memberikan data yang valid, akurat, serta meminimalkan kebutuhan koreksi dalam proses pengujian.
- Pelaksanaan **jaminan mutu hasil pengujian** telah dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan uji banding antar personel. Uji banding tersebut dilakukan pada beberapa parameter pengujian, antara lain Identifikasi Sudan II, Sudan III, Sudan IV pada sediaan *Lip Color*, Identifikasi Sudan II, Sudan III, Sudan IV pada sediaan *Blush On*, Penetapan Kadar Zn Pyriton pada shampo anti ketombe, Penetapan Kadar Paracetamol dalam sediaan sirup, Penetapan Kadar Furosemida dalam sediaan tablet, Penetapan Kadar Triheksilphenidil dalam sediaan Tablet, Penetapan Kadar Kaptopril dalam sediaan tablet dan Penetapan Kadar Amlodipin dalam Sediaan Tablet.
 - Pelaksanaan Uji Profisiensi (UP) dan Uji Banding (UB) antar laboratorium tahun 2025 dengan hasil inlier diantaranya pada parameter:
 1. UP Identifikasi Psikotropika dalam serbuk secara Kromatografi Lapis Tipis yang diselenggarakan oleh PPPOMN,
 2. UB Penetapan Kadar Amlodipin Tablet secara KCKT dengan metode FI VI yang diselenggarakan oleh Balai POM di Manokwari,
 3. UB PK Captopril tablet Secara KCKT dengan Metode FI VI yang diselenggarakan oleh Balai POM di Manokwari,
 4. UP Deteksi *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Candida albicans* pada Sediaan Kosmetik yang diselenggarakan oleh PPPOMN,
 5. UP Identifikasi Bahan Berbahaya Dilarang Dalam Kosmetik (Resorsinol, Kloramfenikol, Betametason) sediaan untuk kulit berjerawat yang diselenggarakan oleh PPPOMN,
 6. UP Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam Obat Bahan Alam dalam Sediaan Padat (Difenhidramin HCl, Klorfeniramine Maleat dan Prometazin HCl) yang diselenggarakan oleh PPPOMN,
 - Pengadaan suku cadang untuk peralatan HPLC, Spektrofotometri UV Vis, GC MS dan AAS telah dilaksanakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengujian, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian (timeline) pengujian dan meningkatkan efektivitas pelayanan laboratorium.
 - Program pengadaan melalui e-katalog (inaproc) yang memungkinkan bahan bahan pengujian dapat diadakan kapan saja sesuai dengan ketersediaan anggaran.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.717.000	11.712.900	99,97	102,58 %	0,03	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,03 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO di BPOM Bengkulu. Indikator indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO didukung oleh anggaran rincian output 3165.QDC.001 dengan pemanfaatan anggaran mencapai 99,97%, dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 11.717.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 11.712.900,-. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.03 yang tergolong kategori efisien.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan KIE farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara hybrid pada bulan Februari 2025, Monitoring evaluasi pelaporan KTD/ESO setiap bulannya, serta advokasi kepada tenaga kesehatan lainnya pada sarana pelayanan kesehatan baik melalui surat dan bersamaan pelaksanaan inspeksi rutin.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Peningkatan target sampel dan pengujian tahun 2026 belum sebanding dengan ketersediaan alat, yang berpotensi pada ketercapaian pemenuhan timeline sampel uji	Pengadaan alat baru (HPLC dan Microwave) untuk menunjang percepatan pengujian	Pelaksanaan pengadaan alat Lab HPLC dan Microwave	Triwulan 2 - 2026	Y	O-01	Penyelesaian pengujian sampel sediaan farmasi meliputi OBA, SK dan kosmetik melewati time line pengujian yang ditetapkan.
	Belum dilakukan inventarisir kebutuhan suku cadang untuk rencana sampling dan pengujian tahun 2026	Pelaksanaan perencanaan yang lebih baik dengan mulai menginventarisir suku cadang dari awal tahun sehingga pengujian berjalan lancar sepanjang tahun	Identifikasi kebutuhan suku cadang sesuai alokasi dan target sampel 2026 serta penentuan gap kekurangannya suku cadang	Triwulan 1 - 2026	T	-	-
	Terdapat perkembangan perkembangan pengujian dikaitkan dengan parameter uji 2026 yang belum sepenuhnya diketahui pegawai	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan yang menunjang pengujian rutin di Balai POM di Bengkulu mengikuti update metode pengujian yang dipersyaratkan Pedoman Sampling 2026	Rencana In House Training tahun 2026 : 1. Obat : Verifikasi metode penetapan kadar dan disolusi tablet Candesartan, HCT secara simultan dengan kromatografi cair kinerja tinggi (USP 43) 2. Kosmetik : Identifikasi dan Penetapan Kadar Oksibenzon, Metilbenziliden Camphor, Butil Metoksi diBenzoilmetan, Oktil Metoksisinamat, Homosalat dan Oktil	Triwulan 3 - 2026	T	-	-

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
			Salisilat dalam Produk Kosmetik secara KCKT-PDA (MA PPOMN 28/KO/16) 3. OTSKK : Identifikasi dan Penetapan Kadar Asam Benzoat; Asam Sorbat; Metil, Etil, Propil, dan Butil Paraben dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Cair Mengandung Madu secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dengan Detektor Photo Diode Array (40/OTPK/17) 4. Mikrobiologi : Uji Identifikasi Vibrio cholerae , Uji Angka Enterococci, Uji Angka Paling Mungkin (APM) Vibrio parahaemolyticus pada Produk Pangan (MA PPOMN no 53/MI/15, MA PPPOMN no 86/MBM/MA-PPOMN/18, MA PPPOMN 088/MI/17)				
	Kurangnya pemeliharaan alat tahun 2025 sehingga terdapat alat rusak seperti HPLC dan microwave.	Perencanaan pemeliharaan alat yang lebih terprogram sehingga kerusakan alat bisa dicegah sebaik mungkin	Pembuatan Jadwal pemeliharaan alat dan kalibrasi alat	Triwulan 1 - 2026	Y	O-01	Penyelesaian pengujian sampel sediaan farmasi meliputi OBA, SK dan kosmetik melewati time line pengujian yang ditetapkan.

IKSS 1.2 - PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Farmakovigilans adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan

pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh awareness dan pemahaman petugas kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang telah diintervensi KIE oleh Balai POM di Bengkulu.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %	26,67 %	102,58 %	Sangat Baik

Pada tahun 2025 Total sarana yang mendapatkan KIE Farmakovigilans sebanyak 45 sarana, sementara target 12 sarana melapor KTD/ESO, sampai akhir tahun 2025 sudah terdapat 12 sarana yang melaporkan KTD/ESO sehingga terealisasi 26,67 % dengan capaian 102,58 %

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga belum ada perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 belum ada sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO pada aplikasi E-MESO dikarenakan tenaga kesehatan belum paham terkait farmakovigilans dan cara pelaporannya. Sehingga diselenggarakan KIE Farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

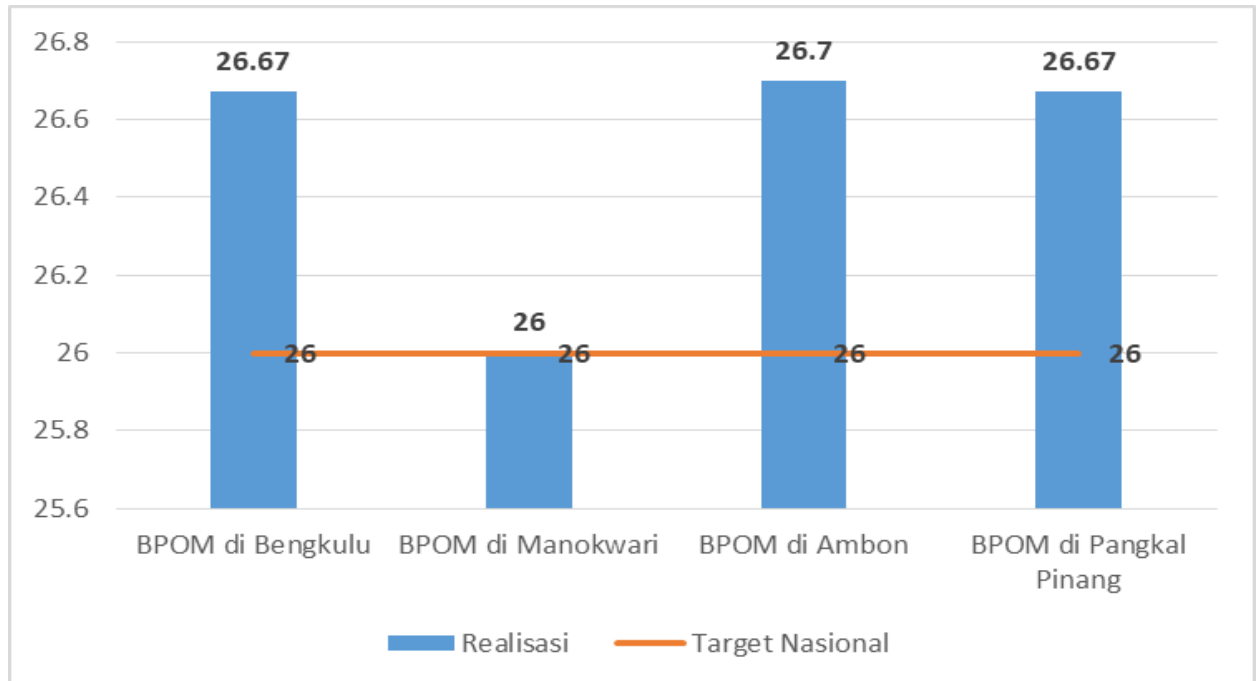
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	26,67	88,9	Akan tercapai 

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 26,67 % jika di bandingkan dengan target renstra jangka menengah sebesar 30 % maka target 2029 tergolong akan tercapai dengan capaian 88,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja ini masih memerlukan perbaikan agar realisasi target jangka menengah 2029 bisa tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara realisasi Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Ambon, Pangkalpinang dan Manokwari. Dari realisasi kinerja 4 (empat) UPT, Balai POM di Bengkulu bersama Balai POM di Ambon dan Pangkal Pinang memiliki realisasi yang tertinggi dengan nilai sama yaitu 26,67%. Ketiga UPT ini mengungguli realisasi Balai POM di Manokwari sebesar 26,0%.

Realisasi Balai POM di Bengkulu juga telah melampaui target nasional sebesar 100%



Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun tercapai dengan nilai capaian 102,58 %.

Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain :

1. Advokasi petugas BPOM kepada tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang diintervensi KIE Farmakovigilans. Dimana untuk memperoleh data kasus KTD/ESO petugas farmasi sebagai PIC program harus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain. Dimana selama ini pemahaman tenaga kesehatan terkait farmakovigilans adalah bahwa kasus yang dilaporkan hanyalah ESO yang intensitas berat saja, padahal beberapa kasus KTD ringan sering terjadi di fasilitas kesehatan, misal karena human eror. Sehingga saat petugas BPOM melakukan pemeriksaan/pengawasan rutin terhadap pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas kesehatan juga melakukan edukasi kembali terkait ruang lingkup KTD/ESO kepada petugas farmasi dan tenaga kesehatan lainnya.
2. PIC farmakovigilans melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan KTD/ESO secara berkala dan menyebarkan hasil monitoring ke WAG setiap bulannya.
3. Pemberian apresiasi kepada sarana yang telah melakukan pelaporan KTD/ESO berupa piagam penghargaan, sehingga diharapkan dapat memacu sarana pelayanan kesehatan lainnya yang belum melaporkan KTD/ESO untuk dapat segera melaporkan.

Pengendalian risiko

Telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko Sarana Pelayanan kesehatan yang telah diedukasi terkait KTD/ESO tidak melakukan pelaporan di aplikasi e-MESO Badan POM tahun 2025. Pengendalian dilakukan melalui :

1. Melakukan KIE farmakovigilans kepada 45 Sarana Pelayanan Kesehatan di provinsi Bengkulu secara hybrid pada tanggal 19 Februari 2025. Peserta KIE adalah tenaga kesehatan pada Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit. Pelaksanaan secara hybrid ini dilakukan karena adanya efisiensi anggaran. Peserta Luring adalah sarana pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu, sedangkan untuk sarana pelayanan kesehatan di kabupaten dilakukan secara daring.
2. Melakukan Monev Pelaksanaan Pelaporan KTD/ESO setiap bulannya.
3. Himbauan untuk aktif melakukan pelaporan lewat WAG.

Hal ini menyebabkan efektivitas pengendalian tergolong efektif dan mampu menurunkan level risiko residu. Dimana pasca pelaksanaan KIE farmakovigilans, baru 3 sarana yang melaporkan KTD/ESO. Tetapi dengan aktifitas pengendalian yang dilakukan maka pada bulan Desember telah terdapat 12 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO dari total 45 sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE farmakovigilans pada bulan Februari 2025. Sehingga realisasi adalah 26,67 %. dengan capaian 102,58 %.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Pencapaian kinerja indikator kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO didukung oleh anggaran rincian output 3165.QDC.001, ditunjang dari kegiatan KIE Farmakovigilans, Monitoring evaluasi pelaporan KTD/ESO serta Advokasi kepada tenaga kesehatan.

1. KIE Farmakovigilans pada tanggal 19 Februari 2025 dilaksanakan sesuai jadwal walaupun di tengah efisiensi anggaran. Pelaksanaan KIE berdasarkan evaluasi

- pelaksanaan sosialisasi mampu meningkatkan Kompetensi Monitoring efek samping obat atau Farmakovigilans bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Hal ini turut menjadi awalan yang baik dan terbukti memberikan daya ungkit berupa awareness dari tenaga medis/tenaga kesehatan tentang pentingnya monitoring efek samping obat dan pelaporannya ke Badan POM yang sangat bermanfaat dalam mengungkap risiko keamanan suatu obat yang beredar di masyarakat.
2. Petugas aktif memonitor melalui penyampaian surat kepada tenaga kesehatan di sarana pelayanan kefarmasian/kesehatan untuk lebih aktif menggali informasi berkaitan dengan KTD kepada nakes. Selain itu, petugas juga terbuka menerima konsultasi terkait mekanisme pelaporan farmakovigilans.
 3. Melakukan edukasi dan advokasi lanjutan terkait KTD/ESO bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesinambungan pelaksanaan KIE Farmakovigilans agar pemahaman yang sudah disampaikan saat KIE tetap terjaga dengan baik
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap bulannya dan menyampaikan kepada sarana pelayanan kesehatan yang telah diintervensi.

Melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak pelaksanaan KIE, tercatat penambahan jumlah pelaporan pada bulan Juli 2025 sebanyak 1 laporan, Agustus 2025 sebanyak 1 laporan, dan Oktober 2025 sebanyak 7 laporan sehingga total jumlah laporan hingga akhir tahun mencapai 12 laporan.

Balai POM di Bengkulu selanjutnya menyampaikan Surat Apresiasi terhadap sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD /ESO serta surat untuk melaporkan kembali KTD/ESO kepala sarana pelayanan kesehatan kepada 12 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO:

1. PKM Anggut Atas
2. Klinik Well
3. RSHD
4. RS Tiara Sella
5. RSUD M Yunus
6. Puskesmas Sukamerindu
7. Klinik Andrew
8. Klinik sint Carolus
9. RS Bhayangkara
10. Klinik Lhay
11. Klinik Betiga Medika
12. RS Tino Galo

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ ESO	11.717.000	11.712.900	99,97	102,58 %	0,03	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,03 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO di BPOM Bengkulu. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO didukung oleh anggaran rincian output 3165.QDC.001 dengan pemanfaatan anggaran mencapai 99,97%, dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 11.717.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 11.712.900,-. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.03 yang tergolong kategori efisien.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan KIE farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara hybrid pada bulan Februari 2025, Monitoring evaluasi pelaporan KTD/ESO setiap bulannya, serta advokasi kepada tenaga kesehatan lainnya pada sarana pelayanan kesehatan baik melalui surat dan bersamaan pelaksanaan inspeksi rutin.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Balai POM di Bengkulu pada tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan diantaranya :

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Masih banyak tenaga kefarmasian yang belum memahami farmakovigilans. Kurangnya pemahaman farmakovigilans pada tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, bidan dll	Pelaksanaan KIE Farmakovigilans untuk sarana pelayanan kesehatan yang belum diintervensi pada tahun sebelumnya, dimana untuk peserta dapat lebih variatif terdiri dari tenaga farmasi dan medis lainnya.	Penjadwalan pelaksanaan KIE farmakovigilans untuk saryankes yang belum diintervensi dan yang belum melaporkan kasus KTD/ESO tahun 2025	Triwulan 1 - 2026	Y	O-04	Sarana pelayanan kesehatan tidak menyampaikan laporan KTD/ESO sehingga target persentase pelaporan tidak tercapai.

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Awareness tenaga kesehatan terkait pemahaman dan pelaporan KTD/ESO belum cukup memadai jika dikaitkan dengan peningkatan target IKU tahun 2026 untuk mempertahankan capaian	Melaksanakan advokasi dengan pihak pimpinan sarana pelayanan kesehatan untuk peningkatan awareness tenaga kesehatan terhadap kasus KTD/ESO dan melaporkannya	Melakukan advokasi dengan pimpinan saryankaes terkait urgensi pelaporan KTD/ESO dan mekanisme pelaporannya	TW IV 2026	Y	O-04	Sarana pelayanan kesehatan tidak menyampaikan laporan KTD/ESO sehingga target persentase pelaporan tidak tercapai.
	Sehubungan dengan adanya rotasi petugas tahun 2026, kompetensi petugas terkait Farmakovigilans belum merata	Peningkatan kompetensi petugas BPOM melalui pelatihan Farmakovigilans	Mengikuti pelatihan farmakovigilans bagi petugas BPOM	Triwulan 1 - 2026	Y	O-04	Kurangnya pemahaman petugas tentang farmakovigilans dan pelaporannya
	Sebagaimana progress tahun 2025, sarana yang melaporkan KTD/ESO pada awal tahun cenderung sedikit dan meningkat pada triwulan III atau IV disebabkan mulai terdeteksinya KTD/ESO	Penyempurnaan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjangkau kelemahan di setiap tahapan kegiatan dan pelaksanaan tindak lanjutnya	Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaporan KTD/ESO pada aplikasi e-Meso, pemberian apresiasi kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO	TW IV 2026	Y	O-04	Tidak tercapainya jumlah sarana yang melaporkan KTD/ESO

IKSS 1.3 - PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator kinerja **Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan** diukur melalui pemenuhan tindak lanjut atas sampel pangan olahan Berisiko yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Tindak lanjut yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai Pedoman Sampling serta pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus:

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan :

A : Kesesuaian target sampel

B : Kesesuaian parameter uji

C : Ketepatan pengambilan Kesimpulan

D : Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

E : Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

F : Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Dalam rangka memenuhi indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Balai POM di Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel pangan olahan yang diambil secara acak selama Tahun Anggaran 2025.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran realisasi indikator ini secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

A : Kesesuaian target sampel

Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
283,00	283,00	100,00	473,00	474,00	99,79	99,89

B : Kesesuaian parameter uji

Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
282,00	283,00	99,65

C : Ketepatan pengambilan Kesimpulan

Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
283,00	283,00	100,00

D : Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
283,00	283,00	100,00

E : Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
93,00	283,00	32,86

F : Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
11,00	12,00	91,67

Dari 6 komponen tersebut, selanjutnya diukur berdasarkan bobot per komponen dengan skala 100 dan dijumlahkan hingga diperoleh realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
99,89	99,65	100,00	100,00	32,86	91,67	91,53

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target 2025 sebesar 91,53 % sehingga diperoleh capaian sebesar 114,41 % (Tidak dapat disimpulkan)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %	91,53 %	114,41 %	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

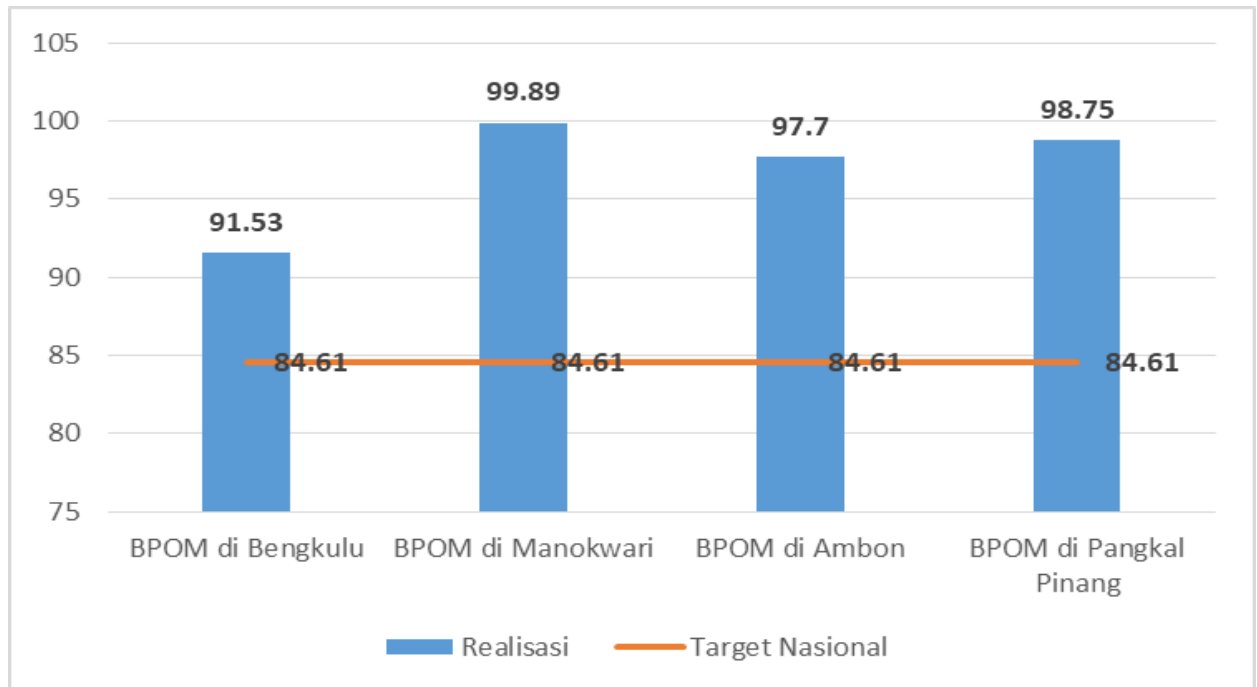
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, indikator ini belum memiliki data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja antarperiode belum dapat dilakukan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 %	91,53 %	104,01%	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 menunjukkan tingkat capaian sebesar **104,01%** dengan kriteria **tercapai/melampaui**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis

Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Manokwari dengan realisasi 99,89% dan yang terendah adalah Balai POM di Bengkulu dengan realisasi 91,53 %. Dibandingkan dengan target Nasional ke -4 Balai dalam kluster II sudah melampaui target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sebesar 114,41% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan oleh kurang tepatnya dalam penetapan target tahun 2025 yang terlalu rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh indikator kinerja ini masih tergolong baru sehingga masih memerlukan penyesuaian. Hal ini juga terlihat dari monitoring capaian terhadap target pertengahan periode renstra (2027) dengan persen capaian 108,96%, mendekati kriteria tidak dapat disimpulkan jika dihitung sebagai capaian tahun berjalan.

Namun, capaian ini pada prinsipnya menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator dimana realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Personel pengujian** (Man) yang kompeten dalam pengujian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang memadai secara berkala
- **Ketersediaan alat** (Machine) yang terstandar dan terkalibrasi. Meskipun pada pertengahan tahun terjadi kerusakan pada instrumen AAS dan HPLC yang sempat menghambat pelaksanaan pengujian, kondisi tersebut dapat diatasi melalui penyusunan jadwal pemakaian bersama instrumen AAS yang berada di Laboratorium Kosmetika. Selain itu, terdapat inovasi berupa aplikasi Simpan Kantor (Sistem Informasi untuk Permintaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) yang memungkinkan permintaan pemeliharaan dapat ditelusuri (tracking) secara lebih efektif. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengajuan permintaan pemeliharaan masih dilakukan melalui aplikasi Srikandi sehingga proses pengadaan jasa pemeliharaan sulit untuk dipantau perkembangannya.
- **Ketersediaan reagen, bahan operasional, suku cadang, serta bahan pendukung lainnya** (Material) dapat terjamin seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2025, fleksibilitas tersebut didukung oleh pemenuhan seluruh kebutuhan laboratorium melalui e-katalog (Inaproc), sehingga proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Kondisi ini berbeda dengan mekanisme pengadaan sebelumnya yang mengandalkan paket besar melalui proses lelang. Selain itu, baku pembanding dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan tetap mengutamakan kesesuaian spesifikasi terhadap metode analisis yang digunakan. Ketersediaan reagensia dan baku pembanding didukung melalui mekanisme sharing dengan balai POM lain serta P3OMN, sehingga memungkinkan terwujudnya efisiensi dan percepatan pemanfaatan reagensia dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling.
- **Dukungan anggaran** (Money) yang memadai tetap terjaga meskipun dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden pada awal tahun 2025. Penganggaran untuk PDD tidak mengalami pemotongan signifikan, sementara pengurangan anggaran perjalanan dinas dapat diatasi melalui pelaksanaan kegiatan secara daring dan hybrid, termasuk pada kegiatan reakreditasi KAN. Efisiensi tersebut tidak menghambat Balai POM di Bengkulu dalam memperoleh Reakreditasi ISO KAN 17025:2017 pada Juni 2025.
- **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) bulanan** (measurement) memungkinkan identifikasi permasalahan capaian kinerja dilakukan secara lebih cepat dan tepat, baik dari sisi keterbatasan alat, suku cadang, hingga ketersediaan bahan pendukung seperti reagensia, baku pembanding dan bahan pendukung lainnya.

- **Dukungan teknisi** terhadap berbagai instrumen berperan penting dalam penyelesaian permasalahan alat, serta didukung oleh keberadaan Balai Kalibrasi P3OMN dalam memastikan seluruh peralatan yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga disebabkan atas **pengendalian risiko yang telah dikelola dengan baik** sepanjang tahun 2025. Risiko yang telah dipetakan pada awal tahun berupa **overwork** penggunaan Microwave sebagai alat preparasi pengujian Logam berat untuk komoditi Pangan, OBA, SK, OK, dan Kosmetik yang berpotensi menyebabkan kerusakan alat dan mengganggu pencapaian *Time Line* Pengujian telah dikendalikan melalui :

1. Membuat Jadwal pemakaian alat laboratorium
2. Melakukan pemeliharaan dan pengecekan alat microwave secara berkala 1 tahun 2x
3. Pemeliharaan Internal dilakukan secara berkala setiap 3 bulan
4. Perencanaan pengadaan alat baru khusus microwave tahun 2026

Walaupun pengendalian dilakukan, kejadian risiko yaitu kerusakan microwave di laboratorium pangan tetap terjadi, namun risiko dapat diatasi dengan membuat jadwal pemakaian alat microwave laboratorium kosmetik, sehingga tujuan organisasi tetap tercapai bahkan tidak dapat disimpulkan dibuktikan dengan realisasi 114,41.

Namun demikian realisasi yang tinggi jauh melampaui target menunjukkan perlu penyesuaian target. Hal ini ditunjukkan juga dengan perbandingan dg target jangka menengah yg masih tinggi

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program kegiatan didukung oleh anggaran rincian output 3165.QIA.001 yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

- Adanya Program Inovasi Simpan Kantor yang merupakan sistem informasi yang memfasilitasi pengajuan pemeliharaan hingga pemantauan (tracking) proses pengajuan tersebut. Inovasi ini meningkatkan efektivitas pemeliharaan dengan memungkinkan proses yang sebelumnya tidak dapat ditelusuri menjadi dapat dipantau secara sistematis.
- Melaksanakan pelatihan internal pada komoditi pangan sebagai upaya meningkatkan dan menjaga kompetensi penguji melalui kegiatan *In House Training* berjudul “**Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen dalam Susu secara Spektrofotometri Serapan Atom dengan Hydride Vapour Generation (HVG-AAS)**” yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Selain itu, salah seorang penguji juga mengikuti pelatihan **Penetapan Kadar Simultan Pewarna pada Pangan Olahan secara KCKT-PDA** serta **Penetapan Kadar**

Migrasi Melamin pada Kemasan Pangan secara KCKT-UV yang diselenggarakan oleh BPOM di Jambi pada bulan Agustus 2025.

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan yang dilakukan oleh tim akuntabilitas dan perencana memungkinkan permasalahan terdeteksi dan ditanggulangi sedini mungkin.
- Program pengadaan reagen melalui e-katalog (Inaproc) memungkinkan bahan-bahan pengujian diadakan kapan saja sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- Pelaksanaan kegiatan verifikasi metode analisis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada awal tahun dan terealisasi sepenuhnya untuk seluruh metode yang direncanakan. Metode analisis yang diverifikasi meliputi:
 1. Penetapan Kadar Residu Kloramfenikol dalam Produk Olahan Ikan,
 2. Penetapan Kadar Natamisin dalam Keju,
 3. Penetapan Kadar Sianida dalam Keripik secara Titrasi Argentometri,
 4. Penetapan Kadar Vitamin A dalam Minyak Goreng secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT),
 5. Penetapan Kadar BHA dalam Minyak/ Lemak secara Kromatografi Cair kinerja Tinggi (KCKT)
 6. Penetapan Kadar Air dalam Garam Secara Gravimetri
 7. Identifikasi Pengawet Formalin pada Tahu
 8. Penetapan Kadar Asesulfam-K dalam Minuman secara KCKT
 9. Identifikasi Rhodamin B
 10. Penetapan Kadar Histamin dalam Produk Olahan Ikan
- Pelaksanaan verifikasi instrumen dilakukan melalui kegiatan kalibrasi oleh PPPOMN, kalibrasi oleh penyedia, serta verifikasi internal yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan terealisasi sebesar 100%. Verifikasi instrumen tersebut meliputi 3 unit Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), 1 unit Spektrofotometer Serapan Atom (AAS), 4 unit timbangan analitik, 2 unit timbangan Top Loading, 1 unit timbangan mikro dan 1 unit Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS).
- Pelaksanaan kalibrasi alat, cek antara timbangan, dan kegiatan verifikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik, guna menjamin hasil pengukuran yang dihasilkan oleh peralatan memberikan data yang valid, akurat, serta meminimalkan kebutuhan koreksi dalam proses pengujian.
- Pelaksanaan jaminan mutu hasil pengujian telah dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan uji banding antar personel. Uji banding tersebut dilakukan pada beberapa parameter pengujian, antara lain Penetapan Kadar Arsen dalam Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Penetapan Kadar Asesulfam K pada Minuman Berperisa, Penetapan Kadar BHA pada Minyak Goreng, Identifikasi Formalin pada Tahu, Penetapan Kadar Air pada Garam, serta beberapa parameter uji lainnya.
- Pengadaan suku cadang untuk peralatan AAS, HPLC, dan GC-MS telah dilaksanakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengujian, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian (timeline) pengujian dan meningkatkan efektivitas pelayanan laboratorium.

F. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	166.723.200,0	166.703.561,0	99,99 %	114,41 %	0,14 (masuk kategori 0-0,2)	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,14 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini didukung oleh anggaran rincian output 3165.Q1A.001 dengan pemanfaatan anggaran menunjang pencapaian target kinerja adalah Pengadaan alat, reagensia, Pembelian suku cadang untuk menunjang alat HPLC dan AAS, pemeliharaan peralatan secara berkala, pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan.

G. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Adapun tindak lanjut atau rekomendasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja adalah:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Banyaknya parameter uji yang harus dilakukan serta tingginya frekuensi penggunaan peralatan berpotensi meningkatkan risiko kerusakan alat. Selain itu, kapasitas microwave yang relatif kecil dan kondisinya yang sering mengalami gangguan turut menghambat kelancaran proses pengujian	Pengadaan alat baru (HPLC dan Microwave) untuk menunjang percepatan pengujian	Pelaksanaan pengadaan alat Lab HPLC dan Microwave	Triwulan 2- 2026	Y	O-02	Instrumen pengujian di laboratorium pangan tidak dapat digunakan karena rusak.

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Belum dilakukan inventarisir kebutuhan suku cadang untuk rencana sampling dan pengujian tahun 2026	Pelaksanaan perencanaan yang lebih baik dengan mulai menginventarisir suku cadang dari awal tahun sehingga pengujian berjalan lancar sepanjang tahun	Identifikasi kebutuhan suku cadang sesuai alokasi dan target sampel 2026 serta penentuan gap kekurangananya suku cadang	Triwulan 1 - 2026	T	-	-
	Terdapat perkembangan perkembangan pengujian dikaitkan dengan parameter uji 2026 sesuai pedoman sampling 2026 yang belum sepenuhnya diketahui pegawai	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan yang menunjang pengujian rutin di Balai POM di Bengkulu mengikuti update metode pengujian yang dipersyaratkan Pedoman Sampling 2026	Pelaksanaan In House Training 2026 Verifikasi Metode Penetapan Kadar Beta Karoten secara Spektrofotometri pada Minyak Goreng (115/PA/MA-PPOMN/21)	Triwulan 3 - 2026	T	-	-
	Kurangnya pemeliharaan alat tahun 2025 sehingga terdapat alat rusak seperti HPLC, microwave. dan AAS	Perencanaan pemeliharaan alat yang lebih terprogram sehingga kerusakan alat bisa dicegah sebaik mungkin	Pembuatan Jadwal pemeliharaan alat dan kalibrasi alat	Triwulan 1 - 2026	Y	O-01	Penyelesaian pengujian sampel sediaan pangan olahan melewati time line pengujian yang ditetapkan.
		Pengusulan peningkatan target menjadi 86 % pada tahun berikutnya					

IKSS 1.4 - PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI KETENTUAN

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai ketentuan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

Keterangan :

A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B : Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n : Total sampel

Dalam rangka memenuhi indikator kinerja 1.4 Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai ketentuan, Balai POM di Bengkulu melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel KLB keracunan pangan yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran realisasi indikator ini secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Target Indikator (%)	Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM	Realisasi (%)
100,00	9	9	100

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target 2025 sebesar 100 % sehingga diperoleh capaian sebesar 100 % (Sangat Baik)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100 %	100 %	Baik

Sepanjang tahun 2025, terjadi dua Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). KLB KP pertama terjadi di Kota Bengkulu pada bulan Juli 2025 yang bersumber dari acara

hajian warga, dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 5 sampel pangan. Sampel tersebut meliputi ayam goreng, ikan masak asam pade, sambal hijau, cabai giling rawit (hijau), serta air sumur yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Berdasarkan hasil wawancara epidemiologi, bihun diduga sebagai salah satu penyebab KLB KP, namun sampel tersebut tidak dapat diperoleh karena telah habis pada saat pengambilan sampel.

KLB KP kedua terjadi di Kabupaten Lebong pada bulan Agustus 2025, dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 4 sampel pangan yang berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu bakso, mi, tahu, dan capcay. Seluruh sampel dari kedua kejadian tersebut telah dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

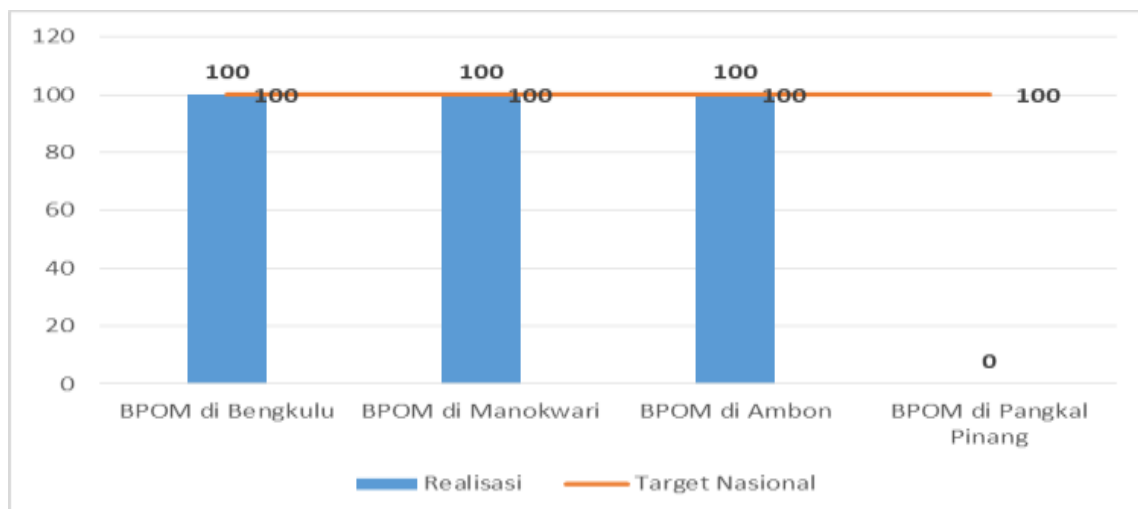
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, indikator ini belum memiliki data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja antarperiode belum dapat dilakukan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %	100 %	100	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 menunjukkan tingkat capaian sebesar **100,0%** dengan kriteria **tercapai/melampaui**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.6. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Berdasarkan data yang disajikan, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Manokwari, dan Balai POM di Ambon masing-masing telah melaksanakan pengujian sampel KLB keracunan pangan dengan tingkat penyelesaian mencapai 100% sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penerimaan, pengujian, hingga pelaporan hasil pengujian sampel KLB di masing-masing Balai telah berjalan optimal dan tepat waktu. Hal ini juga mencerminkan kesiapsiagaan laboratorium serta koordinasi yang baik dalam mendukung upaya respons cepat terhadap kejadian KLB pangan di wilayah kerja masing-masing.

Sementara itu, Balai POM di Pangkal Pinang pada periode pelaporan ini tidak melaksanakan pengujian sampel KLB, yang disebabkan tidak adanya kejadian KLB keracunan pangan yang memerlukan pengujian laboratorium di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, capaian pengujian sampel KLB dari berbagai Balai menunjukkan kinerja pengawasan pangan yang responsif dan efektif, serta mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui penanganan KLB secara cepat, akurat, dan sesuai standar.

Jika dibandingkan dengan target Nasional maka dari ke-3 balai dalam kluster II sudah sesuai dengan target Nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sebesar 100,0 % menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator, Penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Personel (Man) pemeriksaan dan pengujian yang kompeten telah disiapkan dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan melalui pelatihan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan dan berbagai pelatihan In House Training. Penanganan yang cepat dan tepat terlihat dari:
 - a. Kemampuan penanganan sampel yang didapat dari lokasi kejadian KLB keracunan pangan
 - b. Pelaksanaan investigasi lapangan yang dilakukan sesuai pedoman penanganan KLB Keracunan Pangan melalui prosedur yang terarah dan memadai yaitu pengumpulan informasi primer, antara lain wawancara terhadap korban dan pihak terkait untuk mengetahui jenis pangan yang dikonsumsi, gejala yang timbul, serta rentang waktu antara konsumsi pangan dan terjadinya gejala keracunan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penentuan dugaan agen penyebab serta penetapan parameter uji yang relevan.
 - c. Kemampuan dan keterampilan penguji dalam melaksanakan pengujian laboratorium sesuai standar ISO 17025.
- Adanya prosedur yang jelas dan dilengkapi batasan standar (mutu baku) pada setiap tahapan penanganan KLB KP sesuai SOP Mikro Balai POM d Bengkulu Penanganan Sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Nomor POM-03.02/CFM.03/SOP.02/IK.2B.01
- Dukungan Ketersediaan alat (Machine) yang terstandar serta dukungan pemeliharaan secara berkala, verifikasi instrumen dan terkalibrasi secara berkala untuk memastikan ketepatan pengukuran.
- Ketersediaan reagen, bahan operasional, suku cadang, serta bahan pendukung lainnya (Material) yang terjamin seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pelaksanaan anggaran.
- Dukungan anggaran (money) yang memadai tetap terjaga meskipun dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden pada awal tahun 2025. Pelaksanaan pengadaan bahan dan reagensia untuk sampel target pengawasan rutin telah mempertimbangkan potensi parameter uji deteksi keracunan pangan berdasarkan riwayat sebelumnya
- Kecepatan respon petugas yang diikuti analisis penentuan parameter uji dugaan penyebab KLB dan pelaksanaan monitoring penyelesaian pengujian sampel secara berkala dalam menjawab penyebab keracunan pangan.
- Tingginya respon dari petugas Balai POM turut berdampak pada dukungan dan kerja sama yang maksimal dari Dinas Kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan kejadian keracunan pangan (KLP/KP) yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini tercermin melalui koordinasi dalam pengawasan keamanan pangan, pelaporan dan penanganan kasus, serta pelaksanaan

edukasi kesehatan kepada masyarakat guna menurunkan risiko kejadian serupa di masa mendatang.

Pengendalian risiko yang maksimal

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengendalian risiko yang dikelola secara efektif sepanjang tahun 2025. Risiko yang telah dipetakan pada awal tahun, yaitu keterbatasan kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian terhadap beberapa parameter uji pada kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan, telah berhasil dikendalikan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Melakukan evaluasi kemampuan uji terhadap parameter pengujian KLB Keracunan Pangan sesuai dengan pedoman pengujian yang berlaku
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terkait permohonan arahan mengenai kemampuan pengujian parameter Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui surat Nomor **B-PP.02.2B.07.25.665** tanggal **16 Juli 2025** tentang *Permohonan Arahan terkait Kemampuan Uji Parameter sesuai Pedoman Investigasi Epidemiologi, Pengambilan dan Pengujian Sampel Pangan pada KLB Keracunan Pangan*.
3. Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait pemenuhan dan kesesuaian parameter uji KLB Keracunan Pangan.

Pengendalian berbasis risiko juga dilakukan pada **risiko baru yang muncul dan belum teridentifikasi pada awal tahun 2025**. Pada pelaksanaan penanganan KLB KP di kelurahan Padang Serai kecamatan Kampung Melayu .Kota Bengkulu pada bulan Juli 2025, terdapat kendala berupa keterlambatan penerimaan informasi KLB, dimana laporan baru diterima sekitar dua hari setelah kejadian. Kondisi tersebut mengakibatkan pangan yang diduga sebagai penyebab KLB sudah tidak tersedia untuk dilakukan sampling. Meskipun demikian, petugas pemeriksaan tetap melakukan **langkah alternatif** sebagai bentuk **mitigasi risiko**, yaitu dengan melakukan pengambilan sampel air yang digunakan dalam proses pengolahan pangan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa air tersebut tercemar *Escherichia coli*, sehingga tetap diperoleh informasi penting terkait sumber risiko yang berpotensi menyebabkan kejadian keracunan pangan.

Upaya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada ketersediaan sampel pangan, tetapi juga mengedepankan pendekatan investigatif yang adaptif dan berbasis risiko, sehingga tetap dapat mendukung efektivitas pengujian laboratorium dan ketepatan penetapan tindak lanjut dalam penanganan KLB Keracunan Pangan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dengan dukungan anggaran rincian output 3165.QIA.001 adalah:

- Pembentukan **Tim Gerak Cepat Penanganan KLB Keracunan Pangan** sesuai Surat Keputusan Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor. HK.02.02.2B.05.068 TAHUN 2025 tentang Penunjukan Tim Gerak Cepat (TGC) Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu **Yang melibatkan substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Infokom**
- Pelaksanaan respon cepat tim penanganan KLB yang bekerja secara maksimal dalam melakukan skrining awal terhadap dugaan agen penyebab terjadinya KLB keracunan pangan melalui :
 - a. **Koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit** dalam penanganan kasus keracunan pangan yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
 - b. Pelaksanaan observasi lokasi tempat memasak produk pangan yang menjadi sumber penyebab keracunan
 - c. Wawancara terhadap korban keracunan pangan untuk mengidentifikasi onset dan gejala yang ditimbulkan dalam upaya mencari dugaan agen penyebab keracunan
 - d. Pelaksanaan pengambilan sampel sisa produk pangan olahan yang diduga menjadi penyebab keracunan
- Analisis dan penentuan parameter uji dari setiap sampel yang diduga menjadi sumber penyebab keracunan sesuai dengan Referensi Penentuan Sumber dan Etiologi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Pedoman Investigasi Epidemiologi, Pengambilan dan Pengujian Sampel Pangan pada KLB Keracunan Pangan yang dikeluarkan Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan tahun 2023.
- Pelaksanaan pengujian sampel produk pangan sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dan terpenuhi timeline sesuai SOP.
- Penyampaian tindak lanjut hasil pelaksanaan keracunan dengan bersurat ke pemangku kepentingan memuat agen penyebab keracunan pangan.
- Pendokumentasian dan pelaporan secara tertib melalui Sistem Informasi Keracunan (SIKER).
- Pada semester awal Tahun 2025, seluruh penguji mengikuti kegiatan E-Learning Pengujian Kimia dengan Test Kit yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan melalui aplikasi IDEAS. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penguji dalam penggunaan test kit sebagai metode skrining awal untuk penentuan agen penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
- Bimbingan teknis (bimtek) keamanan pangan bagi 22 peserta pelaku usaha pangan siap saji yang menyediakan jasa katering untuk hajatan masyarakat di aula kantor Balai POM, dengan mengundang Dinas Kesehatan sebagai narasumber materi

Sertifikat Laik Sehat, sebagai upaya pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada tanggal 14 agustus 2025.

- Bersama Badan Gizi Nasional, melaksanakan Bimbingan teknis sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan bimtek penjamah makanan untuk SPPG se-provinsi Bengkulu pada bulan oktober 2025. Kegiatan dihadiri oleh sedikitnya 2100 perwakilan SPPG di Provinsi Bengkulu.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi (TE)	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	83.361.600,0	83.351.780,0	99,99	100,0	0,00 (masuk kategori 0-0,2)	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,00 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT. Pencapaian indikator ini didukung anggaran tincian output 3165.QIA.001 dengan **pemanfaatan anggaran** berupa pengadaan alat, reagensia, dan pemeliharaan peralatan secara berkala, pelaksanaan sampling dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Adapun tindak lanjut atau rekomendasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja adalah:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Belum optimalnya Tim Gerak Cepat penanganan KLB keracunan	Penguatan dan optimalisasi Tim Gerak Cepat Penanganan KLB Keracunan Pangan	Penyusun TGR 2026	TW II	Y	R-1	Tindak lanjut sampel KLB-KP tidak dapat menemukan agen penyebab KLB-KP

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Belum dilakukan inventarisir kebutuhan reagen dan media mikro untuk rencana pengujian sampel KLB tahun 2026	Pelaksanaan perencanaan yang lebih baik dengan mulai menginventarisir reagen dan media mikro dari awal tahun sehingga pengujian berjalan lancar sepanjang tahun	Identifikasi kebutuhan reagen dan media mikro sesuai alokasi dan target sampel 2026	Triwulan 2 - 2026	Y	O-03	Ketersediaan reagensia tidak mencukupi untuk pengujian sampel pada awal tahun
	Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pengujian agen penyebab KLP Keracunan Pangan di Balai POM di Bengkulu mengikuti update metode pengujian yang dipersyaratkan Pedoman Pengujian KLP –KP	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan yang menunjang pengujian agen penyebab KLP Keracunan Pangan di Balai POM di Bengkulu mengikuti update metode pengujian yang dipersyaratkan Pedoman Pengujian KLP –KP	Mengikuti pelatihan terkait KLP KP	Triwulan 3 - 2026	T	-	-
	Kurangnya pemeliharaan alat tahun 2025 sehingga terdapat alat rusak seperti HPLC, microwave. dan AAS	Perencanaan pemeliharaan alat yang lebih terprogram sehingga kerusakan alat bisa dicegah sebaik mungkin	Membuat jadwal pemeliharaan alat	Triwulan 1 - 2026	Y	O-02	Instrumen pengujian di laboratorium pangan tidak dapat digunakan karena rusak.

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor khususnya pada aspek deteksi dan pelaporan dini, dirasakan masih kurang alur komunikasi dan pelaporan cepat antara fasyankes, Dinas Kesehatan, dan Balai POM menjadi penting agar investigasi lapangan dan pengambilan sampel dapat dilakukan secara tepat waktu sebelum bukti tidak lagi tersedia.	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan, khususnya pada aspek deteksi dan pelaporan dini.	koordinasi linsek terkait TIM KLB dengan instansi terkait : 1. Deteksi Dini, melalui identifikasi 2 orang dengan gejala sama di Faskes (PKM, Bidan, RS) 2. Alur Komunikasi yang cepat dan tepat, dalam upaya mencegah bukti tidak lagi tersedia 3. Pelaporan KLB KP	Triwulan 1 - 2026	Y	R-1	Tindak lanjut sampel KLB-KP tidak dapat menemukan agen penyebab KLB-KP

IKSS 1.5 - PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan dihitung dengan rumus:

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan :

A : Kesesuaian target sampel PIRT

B : Kesesuaian parameter uji

C : Ketepatan pengambilan Kesimpulan

D : Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian

E : Tindak lanjut sampel PIRT

Dalam rangka memenuhi indikator kinerja 1.5 persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Balai POM di Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel PIRT yang diambil secara acak selama Tahun Anggaran 2025.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran realisasi indikator ini secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemenuhan target sampel PIRT (20 %)

Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** **Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
24,*	37**	37**	100

Keterangan : * Sampel Balai

** Sampel balai + loka pom rejang lebong

b. Kesesuaian Parameter Uji (20 %)

Jumlah sampel sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
24	24	100

c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (20 %)

Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
24	24	100

d. Ketepatan waktu Pengambilan Sampel (10 %)

Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
24	24	100,00

e. Ketepatan waktu pelaporan (10 %)

Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
12	24	50,00

f. Tindak lanjut sampel PIRT (20 %)

Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
3	3	100,00

Dari 6 komponen tersebut, selanjutnya diukur berdasarkan bobot per komponen dengan skala 100 dan dijumlahkan hingga diperoleh realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi
100	100	100	100	50	100	95,00

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target 2025 sebesar 95,0% sehingga diperoleh capaian sebesar 111,76 % (Tidak dapat disimpulkan)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	95 %	111,76 %	Tidak dapat disimpulkan

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai ditetapkan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, indikator ini belum memiliki data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja antarperiode belum dapat dilakukan.

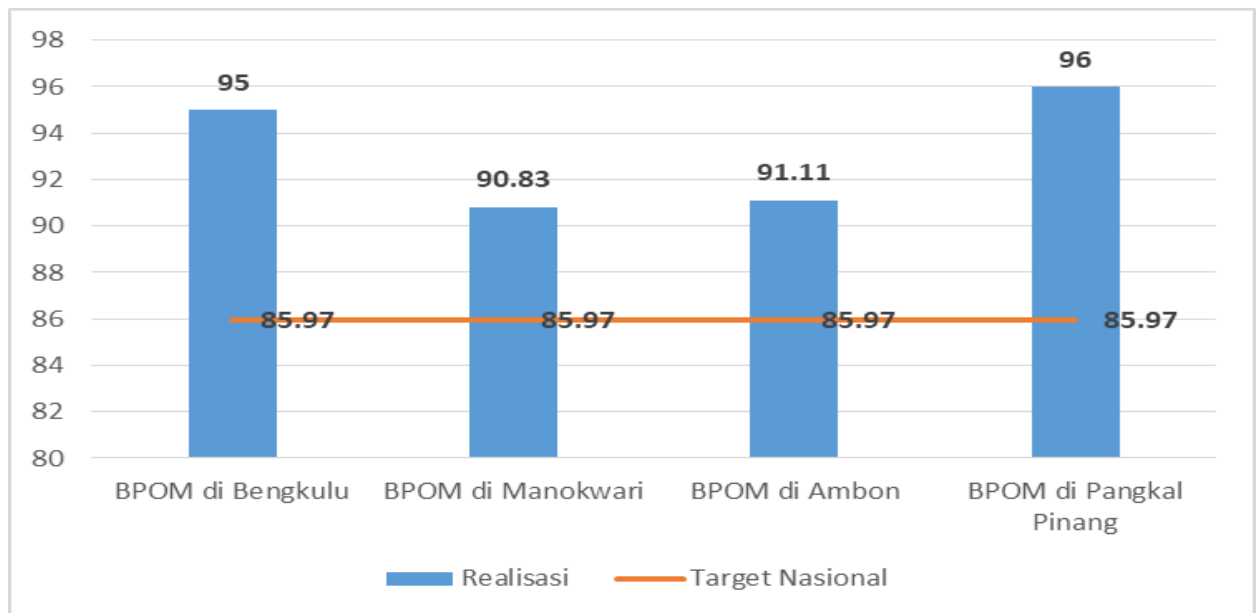
Pada Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, sampel PIRT **belum dipisahkan** secara khusus dan masih tergabung dalam indikator pengawasan sampel pangan olahan secara keseluruhan. Sementara itu, mulai Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025–2029, pengawasan **sampel PIRT berisiko** ditetapkan sebagai indikator kinerja tersendiri, sehingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerjanya dilakukan secara lebih terfokus dan terukur.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %	95,0 %	100,0	Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 91,53%, melampaui target Tahun 2027 sebesar 89%, dengan capaian kinerja sebesar 106,74%. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini masuk dalam **kriteria** tercapai/melampaui.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.7. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel Pangan IRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Balai POM di Bengkulu mencatat realisasi tertinggi ke-2 dengan realisasi 95,0%, di bawah Balai POM di Pangkalpinang (96%). Realisasi Balai POM di Bengkulu mengungguli Balai POM di Manokwari sebesar 90,83% dan Balai POM di Ambon sebesar 91,11%.

Realisasi indikator Persentase Sampel Pangan IRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Balai POM di Bengkulu mencapai **95,0%**, lebih tinggi dibandingkan Target Nasional sebesar **85,97%**, dengan selisih capaian sebesar **9,03 poin persentase**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Bengkulu telah melampaui standar nasional yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan balai sejenis, realisasi Balai POM di Bengkulu berada pada peringkat kedua setelah Balai POM di Pangkal Pinang (96%), serta lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Manokwari (90,83%) dan Balai POM di Ambon (91,11%). Secara keseluruhan, seluruh balai yang dibandingkan telah melampaui Target Nasional, namun capaian Balai POM di Bengkulu menunjukkan konsistensi pengawasan yang efektif dan responsif dalam menindaklanjuti sampel pangan IRT berisiko.

Realisasi di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta komitmen Balai POM di Bengkulu dalam menindaklanjuti temuan sampel PIRT berisiko masih tergolong lebih cepat dan sesuai prosedur dibanding Balai lain sejenis. Hasil ini juga mencerminkan koordinasi yang baik antara kegiatan pengambilan sampel, pengujian, dan tindak lanjut, sehingga upaya perlindungan masyarakat dari risiko pangan olahan dapat terlaksana secara optimal

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sebesar 111,76 % (tidak dapat disimpulkan) disebabkan oleh kurang tepatnya dalam penetapan target tahun 2025 yang terlalu rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh indikator kinerja ini masih tergolong baru sehingga masih memerlukan penyesuaian. Hal ini juga terlihat dari monitoring capaian terhadap target jangka menengah dengan persen capaian 106,74%, mendekati kriteria tidak dapat disimpulkan jika dihitung sebagai capaian tahun berjalan.

Namun, capaian ini pada prinsipnya menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator dimana realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Personel pengujian** (Man) yang kompeten dalam pengujian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang memadai secara berkala
- **Ketersediaan alat** (Machine) yang terstandar dan terkalibrasi. Meskipun pada pertengahan tahun terjadi kerusakan pada instrumen AAS dan HPLC yang sempat menghambat pelaksanaan pengujian, kondisi tersebut dapat diatasi melalui penyusunan jadwal pemakaian bersama instrumen AAS yang berada di Laboratorium Kosmetika. Selain itu, terdapat inovasi berupa aplikasi Simpan Kantor (Sistem Informasi untuk Permintaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) yang memungkinkan permintaan pemeliharaan dapat ditelusuri (tracking) secara lebih efektif. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengajuan permintaan pemeliharaan masih dilakukan melalui aplikasi Srikandi sehingga proses pengadaan jasa pemeliharaan sulit untuk dipantau perkembangannya.
- **Ketersediaan reagen, bahan operasional, suku cadang, serta bahan pendukung lainnya** (Material) dapat terjamin seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2025, fleksibilitas tersebut didukung oleh pemenuhan seluruh kebutuhan laboratorium melalui e-katalog (Inaproc), sehingga proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Kondisi

- ini berbeda dengan mekanisme pengadaan sebelumnya yang mengandalkan paket besar melalui proses lelang.
- **Dukungan anggaran** (Money) yang memadai tetap terjaga meskipun dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden pada awal tahun 2025.
 - **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) bulanan** (measurement) memungkinkan identifikasi permasalahan capaian kinerja dilakukan secara lebih cepat dan tepat, baik dari sisi keterbatasan alat, suku cadang, hingga ketersediaan bahan pendukung seperti reagensia, baku pembanding dan bahan pendukung lainnya.
 - **Dukungan teknis** terhadap berbagai instrumen berperan penting dalam penyelesaian permasalahan alat, serta didukung oleh keberadaan Balai Kalibrasi P3OMN dalam memastikan seluruh peralatan yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain dari aspek pengujian laboratorium, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan juga didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan dan sampling yang konsisten sesuai pedoman. Penentuan sampel PIRT berisiko dilakukan menggunakan metode targeted sampling berbasis analisis risiko, dengan mengacu pada data hasil pengawasan sebelumnya, tingkat kepatuhan sarana, serta potensi risiko produk. Pelaksanaan sampling dilakukan oleh petugas pemeriksa yang kompeten dan berpedoman pada ketentuan teknis yang berlaku.

Seluruh sampel PIRT yang diambil selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan, baik melalui pengujian laboratorium maupun penerapan langkah tindak lanjut terhadap hasil pengujian, termasuk rekomendasi perbaikan, pembinaan, maupun penindakan apabila diperlukan. Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksa dan penguji laboratorium memastikan ketepatan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, serta ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Indikator kinerja ini dihitung menggunakan formula komposit yang mencerminkan keterpaduan seluruh tahapan pengawasan, mulai dari kesesuaian penetapan target sampel PIRT berisiko, ketepatan penentuan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian, hingga ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan. Pendekatan ini memastikan bahwa capaian indikator kinerja tidak hanya menggambarkan jumlah sampel yang diuji, tetapi juga mencerminkan kualitas proses pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengendalian risiko indikator kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga disebabkan atas pengendalian risiko yang telah dikelola dengan baik sepanjang tahun 2025. Risiko yang telah dipetakan pada awal tahun berupa pola tindak lanjut terkait hasil pengujian TMS pada sampel PIRT yang berpotensi tidak terlaksana tepat waktu, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber produsen yang tidak lengkap pada label dan kode PIRT yang sudah tidak berlaku.

Pengendalian risiko dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

1. Koordinasi dengan tempat penjualan sampel untuk memperoleh informasi asal produk dan supplier terkait.
2. Konfirmasi kode PIRT yang dimaksud melalui UPT asal daerah atau Dinas Kesehatan setempat.
3. Pengiriman surat permohonan tindak lanjut hasil uji TMS kepada UPT wilayah sumber, yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk pembinaan PIRT.

Dengan langkah-langkah pengendalian ini, seluruh sampel PIRT tetap dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga pencapaian indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti melebihi target sekaligus menunjukkan efektivitas dan kesinambungan proses pengawasan sepanjang tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, didukung oleh anggaran rincian output **3165.QIA.001** dari sisi pemenuhan pengujian laboratorium adalah:

- Adanya Program Inovasi Simpan Kantor yang merupakan sistem informasi yang memfasilitasi pengajuan pemeliharaan hingga pemantauan (tracking) proses pengajuan bahan, media dan reagen yang diperlukan. Inovasi ini meningkatkan efektivitas pemeliharaan sarana/prasarana laboratorium dengan memungkinkan proses yang sebelumnya tidak dapat ditelusuri menjadi dapat dipantau secara sistematis.
- Melaksanakan pelatihan internal pada komoditi pangan sebagai upaya meningkatkan dan menjaga kompetensi penguji melalui kegiatan *In House Training* berjudul **“Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen dalam Susu secara Spektrofotometri Serapan Atom dengan *Hydride Vapour Generation* (HVG-AAS)”** yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Selain itu, salah seorang penguji juga mengikuti pelatihan **Penetapan Kadar Simultan Pewarna pada Pangan Olahan secara KCKT-PDA** serta **Penetapan Kadar Migrasi Melamin pada Kemasan Pangan secara KCKT-UV** yang diselenggarakan oleh BPOM di Jambi pada bulan Agustus 2025.
- Program pengadaan reagen melalui e-katalog (Inaproc) memungkinkan bahan-bahan pengujian, termasuk peruntukan sampel PIRT diadakan kapan saja sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- Pelaksanaan kegiatan verifikasi metode analisis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada awal tahun dan terealisasi sepenuhnya untuk seluruh metode yang direncanakan. Metode analisis yang diverifikasi meliputi Penetapan Kadar Air dalam Garam secara Gravimetri, Identifikasi Rhodamin B dan Penetapan Kadar Sianida dalam Keripik secara Titrasi Argentometri, serta beberapa metode analisis lainnya.
- Pelaksanaan verifikasi instrumen dilakukan melalui kegiatan kalibrasi oleh PPPOMN, kalibrasi oleh penyedia, serta verifikasi internal yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan terealisasi sebesar 100%. Verifikasi instrumen tersebut meliputi peralatan Kromatografi Cair

Kinerja Tinggi (KCKT), Spektrofotometer Serapan Atom (AAS), timbangan analitik, dan Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS).

- Pelaksanaan kalibrasi alat, cek antara timbangan, dan kegiatan verifikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik, guna menjamin hasil pengukuran yang dihasilkan oleh peralatan memberikan data yang valid, akurat, serta meminimalkan kebutuhan koreksi dalam proses pengujian.
- Pengadaan suku cadang untuk peralatan AAS, HPLC, dan GC-MS telah dilaksanakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengujian sampel PIRT, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian (timeline) pengujian dan meningkatkan efektivitas pelayanan laboratorium.

Selain dari aspek pengujian laboratorium, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan juga didukung oleh pelaksanaan tugas fungsi pemeriksaan dan sampling:

1. Penyusunan perencanaan sampling berbasis risiko, yang mempertimbangkan data hasil pengawasan sebelumnya, tingkat kepatuhan sarana, serta potensi risiko produk. Hal ini turut memberikan output sampel yang akan dilakukan evaluasi adalah sampel yang memiliki risiko keamanan lebih besar bagi masyarakat. Realisasi sampling tahun 2025 memenuhi target yang ditetapkan sebesar 24 Sampel PIRT. Sampel tersebut mencakup berbagai kelompok pangan berisiko sesuai pedoman sampling berbasis risiko, dengan rincian meliputi hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata sebanyak 4 sampel; hasil olahan unggas dan telur 1 sampel; hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut 2 sampel; tepung dan hasil olahannya 4 sampel; gula, kembang gula, dan cokelat 6 sampel; kopi dan teh kering 1 sampel; bumbu dan rempah 1 sampel; minuman serbuk dan botanika 3 sampel; serta hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi sebanyak 2 sampel. Distribusi jenis sampel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sampling telah dilakukan secara terarah dan proporsional sesuai dengan prioritas risiko pangan. Setiap kategori PIRT dapat tersampling sesuai kategori dan jumlahnya masing-masing.
2. Pelaksanaan inspeksi dan sampling telah dilakukan dengan konsisten sesuai pedoman. Penentuan sampel PIRT berisiko dilakukan menggunakan metode targeted sampling berbasis analisis risiko yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan sampling dilakukan oleh petugas pemeriksa yang kompeten melalui pelatihan keamanan pangan dan inspektur pangan serta berpedoman pada ketentuan teknis yang berlaku.
3. Evaluasi penandaan/label sampel PIRT sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Melalui evaluasi penandaan, sampel dapat dikategorikan lebih awal memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi persyaratan. Untuk sampel yang tidak memenuhi persyaratan, tindak lanjut dilakukan melalui pengiriman surat kepada pihak berwenang. Sampel dalam wilayah kerja ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Dinas Kesehatan setempat yang memiliki kewenangan dalam perizinan PIRT. Pada sampel produk PIRT yang diproduksi di luar wilayah kerja, dikomunikasikan melalui BPOM/Loka setempat agar diteruskan ke Dinas

Kesehatan setempat untuk pembinaan atau tindakan lanjutan. Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan ke Dinkes di luar propinsi Bengkulu diantaranya:

- Sampel Keripik Pisang Rasa Coklat, diproduksi di kabupaten Rejang Lebong
 - Sampel keripik Pisang SG, diproduksi di Kabupaten Rejang Lebong
 - Sampel Gula Merah, diproduksi di Jambi.
4. Pelaksanaan tindak lanjut sampel PIRT sesuai ketentuan yang tertera pada pedoman pada Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dan Pedoman Tindak Lanjut Keamanan Pangan Olahan, baik melalui pengujian laboratorium maupun penerapan langkah tindak lanjut terhadap hasil pengujian, termasuk rekomendasi perbaikan, pembinaan, maupun penindakan apabila diperlukan. Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksa dan penguji laboratorium memastikan ketepatan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, serta ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pendekatan yang sistematis ini memastikan seluruh tahap pengawasan, mulai dari perencanaan, pengambilan sampel, evaluasi, hingga tindak lanjut, dapat terlaksana secara konsisten dan tepat waktu, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja yang optimal.

Indikator kinerja ini dihitung menggunakan formula komposit yang mencerminkan keterpaduan seluruh tahapan pengawasan, mulai dari kesesuaian penetapan target sampel PIRT berisiko, ketepatan penentuan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian, **hingga** ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian **serta** pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan. Pendekatan ini memastikan bahwa capaian indikator kinerja tidak hanya menggambarkan jumlah sampel yang diuji, tetapi juga mencerminkan kualitas proses pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.361.600,0	83.351.780,0	99,99 %	111,76 %	0,12	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,12 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan. Pencapaian indikator ini didukung anggaran rincian output 3165.QIA.001 dengan pemanfaatan anggaran berupa Pengadaan alat, reagensia, Pembelian suku cadang untuk menunjang alat HPLC dan AAS , pemeliharaan peralatan secara berkala, pelaksanaan sampling dan pengujian PIRT,

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Adapun tindak lanjut atau rekomendasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja adalah

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Berdasarkan implementasi tahun 2025, terdapat sampel PIRT yang tidak dapat ditindaklanjuti karena Informasi produsen pada label produk tidak lengkap/tidak sesuai, adanya pedagang perantara sehingga identitas produsen tidak dapat tertelusur, produsen PIRT sudah tidak aktif berusaha namun produknya masih beredar di pasaran.	Penetapan perencanaan sampling PIRT berbasis resiko, dengan berkoordinasi dengan dinkes penerima DAK terkait hasil pengujian PIRT	Penyusunan Renlak PIRT berbasis resiko	Tw I	Y	S-01	Sampel PIRT berisiko hasil pengujian tidak dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
	ketidak sinkronan sampling dan penyelesaian pengujian atas sampel yang disampling	Penguatan koordinasi antara petugas sampling dan petugas laboratorium	Penyusunan renlak dilakukan bersama antara petugas pemeriksaan dan pengujian	Tw 1			

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Kapasitas microwave yang terbatas tidak mampu mengakomodasi kebutuhan percepatan pengujian, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan proses pengujian	Pengadaan alat Microwave dengan kapasitas yang besar untuk menunjang percepatan pengujian	Pelaksanaan pengadaan alat Lab Microwave dengan kapasitas yang lebih besar	Triwulan 2 - 2026	T	-	-
	Belum dilakukan inventarisir kebutuhan suku cadang untuk rencana sampling dan pengujian tahun 2026	Pelaksanaan perencanaan yang lebih baik dengan mulai menginventarisir suku cadang dari awal tahun sehingga pengujian berjalan lancar sepanjang tahun	Identifikasi kebutuhan suku cadang sesuai alokasi dan target sampel 2026 serta penentuan gap kekurangan nya suku cadang	Triwulan 1 - 2026	T	-	-
	Terdapat update metode pengujian sesuai persyaratan pedoman sampling 2026 yang belum cukup diketahui penguji	Peningkatan kompetensi petugas dengan melakukan pelatihan yang menunjang pengujian rutin di Balai POM di Bengkulu mengikuti update metode pengujian yang dipersyaratkan Pedoman Sampling 2026	Mengikuti pelatihan	Triwulan 2 - 2026	T	-	-
	Tingginya beban operasional alat lab berdasarkan rencana sampling tahun	Perencanaan pemeliharaan alat yang lebih terprogram sehingga	Membuat jadwal pemeliharaan alat	Tw 1	Y	O-02	Intsrumen pengujian di laboratorium pangan tidak dapat digunakan

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	2026 yang berisiko pada kerusakan alat	kerusakan alat bisa dicegah sebaik mungkin					n karena rusak.
	Gap antara capaian tahun 2025 dengan target yang cukup besar	Pengusulan peningkatan target menjadi 90 % pada tahun berikutnya	penyesuaian target tahun 2026	Tw 1/Tw 2			

IKSS – 1.6 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi SK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

- (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%
- (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n.

$$\%B3 = (\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}) / (\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}) \times 100\%$$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	99,91	109,79	Sangat baik

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan petugas fungsi pemeriksaan Balai POM di Bengkulu dalam koordinasi lintas sektor dan pendampingan penyelesaian CAPA pelaku usaha dimana Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor sebanyak 6 rekomendasi dengan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor juga berjumlah 6 rekomendasi sehingga persentase realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100 %. Sementara Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha Obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan sebanyak 214 rekomendasi dengan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan berjumlah 213 rekomendasi sehingga persentase realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 99,82 %. Sehingga Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2015 dengan realisasi sebesar 99,91 %, dan capaian sebesar 109,79 % dengan kriteria sangat baik

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan adanya perbedaan nama indikator dan definisi operasional, dimana pada Manual Indikator Kinerja Tahun 2021-2024 indikator keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

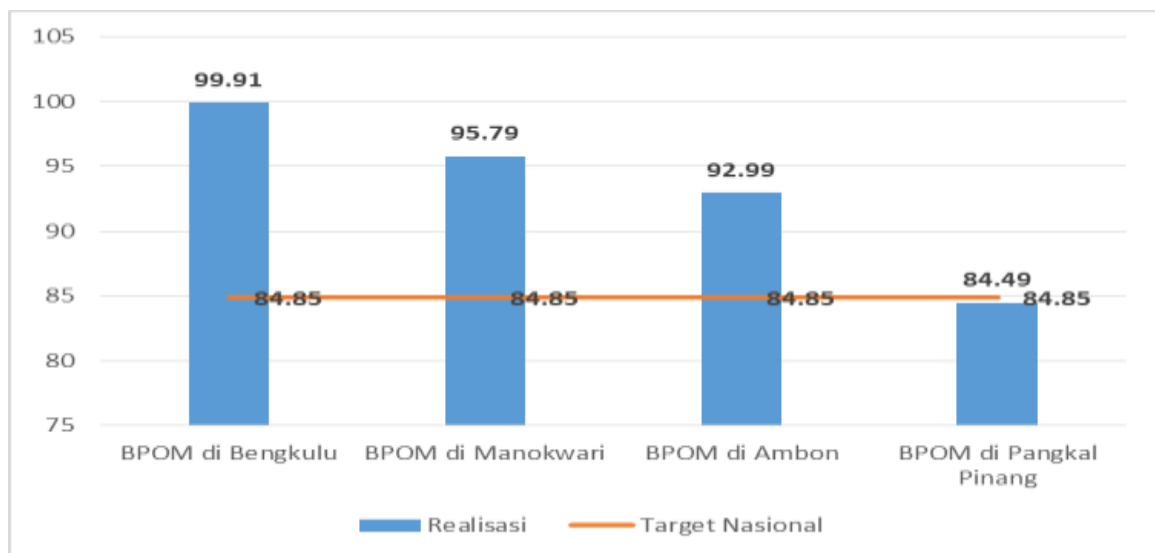
- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95	99,91	105,17	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99,91 % jika di bandingkan dengan target dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra 2025-2029 target tahun 2029 sebesar 95% maka target 2029 tergolong tercapai/terlampaui dengan capaian 105,17%, sehingga diperlukan kinerja yang baik agar realisasi target di 2029 jangka menengah tetap bisa tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Manokwari, Ambon, dan Pangkal Pinang. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa realisasi Balai POM di

Bengkulu merupakan yang tertinggi dengan nilai 99,91%. Dengan demikian, pelaksanaan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan atas keputusan/rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Bengkulu merupakan yang terbaik dibanding Balai lain dalam klaster yang sama.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 telah tercapai dengan realisasi 99,91% dan capaian 109,79 %.

Adapun faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Koperasi. Sehingga surat rekomendasi yang disampaikan ke Dinas terkait telah ditindaklanjuti untuk penerapan tindak lanjut hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian. Berikut beberapa surat tindak lanjut dari lintas sektor antara lain :
 - a. Surat dari Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pengawasan IFP kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 441.2/02/FARMALKES/DINKES/II/2025 tanggal 24 Januari 2025
 - b. Surat peringatan tertulis pertama kepada Apotek Fera dari DPMPTSP Kota Bengkulu Nomor B/97/500.16.6.5/DPMPTSP/V/2025 tanggal 23 Mei 2025
 - c. Surat peringatan tertulis pertama kepada Apotek Paten Farma 2 dari DPMPTSP Kota Bengkulu Nomor B/98/500.16.6.5/DPMPTSP/V/2025 tanggal 23 Mei 2025
 - d. Surat peringatan tertulis pertama dan terakhir kepada Apotek Mila Farma dari DPMPTSP Kota Bengkulu Nomor B/112/500.16.6.5/DPMPTSP/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025
2. Kerjasama yang baik dengan organisasi profesi IAI, PAFI terkait bantuan dalam hal pembinaan anggota untuk perbaikan dalam hal pengelolaan sediaan farmasi pada sarana pelayanan kefarmasian.
3. Terlaksananya monitoring rutin setiap bulannya terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang telah diberikan kepada pelaku usaha, guna mengingatkan pelaku usaha untuk segera melakukan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap hasil temuan pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas Balai POM di Bengkulu. Bentuk monitoring ini juga dilakukan secara personal dengan menghubungi Pelaku usaha via whatsapp secara berkala sampai sebelum timeline perbaikan.
4. Pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan CAPA baik dilakukan saat pemeriksaan sarana ataupun melalui Whatsapp.

Selain itu, telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko Kurangnya tindak lanjut yang dilakukan pemilik sarana/pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan BPOM di Bengkulu. Pengendalian dilakukan melalui :

1. Melakukan monitoring secara berkala terkait Feedback rekomendasi pengawasan lebih kepada sarana dengan risiko tinggi (sarprod dan gudang distributor untuk sarana pangan
2. Melaksanakan monitoring secara berkala untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana distribusi/ pelayanan kefarmasian, sarana distribusi pangan, dan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Pendampingan CAPA di sarana pada saat pemeriksaan rutin sarana distribusi/ pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi Obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini adalah 3165.QIC.001.Pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pendampingan CAPA pelaku usaha obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan baik oleh petugas BPOM, dilakukan pada saat akhir pelaksanaan inspeksi dan berkesinambungan melalui telepon dan Whatsapp.
2. Kegiatan pendampingan CAPA pelaku usaha obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota sesuai dengan rincian kegiatan DAK Non Fisik BPOM tahun 2025.
3. Bimbingan teknis pengelolaan obat pada sarana pelayanan kefarmasian sehingga meningkatkan kompetensi dan pemahaman pengelola obat pada pelayanan kefarmasian tentang aspek-aspek pengelolaan obat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Kegiatan advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal pengelolaan obat dan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Koordinasi dengan Dinkes dan DPMTSP Bengkulu Selatan tanggal 25 September 2025 terkait tindak lanjut hasil pengawasan Apotek Camilo dan Alpino
 - Koordinasi dengan Dinkes dan DPMTSP Kota Bengkulu tanggal 3 Juni 2025 terkait hasil pengawasan pelayanan sarana kefarmasian di Kota Bengkulu
 - Koordinasi dengan Dinkes dan DPMTSP Kota Bengkulu tanggal 22 Mei 2025 terkait hasil pengawasan PIRT di Kota Bengkulu
 - Koordinasi dengan dinkes dan DPMTSP Kota Bengkulu terkait tindak lanjut pengawasan apotek Mila
 - Koordinasi ke DPMTSP dan Dinkes Kab Mukomuko pada 7 Juli 2025 terkait rencana pelaksanaan pengawasan bersama sarana pelayanan kefarmasian di Kab Mukomuko
 - Koordinasi Ke Dinkes dan Disperindagkop pada Desember sekaligus

- pengawasan bersama dalam rangka Intensifikasi pangan menjelang Nataru di Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Selatan
- Koordinasi dengan Dinkes,DKP dan Disperindag Provinsi serta dinkes dan perindag kota dilanjutkan pengawasan bersama dalam rangka intensifikasi pangan di Pasar Tradisional pada 16 Desember 2025.
5. Pelaksanaan evaluasi CAPA pelaku usaha obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan secara tepat waktu sebelum timeline oleh petugas yang melakukan kegiatan inspeksi pada sarana yang menyampaikan bukti perbaikan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	7.474.500	7.473.533	99,99	109,79 %	0,10	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,10 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Penggunaan anggaran untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder mencapai 99,99%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.474.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp 7.473.533,-. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.1 yang tergolong kategori efisien.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah Advokasi Lintas sektor, Pendampingan CAPA pelaku usaha, serta monitoring tindak lanjut Hasil inspeksi secara rutin.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan diantaranya:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timel ine	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh stakeholder sesuai ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan.	Melakukan Advokasi lintas sektor ke Dinas terkait antara lain Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota dalam hal percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi.	Melakukan koordinasi dan advokasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, DPMPTSP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi, disertai pemantauan progres penyelesaiannya	Tw 1	Y	S-02	Keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak ditindaklanjuti oleh stakeholder sesuai ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan.
	Pemanfaatan dana DAK belum optimal dalam hal pendampingan CAPA untuk memperluas cakupan pada sarana-sarana yang telah menerima surat rekomendasi hasil inspeksi dari BPOM maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan dana DAK dengan membuat perencanaan bersama terkait dengan kegiatan pendampingan CAPA agar cakupan pendampingan ini bisa lebih banyak lagi mencapai sarana-sarana yang telah menerima surat rekomendasi hasil inspeksi baik dari petugas BPOM maupun dari Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.	Melaksanakan koordinasi melalui rapat/pertemuan dengan dinkes penerima DAK terkait rencana kerja 2026	TW 1	T		
	Pendampingan penyelesaian CAPA telah dilakukan petugas, tetapi belum cukup menjangkau sarana-sarana yang lokasinya cukup jauh di luar Kota Bengkulu yang	Pengembangan teknologi informasi yang bisa digunakan oleh pelaku usaha dalam hal permintaan pendampingan CAPA sehingga dapat lebih cepat dalam hal penyelesaian	Pemanfaatan media komunikasi daring/Zoom dalam pendampingan evaluasi CAPA	Tw 3	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timel ine	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	tidak memungkinkan pelaku usaha datang ke kantor atau menghadiri Bimtek yang diselenggarakan BPOM	CAPA oleh pelaku usaha.					

IKSS 1.7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan di Tindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan di Tindaklanjuti	87	100	114,94	Tidak dapat disimpulkan

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia dilakukan dalam rangka memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk farmasi, makanan, suplemen, serta produk kesehatan lainnya melalui evaluasi sebelum edar, pengawasan saat edar, penindakan pelanggaran, dan edukasi publik, dengan tujuan melindungi masyarakat dari produk tidak aman, dalam hal ini dilakukan pengawasan pada sarana produksi sediaan farmasi yang ada pada wilayah kerja Balai POM di Bengkulu, yaitu sarana produksi Obat Bahan Alam.

Persentase target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sebesar 87% dengan target jumlah sarana sebanyak 1 (satu) sarana dapat diselesaikan pada Triwulan III tahun 2025 dengan melakukan pemeriksaan pada sarana produksi Obat Bahan Alam, hal sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada awal tahun, sehingga pada akhir tahun 2025 diperoleh realisasi 114,94 %, target ini diukur dengan jumlah sarana pemeriksaan Sediaan Farmasi yang dilakukan pemeriksaan pada tahun berjalan, Indikator tersebut menggambarkan komitmen UPT BPOM untuk melakukan

pengawasan sesuai petunjuk teknis yang ada dengan ditunjang oleh Tingkat kompetensi petugas dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Apabila disandingkan dengan capaian tahun -tahun sebelumnya, maka capaian pada tahun ini tidak dapat diberikan Gambaran karena terjadi perbedaan Indikator kinerja secara nomenklatur.

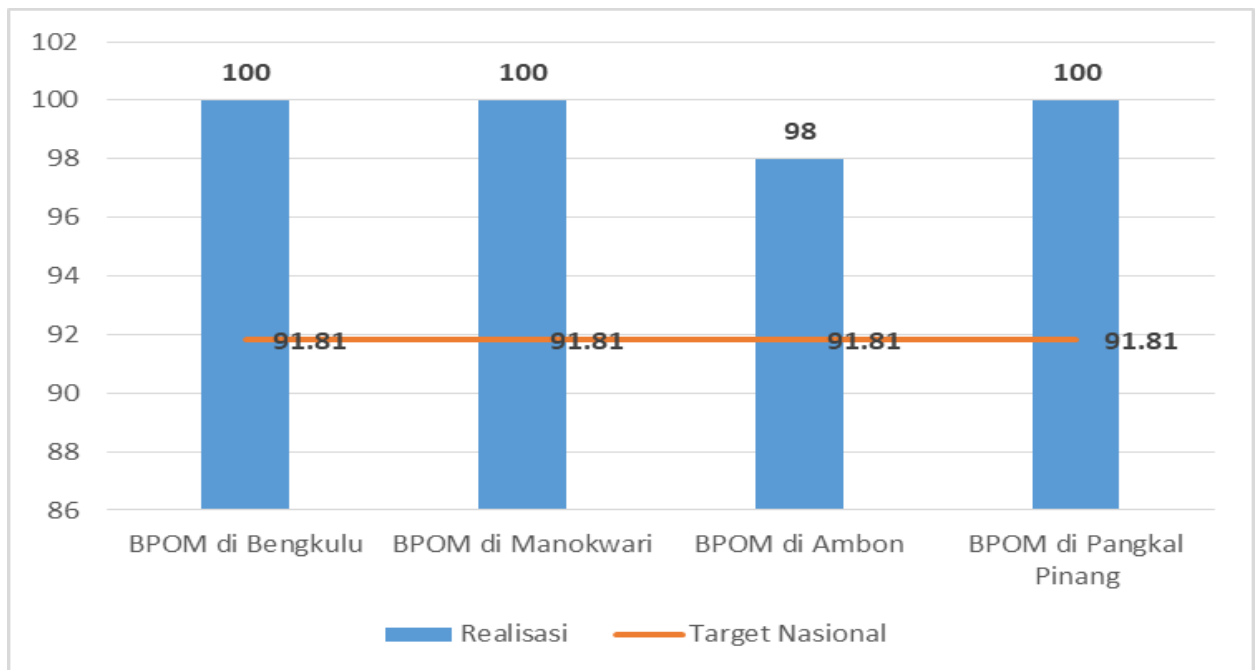
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini, dengan hasil termasuk dalam kategori tercapai / melampaui target. Hal ini Adalah suatu Gambaran kinerja yang baik, akan tetapi tetap harus dilakukan peningkatan dan penyesuaian kedepannya agar indicator kinerja ini dapat memberikan daya ungkit yang maksimal bagi penilaian kinerja Balai POM di Bengkulu secara keseluruhan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan di Tindaklanjuti	91,5	100	109,29	Tercapai / melampaui target

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan di Tindaklanjuti Balai POM di Bengkulu berada pada posisi teratas bersama Balai POM di Ambon dan Pangkalpinang dengan realisasi sempurna 100%. Seluruh Balai POM pada klaster ini telah melampaui target nasional 91,81%.



Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan di Tindaklanjuti dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan petugas fungsi pemeriksaan Balai POM di Bengkulu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di sarana dan pengambilan Kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam, sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang tahun 2025 ini, pengukuran indikator ini telah direncanakan dengan baik, dilaksanakan, lalu dimonev secara berkala. Dalam monev, terdapat beberapa saran perbaikan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti antara lain mempercepat realisasi pada triwulan III tahun 2025 sehingga memberikan hasil yang baik di akhir tahun 2025.
- Kegiatan perencanaan telah dilakukan disesuaikan dengan ketersediaan dan profil sarana produksi sediaan farmasi di Provinsi Bengkulu, sehingga terealisasi 100% sesuai target pada triwulan III Tahun 2025
- Pelaporan hasil inspeksi telah lengkap dan memenuhi ketepatan waktu yang dipersyaratkan Badan POM
- Ketepatan petugas dalam penentuan kesimpulan dan tindak lanjut hasil inspeksi
- Kompetensi personil memadai dengan tugas yang diemban, melalui pelatihan di Bidang pengawasan sediaan farmasi terutama mengenai pengawasan sarana produksi sediaan farmasi.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target dan dapat dilakukan pemeriksaan.

- Dukungan Ketersediaan SOP mikro Nomor POM-02.03/CFM.01/SOP.01/IK.9A.01 Penilaian Sarana Fasilitas/Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang jelas dan kepatuhan petugas dalam menjalankannya.
- Dukungan anggaran yang memadai pada kegiatan Sampling dan pengujian

Selain itu, telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko :

1. Penyesuaian pelaksanaan renlak pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi
2. Komunikasi dengan pelaku usaha yang akan dilakukan pemeriksaan agar memastikan sarana dapat diperiksa dengan tidak mengabaikan persiapan yang akan dilakukan pelaku usaha apabila dilakukan pemberitahuan mendadak.

Hal ini menyebabkan efektivitas pengendalian tergolong efektif dan mampu menurunkan level risiko residu.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan untuk indikator ini didukung oleh rincian output 3165.QIC.001. Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti ini diantaranya:

- Perencanaan yang baik sebagai persiapan kegiatan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi telah disusun dalam rencana pelaksanaan kegiatan pada awal tahun dan direalisasikan sesuai target yaitu pada triwulan III
- Kegiatan inspeksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesimpulan hasil pengawasan yang diambil oleh petugas sesuai dengan panduan yang ada sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan.
- Kemampuan petugas/inspektur yang bersikap terbuka dan menjangkau umpan balik dua arah, sehingga pelaku usaha secara sadar dapat terbuka menerima hasil pemeriksaan oleh petugas dan menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Balai POM di Bengkulu dalam rangka mewujudkan Obat dan Makanan yang sesuai ketentuan.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Balai POM di Bengkulu untuk senantiasa berkomitmen penuh melakukan pengawasan sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Bengkulu dan memberikan jaminan keamanan, mutu dan khasiat. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dengan profesional dan petugas yang kompeten di bidangnya dalam mendukung tercapainya target kinerja. Tidak lupa pula dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menyiapkan petugas yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan sarana dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	4.983.000	4.982.355	99,99	100	0,15	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,15 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. **Pemanfaatan anggaran** pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah penentuan jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan dan penggunaan biaya transportasi yang sesuai standar dalam menempuh tujuan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Rencana tindak lanjut untuk periode 2026 dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Gap antara capaian tahun 2025 dengan target jangka menengah 2027	Penyesuaian target indikator kinerja untuk menyesuaikan Kesimpulan akhir kinerja tahun 2026.	penyesuaian target tahun 2026	TW 1	Y	O-04	Pemeriksaan dan Tindak lanjut terhadap sarana produksi IKOT dan UMOT tidak terlaksana sesuai target
	Jumlah sarana yang tersedia tahun 2026 mengalami peningkatan tetapi masih sangat terbatas (sedikit)	Menambah target sarana produksi sediaan farmasi yang akan dilakukan pemeriksaan.	Peningkatan usulan target sarana produksi naik dari 1 menjadi 2 di tahun 2026 (ini di POK) hasil desk penyesuaian target dengan anggaran kemaren, yang pangan turun dari 36 jadi 23 dan Sediaan farmasi dari 2 jadi 4 (kos1 dan OBA 3)	TW 1	Y	O-04	Pemeriksaan dan Tindak lanjut terhadap sarana produksi IKOT dan UMOT tidak terlaksana sesuai target
	Risiko Sarana produksi tutup/tidak beroperasi saat jadwal pemeriksaan, sebagaimana terjadi tahun 2025	Perencanaan yang lebih baik	Membuat database sarana produksi berdasarkan identifikasi risiko dan perencanaan lebih matang	TW 1	Y	O-04	Pemeriksaan dan Tindak lanjut terhadap sarana produksi IKOT dan UMOT tidak terlaksana sesuai target

	Tenaga SDM yang memiliki kompetensi untuk CPOTB terbatas	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia melalui pelatihan yang relevan	Pelatihan Inspektur OBASK dan Kosmetik	TW 1	Y	O-04	Pemeriksaan dan Tindak lanjut terhadap sarana produksi IKOT dan UMOT tidak terlaksana sesuai target

IKSS 1.8 - PRESENTASI SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Presentasai Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,29	110,93	Tidak dapat disimpulkan

Target sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85% berhasil dilampaui. Hingga akhir tahun 2025, realisasi capaian mencapai 94,29%, sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 110,93%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Capaian indikator kinerja yang melampaui batas maksimal capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pada tahap awal perencanaan terdapat ketidaktepatan dalam penetapan target indikator, yang disebabkan oleh pemahaman awal terhadap definisi operasional indikator yang belum optimal. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan dan pendalaman terhadap definisi operasional, capaian kinerja menjadi lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal ini menjadi pembelajaran penting dalam penyusunan target kinerja tahun berikutnya agar lebih akurat dan terukur.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan dilakukan terhadap 35 (tiga puluh lima) sarana. Penilaian capaian indikator kinerja ini didasarkan pada beberapa aspek, antara lain ketepatan waktu pemeriksaan, ketepatan waktu tindak lanjut, ketepatan pelaksanaan tindak lanjut, serta ketepatan penentuan grading hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 32 dari 35 sarana telah dilakukan pemeriksaan tepat waktu, 32 dari 35 sarana telah ditindaklanjuti tepat waktu, dan 32 dari 35 sarana menunjukkan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan. Sementara itu, untuk aspek ketepatan penentuan grading hasil pemeriksaan, seluruh sarana atau 35 dari 35 sarana telah dinilai secara tepat sesuai dengan pedoman yang berlaku. Terdapat 3 sarana yang belum memenuhi ketepatan waktu pemeriksaan dan tindak lanjut, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Penjadwalan pemeriksaan yang berdekatan dengan kegiatan prioritas lain ditengah keterbatasan SDM yang ada
- Terdapat kondisi khusus berupa kebutuhan menunggu hasil uji laboratorium terhadap produk yang disampling di tempat produksi, dimana hasil uji juga di sampaikan dalam surat tindak lanjut
- Proses verifikasi administrasi tindak lanjut yang memerlukan klarifikasi tambahan.

Aspek Pemenuhan	Target Sarana	Sarana Yang diperiksa	Persentase
% Ketepatan waktu	32	35	91,43
% Ketepatan tindak lanjut	32	35	91,43
Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	35	35	100,00
Rata-rata	94,29		

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

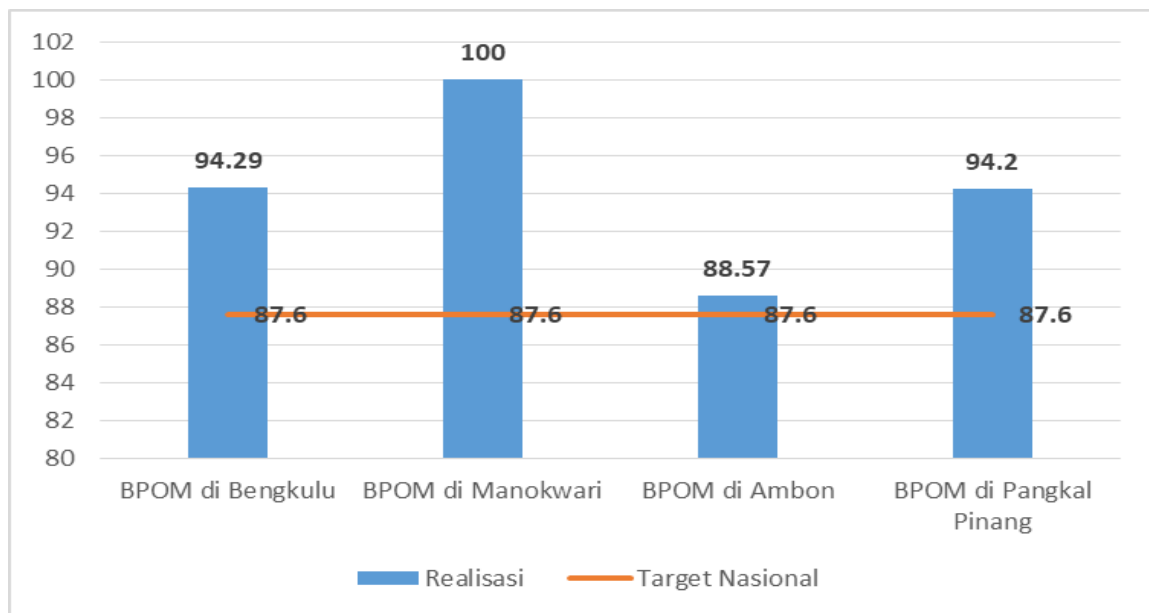
Indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan substansi indikator. Pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, indikator yang digunakan adalah persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan, yang menitikberatkan pada hasil akhir kondisi sarana produksi yaitu apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Sementara itu, pada tahun 2025 indikator berubah menjadi persentase sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yang lebih menekankan pada proses pengawasan serta ketepatan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah atau target akhir Renstra 2025-2029 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini, dengan hasil termasuk dalam kategori akan tercapai.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Presentasai Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	94,29	99,25	Akan Tercapai

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.10. Perbandingan Realisasi Indikator Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi pangan olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai POM di Bengkulu mencatat realisasi tertinggi ke-2 sebesar **94,29%**, berada di bawah Balai POM di Manokwari sebesar 100%. Realisasi Balai POM di Bengkulu berada di atas Balai POM di pangkalpinang (94,2%) dan Balai POM di Ambon (88,57%). Realisasi ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi serta konsistensi dalam menindaklanjuti hasil

pemeriksaan sesuai prosedur oleh Balai POM di Bengkulu masih tergolong baik dibandingkan Balai lain sejenis.

Persentase capaian yang melebihi 100% disebabkan oleh adanya tambahan sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di luar target awal, sebagai respons terhadap dinamika pengawasan di lapangan. Kondisi ini mencerminkan fleksibilitas dan kesiapsiagaan Balai POM dalam menyesuaikan pelaksanaan pengawasan guna memastikan pemenuhan ketentuan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kinerja pengawasan sarana produksi yang optimal dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta pengendalian risiko keamanan pangan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor pendukung yang saling terkait, sekaligus dari upaya pengelolaan risiko yang dilakukan secara sistematis. Dari aspek sumber daya manusia (Man), meskipun Balai POM di Bengkulu memiliki keterbatasan jumlah personel pemeriksa, pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut didukung oleh kerja sama tim yang solid dan efektif antartugas fungsi pemeriksaan, serta peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan dalam pelatihan Food Inspector Dasar dan Muda pada tahun 2025, yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan, ketepatan penentuan jenis temuan, serta pengambilan kesimpulan hasil pengawasan sesuai pedoman yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat risiko yang telah diidentifikasi dalam manajemen. Dari aspek sarana dan prasarana (Machine), keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh tersedianya fasilitas pendukung pengawasan yang memadai, antara lain tools pengawasan, perangkat kerja berupa laptop dan printer portabel yang dapat digunakan secara fleksibel di lapangan, serta dukungan kendaraan dinas yang mampu mengantarkan petugas ke lokasi sarana produksi, termasuk lokasi yang berada di wilayah terpencil atau pedalaman. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut memungkinkan kegiatan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara optimal meskipun menghadapi tantangan geografis.

Selanjutnya, dari aspek metode, sistem, dan regulasi (Method), pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi dan pedoman kerja yang jelas dan terstandar. Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.2B.01 tentang Pemeriksaan Sarana Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan, serta Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan yang Baik (Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2023) dan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020). Kejelasan metode dan regulasi tersebut

menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan dan menentukan tindak lanjut secara konsisten dan sesuai ketentuan.

Dari sisi bahan input (Material), tersedianya database sarana produksi pangan olahan yang telah disusun berdasarkan tingkat risiko menjadi dasar dalam perencanaan dan penetapan target pengawasan. Database tersebut memungkinkan pengawasan difokuskan pada sarana produksi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Selain itu, tersedianya Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) mendukung proses pelaporan hasil pengawasan kepada pusat secara sistematis, terintegrasi, dan tepat waktu.

Dukungan anggaran (Money) juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian kinerja. Tersedianya anggaran yang mencukupi memungkinkan pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan, baik untuk kegiatan pemeriksaan di lapangan maupun untuk mendukung kebutuhan operasional lainnya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari aspek pengukuran kinerja (Measurement), keberhasilan indikator ini didukung oleh tersedianya definisi operasional dan indikator kinerja yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara objektif. Kejelasan pengukuran ini juga mendukung ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT yang memiliki batas waktu tertentu.

Selain itu, dari aspek lingkungan dan keterlibatan pihak lain (Lingkungan), terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik, baik secara internal antarpetugas fungsi pemeriksaan dan tim pendukung, maupun secara eksternal dengan pelaku usaha, lintas sektor, serta pihak terkait lainnya. Lingkungan kerja yang kondusif dan koordinasi yang baik tersebut turut mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan serta pengendalian risiko dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat risiko yang telah diidentifikasi dalam manajemen risiko, yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Risiko tersebut antara lain disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB karena dianggap sebagai beban tambahan, serta pada beberapa sarana produksi yang diwajibkan memiliki laboratorium, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemastian mutu produk sehingga mutu dan keamanan produk belum sepenuhnya terjamin. Risiko ini berpotensi mempengaruhi kualitas hasil pengawasan serta efektivitas tindak lanjut pemeriksaan apabila tidak dikelola secara tepat.

Sebagai upaya pengendalian risiko tersebut, Balai POM di Bengkulu menerapkan langkah-langkah pengendalian yang terukur, antara lain melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tindak lanjut temuan pemeriksaan dengan batas waktu yang jelas untuk dipenuhi oleh sarana produksi. Selain itu, dilakukan penerapan sanksi secara bertahap sesuai dengan ketentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hingga pemberlakuan sanksi administratif berupa Penghentian Kegiatan Sementara (PSK) bagi sarana produksi yang tidak memenuhi kewajiban perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Penerapan pengendalian risiko tersebut mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta memastikan bahwa proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan untuk indikator ini didukung oleh rincian output 3165.QIC.001. Pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang berlaku hingga pelaksanaan tindak lanjut.

- Perencanaan yang baik melalui penyusunan database sarana produksi pangan olahan berdasarkan tingkat risiko. Database ini selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan dan penetapan target pengawasan dengan prioritas risiko lebih tinggi.
- Kegiatan inspeksi sarana produksi pangan olahan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan yaitu Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan yang Baik (Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2023, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara sistematis, terukur dan sesuai ketentuan.
- Kegiatan penetapan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku yaitu Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020. Penentuan jenis temuan dan tindak lanjut dilakukan secara tepat dan konsisten, disertai dengan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perbaikan oleh pelaku usaha dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta memastikan efektivitas proses pengawasan.
- Pelaporan hasil inspeksi sarana produksi oleh petugas melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) secara tepat waktu dan terpenuhi timeline, mendukung proses pelaporan hasil pengawasan kepada pusat secara sistematis, terintegrasi, dan tepat waktu untuk diperoleh umpan balik dan tindak lanjut.
- Komunikasi yang baik melalui umpan balik 2 arah antara petugas pengawasan dengan pelaku usaha sebagai bagian dari upaya edukasi dan pembinaan. Melalui komunikasi yang efektif, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pentingnya pemenuhan ketentuan keamanan pangan.
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor secara berkala turut mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam hal sinergi kegiatan, pertukaran informasi, dan tindak lanjut pengawasan di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang berpedoman pada regulasi, didukung oleh tindak lanjut yang konsisten serta komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pelaku usaha dan lintas sektor, menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada tahun 2025.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Presentasai Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.457.500	12,455,889	99,99	110,93	0,11	Efisien

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien. Berdasarkan data anggaran, target anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12.457.500, dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.455.889 atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran yang tersedia.

Realisasi anggaran hampir sepenuhnya terserap. Capaian indikator kinerja yang dihasilkan mencapai 110,93%, atau melebihi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Perbandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian indikator menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,11, yang termasuk dalam kriteria **efisien**.

Efisiensi ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang terencana dengan baik, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta koordinasi dan kerja sama tim yang efektif dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut pengawasan. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada indikator kinerja ini telah mampu mendukung pencapaian kinerja secara optimal tanpa pemborosan sumber daya.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan kualitas pencapaian kinerja pada tahun 2026, serta untuk mengantisipasi risiko yang masih berpotensi muncul, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya dan perlu terus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemudahan pelaku usaha agar tindak lanjut pemeriksaan terlaksana sesuai indikator kinerja	Penguatan pembinaan dan edukasi pelaku usaha berbasis risiko	Pembinaan kepada pelaku usaha secara berkelanjutan	Tw 2	Y	S-04	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja
	Masih terbatasnya akses informasi dan alur pengujian sampel sarana produksi di Lab. BPOM Bengkulu	Optimalisasi pemanfaatan sarana laboratorium oleh pelaku usaha	Memberikan kesempatan pengujian sampel sarana produksi di lab BPOM Bengkulu	Tw 3	Y	S-04	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja
	Masih kurangnya kapasitas petugas dalam mekukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	Peningkatan kapasitas dan pemerataan kompetensi petugas pemeriksa	Pelatihan Food inspektur untuk petugas	Tw 4	Y	S-04	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja
	Belum optimalnya perencanaan pengawasan berbasis data base dan manajemen risiko	Penguatan perencanaan pengawasan berbasis database dan manajemen risiko	Penyusunan target sarana produksi berbasis resiko	TW 1	Y	S-04	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja
	belum optimalnya Monev TL hasil pemeriksaan terlihat dari Masih	Optimalisasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan monev seraca berkala, terhadap TL yang diberikan	Tw 1	Y	S-03	Kepatuhan pelaku Usaha terhadap Pemenuhan aspek

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	rendahnya pemenuhan aspek CPPOB						CPPOB masih rendah
	Masih kurangnya tanggapan lintas sektor dalam menindaklanjuti TLHP BPOM Bnegkulu	Penguatan koordinasi dan sinergi dengan lintas sector	Penyampaian hasil TL ke sarana kepada lintas sektor yang terkait sesuai kewenangan masing[-masing]	Tw 2	Y	S-03	Kepatuhan pelaku Usaha terhadap Pemenuhan aspek CPPOB masih rendah
	Keterbatasan sumber daya dan anggaran memerlukan perencanaan yang baik	Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan kegiatan yang lebih	Penyusunan renlak kegiatan rutin secara lebih efisien dengan menggabungkan 1 kegiatan dengan kegiatan lain dalam perjalan yang sama	Tw 1	Y	S-04	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja

IKSS 1.9 - PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada indikator pengukuran dilakukan terhadap jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan dan Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil

pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdiri dari komponen :

1. Pemenuhan Target Pemeriksaan
2. Kesesuaian Tindaklanjuti

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdiri dari komponen :

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
2. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan petugas fungsi pemeriksaan dalam menerapkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait melaksanakan setiap tahapan pemeriksaan dan tindak lanjut.

Pengukuran realisasi indikator kinerja dibagi ke dalam perhitungan per jenis sarana distribusi sebagai berikut:

Fasilitas Distribusi Obat

Target	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa	% pemenuhan target pemeriksaan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa 2	% kesesuaian tindaklanjuti	% Sardis Obat
116	116	116	100,00	116	116	100,00	100,00

Fasilitas Distribusi OBA dan SK

Jumlah sarana diperiksa	Jumlah target inspeksi	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana diperiksa	% Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang diperiksa 2	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindakan lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah pengawasan	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA & SK
21	21	100,00	21	21	100,00	21	21	100,00	21	21	100,00	100,0

Fasilitas Distribusi Kosmetika

Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target tahunan	% Pelaknaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindakan lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindakan lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis Kosmetik
51	51	100	51	51	100,00	51	51	100	51	51	100,00	100,0

Dari ketiga komponen pengukuran tersebut selanjutnya dihitung rata-rata (tanpa pembobotan) %Sarana Distribusi Obat (100%), OBA dan SK (100%) dan Kosmetik (100%) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga **diperoleh realisasi 100%.**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100	104,44	Sangat Baik

Pada indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini, dimana target sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 sejumlah 188 sarana dan dengan realisasi seluruh sarana distribusi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 100 % dengan persentase capaian 104,44 % dibandingkan target tahun 2025 sebesar 95,75 %

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

IKU Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan adanya perbedaan nama indikator dan definisi operasional. Dimana pada Manual Indikator Kinerja Tahun 2021-2024 Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hanya menitikberatkan pada kesimpulan hasil inspeksi sarana berupa Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan) yang dihitung dari :

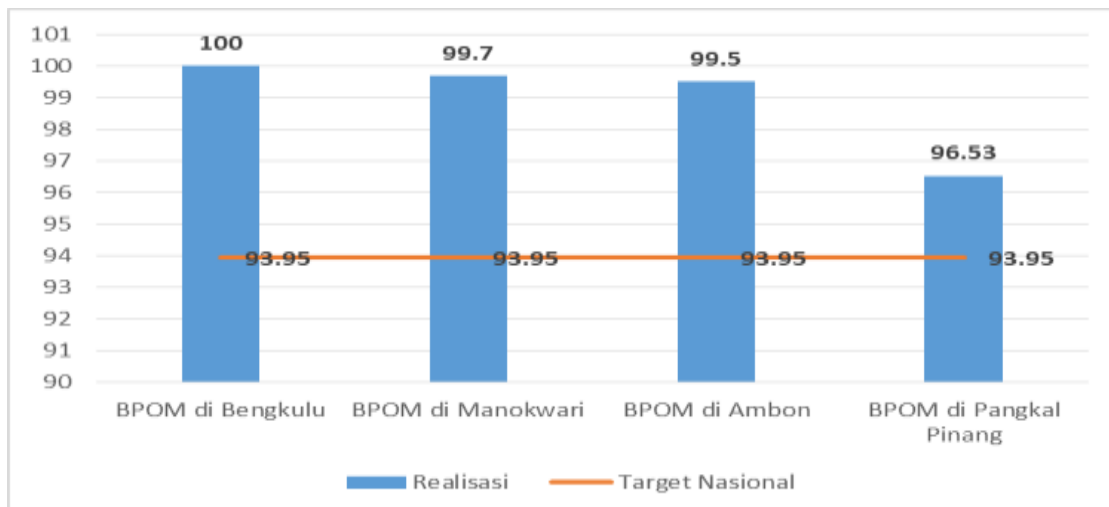
1. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (pembilang)
2. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa (penyebut)

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,25	100	100,76	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 % jika di bandingkan dengan target renstra jangka menengah sebesar 99,25 % maka target 2029 tergolong telah tercapai/terlampaui dengan capaian 100,76 %, sehingga diperlukan kinerja yang baik agar realisasi target di 2027 jangka menengah tetap bisa tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.11. Perbandingan dengan Balai POM Kluster II dan Target Nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi terhadap Balai POM lain sejenis, realisasi Balai POM di Bengkulu merupakan yang terbaik dengan realisasi sempurna 100%, unggul dari Balai POM di Manokwari, Ambon dan Pangkalpinang. Jika dibandingkan dengan target Nasional maka ke4 Balai pada Kluster II sudah berada diatas target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah tercapai dengan realisasi 100 % dan capaian 104,44 %.

Adapun faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan iklan pemeriksaan target sarana distribusi sediaan farmasi yang tepat jumlah dan tepat waktu oleh personil.
2. Kompetensi personil memadai dengan tugas yang diemban, melalui pelatihan inspektur CDOB untuk seluruh personil inspeksi
3. Pemahaman personil inspeksi yang memadai terkait Kepka BPOM RI nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas khusus lainnya, serta PerBPOM No 9 Tahun 2024 tentang Pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan Zat adiktif.
4. Komitmen personil inspeksi yang baik terkait kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari mulai pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat melalui aplikasi SIPT.
5. Monitoring terhadap pelaporan hasil inpeksi pada SIPT yang dilakukan secara rutin sehingga jika terdapat permasalahan pada proses verifikasi/ approve bisa cepat diketahui dan diatasi,

Telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko tidak terpenuhinya cakupan wilayah pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi untuk target seluruh sarana yang ada sesuai dengan target kajian risiko sarana yang ditetapkan. Hal ini karena banyaknya sarana yang baru buka untuk beberapa daerah wilayah kab/kota pada tahun berjalan dan adanya efisiensi anggaran serta SDM tidak mencukupi untuk mengcover seluruh sarana yang ada di wilayah kerja BPOM di Bengkulu. Pengendalian telah dilakukan melalui koordinasi dengan Stakeholder terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pemenuhan jumlah target pemeriksaan sarana dengan kategori risiko. (berbagi risiko untuk menjadi target pemeriksaan) melalui pemanfaatan DAK Non fisik BPOM. Hal ini menyebabkan efektivitas pengendalian tergolong efektif dan mampu menurunkan level risiko residu.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan rincian output 3165.QIC.004.

Pencapaian kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh kegiatan antara lain :

- a. Dukungan kolaborasi dari stakeholder antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, DPMPTSP, Organisasi Profesi, Korwas PPNS dalam pelaksanaan inspeksi ke sarana distribusi sediaan farmasi di Wilayah Kerja BPOM di Bengkulu
- b. Ketertiban / Kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan Inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan Kepka BPOM RI nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas khusus lainnya, serta PerBPOM No 9 Tahun 2024 tentang Pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan Zat adiktif..
- c. Peningkatan kompetensi personil inspeksi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi bidang sediaan farmasi, diantaranya In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT BPOM Berdasarkan Trend dan Analisis Kebutuhan Terkini tgl 19 Juni – 20 Juni 2025

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.314,900	112.239.364	99.93	104,44	0,05	Efisien 100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,05 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi yang tepat.

Selain itu, adanya koordinasi yang baik antar kedeputian sehingga kebutuhan dana untuk pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi tercukupi dan inspeksi dapat dilaksanakan sesuai target tahun 2025

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Adapun tindak lanjut untuk periode tahun 2026 dengan menjawab penyebab kegagalan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya dapat berupa :

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengawasan yang komprehensif pada sarana distribusi sediaan farmasi	Melakukan advokasi lintas sektor terkait dukungan pelaksanaan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian	TW 1	Y	S-05	Terjadinya miskomunikasi terkait tindak lanjut pemeriksaan Saryanfar
		Penyusunan perencanaan target sarana bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan DAK Non Fisik BPOM dalam rangka peningkatan cakupan sarana distribusi sediaan farmasi yang diawasi.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan PIC DAK masing-masing kabupaten dalam penentuan target pemeriksaan saryanfar	Tw 1	Y	S-05	Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia melalui pelatihan CDOB dari tingkat junior, senior, dan Kepala	Pelatihan CDOB Junior, senior dan Kepala bagi petugas Pemeriksaan	TW IV	Y	S-05	Kesalahan dalam penetapan Tindak lanjut hasil pemeriksaan saryanfar
		Monitoring pelaporan pada SIPT hasil inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi secara rutin setiap bulannya untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan diterima pusat	melakukan monitoring pelaporan SIPT hasil pemeriksaan saryanfar setiap akhir bulan sebelum batas timeline yang ditetapkan	Tw 1	TW IV	S-05	Adanya keterlambatan verifikasi dari supervisor, kepala UPT ke operator pusat

IKSS 1.10 - PRESENTASI SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Presentasai Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Presentasai Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,32	109,24	Sangat Baik

Target presentasi sarana distribusi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90% berhasil dilampaui. Hingga akhir tahun 2025, realisasi capaian mencapai

98,32%, sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 109,24%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kriteria *Sangat Baik*.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan pengatewasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan terhadap **101 (seratus satu) sarana**. Penilaian capaian indikator kinerja ini didasarkan pada beberapa aspek, antara lain **ketepatan jumlah sarana yang diperiksa, ketepatan pelaksanaan tindak lanjut, serta ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan dengan pembobotan yang berbeda-beda sesuai table di bawah ini.**

Aspek Pemenuhan	Target Sarana	Sarana Yang diperiksa	Bobot persentasi
% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	101	101	20
% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	101	99	68,62
% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	101	98	9,7
Jumlah	98,32		

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh 101 sarana (100%) telah diperiksa sesuai dengan target yang ditetapkan, yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berjalan optimal. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian jadwal serta komitmen dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sebanyak 99 dari 101 sarana (98,02%) telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Masih terdapat 2 sarana yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tindak lanjut, yang umumnya disebabkan oleh kebutuhan klarifikasi tambahan, penyempurnaan dokumen, atau proses verifikasi lanjutan sebelum keputusan final dapat ditetapkan.

Pada aspek pelaporan, sebanyak 98 dari 101 sarana (97,03%) telah dilaporkan tepat waktu melalui sistem pelaporan yang berlaku. Keterlambatan pada sebagian kecil sarana dapat disebabkan oleh proses unggah dokumen yang masih memerlukan kelengkapan administrasi, penyesuaian data hasil pemeriksaan, atau kendala teknis pada sistem pelaporan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan definisi operasional substansi indikator.

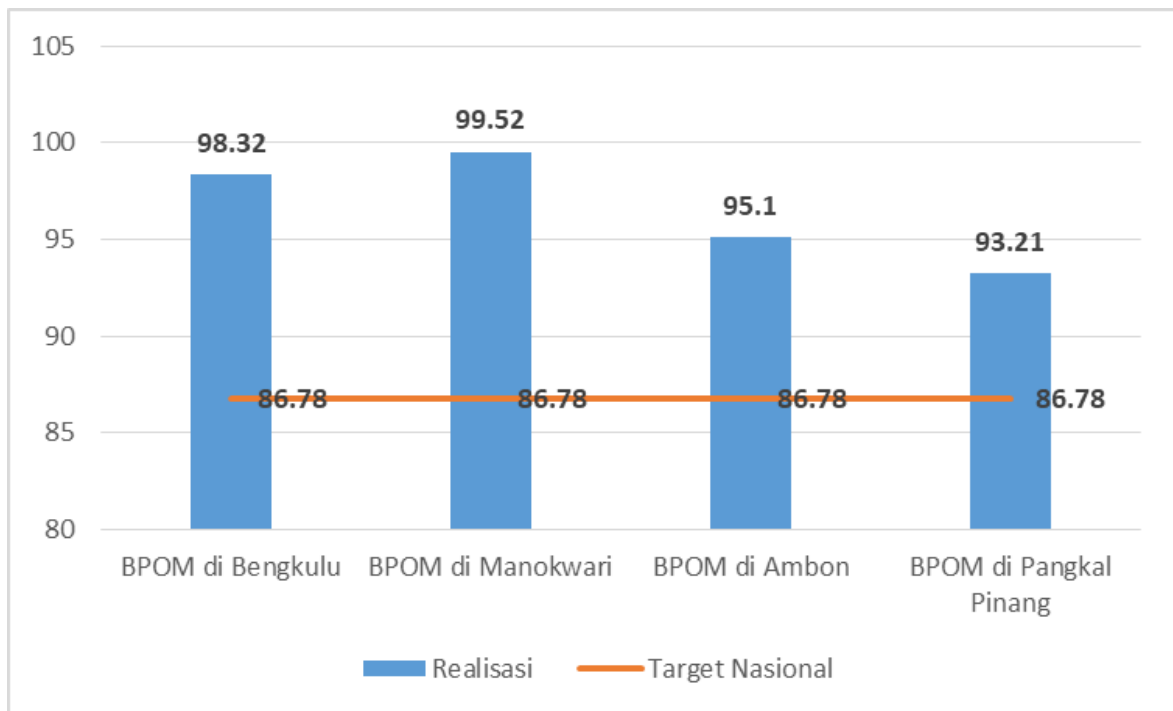
Pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, indikator yang digunakan adalah *persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan*, yang menitikberatkan pada hasil akhir kesimpulan kondisi sarana distribusi dalam pemenuhan persyaratan/standar, yaitu apakah memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, pada tahun 2025 indikator berubah menjadi *persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*, yang lebih menekankan pada proses pengawasan serta ketepatan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini, dengan hasil termasuk dalam kategori tercapai / melampaui target.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Presentasai Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	98,32	104,60	Tercapai / Terlampaui

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.12. Perbandingan realisasi Presentasai Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Balai POM di Bengkulu memiliki realisasi tertinggi urutan ke-2 sebesar 98,32%, di bawah Balai POM di Manokwari (99,52%). Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi serta konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan telah dilaksanakan Balai POM di Bengkulu masih lebih baik dibanding Balai POM lain sejenis.

Terhadap target 90%, persentase capaian Balai POM di Bengkulu yang melebihi 100% disebabkan oleh adanya penambahan sarana distribusi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di luar target awal, sebagai bentuk respons terhadap dinamika pengawasan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan kesiapsiagaan dan komitmen Balai POM dalam memastikan pemenuhan ketentuan distribusi pangan olahan guna melindungi masyarakat dari potensi risiko keamanan pangan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan kinerja pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang optimal dan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta pengendalian risiko pangan olahan di wilayah kerja masing-masing.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang mampu bekerja secara kolaboratif dan adaptif. Meskipun jumlah personel pengawasan sarana distribusi terbatas, pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut tetap dapat diselesaikan secara optimal melalui pembagian tugas yang efektif serta kerja sama tim yang solid. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pengawasan melalui keikutsertaan dalam pelatihan Food Inspector Dasar dan Food Inspector Muda pada Tahun 2025 turut mendukung peningkatan pemahaman petugas terhadap pedoman pengawasan dan ketepatan penentuan tindak lanjut, sehingga capaian indikator dapat melampaui target yang ditetapkan.

Dari aspek sarana dan prasarana, pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan didukung oleh ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, antara lain checklist pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, berita acara pemusnahan, serta berbagai formulir pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, dukungan kendaraan dinas yang menunjang mobilitas petugas ke lokasi sarana distribusi turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan pengawasan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut. Ketersediaan **perangkat laptop** serta **jaringan internet** yang stabil juga sangat membantu petugas dalam menginput dan melaporkan hasil pengawasan ke dalam **Sistem Informasi** Pelaporan Terpadu (SIPT) secara tepat waktu.

Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.2B.01 tentang Pemeriksaan Sarana Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan, serta didukung oleh regulasi dan pedoman yang berlaku, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran dan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020). Keberadaan SOP dan pedoman tersebut memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, penetapan jenis temuan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan secara terstandar, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi acuan yang jelas bagi petugas dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan. Dukungan anggaran tersebut memungkinkan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, sehingga target kinerja dapat dicapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari aspek pengukuran kinerja, indikator ini didukung oleh definisi operasional dan parameter pengukuran yang jelas, meliputi ketepatan jumlah sarana yang diawasi, ketepatan waktu tindak lanjut, dan ketepatan waktu pelaporan. Kejelasan mekanisme pengukuran tersebut memungkinkan capaian kinerja dapat dinilai secara objektif, sehingga capaian sebesar 109,24 persen dapat diidentifikasi dan divalidasi dengan baik.

Dari aspek lingkungan, terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara petugas pengawasan dengan pelaku usaha sarana distribusi, serta dengan lintas sektor dan pihak terkait lainnya. Hubungan kerja yang kondusif tersebut mendukung kelancaran

proses pengawasan dan tindak lanjut, sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan, terdapat risiko yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian indikator kinerja, **yaitu** tidak terpenuhinya cakupan pemeriksaan terhadap seluruh sarana distribusi yang ada sesuai dengan target kajian risiko yang telah ditetapkan. Risiko ini muncul seiring dengan dinamika perkembangan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja, khususnya dengan bertambahnya jumlah sarana distribusi baru yang mulai beroperasi di beberapa kabupaten/kota pada tahun berjalan, sehingga meningkatkan beban pengawasan.

Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk mengakomodasi seluruh sarana distribusi yang ada dalam satu periode pelaporan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pemenuhan target cakupan pemeriksaan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian perencanaan dan strategi pengawasan yang adaptif. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis risiko dan penetapan prioritas pemeriksaan terhadap sarana distribusi berbasis risiko, sehingga pelaksanaan pengawasan tetap berjalan efektif dan selaras dengan tujuan perlindungan konsumen.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini adalah rincian output 165.QIC.004. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Indikator Presentasi Sarana Distribusi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan inspeksi sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko sebagai strategi utama dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja. Pada tahap perencanaan, terlebih dahulu disusun daftar sarana distribusi pangan olahan yang terdata di lingkungan Badan POM dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko. Berdasarkan data tersebut, dilakukan penetapan target pengawasan dengan mempertimbangkan hasil pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya. Sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pengawasan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir atau lebih, serta sarana yang pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), ditetapkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pengawasan pada tahun berjalan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengawasan dengan memfokuskan sumber daya pada sarana yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan olahan.
2. Pelaksanaan tindaklanjut hasil inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui penerbitan surat tindak lanjut maupun pembinaan langsung kepada pelaku usaha. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai langkah-langkah perbaikan atas temuan ketidaksesuaian. Untuk temuan tertentu yang bersifat ringan dan memungkinkan untuk segera diperbaiki, tindak lanjut dilakukan langsung di lokasi pada saat inspeksi, sehingga perbaikan dapat segera diimplementasikan.
3. Pelaksanaan inspeksi secara terpadu bersama lintas sektor terkait khususnya dalam rangka **menjelang** Hari Raya Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru. Sinergi

lintas sektor ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperluas cakupan perlindungan terhadap masyarakat.

4. Pelibatan lintas sektor dalam upaya tindak lanjut hasil inspeksi. Sebagai bentuk penguatan koordinasi dan transparansi, seluruh surat tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan kepada pelaku usaha juga ditembuskan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Pemerintah Kota/Kabupaten setempat, sehingga upaya pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Presentasai Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.314.900	112.239.364	99,93	109,24	0,09	Efisien

Berdasarkan hasil evaluasi efisiensi penggunaan anggaran pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diketahui bahwa pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp112.314.900, dengan realisasi anggaran sebesar Rp112.239.364 atau 99,93 % dari pagu yang ditetapkan.

Dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,24% , tingkat efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar **0,09** dan termasuk dalam kriteria Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang hampir sepenuhnya terserap, namun tetap menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya secara tepat guna untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sebagian besar anggaran pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pengawasan lapangan. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan sarana distribusi, klarifikasi temuan, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Balai POM, namun juga melibatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, antara lain dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Pelibatan lintas sektor ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kepatuhan

pelaku usaha, serta memastikan tindak lanjut yang lebih komprehensif sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pemanfaatan anggaran perjalanan dinas secara terarah memungkinkan pelaksanaan pengawasan bersama di wilayah prioritas, termasuk daerah dengan tingkat risiko lebih tinggi. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui penghindaran duplikasi kegiatan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarinstansi dalam kerangka pengawasan terpadu di daerah.

Melalui sinergi tersebut, terbentuk mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis risiko, sehingga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Capaian indikator sebesar 109,24% dengan realisasi anggaran sebesar 99,93% menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pengawasan serta optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Database sarana berbasis risiko sudah tidak update sehingga dapat mempengaruhi perencanaan	Penyempurnaan perencanaan dan penetapan target mempertimbangkan hasil kajian risiko, dinamika penambahan sarana baru, serta kapasitas sumber daya yang tersedia agar target lebih proporsional dan realistis	Menyusun target sarana distribusi berbasis risiko	TW I	Y	S-05	Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
	Hasil inspeksi belum sepenuhnya menjangkau fasilitas distribusi yang memiliki riwayat ketidakpatuhan, sarana baru berdiri dan sarana yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan peredaran pangan olahan	Penguatan pengawasan berbasis risiko memprioritaskan sarana yang memiliki riwayat ketidakpatuhan, sarana yang belum pernah diawasi dalam kurun waktu tertentu, serta sarana baru yang berpotensi memiliki risiko lebih tinggi	Inspeksi sarana yang masuk dalam penyusunan target sarana berbasis risiko (risiko tinggi)	TW I	Y	S-05	Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Pengawasan pangan olahan yang terus berkembang yang belum diketahui petugas	Peningkatan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui penguatan kerja tim, pembagian tugas yang lebih efisien, serta pemanfaatan sistem pelaporan untuk mendukung ketepatan waktu pemeriksaan dan tindak lanjut.	Pelatihan food inspektur, Meleburkan tim, tidak terpisah perkedeputian	 TW IV	 Y	 S-05	Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan
	Pemerintah daerah belum sepenuhnya memonitor Tindak lanjut hasil inspeksi pada sarana distribusi pangan olahan	Penguatan pembinaan dan koordinasi lintas sector melalui pendekatan edukatif serta memperkuat koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintah daerah guna mendukung efektivitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Koordinasi lintas sektor	 TW I	 Y	 S-05	Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan

IKSS 1.11 - PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didahului dengan pengukuran Iklan per jenis komoditi sebagai berikut:

Obat

Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi 2	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
104	104	100,00	104	104	100,00	100,00

Kosmetik

Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target	Jumlah iklan yang dievaluasi dan verifikasi oleh Operator JPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi 2	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Iklan yang dilaporkan tepat waktu	% Iklan Kos
13	13	100	13	13	100	182	182	100	52	52	100	100	260	260	100	260	260	100	100	100

Suplemen Kesehatan

Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
35	35	100,00	35	35	100,00	35	35	100,00	100,00

Obat Bahan alam

Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
75	75	100	75	75	100	75	75	100	100

Pangan Olahan

Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO
14,52%	1	46	37,10%	0,99	30	24,19%	0,97	30	24,19%	0,97	19,62	124	40,00	99,62

Selanjutnya, dilakukan perhitungan secara rata-rata dari kelima pengukuran % Iklan di atas hingga diperoleh realisasi 99,92% sebagai berikut:

% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
100,00	100,00	100,00	100,00	99,62	99,92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,92	109,80	Sangat Baik

Target pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 91% dapat diselesaikan, bahkan melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sehingga terealisasi 99,92 %, sehingga persentase capaian berbanding dengan target sebesar 109, 80% masuk dalam kriteria sangat baik. Tambah Tabel matriks realisasi.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

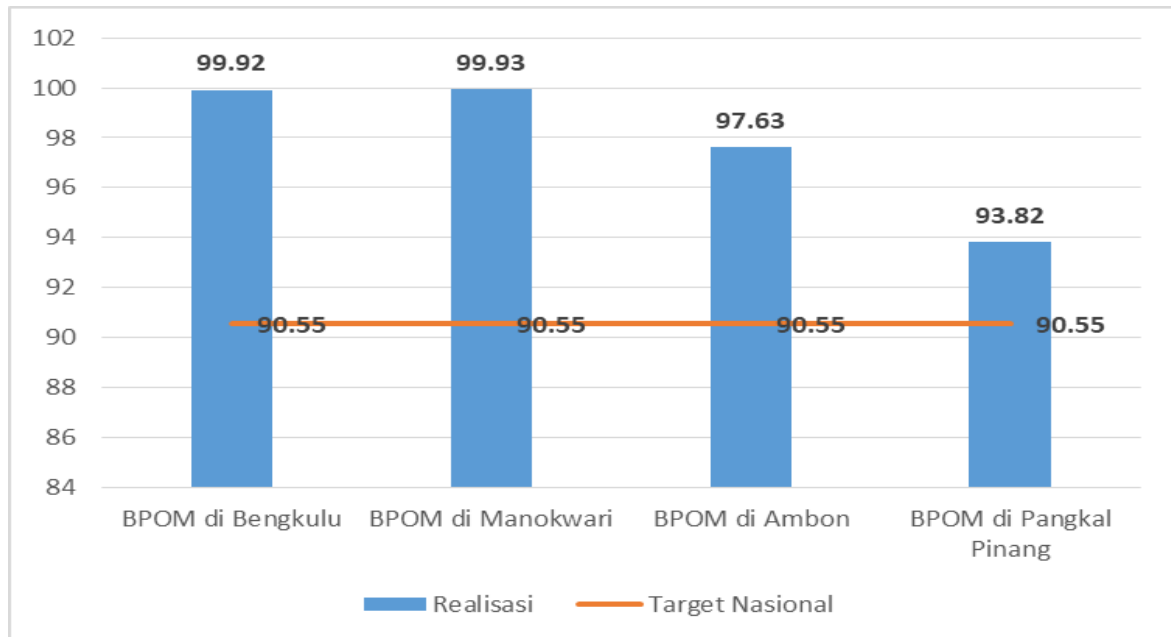
Indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan tidak terdapat indikator kinerja yang mengukur kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini, dengan hasil termasuk dalam kategori tercapai / melampaui target.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,20	99,20	104,96	Tercapai / Terlampaui

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.13. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan Balai POM sejenis dan target Nasional

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, realisasi Balai POM di Bengkulu termasuk yang tertinggi (99,92%) bersama dengan Balai POM di Manokwari (99,93%), diikuti oleh Balai POM di Ambon (97,63%) dan Balai POM di Pangkal Pinang (93,82%). Jika dibandingkan dengan target nasional realisasi dari ke-4 Balai pada kluster II tersebut sudah diatas target nasional.

Melalui realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah dilaksanakan Balai POM di Bengkulu masih lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibanding Balai POM lain. Hal ini juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi periklanan, serta kontribusi nyata dalam melindungi masyarakat dari informasi iklan yang berpotensi menyesatkan telah dijalankan Balai POM di Bengkulu dengan baik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan petugas fungsi pemeriksaan Balai POM di Bengkulu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan jumlah target yang dibebankan. Selain itu, pelaksanaan pengambilan Kesimpulan hasil pengawasan iklan berupa memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan dan ketepatan waktu pelaporan

melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang memiliki batas waktu tertentu juga berkontribusi pada keberhasilan capaian.

Secara umum, keberhasilan capaian kinerja indikator ini dijelaskan sebagai berikut:

- Kompetensi personil memadai dengan tugas yang diemban, melalui pelatihan di Bidang pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
- Adanya peraturan yang memadai tentang pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan baik dalam bentuk luring dan daring
- Dukungan anggaran yang memadai pada kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan baik dalam bentuk perjalanan dinas maupun ketersediaan infrastruktur internet dalam pengawasan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)
- Keterlibatan tim IT dalam memastikan kestabilan jaringan pada saat melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring maupun pada saat melakukan pelaporan menggunakan SIPT.

Keberhasilan capaian indikator ini juga tidak lepas dari adanya pengendalian yang memadai atas peristiwa risiko tidak terpenuhinya target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi. Terhadap peristiwa risiko tersebut telah dilakukan tindakan pengendalian yang memadai berupa:

1. Penyesuaian pelaksanaan renlak pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulannya dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan time line pelaporan
2. Komunikasi antar petugas pada saat pengambilan Keputusan akhir mengenai Kesimpulan apakah suatu iklan sediaan farmasi atau pangan olahan tersebut memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan.
3. Bahwa sepanjang tahun 2025 ini pengukuran indikator ini telah direncanakan dengan baik, dilaksanakan, lalu dimonev berkala. Dalam monev, terdapat beberapa saran perbaikan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti antara lain kesesuaian antara realisasi setiap bulannya di sandingkan dengan perencanaan bulanan yang telah disampaikan ke Unit Pusat pada awal tahun 2025. sehingga memberikan hasil yang baik di akhir tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini dengan rincian output 3165.QIC.004. Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang baik dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia baik petugas, anggaran dan

- sarana prasarana pada awal tahun sesuai target pengawasan dan telah dibagi ke dalam target bulanan.
2. Kegiatan pelaksanaan pengawasan iklan, dalam bentuk perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan iklan dilaksanakan secara efisien memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada. Pada beberapa perjalanan, dilakukan bersamaan dengan kegiatan inspeksi rutin.
 3. Pelaksanaan pengawasan tahap evaluasi bahan iklan yang telah dikumpulkan hingga pengambilan keputusan MK/TMK telah dilakukan sesuai dengan pedoman pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan diantaranya:
 - Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik
 - Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
 - Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan
 - Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan
 - Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat
 4. Pelaporan hasil pengawasan iklan telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu melalui aplikasi pelaporan SIPT yang didahului dengan verifikasi hasil evaluasi iklan oleh Ketua Tim melalui SIPT.
 5. Pelatihan/Bimtek terkait iklan OT 13 Nov tahun 2025 kepada pelaku usaha penyiaran lokal (radio 10), 2 TV lokal dan 2 Koran lokal dan media online.
 6. Pelatihan Iklan bagi 3 orang petugas Bimtek transformasi pengawasan iklan dan penandaan OBA, SK dan kuasi bulan Februari 2025.
 7. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Deputi II pada akhir bulan (Week 4) : konfirmasi data pelaporan,

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	74.876.600	74.826.243	99,93	93,20	0,10	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,1 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah penentuan jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan dan penggunaan biaya transportasi yang sesuai standar dalam menempuh tujuan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Rencana tindak lanjut untuk periode 2026 dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Penyesuaian Target oleh pengampu pusat	Perencanaan yang lebih baik	Penyusunan renlak iklan, menyesuaikan dengan perubahan target	TW 1	Y	O-05	Pengawasan dan tindak lanjut iklan sediaan farmasi dan/atau pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja yang ditetapkan
	Tingkat kemampuan petugas yang belum merata	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia melalui pelatihan yang relevan	Pelatihan Iklan OTSK dan Kosmetik bagi petugas	TW 1	Y	O-05	Pengawasan dan tindak lanjut iklan sediaan farmasi dan/atau pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja yang ditetapkan

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Gap rekapitulasi antara unit pengampu pusat dan data balai	Penyempurnaan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaring kelemahan di setiap tahapan kegiatan	Monev bulanan dan menyandingkan data hasil evaluasi unit pengampu pusat	TW 1	Y	O-05	Pengawasan dan tindak lanjut iklan sediaan farmasi dan/atau pangan olahan tidak terlaksana sesuai target indikator kinerja yang ditetapkan

IKSS 1.12 – PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Perhitungan % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar terdiri dari 2 komponen yaitu :

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label

$$\left(\frac{\text{Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi}} \times 100\% \right)$$

Tahun	Realisasi jumlah pengawasan label setahun	Target akumulatif setahun	% pemenuhan jumlah target pengawasan label
2025	144	144	100 %

Target Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label tahun 2025 tercapai 100 % sebanyak 144 label produk tembakau telah diawasi.

B : Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $A+B/2$

Tahun	Realisasi ketepatan waktu pengawasan label setahun	Target akumulatif setahun	% pemenuhan ketepatan waktu pengawasan label
2025	106	144	73,6 %

Untuk komponen % pemenuhan ketepatan waktu pengawasan label belum tercapai. Dari 144 label produk tembakau yang diawasi, hanya 106 label yang tepat waktu dilaporkan sehingga capaian hanya 73,6 %

Sehingga % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 sebagai berikut :

Tahun	% pemenuhan jumlah target pengawasan label	% pemenuhan ketepatan waktu pengawasan label	% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
2025	100 %	73,6 %	86,8 %

Pada tahun 2025 Total target label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebanyak 144 sampel, berdasarkan perhitungan terhadap 2 komponen terkait Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label dan Persentase ketepatan waktu pelaporan label dengan realisasi sebesar 86,8 %

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan petugas fungsi pemeriksaan Balai POM di Bengkulu dalam menjabarkan pedoman sampling 2025 dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan produk tembakau yang beredar di Provinsi Bengkulu. Dari jumlah target pengawasan label produk tembakau sebanyak 144 label, sampling produk tembakau 2 sampel dan pengawasan label rokok elektronik 2 sampel dapat terpenuhi semuanya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	86,8	96,46	Baik

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

IKU persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar ini merupakan IKU baru untuk tahun 2025, sehingga belum terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya. Pada periode Renstra tahun 2019-2024, belum terdapat pelaksanaan pengukuran kinerja pengawasan label produk tembakau.

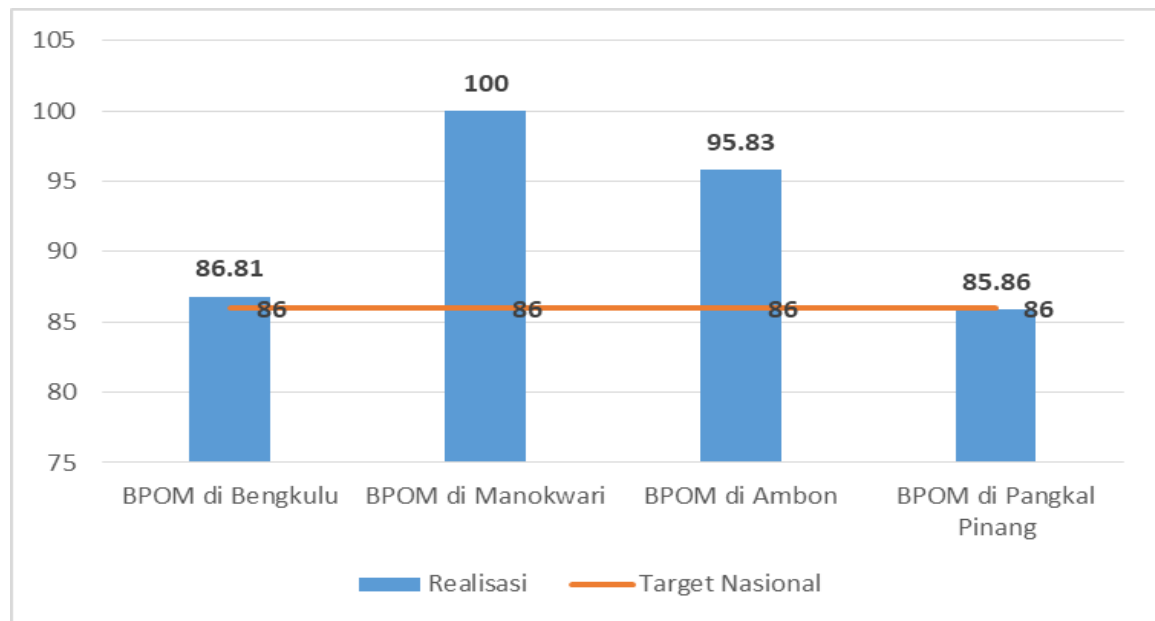
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94	86,81	92,35	Akan tercapai

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 86,81 % jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah atau periode akhir Renstra 2025-2029 sebesar 94 % maka target 2029 tergolong akan tercapai dengan capaian 92,35 %, sehingga diperlukan kinerja yang lebih baik lagi agar realisasi target di 2029 jangka menengah bisa tercapai

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Manokwari, Ambon, dan Pangkal Pinang. Berdasarkan data realisasi tersebut, Balai POM di Bengkulu berada pada urutan ke-3 (86,81%), di bawah Balai POM di Manokwari (100%) dan Balai POM di Ambon (95,83%).



Gambar 3.14. Perbandingan Realisasi Indikator label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian target label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 belum tercapai dengan realisasi hanya 86,81% dengan nilai capaian 96,64%.

Adapun faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Perubahan jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik karena terjadinya efisiensi anggaran. Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif nomor B-PW.01.15.3.02.25.62 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penyampaian Penyesuaian Target Pengawasan Zat Adiktif Badan POM Tahun 2025, terjadi perubahan jumlah target dari 12 label/bulan menjadi 7 label perbulan. Sehingga Petugas melakukan pengawasan Label untuk periode Januari sampai Februari masih sesuai dengan target awal yaitu 12 label/ bulan dengan total label 24 label periode Januari – Februari 2025 , sehingga sudah berlebih jika adanya penyesuaian target revisi yang totalnya adalah

- 14 label periode Januari- Februari. Sehingga pada bulan Maret tidak dilakukan sampling karena jumlah target sudah terpenuhi.
2. Relaksasi anggaran pada bulan April 2025 menyebabkan terjadinya perubahan jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik kembali, hal ini menyebabkan penumpukan target pengawasan label tembakau pada triwulan II dan keterlambatan penginputan SIPT
 3. Perubahan waktu timeline penginputan pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang awalnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya menjadi setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Hal ini merujuk pada Surat Nomor B-PW.01.15.35.05.25.738 tanggal 19 Mei 2025 perihal Undangan Desk Pembahasan Usulan Target Indikator Pengawasan Label Produk Tembakau dan Rokok elektronik 2025-2029 di UPT BPOM yang baru disampaikan pada bulan Mei 2025. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan bulan Januari 2025 (13 dari 13), April (15 dari 18), Mei (8 dari 20).
 4. Kurangnya monitoring terhadap pelaporan SIPT pengawasan label label produk tembakau, sehingga proses *approval*/persetujuan laporan dari Kepala Balai POM di Bengkulu terlambat diterima Badan POM.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Dengan rincian output 3165.QIC.004. Pencapaian kinerja indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar ditunjang dari kegiatan berikut :

1. Perencanaan pelaksanaan pengawasan label rokok yang mengalami perubahan secara cukup signifikan sesuai petunjuk dari Badan POM. Melalui surat dari Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif nomor B-PW.01.15.3.02.25.62 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penyampaian Penyesuaian Target Pengawasan Zat Adiktif Badan POM Tahun 2025, terjadi perubahan jumlah target dari 12 label/bulan menjadi 7 label perbulan. Dalam monitoring bulan Januari yang dilakukan pengawasan 12 label/bulan menyebabkan realisasi sampling Februari hanya ditarget 2 label. Pelaksanaan pengawasan kemudian mengalami relaksasi pada bulan April dimana target kembali 12 label/bulan sehingga mempengaruhi perencanaan target pengawasan bulan April 2025 menjadi 18 label dan Mei 2025 (20 label).
2. Pengadaan dan pengambilan sampel produk tembakau di peredaran untuk dilakukan pengawasan, dengan target pengawasan label produk tembakau sebanyak 144 label, sampling produk tembakau 2 sampel dan pengawasan label rokok elektronik 2 sampel terealisasi seluruhnya. Namun pelaksanaan pengadaan sampel dan pengawasan pada bulan Januari dan Februari 2025 dimana kelebihan sampel tidak terhitung sebagai capaian kinerja oleh Pusat berkenaan penyesuaian target bulanan pada poin 1.
3. Pelaporan hasil pengawasan label tembakau belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib. Hal ini dilatarbelakangi oleh batas pelaporan yang semula tanggal 10 bulan berikutnya menjadi setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Namun, perubahan batas waktu tersebut baru disampaikan tanggal 19 Maret 2025 oleh Direktorat KMEI

ONPPZA sesuai Surat Nomor B-PW.01.15.35.05.25.738 tanggal 19 Mei 2025 perihal Undangan Desk Pembahasan Usulan Target Indikator Pengawasan Label Produk Tembakau dan Rokok elektronik 2025-2029 di UPT BPOM. Hal ini menyebabkan pelaporan bulan Januari 2025 (13 dari 13), April (15 dari 18), Mei (8 dari 20) dianggap sebagai keterlambatan.

4. Monitoring SIPT terhadap pelaporan hasil pengawasan label tembakau sudah dilakukan sebelum waktu timeline. Namun, disebabkan perubahan timeline tanggal 10 menjadi tanggal 5 yang baru diketahui pada Bulan Mei 2025 membuat monitoring pada awal tahun belum berjalan secara optimal.
5. Kegiatan lain yang mendukung pencapaian kinerja:
 - a. Peningkatan kompetensi melalui Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau tanggal 4 Juni 2025
 - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Produk Tembakau Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2025

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	37.438.300	37.413.121	99,93	96,46 %	-0,03	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar -0,03 dengan kriteria tidak efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 belum sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Penggunaan anggaran untuk indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar mencapai 99,93%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 37.438.300,- dapat direalisasikan sebesar Rp 37.413.121,-.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan perencanaan pengawasan label tembakau sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengambilan sampel produk tembakau di peredaran melalui pengadaan sampel produk tembakau dan perjalanan dinas, serta evaluasi penandaan dan penginputan pelaporan melalui SIPT dan diakhiri monitoring pelaporan SIPT secara berkala setiap bulan.

Tidak efisiennya dalam pengelolaan anggaran ini tercermin melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran yang mengalami dinamika sangat tinggi pada triwulan I dan II tahun 2025, dimulai dari efisiensi hingga relaksasi yang mendorong kembalinya target pengawasan ke 12 label/bulan. Hal ini membuat penyerapan anggaran kembali

terkonsentrasi pada pengadaan sampel produk tembakau sehubungan dengan penyesuaian kembali target pengawasan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Balai POM di Bengkulu pada tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan diantaranya :

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
12.Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Terdapat penetapan target pengawasan produk tembakau dari pusat yang perlu dipenuhi dan ditindaklanjuti oleh Balai POM di Bengkulu	Penyusunan perencanaan pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dengan lebih komprehensif sehingga tidak melewati timeline yang ditetapkan.	membuat renlak pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik secara komprehensif	TW I	Y	S-06	pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan
	Tingginya target pengawasan label produk tembakau membuat monitoring pelaporan hasil pengawasan ke pusat kurang maksimal dan belum sepenuhnya dilakukan berkala	Melaksanakan monitoring penginputan SIPT hasil pengawasan label tembakau secara lebih intensif, sehingga menghindari timeline pelaporan sampai pada operator pusat.	Pelaksanaan Monev SIPT hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik setiap bulannya	TW I	Y	S-06	pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan

IKSS 1.13 – PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH UPT

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase pemenuhan target persentase pengendalian AMR di Wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) 2) Pelaksanaan Bimtek (B) 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: $\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,99	105,99	Sangat baik

Pada tahun 2025 Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR BPOM di Bengkulu sebesar 105,99 % dengan rincian komponen sebagai berikut :

1. KOMPONEN TOOLS PENGAWASAN AMR (A) sebesar 123,96 %

NO	Unit pelaksana Teknis	Komponen Tools Pengawasan (A)		
		Jumlah penggunaan tools antibiotik	Jumlah target apotek dan ketepatan	% Penggunaan Tools pengawasan AMR
1	UPT BPOM di Bengkulu	99,17 %	80 %	123,96 %

Dari total 43 sarana Apotek yang diawasi, sebanyak 99,17 % pengawasan telah menggunakan tools pengawasan antibiotik secara tepat

2. KOMPONEN BIMTEK (B) sebesar 100 %

NO	Unit pelaksana Teknis	Komponen Bimtek (B)		
		Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis	Target Bimtek dalam satu tahun	% Pelaksanaan Bimtek
1	UPT BPOM di Bengkulu	1	1	100 %

Balai POM di Bengkulu telah melaksanakan satu kali Bimbingan Teknis pengendalian AMR tahun 2025 sesuai dengan target tahun 2025 sehingga capaian komponen pelaksanaan Bimtek adalah 100 %

3. KOMPONEN ADVOKASI (C) sebesar 100 %

NO	Unit pelaksana Teknis	Komponen Advokasi (C)		
		Jumlah Kegiatan Advokasi	Target Advokasi dalam satu tahun	% Pelaksanaan Advokasi
1	UPT BPOM di Bengkulu	1	1	100 %

Balai POM di Bengkulu telah melaksanakan kegiatan advokasi terkait pengendalian AMR di Kabupaten Kota dengan out put berupa Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pengendalian AMR

4. KOMPONEN PUBLIKASI (D) sebesar 100 % (uraikan realisasi masing2 dapat dari mana perhitungannya)

NO	Unit pelaksana Teknis	Komponen Publikasi (D)		
		Jumlah Publikasi	Target Publikasi	% Pelaksanaan Publikasi
1	UPT BPOM di Bengkulu	2	2	100 %

BPOM di Bengkulu telah melakukan publikasi hasil pengawasan penyerahan antibiotik di sarana Apotek tahun 2025. Publikasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu semester 1 dan semester 2 tahun 2025. Publikasi dilakukan di media sosial facebook, instagram Balai POM di Bengkulu

NO	Komponen IKU AMR UPT				% Realisasi Capaian IKU AMR
	% Penggunaan Tools pengawasan AMR	% Pelaksanaan Bimtek	% Pelaksanaan Advokasi	% Pelaksanaan Publikasi	
1	123,96 %	100 %	100 %	100 %	105,99 %

Sehingga didapatkan Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR BPOM di Bengkulu sebesar 105,99 % dengan kriteria sangat baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT ini merupakan IKU baru untuk tahun 2025, sehingga belum terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, implementasi pengendalian AMR telah berjalan hanya mencakup penggunaan tools pengawasan antibiotik dalam inspeksi rutin sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek, tetapi belum terdapat pengukuran kinerja dalam IKU sebagaimana tahun 2025 dengan komponen yang lebih kompleks.

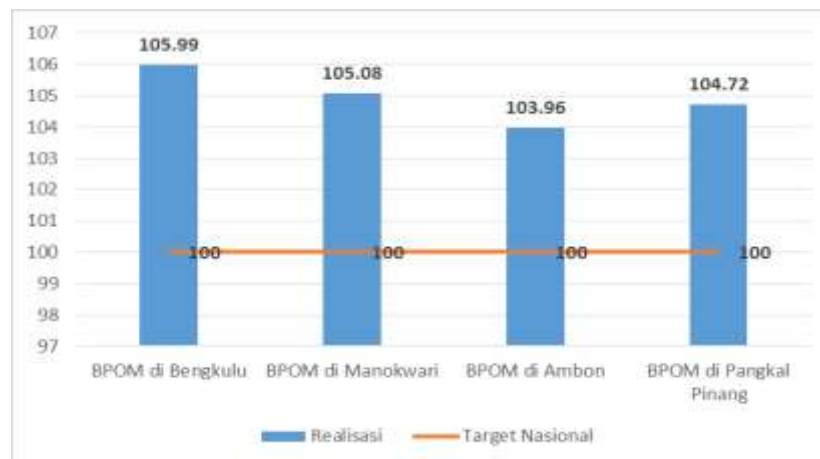
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	105,99	105,99	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 105,99 % jika di bandingkan dengan target renstra jangka menengah sebesar 100 % maka target 2029 tergolong telah tercapai/terlampaui dengan capaian 105,99 %, sehingga diperlukan kinerja yang baik agar realisasi target di 2029 jangka menengah tetap bisa tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Manokwari, Ambon, dan Pangkal Pinang. Berdasarkan realisasi tersebut, realisasi kinerja Balai POM di Bengkulu merupakan yang tertinggi dengan nilai 105,99% mengungguli realisasi POM di Manokwari (105,08%), Ambon (103,96%), dan Pangkal Pinang (104,72%).



Gambar 3.15. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian target Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT tahun 2025 telah tercapai dengan realisasi 105,99 % dengan nilai capaian 105,99 %.

Adapun faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Pemahaman yang baik dan memadai penggunaan tools antibiotik oleh petugas inspeksi dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek.
2. Komitmen yang tinggi oleh petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dalam penggunaan tools antibiotik. Hal ini terwujud melalui tercapainya jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek selama tahun 2025 sebanyak 43 sarana dengan persentase realisasi penggunaan tools antibiotik sebesar 123.59 %.
3. Melalui pemahaman dan komunikasi yang baik, pelaksanaan advokasi lintas sektor khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota telah mampu membangun komitmen kepala daerah dan Dinas Kesehatan kab/kota dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Output dari advokasi ini terwujud melalui terbitnya Surat Edaran Walikota/Bupati tentang pengendalian resistensi antimikroba.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya resistensi antimikroba sehingga menurunkan permintaan antibiotik tanpa resep dokter yang berkontribusi pada penurunan persentase Apotek yang menyerahkan antimikroba tanpa resep dokter. Hal ini terwujud karena adanya pelaksanaan sosialisasi, KIE serta terlaksananya publikasi AMR dan hasil pengawasan tahun 2025 secara berkala dan tepat waktu.
5. Dukungan yang berkesinambungan dari pemangku kepentingan meliputi Dinas Kesehatan, IAI, IBI, Dinas Kelautan dan Perikanan serta tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pengendalian resistensi antimikroba. Hal ini terwujud karena terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian antimikroba tahun 2025 yang mampu memberikan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengendalian AMR serta langkah aksi lanjutan berupa joint inspection yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini dengan rincian output 3165.QIC.004. Pencapaian kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT ditunjang dari 4 kegiatan (program) yaitu :

1. Kegiatan rutin pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek, dimana petugas harus tepat dalam pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik. Oleh karena itu petugas harus memahami cara pengisian tool antibiotik yang benar.
2. Advokasi lintas sector baik dengan Walikota/Bupati, organisasi profesi (IAI, PPNI, IBI) terkait efektivitas pengawasan Obat dan makanan serta pengendalian resistensi antimikroba untuk meningkatkan jejaring dalam menyebarkan informasi tentang AMR kepada masyarakat. Adapun surat edaran Walikota/Bupati tentang pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba yang telah terbit tahun 2025 S sejumlah 6 Surat Edaran yaitu :

1. Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 13 Agustus 2025
2. Surat Edaran Bupati Bengkulu Selatan nomor : 028/039/UU/Dinkes/2025 tanggal 16 September 2025
3. Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara Nomor : 400.7.23.1/5037/DINKES tanggal 31 Juli 2025
4. Surat Edaran Bupati Kaur Nomor : 400.7/925/Dinkes/2025 tanggal 18 Juni 2025
5. Surat Edaran Bupati Seluma Nomor 80 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025
6. Surat Edaran Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 100.3.4.2/0650/DINKES/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025
3. Bimbingan teknis pengendalian resistensi antimikroba dilaksanakan sesuai rencana melibatkan sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek di Kota Bengkulu yang telah dilaksanakan tanggal 16 September 2025, dengan narasumber Ibu Amatul Syukra Tampubolon dari Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Badan POM. Peserta adalah lintas sektor terkait Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Kelautan Perikanan, IAI, IBI, serta 30 sarana Apotek di Kota Bengkulu.
4. Joint Inspection yang dilakukan pada tanggal 27-28 Oktober 2025 bersama lintas sektor antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu. Pada Kegiatan ini dilakukan pemeriksaan bersama ke sarana perikanan lele, patin, peternakan sapi, Peternakan Bebek, Toko Penyalur pakan dan obat-obatan hewan. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko penyalahgunaan atau pelanggaran terkait penyediaan, distribusi/peredaran dan penggunaan bahan obat dan obat jadi untuk mengendalikan kasus resistensi antimikroba.
5. Publikasi hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah kerja BPOM di Bengkulu untuk mengetahui terkait penjualan abtibiobtik di Apotek. Publikasi dilakukan setiap semester. Pada semester 2 tahun 2025 telah dipublikasikan pada media sosial BPOM di Bengkulu bahwa penjualan antibiotik tanpa resep dokter sebesar 66,67 % untuk wilayah kerja Balai POM di Bengkulu, sedangkan untuk Provinsi Bengkulu sebesar 71,74 % penjualan antibiotek tanpa resep dokter.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	37.438.300	37.413.121	99,93	105,99 %	0,06	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,06 dengan kriteria efisien sehingga dapat

disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT. Penggunaan anggaran untuk indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT mencapai 99,93%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 37.438.300,- dapat direalisasikan sebesar Rp 37.413.121,-. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.06 yang tergolong kategori efisien.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah Advokasi Lintas sektor, pemeriksaan rutin sarana Apotek, bimbingan teknis pengendalian antimikroba, joint inspection.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT Balai POM di Bengkulu pada tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan diantaranya :

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	Tingginya praktik penyaluran antibiotik tanpa Resep dokter membuat perlunya kolaborasi lintas sektor, tetapi belum seluruh Kab Kota di wilayah kerja BPOM Bengkulu terdapat SE pengendalian AMR (Mukomuko), serta belum adanya advokasi AMR ke Gubernur	Melakukan Advokasi lintas sektor ke Gubernur Bengkulu dan Bupati Mukomuko untuk penerbitan Surat Edaran tentang Pengendalian resistensi antimikroba.	Melaksanakan Advokasi ke Gubernur dan Bupati Mukomuko tentang pengendalian AMR	TW 2	Y	S-07	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan dimasyarakat

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Belum adanya komitmen yang memadai pada stakeholder organisasi keprofesian di tingkat Kab/Kota terkait pengendalian AMR	Melakukan Advokasi dengan organisasi profesi IDI, IBI, IAI, PPNI di setiap kabupaten/Kota untuk dapat mendorong anggotanya berkomitmen dalam pengendalian resistensi antimikroba	Advokasi ke organisasi profesi dalam pengendalian AMR	TW I	Y	S-07	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan dimasyarakat
	Seiring dengan peningkatan target IKU 2026, perkembangan terkait AMR dan rotasi petugas di lingkup tim pemeriksaan, kompetensi petugas terkait AMR belum sepenuhnya merata	Peningkatan kompetensi petugas untuk penguasaan materi terkait regulasi, cara penggunaan antimikroba yang tepat, dan dampak resistensi antimikroba.	Pelatihan petugas BPOM untuk meningkatkan kompetensi dalam KIE pengendalian antimikroba	TW III	T		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan dimasyarakat

IKSS 1.14 - PERSENTASE PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Indikator kinerja **Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium** mengukur sejauh mana laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). SKL sendiri merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM secara Nasional. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM dievaluasi berdasarkan beberapa komponen, yang berbeda tergantung pada tingkat SKL :

Untuk SKL tingkat 4 dan 3, pemenuhan dievaluasi berdasarkan empat komponen utama, yaitu:

1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup pengujian.
2. Pemenuhan terhadap Standar Peralatan laboratorium.
3. Pemenuhan terhadap Standar Kompetensi Laboratorium, yang mencakup keahlian personel.
4. Pemenuhan terhadap Standar Metode pengujian yang telah terverifikasi.

Sementara itu, untuk SKL tingkat 2 dan 1, evaluasi pemenuhan didasarkan pada tiga komponen, meliputi:

1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup pengujian.
1. Pemenuhan terhadap Standar Peralatan laboratorium.
2. Pemenuhan terhadap Standar Kompetensi Laboratorium.

Balai POM di Bengkulu masuk dalam katagori Balai dengan Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 3.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	75%	76,9 %	102,5 %	Sangat baik

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 untuk Laboratorium Balai Besar/Balai POM di Tingkat provinsi dihitung dengan formula = $(50 \% \times A) + (20 \% \times B) + (20 \% \times C) + (10 \% \times D)$

- A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- D. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi. (uraikan perhitungan rinci masing2 komponen ini shg didapat realisasi 76,9%)

Perhitungan rinci capaian Balai POM di Bengkulu adalah sebagai berikut :

Target Nilai SKL tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian terhadap Target Tahun 2025 (%)
	SRL (A)	Standar Peralatan (B)	Standar Kompetensi Laboratorium (C)	Standar Metode Terverifikasi (D)		
	80,1	91,8	80	24,6		
Bobot	(50 % x A)	(20% x B)	(20% x C)	(10% x D)	Jumlah	
75	40,05	18,36	16	2,46	76,9	102,5

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan oleh PPPOMN setiap triwulan. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai berikut :

- Balai Besar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
- PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).
- Pembuatan 'Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT.
- Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan 'Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4' yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedepuyan 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan format penilaian assessment pemenuhan peralatan pada Triwulan IV 2023 yang disesuaikan dengan konsep regionalisasi laboratorium yang terbaru. Selanjutnya, pada tahun 2025 terdapat perubahan komponen penilaian dan definisi operasional dari indikator kinerja ini sesuai dengan Renstra 2025-2029, sebagaimana telah dijelaskan pada poin A. Sementara untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 komponen penilaian hanya terdiri dari 3 aspek yaitu :

1. Persentase pemenuhan standar ruang lingkup
2. Persentase pemenuhan kompetensi

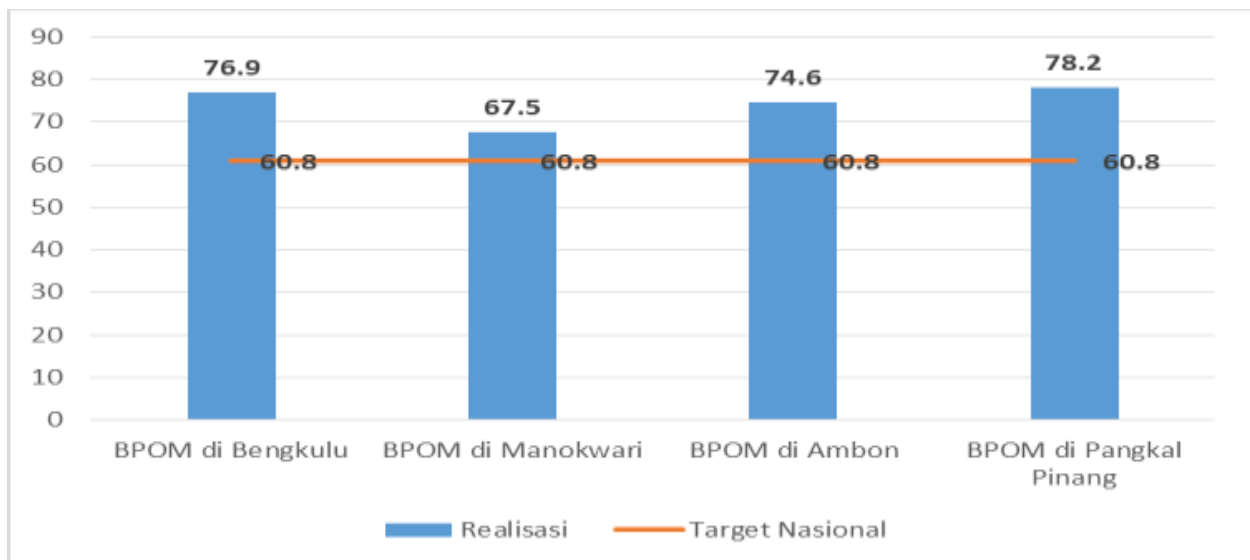
3. Persentase pemenuhan peralatan

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	83 %	76,9 %	92,65	Akan tercapai

Realisasi kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 menunjukkan tingkat capaian sebesar **92,65%** dengan kriteria **Akan Tercapai**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.16. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium dengan Balai sejenis dan Target Nasional.

Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator kinerja Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium pada Balai POM di Bengkulu berada pada urutan ke-2 (76,9%), setelah Balai POM di Pangkalpinang (78,2%).

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sebesar 102,5% (Sangat Baik) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Optimalisasi pemenuhan Standar Ruang Lingkup (Bobot 50%)

Komponen ini memiliki bobot terbesar dari nilai SKL secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menambah jumlah parameter pengujian kimia dan biologi yang terverifikasi sesuai standar ruang lingkup dapat berhasil mendongkrak dengan nilai capaian komponen 80,1 %.

2. Ketersediaan Peralatan Laboratorium sesuai standar peralatan (Bobot 20%)

Laboratorium kimia dan biologi Balai POM di Bengkulu telah memiliki peralatan yang lengkap ditinjau dengan standar peralatan pada SKL. Nilai Pemenuhan Peralatan Laboratorium sesuai standar mencapai 91,8 %. Balai POM di Bengkulu terus berusaha untuk mengajukann pemenuhan kekurangan peralatan laboratorium dan melaksanakan kalibrasi dan *maintenance* peralatan yang ada secara rutin untuk mencegah terjadinya *downtime* (waktu henti) alat, sehingga kesiapan peralatan selalu dalam kondisi prima saat dievaluasi oleh PPPOMN.

3. Peningkatan Kompetensi Personel (Bobot 20%)

Pada komponen kompetensi ini, capaian yang didapat sudah cukup baik yaitu 80 %. Keberhasilan laboratorium dalam memetakan kebutuhan kompetensi dan memenuhinya melalui pelatihan teknis, sehingga nilai kompetensi laboratorium meningkat. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan antara lain :

1. In House Trainning (IHT) Pengujian Kosmetik dengan judul Verifikasi Metode Analisa Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT pada bulan Juli 2025
2. IHT Lab. Obat dengan judul Verifikasi Metode Tropikamida dalam sediaan tetes mata secara KCKT dan verifikasi metode Dextrose dalam sediaan infus secara polarimetri pada bulan Juli 2025
3. IHT VERIFIKASI METODE ANALISIS MIKROBIOLOGI BERDASARKAN ISO 16140-3:2021 PENGUJIAN MIKROBIOLOGI
4. Workshop: Refreshment ISO 17025 dan Provider Uji Banding Antar Laboratorium Mikrobiologi
5. IHT Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen (As) dalam Susu Secara Spektrofotometri Serapan Atom-Hydride Vapour Generator (HVG-AAS)16/PA/MA PPPOMN/19

4. Verifikasi Metode Analisa (Bobot 10%)

Pada komponen ini laboratorium telah mencapai 24,6 % dari standar Metode Analisa yang ditetapkan. Tim laboratorium berhasil melakukan verifikasi metode analisis (MA) secara mandiri untuk metode-metode yang masuk dalam standar metode terverifikasi maupun dalam standar ruang lingkup. Selama tahun 2025 telah dilaksanakan Verifikasi metode Analisa dengan rincian pada Laboratorium ONAPPZA sebanyak 11 MA; Laboratorium OBA SKK sebanyak 3 MA; laboratorium Kosmetik sebanyak 8 MA; Laboratorium Pangan sebanyak 10; dan Laboratorium Mikro sebanyak 6 MA. Diantaranya dengan judul :

- Verifikasi Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT
- Verifikasi Disolusi amlodipin dalam sediaan tablet secara KCKT
- Verifikasi Angka Enterobacteriaceae pada produk pangan
- Verifikasi Penetapan Kadar Histamin dalam Produk Olahan Ikan

- Verifikasi Penetapan Kadar Natamycin dalam Keju

5. Efektivitas Monitoring Internal

Laboratorium Balai POM di Bengkulu telah konsisten membuat rencana pelaksanaan pemenuhan SKL seperti perencanaan program verifikasi alat dan juga identifikasi kebutuhan pelatihan personel pengujian. Program-program tersebut juga dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Selain itu, kedisiplinan dalam mengisi *tools* monev setiap triwulan memungkinkan Balai POM di Bengkulu mendeteksi potensi kegagalan lebih dini dan melakukan koreksi sebelum penilaian akhir tahun.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga disebabkan atas **pengendalian risiko yang telah dikelola dengan baik** sepanjang tahun 2025. Risiko yang telah dipetakan pada awal tahun berupa **Masih rendahnya jumlah metode analisa yang diverifikasi dari target yang ditetapkan** telah dikendalikan melalui :

1. Membuat program verifikasi MA
2. Monev program verifikasi MA

Namun demikian realisasi Verifikasi MA sesuai standar SKL masih tergolong kecil yaitu 24%. Kegiatan pengujian rutin yang padat menyebabkan pelaksanaan verifikasi metode MA ini hanya dapat dilakukan dengan jumlah 1 MA per penguji. Untuk kedepannya diharapkan verifikasi metode MA ini dilakukan bersamaan dengan pengujian rutin.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini adalah rincian output 3165.PDD.001 dan 3165.RAB.001. Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator **Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium** adalah :

- Pelaksanaan verifikasi metode Analisa dan monev terhadap program tersebut secara triwulan. Pelaksanaan kegiatan verifikasi metode analisis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada awal tahun dan terealisasi sepenuhnya sejumlah **38 verifikasi metode analisis (PER KOMODITI)** sesuai direncanakan dengan rincian 11 metode laboratorium ONAPPZA, 8 metode laboratorium kosmetik, 10 metode laboratorium Pangan, 3 metode laboratorium OBASKK dan 6 metode laboratorium Mikrobiologi.
- Pemetaan kompetensi yang didahului oleh identifikasi kebutuhan pelatihan personel laboratorium dapat menunjang pemenuhan kompetensi sesuai standar SKL. Beberapa pelatihan telah dilaksanakan pada tahun 2025, termasuk pelatihan untuk verifikasi metode analisa. Pelatihan internal yang dilakukan pada semua komoditi obat mampu meningkatkan serta menjaga kompetensi penguji, diantaranya :

Pelatihan internal :

- 1) In House Training Obat dengan judul Verifikasi Metode Tropikamida dalam sediaan tetes mata secara Spektrofotometri UV VIS dan verifikasi metode Dextrose dalam sediaan infus secara polarimetri pada bulan Juli 2025.
- 2) In House Training Kosmetik dengan judul Verifikasi Metode Analisis Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT pada bulan Juli 2025
- 3) In House Training Bidang Kimia Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kuasi “Verifikasi Metode Penentuan Kandungan n-Heksana dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Mass” pada bulan Oktober 2025
- 4) Workshop Refreshment ISO 17025 : 2017 Evaluasi Estimasi Ketidakpastian Pengujian pada bulan Mei 2025
- 5) *In House Training* berjudul “**Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen dalam Susu secara Spektrofotometri Serapan Atom dengan Hydride Vapour Generation (HVG-AAS)**” yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

Sementara Pelatihan Eksternal yaitu

1. Pelatihan Bidang Kimia Obat Bahan Alam di Balai Besar POM di Samarinda pada bulan Oktober 2025
 2. Selain itu, salah seorang penguji juga mengikuti pelatihan **Penetapan Kadar Simultan Pewarna pada Pangan Olahan secara KCKT-PDA** serta **Penetapan Kadar Migrasi Melamin pada Kemasan Pangan secara KCKT-UV** yang diselenggarakan oleh BPOM di Jambi pada bulan Agustus 2025.
- Adanya Program **Inovasi Simpan Kantor** yang merupakan sistem informasi yang memfasilitasi pengajuan pemeliharaan hingga pemantauan (tracking) proses pengajuan tersebut. Inovasi ini meningkatkan efektivitas pemeliharaan dengan memungkinkan proses yang sebelumnya tidak dapat ditelusuri menjadi dapat dipantau secara sistematis.
 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan yang dilakukan oleh tim akuntabilitas dan perencana memungkinkan permasalahan terdeteksi dan ditanggulangi sedini mungkin.
 - Pelaksanaan **verifikasi instrumen** dilakukan melalui kegiatan kalibrasi oleh PPPOMN, kalibrasi oleh penyedia, serta verifikasi internal yang dilaksanakan **sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan terealisasi sebesar 100%**. Verifikasi instrumen tersebut meliputi peralatan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), Spektrofotometer Serapan Atom (AAS), timbangan analitik, dan Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS).
 - Pelaksanaan **kalibrasi alat, cek antara timbangan**, dan kegiatan verifikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik, guna menjamin hasil pengukuran yang dihasilkan oleh peralatan memberikan data yang valid, akurat, serta meminimalkan kebutuhan koreksi dalam proses pengujian.

- **Pengadaan suku cadang** untuk peralatan AAS, HPLC, dan GC-MS telah dilaksanakan guna mendukung kinerja peralatan laboratorium dan meningkatkan efektivitas pelayanan laboratorium.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	6.394.172.000	6.394.018.622	100,00 %	102,5 %	0,03 (masuk kategori 0-0,2)	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,03 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah Peningkatan Kompetensi, Pengadaan alat, reagensia, Pembelian suku cadang untuk menunjang alat HPLC dan AAS , pemeliharaan peralatan secara berkala.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Adapun tindak lanjut atau rekomendasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja adalah:

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kod e risik o	Peristiwa Risiko
14.Persentase IPemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	Belum cukup terpenuhinya SKL dari komponen kecukupan verifikasi metode analisis	Meningkatkan jumlah rencana verifikasi metode Analisa baik yang masuk dalam Standar Ruang Lingkup maupun yang masuk dalam Verifikasi	1. Membuat program verifikasi MA sesuai metode analisa pada SRL 2. Monev program verifikasi MA	1. Progra m TW 1 2. Monev TW 2	Y	S-09	Masih rendahnya jumlah metode analisa yang diverifikasi dari target yang ditetapkan.

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah Sudah dikelol a sebagai risiko? (Y/T)	Kod e risik o	Peristiwa Risiko
		Metoda Analisa sesuai standar.					
		Pengajuan Pengadaan alat baru (seperti ICPMS) untuk menunjang pemenuhan standar peralatan	1. Pengajuan rekomendasi pengadaan alat ICPMS 2. Optimalisasi anggaran belanja modal utk membeli alat sesuai standar peralatan SKL	TW 1	T		
	Tingginya beban operasional alat lab tahun 2026 yang menuntut kecukupan pemeliharaan alat untuk mencegah kerusakan	Perencanaan pemeliharaan alat yang lebih terprogram sehingga kerusakan alat bisa dicegah sebaik mungkin	1. Membuat jadwal kalibrasi alat 2. Membuat jadwal pemeliharaan alat internal untuk alat microwave	TW 1	Y	O-02	Intsrumen pengujian di laboratorium pangan tidak dapatdigunaka n karena rusak.
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan yang menunjang pengujian rutin dan pengampu ruang lingkup yang telah terpenuhi pada SRL.	1. Membuat training need analisis (TNA) untuk mengidentifikas i kebutuhan pelatihan penguji 2. Membuat rencana pelatihan pengujian	TW 1	T		

IKSS 1.15 – PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Persentase Kab/Kota Pangan Aman

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100	Baik

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, UPT BPOM di Bengkulu menetapkan sasaran kegiatan berupa meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase kabupaten atau kota yang memperoleh pendampingan dalam pencapaian Kabupaten atau Kota Pangan Aman. Indikator tersebut menggambarkan komitmen UPT BPOM untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui pembinaan dan fasilitasi agar upaya keamanan pangan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 14,29% dan realisasi capaian tercatat sama, yaitu 14,29%. Kesetaraan target dan realisasi ini menghasilkan tingkat capaian 100% dengan kriteria Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa program pendampingan yang direncanakan telah terlaksana sesuai target kinerja tahunan, serta menjadi bukti bahwa koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten atau kota dapat dijalankan secara konsisten.

Secara makna kinerja, capaian 100% menegaskan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pendampingan sudah selaras, sehingga dukungan UPT BPOM dalam mendorong lingkungan pangan yang lebih aman dapat diupayakan sesuai mandat dan rencana kerja. Ke depan, capaian ini tetap perlu dijaga dengan memastikan kualitas pendampingan, terutama pada penguatan pemahaman standar keamanan pangan, perbaikan praktik pengelolaan pangan, dan penguatan koordinasi lintas sektor di daerah, agar keberhasilan kinerja tidak hanya tercermin pada angka capaian, tetapi juga pada dampak perlindungan kesehatan masyarakat.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan gambar perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja persentase kabupaten atau kota yang memperoleh pendampingan dalam pencapaian Kabupaten

atau Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, pada periode 2022 hingga 2024 indikator ini belum digunakan, sehingga tidak tersedia data target, realisasi, maupun capaian yang dapat dijadikan dasar perbandingan kinerja antarwaktu.

Pada tahun 2025, indikator ini mulai diintegrasikan ke dalam sistem pengukuran kinerja UPT BPOM di Bengkulu sebagai bentuk penguatan orientasi hasil pengawasan. Target ditetapkan sebesar 14,29% dan realisasi capaian menunjukkan angka yang sama, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Hasil ini menandai keberhasilan awal dalam implementasi indikator baru, sekaligus menunjukkan bahwa program pendampingan kepada pemerintah daerah telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sejak tahun pertama penerapannya.

Secara konseptual, munculnya indikator ini pada tahun 2025 mencerminkan pergeseran pendekatan kinerja dari sekadar pengawasan berbasis aktivitas menuju pengawasan berbasis dampak, khususnya dalam mendorong terwujudnya lingkungan pangan yang lebih aman di tingkat kabupaten atau kota. Meskipun belum dapat dibandingkan secara historis, capaian tahun pertama ini dapat menjadi baseline kinerja untuk evaluasi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perkembangan efektivitas pendampingan dapat dinilai secara lebih objektif dan berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	71,43	14.29	20,01	Perlu Upaya Keras

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah, dapat dijelaskan bahwa UPT BPOM di Bengkulu menempatkan sasaran kegiatan berupa meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT sebagai bagian dari agenda strategis jangka menengah. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase kabupaten atau kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten atau Kota Pangan Aman, yang mencerminkan peran aktif UPT BPOM dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah di bidang keamanan pangan.

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah, target indikator pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 71,43%. Sementara itu, realisasi capaian pada tahun 2025 baru mencapai 20,01%. Dengan perbandingan tersebut, tingkat capaian terhadap target jangka menengah berada pada kriteria Perlu Upaya Keras. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun program pendampingan telah mulai berjalan, kontribusinya terhadap target strategis jangka menengah masih perlu diperkuat secara lebih sistematis.

Secara substantif, hasil ini memberikan pesan penting bahwa tahun 2025 dapat dipandang sebagai fase awal konsolidasi pelaksanaan indikator baru. Capaian yang masih sepertiga dari target jangka menengah menegaskan perlunya akselerasi pada tahun-tahun berikutnya, baik melalui perluasan cakupan kabupaten atau kota yang didampingi, penguatan kualitas pendampingan, maupun peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja tidak hanya diarahkan pada pemenuhan angka target, tetapi juga pada penguatan dampak nyata terhadap terwujudnya lingkungan pangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan merupakan IKU baru

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan kinerja pada tahun 2025 terutama terlihat dari hasil tools yang dikirimkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan nilai 96%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara administratif, Pemda telah mampu memenuhi sebagian besar indikator yang dipersyaratkan dalam program Kabupaten atau Kota Pangan Aman. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu adanya komitmen pimpinan daerah, ketersediaan dokumen kebijakan pendukung, serta meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam menyiapkan data dan bukti pelaksanaan kegiatan. Pendampingan dari UPT BPOM juga berperan penting dalam memperkuat pemahaman teknis terhadap indikator, sehingga proses pengisian tools dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah.

Dari sisi peningkatan kinerja, tahun 2025 dapat dipandang sebagai fase awal konsolidasi, mengingat indikator ini baru diterapkan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang belum memiliki ukuran kinerja serupa, kehadiran indikator ini sendiri sudah menjadi bentuk kemajuan dalam tata kelola pengawasan pangan. Capaian administratif yang tinggi menandakan adanya kesiapan kelembagaan yang relatif baik untuk melangkah ke tahap penguatan implementasi.

Situasi ini menjelaskan dinamika peningkatan dan keterbatasan kinerja secara lebih utuh. Peningkatan terjadi pada aspek tata kelola dan kesiapan sistem, sedangkan keterbatasan muncul pada aspek eksekusi dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, perbaikan kinerja ke depan perlu difokuskan pada penyelarasan antara capaian administratif dan kualitas implementasi, agar tidak lagi terjadi jarak yang lebar antara nilai tools dan penilaian juri. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pada periode berikutnya tidak hanya terjadi peningkatan angka capaian, tetapi juga peningkatan mutu pelaksanaan yang lebih terasa bagi masyarakat, terutama dalam upaya perlindungan kesehatan melalui penguatan keamanan pangan di Kota Bengkulu.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh sinergi berbagai faktor pendukung yang saling terkait. Dari aspek **Man (SDM)**, petugas Balai POM di Bengkulu telah

memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam melakukan advokasi serta memahami juknis dan tools pemenuhan persentase kabupaten/Kota pangan aman.

ketersediaan petugas yang telah dilatih di bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, dan POSS menjadi kekuatan utama dalam memastikan pelaksanaan pengawasan, pembinaan, serta tindak lanjut berjalan sesuai kompetensi dan standar teknis. Keberadaan Tim Koordinasi Teknis Keamanan Pangan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.

Dari sisi **Material**, dukungan sarana prasarana pengawasan, ketersediaan dokumen regulasi, serta akses kerja sama pengujian keamanan dan mutu pangan dengan laboratorium pemerintah dan swasta, termasuk BPOM di Bengkulu, memungkinkan proses pengawasan dan pembuktian kepatuhan dilakukan secara objektif dan terverifikasi. BPOM di Bengkulu juga menyediakan produk KIE berupa brosur dan leaflet keamanan pangan, contoh draft SK TKKPOM dan SE Germas SAPA, reagen rapid testkit formalin, boraks, methanol yellow dan Rhodamin B, yang digunakan untuk membantu pengawasan PSAH, PSAT, PSAI, PIRT dan POSS. Faktor **Money** turut berkontribusi melalui tersedianya anggaran pelayanan publik pada tahun 2024 dan 2025 untuk perizinan dan pengawasan pangan, meskipun masih bersumber dari DAU dan DBH, namun tetap mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan prioritas keamanan pangan. Selain itu BPOM di Bengkulu juga meanggarkan kegiatan pengawasan bersama tim TKKPOM di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2025, dengan melakukan pengawasan terhadap PSAH, PSAT, PSAI, PIRT dan POSS.

Dari aspek **Method**, keberhasilan ditopang oleh penerapan metode kerja yang mengacu pada NSPK, meliputi pengawasan pre-market dan post-market, pembinaan dan monitoring pelaku usaha, pelaksanaan GERMAS SAPA, serta mekanisme koordinasi rutin melalui Tim Koordinasi Teknis Keamanan Pangan. Adanya regulasi tentang pengawasan keamanan pangan di Kota Bengkulu yaitu dengan adanya SK tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Bengkulu, Nomor 201 Tahun 2025 dan Adanya Keputusan Walikota Nomor : 233 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman di Kota Bengkulu. Metode ini memastikan kegiatan tidak bersifat ad hoc, melainkan sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, **Measurement** diwujudkan melalui penggunaan indikator terukur dalam tools penilaian, didukung oleh data dukung yang lengkap berupa laporan kegiatan, berita acara, dokumentasi lapangan, serta bukti tindak lanjut pelaku usaha, sehingga capaian kinerja dapat diukur dan diverifikasi secara akuntabel.

Sementara itu, faktor **Lingkungan (Environment)** turut memperkuat keberhasilan, ditandai dengan dukungan kebijakan daerah melalui integrasi program keamanan pangan dalam dokumen perencanaan pembangunan, keterlibatan aktif OPD teknis, partisipasi masyarakat dan kader keamanan pangan di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta munculnya berbagai inovasi daerah di bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, dan POSS. Kondisi lingkungan kebijakan dan sosial yang kondusif ini menciptakan ekosistem keamanan pangan yang mendukung pencapaian IKU secara berkelanjutan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini adalah rincian output 3165.QIA.001. Pencapaian persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman Kota Bengkulu merupakan hasil dari interaksi berbagai program dan kegiatan lintas sektor yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat. Penilaian terhadap indikator ini tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan kegiatan semata, tetapi juga pada konsistensi implementasi, keterpaduan dalam perencanaan daerah, serta kelengkapan data dukung yang diverifikasi melalui tools penilaian resmi. Keberhasilan persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman Kota Bengkulu **didukung oleh kegiatan dan berbagai upaya** yang dilakukan Balai POM di Bengkulu meliputi :

1. Dilaksanakannya kegiatan advokasi ke Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 12 September 2025 Yang dihadiri oleh Dinas DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu. Dalam kegiatan advokasi ini disampaikan manfaat dari penilaian mandiri dan melihat komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. BPOM di Bengkulu melakukan pendampingan dengan memantau pelaksanaan pengisian tools penilaian mandiri agar terisi dengan baik dan benar, menjawab pertanyaan Kabupaten/Kota, dan menilai kesesuaian data dukung yang di isi oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Selain itu dilakukan monitoring agar seluruh pengisian data dukung selesai sesuai. Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan ke tiap OPD yaitu sebagai berikut
 - a. Dinas kesehatan tanggal 09 September 2025
 - Terdapat petugas terlatih di bidang PIRT, POSS
 - Terbitnya Keputusan Walikota Nomor : 233 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman di Kota Bengkulu
 - Terdapat akses kerjasama pengujian keamanan dan mutu pangan dengan laboratorium pengujian swasta dan pemerintah dalam hal ini BPOM di Bengkulu
 - Pada pengawasan POSS, 70% Tempat pengolahan pangan (TPP) memenuhi kesehatan lingkungan
 - Terdapat regulasi dalam penatalaksanaan KLB keracunan pangan di Kota Bengkulu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nomor : 443/31 b/D.KES/2018 Tentang Tim gerak Cepat (TGC) Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
 - Terdapat program pembinaan pelaku usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan
 - Pelaksanaan keamanan pangan oleh pelaku usaha POSS telah berjalan dengan baik, dimana TPP seluruhnya memperhatikan tahapan proses pangan siap daji dan terdapat tindak lanjut setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan.

- b. Dinas Perikanan tanggal 23 September 2025
 - Terdapat petugas terlatih di bidang PSAI
 - Terdapat kegiatan pembinaan dan monitoring pangan segar asal ikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Bengkulu
 - Terdapat program pembinaan pelaku usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan
- c. DPMPTSP tanggal 24 September 2025
 - Tersedianya anggaran pelayanan publik tahun 2024 dan 2025 terkait perizinan berusaha di bidang PSAT, PSAH, PIRT dan POSS yang berada dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Bappeda Kota Bengkulu tanggal 25 September 2025
 - Terdapat program pengawasan keamanan pangan dalam dokumen perencanaan daerah antara lain : Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025
 - Terdapat inovasi pemerintah Kota Bengkulu terkait keamanan pangan di bidang PSAT (Menangkap Ikan Gebur, D'REM Ceting/Daun Remungai cegah stunting), PSAH (Kelok Nekek, Yanduan/pelayanan terpadu hewan, Insang/Inseminator sang petualang), PSAI (Pikikir dulu, Si Manja Lusi, Pokdakan tinile), PIRT (Sibute ungu, dewa braksi, pdajo, unpeco), POSS (Mekar Bengkulu, Mabagusi, Penyu Kantin, Masbing).
 - Terdapat penghargaan yang diterima pemerintah daerah Kota Bengkulu terkait keamanan pangan dan kesehatan antara lain penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public (opini) pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 berupa zona hijau kualitas tertinggi yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan DPMPTSP Kota Bengkulu, MI Humaira Kota Bengkulu memperoleh Juara I Sekolah dengan PJAS AMAN Tingkat Nasional Regional Barat, Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu melalui puskesmas Beringin Raya untuk inovasi Gardu Pelangi (Gerakan Peduli Pemeriksaan Gula Darah dan Tekanan Darah Tinggi Terkendali)
- e. Dinas Kominfo Kota Bengkulu tanggal 26 September 2025
 - Kegiatan Pemberdayaan masyarakat oleh Balai POM di Bengkulu telah secara aktif mendapat respon yang baik dari masyarakat, ditunjukkan dengan dukungan peran serta kader yang mensosialisasikan keamanan pangan, serta adanya akses informasi dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat melalui media sosial di 9 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu

- f. Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu tanggal 29 September 2025

- Terdapat petugas terlatih di bidang PSAH, PSAH
- Terdapat akses kerjasama pengujian keamanan dan mutu pangan dengan laboratorium pengujian swasta dan pemerintah dalam hal ini BPOM di Bengkulu
- Terdapat program pembinaan pelaku usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan
- Pada pelaksanaan keamanan pangan oleh pelaku usaha PSAH, terdapat ≥ 50 % Unit usaha produk hewan yang dibina telah memiliki sertifikat NKV atau dalam pembinaan NKV dan 61-100% pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

Dimana melalui kegiatan pendampingan terjadi peningkatan nilai pemenuhan tools Kabupaten/Kota Pangan Aman dari 41 menjadi 96.

3. Dilakukan kegiatan pelaporan Kabupaten/Kota Pangan Aman tepat waktu yaitu tanggal 30 September 2026.
4. Kegiatan pembinaan secara berkelanjutan oleh Balai POM di Bengkulu dalam mengawal pelaksanaan program kerja pengawasan keamanan pangan oleh tim koordinasi teknis keamanan pangan di Kota Bengkulu, meliputi kegiatan pembinaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, monitoring dan evaluasi keamanan pangan, laporan kinerja TKKPOM, menyampaikan laporan ke pemerintah daerah dan dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi TKKPOM di Kota Bengkulu

Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	83.361.600	83.351.781	99,99	100	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan indikator persentase kabupaten atau kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten atau Kota Pangan Aman pada tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp83.361.600. Realisasi anggaran tercatat Rp83.351.781, sehingga tingkat penyerapan mencapai 99,99%. Pada saat yang sama, capaian indikator kinerja mencapai 100%, yang menandakan bahwa output kinerja yang ditargetkan berhasil dipenuhi secara penuh.

Kombinasi antara capaian indikator yang maksimal (100%) dan realisasi anggaran yang sedikit lebih rendah daripada pagu yang ditetapkan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara hati-hati dan tepat sasaran. Selisih kecil antara target dan realisasi anggaran dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian belanja, misalnya melalui efisiensi biaya operasional, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, atau optimalisasi sumber daya yang tersedia. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, situasi ini menggambarkan keterkaitan yang baik antara input (anggaran) dan output (capaian indikator), karena target kinerja tercapai tanpa melampaui pagu, sehingga pada tabel dinilai dengan kriteria Efisien.

Secara konseptual, analisis efisiensi dalam pengukuran kinerja publik menekankan pentingnya hubungan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, yakni bagaimana organisasi dapat mencapai target dengan pengeluaran yang terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka penganggaran berbasis kinerja juga menekankan bahwa kualitas belanja tercermin dari kemampuan menjaga konsistensi antara realisasi anggaran dan pencapaian kinerja, bukan semata-mata dari tingginya serapan anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja indikator persentase kabupaten atau kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten atau Kota Pangan Aman pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, penerapan strategi pengendalian biaya melalui perencanaan kegiatan yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil telah membantu menekan pemborosan, sehingga realisasi anggaran dapat dijaga tetap optimal tanpa mengurangi kualitas output. Kedua, adanya integrasi kegiatan antara fungsi pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas program memungkinkan satu rangkaian aktivitas memberikan manfaat ganda, baik sebagai sarana peningkatan kapasitas daerah maupun sebagai pemenuhan indikator kinerja. Ketiga, pemanfaatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait turut memperkuat efisiensi, karena sebagian sumber daya dapat disinergikan, misalnya dalam kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi bersama. Kombinasi ketiga faktor tersebut menjadikan hubungan antara input anggaran dan output kinerja lebih seimbang, sehingga capaian indikator dapat diraih secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pendampingan belum sepenuhnya terfokus pada daerah yang paling siap sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pendampingan dan keberlanjutan capaian status daerah yang telah didampingi.	Pendampingan perlu diarahkan pada kabupaten atau kota yang paling siap untuk ditingkatkan statusnya, sekaligus memastikan daerah yang sudah didampingi tidak mengalami penurunan kualitas pelaksanaan melalui pendekatan berbasis tahapan	Menyusun pemetaan kesiapan kabupaten/kota berbasis skor tools penilaian (komitmen, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, inovasi) sebagai dasar penentuan prioritas pendampingan tahun 2026.	TW I 2026	Y	S-10	Tidak terpenuhinya tools penilaian kabupaten kota pangan aman
	Komponen penilaian kritis belum diperkuat secara merata, khususnya bukti implementasi teknis pengawasan, pembinaan sarana, dukungan laboratorium, dan tindak lanjut temuan.	Penguatan komponen yang biasanya paling menentukan dalam penilaian juri, seperti bukti implementasi teknis pengawasan pre market dan post market, pembinaan sarana dan pelaku usaha, dukungan pengujian atau laboratorium, serta tindak lanjut temuan	Melaksanakan pendampingan tematik berbasis komponen penilaian dengan melibatkan lintas sektor (Dinkes, DPMPSTSP, Kominfo, Bappeda, DKPP) dan mendokumentasikan evidensi kegiatan secara terstandar.	TW I-III 2026	Y	S-10	Tidak terpenuhinya tools penilaian kabupaten kota pangan aman
	Ditemukan variasi kualitas data dukung, ketidakterbacaan dokumen, serta ketidaksesuaian evidensi dengan indikator	menerapkan verifikasi internal sebelum penilaian eksternal, misalnya melalui daftar periksa	Menyusun checklist verifikasi internal KKPA, melakukan review evidensi oleh tim UPT, serta standarisasi sistem penyimpanan dan penamaan dokumen data	TW II 2026	Y	S-10	Tidak terpenuhinya tools penilaian kabupaten kota pangan aman

Indikator	Kendala / Permasalahan (akhir 2025 / awal 2026)	Rekomendasi 2026	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	penilaian pada tahap verifikasi.	evidensi minimal per komponen, penataan tautan data dukung yang seragam, serta pengecekan keterbacaan dan relevansi bukti terhadap indikator.	dukung.				

SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT Balai POM di Bengkulu berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, terdapat 1 indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu telah berhasil mewujudkan peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya capaian indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar **100%** yang juga menjadi capaian sasaran strategis 2.

2.1. PRESENTASI CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DI TINDAK LANJUTI SESUAI KETENTUAN

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Presentasi cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Presentasi cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	Baik

Target sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 50% berhasil dicapai. Hingga akhir tahun 2025, realisasi capaian mencapai 50 % dihitung dari jumlah sarana diperiksa (3 sarana) dibanding jumlah sarana fortifikasi yang ada (6 sarana), sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kriteria *Baik*.

Realisasi 3 (tiga) sarana Pangan fortifikasi yang diperiksa terdiri atas 1 (satu) sarana produksi minyak goreng sawit dan 2 (dua) sarana produksi garam beriodium yang seluruhnya berlokasi di kota Bengkulu.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

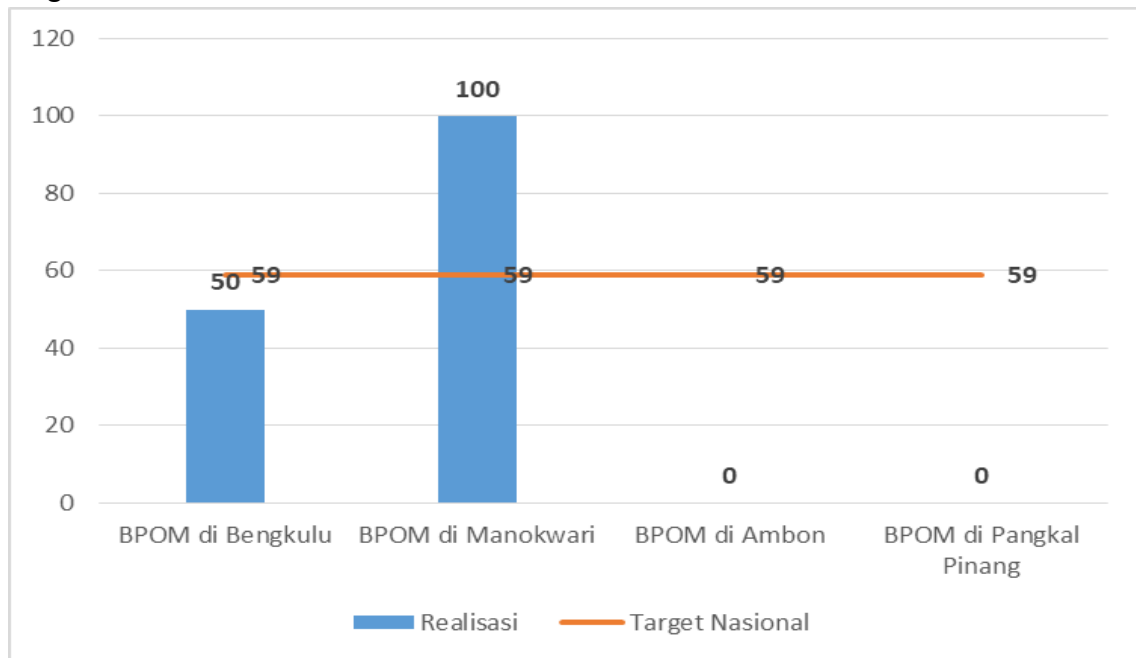
Indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan substansi dan ruang lingkup indikator. Pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, sarana produksi pangan fortifikasi tidak dipisahkan dari sarana produksi pangan olahan lainnya. Capaian hasil pengawasan ini menyatu dengan indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Sedangkan untuk sampling pangan fortifikasi, tahun 2020-2024 terpisah dari sampling pangan olahan lainnya dan terdapat perbedaan kesimpulan akhir jika produk disampling di sarana produksi dan di sarana peredaran. Pada tahun 2025, sampling juga dilakukan di sarana produksi dan hasilnya melekat terhadap kesimpulan hasil inspeksi sarana.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini, dengan hasil termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Presentasi cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	83	50	60,24	Perlu Upaya Keras

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.17. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Presentasi Sarana Produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ketentuan dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi pangan, Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Manokwari masing-masing mencapai capaian **100%**, yang menunjukkan seluruh sarana produksi fortifikasi yang menjadi sasaran telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Balai POM di Ambon dan Balai POM di Pangkal Pinang tidak mencatat capaian pada indikator ini (**0%**) karena pada periode pelaporan tidak terdapat sarana produksi fortifikasi pangan yang menjadi objek pemeriksaan di wilayah kerja masing-masing. Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan indikator ini telah disesuaikan dengan kondisi dan potensi pengawasan di lapangan, serta tetap mencerminkan kesiapan Balai POM dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut apabila terdapat sarana produksi fortifikasi yang menjadi sasaran pengawasan

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan hasil dukungan berbagai faktor yang saling berkaitan, serta penerapan pengelolaan risiko yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dari aspek sumber daya manusia (Man), meskipun Balai POM di Bengkulu menghadapi keterbatasan jumlah personel

pemeriksa, kegiatan pengawasan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini didukung oleh soliditas dan efektivitas kerja sama antarpetugas fungsi pemeriksaan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Pengawasan Pangan Fortifikasi tahun 2025. Peningkatan kompetensi tersebut berdampak positif terhadap kualitas pemeriksaan, khususnya dalam pemastian fortifikan, ketepatan klasifikasi temuan, serta penetapan kesimpulan hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan, telah diidentifikasi risiko utama dalam manajemen risiko, yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Rendahnya kepatuhan tersebut antara lain disebabkan oleh persepsi sebagian pelaku usaha yang menganggap penerapan CPPOB sebagai beban tambahan, serta masih ditemukannya sarana produksi yang telah memiliki laboratorium namun belum memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk pemastian mutu produk. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi mutu dan keamanan produk serta efektivitas hasil pengawasan apabila tidak dikelola dengan baik.

Sebagai langkah mitigasi terhadap risiko tersebut, Balai POM di Bengkulu menerapkan upaya pengendalian yang terukur melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan penetapan batas waktu yang jelas bagi sarana produksi. Selain itu, diterapkan sanksi secara bertahap sesuai ketentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hingga pemberlakuan sanksi administratif berupa Penghentian Kegiatan Sementara (PSK) bagi sarana produksi yang tidak memenuhi kewajiban perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Upaya pengendalian risiko ini berkontribusi dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta memastikan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan secara konsisten sesuai pedoman.

Dari aspek sarana dan prasarana (Machine), pelaksanaan kegiatan pengawasan didukung oleh ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, antara lain perangkat pengawasan berupa formulir checklist yang dilengkapi dengan perhitungan hasil penambahan fortifikan untuk memastikan kadar fortifikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu juga peralatan kerja seperti laptop dan printer portabel yang dapat digunakan secara fleksibel di lapangan, serta dukungan kendaraan dinas. Ketersediaan sarana tersebut memungkinkan petugas menjangkau lokasi sarana produksi, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau memiliki kendala geografis, sehingga kegiatan pemeriksaan dapat tetap dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya, dari aspek metode, sistem, dan regulasi (Method), pengawasan sarana produksi pangan olahan dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi dan pedoman kerja yang jelas serta terstandar. Pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.2B.01 tentang Pemeriksaan Sarana Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan, Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan yang Baik (Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2023), serta Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020). Kejelasan metode dan regulasi tersebut menjadi landasan bagi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan dan menetapkan tindak lanjut secara konsisten dan sesuai ketentuan.

Dari sisi bahan input (Material), tersedianya database sarana produksi pangan olahan yang telah dipetakan berdasarkan tingkat risiko menjadi dasar dalam perencanaan dan penetapan sasaran pengawasan. Database tersebut memungkinkan pelaksanaan pengawasan difokuskan pada sarana produksi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) mendukung proses pelaporan hasil pengawasan secara terstruktur, terintegrasi, dan tepat waktu kepada pusat.

Dukungan anggaran (Money) juga berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan, baik pemeriksaan lapangan maupun kebutuhan operasional pendukung lainnya, dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Dari aspek pengukuran kinerja (Measurement), indikator ini didukung oleh tersedianya definisi operasional dan mekanisme pengukuran yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi secara objektif. Kejelasan pengukuran tersebut juga mendukung ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT yang memiliki batas waktu pelaporan tertentu.

Selain itu, dari aspek lingkungan dan keterlibatan pemangku kepentingan (Lingkungan), terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, baik secara internal antartugas fungsi pemeriksaan dan tim pendukung, maupun secara eksternal dengan pelaku usaha, lintas sektor, serta pihak terkait lainnya. Lingkungan kerja yang kondusif serta sinergi antar pihak tersebut turut mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian risiko dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung indikator ini dengan rincian output 3165.QIC.003. Pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh:

1. Pelaksanaan program dan **kegiatan inspeksi** yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.2B.01 tentang Pemeriksaan Sarana Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan (Peraturan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2023), sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan.
2. Pelaksanaan **kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan** juga dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku (Peraturan BPOM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020). Penetapan jenis temuan dan tindak lanjut dilakukan secara tepat dan berkesinambungan, serta didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perbaikan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 3 (tiga) sarana produksi pangan fortifikasi, seluruh sarana atau 100 persen telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan hingga seluruh temuan dinyatakan selesai (*close*). Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepatuhan

pelaku usaha sekaligus memastikan bahwa proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan.

3. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi juga disertai dengan pengambilan sampel produk yang dihasilkan. Sampel tersebut kemudian diuji untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan mutu dan persyaratan fortifikasi. Dari tiga sarana produksi yang disampling dan diuji, terdiri atas dua produk garam dan satu produk minyak goreng, seluruhnya menunjukkan hasil memenuhi persyaratan.
4. Tindak lanjut hasil pengawasan sarana pangan fortifikasi diberikan tembusan kepada lintas sektor terkait sebagai bahan koordinasi, pembinaan, dan penguatan pengawasan bersama, guna memastikan pemenuhan persyaratan secara berkelanjutan serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui ketersediaan pangan fortifikasi yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh terjalannya komunikasi yang baik antara petugas pengawasan dengan pelaku usaha sebagai bagian dari upaya edukasi dan pembinaan. Melalui komunikasi yang efektif, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terutama pada pemenuhan persyaratan fortifikan dalam produk.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang berpedoman pada regulasi, didukung oleh tindak lanjut yang konsisten serta komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pelaku usaha dan lintas sektor, menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada tahun 2025.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Presentasi cakupan saran produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan di tindak lanjuti sesuai ketentuan	4.170.000	4.164.975	99,88	100	0,00	Efisien

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien. Berdasarkan data anggaran, target anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.170.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.164.975 atau sebesar 99,88% dari pagu anggaran yang tersedia.

Realisasi anggaran hampir sepenuhnya terserap. Capaian indikator kinerja yang dihasilkan mencapai 100 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Perbandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian indikator menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,00, yang termasuk dalam kriteria **efisien**.

Efisiensi ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang terencana dengan baik, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta koordinasi dan kerja sama tim yang efektif dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut pengawasan. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada indikator kinerja ini telah mampu mendukung pencapaian kinerja secara optimal tanpa pemborosan sumber daya.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025, dengan capaian kinerja sebesar **100 persen**, serta mempertimbangkan adanya peningkatan target pada Tahun 2026 dari 50 persen menjadi 67 persen, maka diperlukan sejumlah rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada Tahun 2026, sebagai berikut:

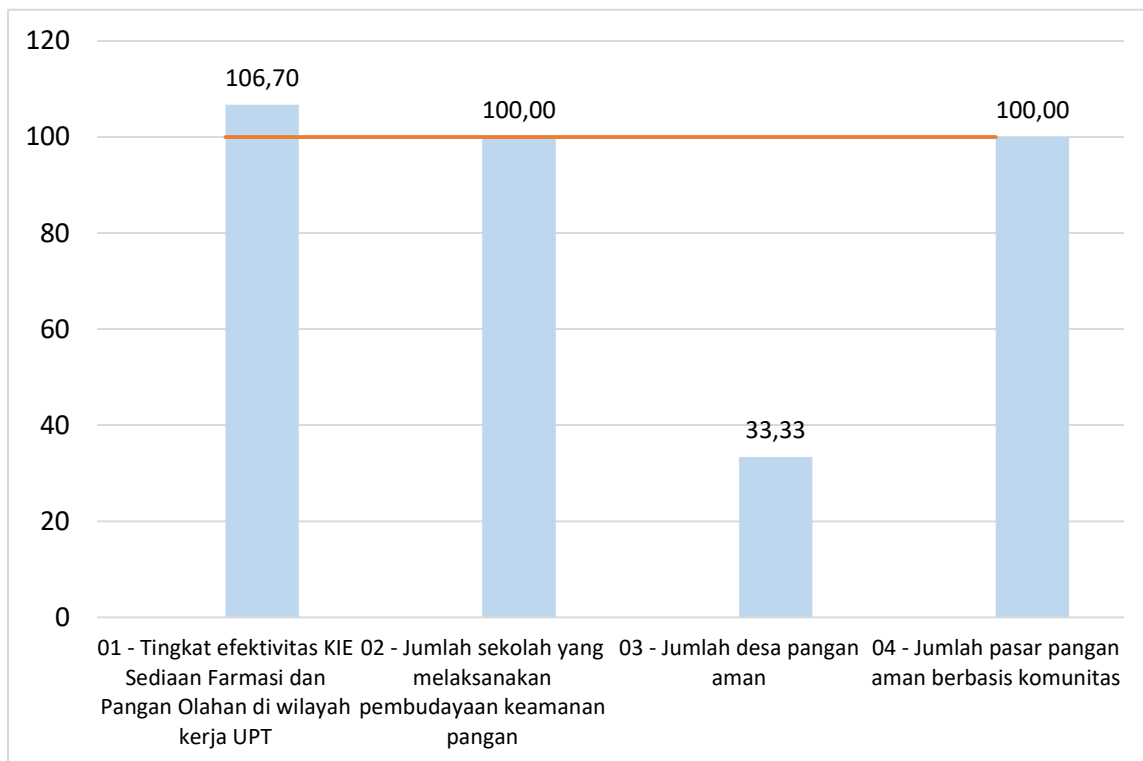
Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
01. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemutakhiran data sarana produksi belum dilakukan untuk menghadapi tahun 2026, berdasar tahun 2025 terdapat beberapa sarana yang terdaftar namun pada saat pelaksanaan pengawasan diketahui sedang tidak beroperasi atau tidak berproduksi lagi, sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian target pengawasan	Penguatan perencanaan berbasis risiko melalui optimalisasi pemanfaatan database sarana produksi berbasis risiko	Pemutakhiran database sarana produksi fortifikasi sebagai bagian dari perencanaan pengawasan tahun 2026	Triwulan 1- 2026	Y	S-12	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan fortifikasi tidak mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.
	Kompetensi personil terkait pengawasan pangan fortifikasi tidak merata, ditambah dengan kondisi adanya rotasi internal	Peningkatan kapasitas dan pemerataan kompetensi petugas	Pelatihan teknis pengawasan pangan fortifikasi	triwulan 1-2	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan CPPOB untuk pangan fortifikasi yang diproduksinya	Penguatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha	Pelaksanaan kegiatan pembinaan	TW 2-4	T		
	Keterlambatan pelaku usaha dalam melaporkan tindakan perbaikan hasil inspeksi sarana produksi pangan fortifikasi	Optimalisasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut	TW 1-4	Y	S-12	Pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan fortifikasi tidak mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.
	Pengawasan pangan fortifikasi belum sepenuhnya mengedepankan sinergi dengan lintas sektor dalam mendukung percepatan penurunan stunting	Penguatan koordinasi dan sinergi dengan lintas sector	Melakukan koordinasi dan berbagi data dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian/P perdagangan, dan instansi terkait dalam pembinaan sarana serta pemantauan ketersediaan pangan fortifikasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting.	TW 1-4	T		
	Keterbatasan sumber daya sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi anggaran	Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan kegiatan yang lebih terintegrasi	Penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko secara terintegrasi untuk optimalisasi penggunaan anggaran.	TW 1-4	T		

SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BENGKULU

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Balai POM di Bengkulu harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu.

Pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu telah **belum sepenuhnya berhasil** mewujudkan peningkatan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya 1 dari 4 indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 yaitu indikator desa pangan aman dengan capaian sangat rendah 33,3%. Nilai sasaran strategis dari keempat indikator ini sebesar 85,01% atau kriteria **Cukup**.



Gambar 3.18. Meningkatnya efektivitas kie di wilayah kerja balai pom di Bengkulu

IKSS 3.1 - Tingkat Efektivitas KIE

A. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	87.31	93.16	106.70	Sangat Baik

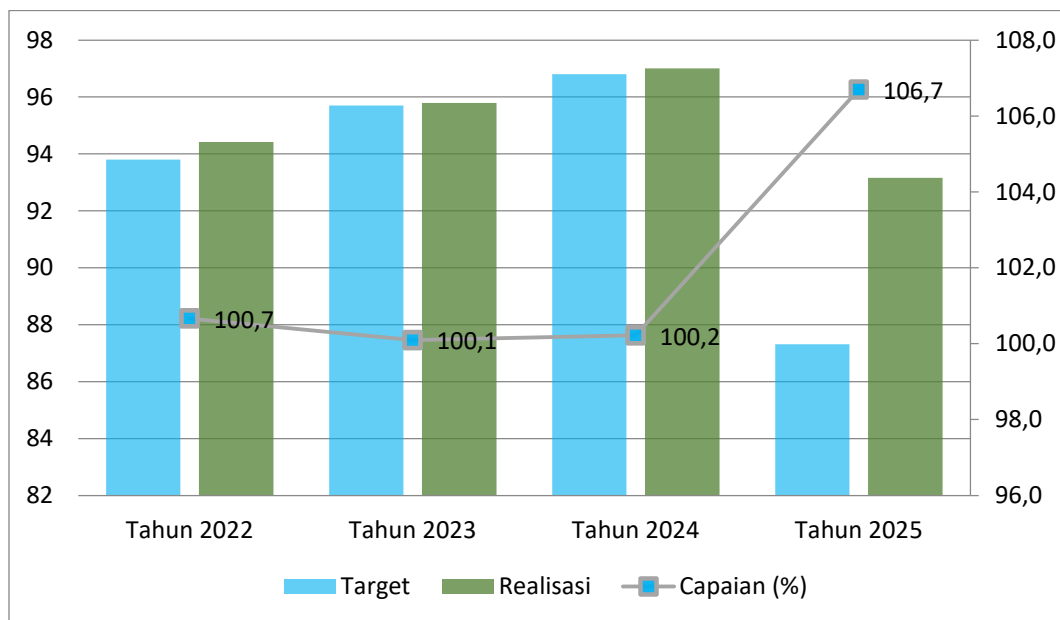
Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa sasaran kegiatan berupa meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu telah menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hasil survei efektivitas KIE ini dilakukan terhadap total jumlah responden 2.188 responden yang terdiri dari 1.925 tatap muka dan 263 media dengan Indeks Rata-Rata Final 93,16, yang menandakan bahwa KIE secara keseluruhan dinilai efektif. Hal ini tercermin dari indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT, dengan target tahun 2025 sebesar 87,31 dan realisasi mencapai 93,16. Capaian tersebut menghasilkan persentase kinerja sebesar 106,70%, sehingga diklasifikasikan dalam kriteria Sangat Baik.

Indeks Survei Tatap Muka (Total Responden : 1.925)			Indeks Survei MEDIA (Total Responden : 263)		
Average Values Of	Skala 4	Skala 100	Average Values Of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/P etugas	3.71	92.63	Sumber Informasi	3.95	98.72
Konten/Inform asi	3.69	92.26	Konten/Inform asi	3.95	98.73
Pemahaman Audiens	3.45	86.16	Pemahaman Audiens	3.78	94.39
Manfaat	3.45	86.18	Manfaat	3.85	96.25
Indeks Tatap Muka	89.31		Indeks Media	97.02	
Indeks Rata-Rata/Final	93.16				
Total Refsponden	2.188				
Kategori	EFEKTIF				

Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi KIE yang diterapkan, baik dari sisi perencanaan, metode penyampaian, maupun jangkauan sasaran, telah berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemahaman keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan kata lain, keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang baik antara upaya edukasi yang sistematis dan respons positif dari kelompok sasaran di wilayah kerja BPOM di Bengkulu.

Dalam perspektif manajemen kinerja, capaian di atas target juga memberikan sinyal bahwa organisasi telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan dampak yang lebih besar dari yang direncanakan. Ke depan, capaian ini perlu dijaga melalui konsistensi mutu pelaksanaan KIE serta penguatan mekanisme evaluasi, agar keberhasilan tidak hanya terukur dalam angka capaian tahunan, tetapi juga berkelanjutan dalam membentuk perilaku masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa kinerja efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT menunjukkan tren yang konsisten dan cenderung

menguat. Pada periode 2022 hingga 2024, capaian kinerja relatif stabil di atas target, dengan persentase capaian yang berada pada kisaran 100 persen setiap tahunnya. Pola ini mencerminkan bahwa pelaksanaan KIE telah berjalan secara berkelanjutan dan tidak bersifat sporadis, melainkan menjadi bagian dari praktik kerja yang semakin mapan.

Meskipun target tahun 2025 disusun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja justru meningkat secara signifikan. Kondisi ini menghasilkan lonjakan capaian hingga sekitar 106,7 persen, yang menempatkan kinerja pada kategori sangat baik. Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan KIE tidak hanya terjaga, tetapi juga semakin efektif dalam menjangkau sasaran dan menghasilkan dampak yang lebih kuat, meskipun dengan target yang lebih moderat. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dan ketepatan strategi dalam penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

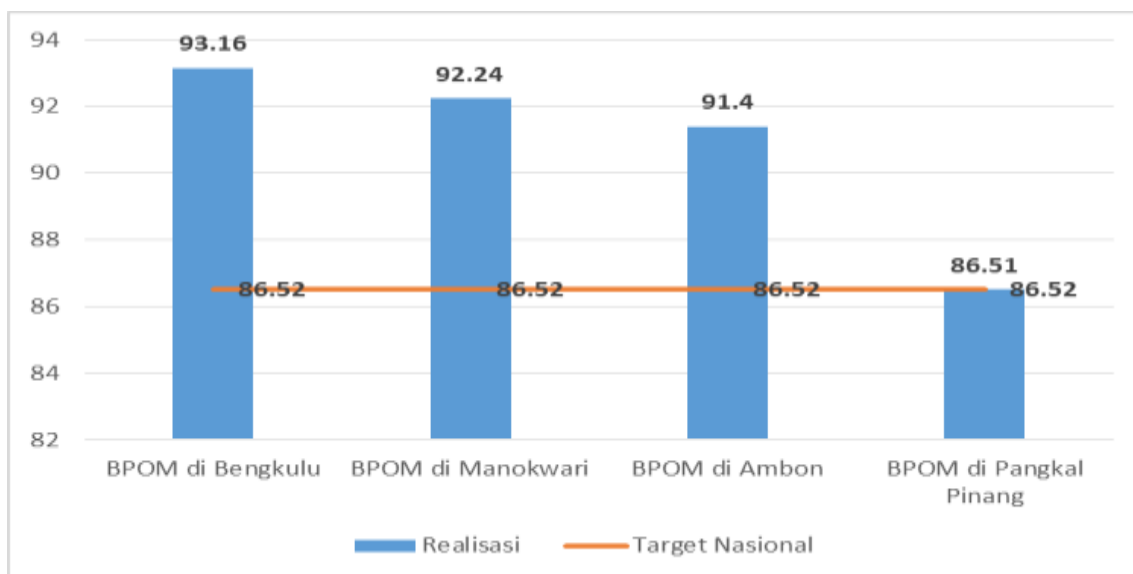
Dari perspektif manajemen kinerja sektor publik, tren ini mencerminkan dua hal penting. Pertama, terdapat kematangan organisasi dalam mengelola program KIE, yang ditandai oleh kemampuan menjaga konsistensi hasil dari tahun ke tahun. Kedua, capaian tahun 2025 memberi sinyal bahwa organisasi mulai memasuki fase optimalisasi kinerja, di mana kualitas pelaksanaan program mampu melampaui ekspektasi perencanaan. Dengan demikian, grafik ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan pencapaian angka kinerja, tetapi juga menggambarkan proses pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan edukatif kepada masyarakat.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90.8	93.16	102.60	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah, dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini tercermin dari indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan, di mana realisasi tahun 2025 mencapai 93,16, sementara target jangka menengah tahun 2029 ditetapkan sebesar 90,8. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 102,60% dari target jangka menengah dan dikategorikan tercapai bahkan melampaui.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.20. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan Balai POM sejenis dan Target Nasional

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu menunjukkan realisasi tertinggi (93,16%) dibanding Balai POM di Manokwari, Ambon dan Pangkalpinang. Tingginya realisasi yang melebihi target 87,31% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE telah berhasil meningkatkan jangkauan dan pemahaman masyarakat secara optimal dibanding Balai POM lain sejenis. Hasil ini menempatkan Balai POM di Bengkulu sebagai UPT berkinerja unggul pada indikator efektivitas KIE tahun 2025 serta memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian outcome perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan.

Realisasi Balai POM di Bengkulu bersama dengan Balai POM Manokwari dan Ambon juga telah melampaui target nasional sebesar 86,52.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025, pelaksanaan KIE UPT BPOM di Bengkulu dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan edukasi publik yang berjalan melalui dua jalur utama, yaitu tatap muka dan media, lalu ditutup dengan pengukuran efektivitas untuk memastikan pesan yang disampaikan benar-benar dipahami. Hasil survei efektivitas menunjukkan total 2.188 responden (1.925 tatap muka dan 263 media) dengan Indeks Rata-Rata Final 93,16, yang menandakan bahwa KIE secara keseluruhan dinilai efektif.

Melalui KIE tatap muka, BPOM Bengkulu melaksanakan KIE rutin yang menasar kelompok strategis seperti pelaku usaha, sekaligus menjalankan KIE tematik yang selaras dengan isu prioritas kesehatan masyarakat, termasuk KIE stunting yang menasar kelompok rentan seperti masyarakat umum, ibu hamil dan menyusui, serta kader. Pelaksanaan KIE tatap muka ini juga diperkuat dengan model kolaboratif melalui kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat, sehingga pesan KIE lebih mudah diterima karena “dibumikan” dalam konteks lokal dan didukung figur yang dekat dengan komunitas. Sementara itu, jalur media menjadi penguat yang sangat signifikan karena indeks efektivitas media mencapai 97,02, dan dinilai sangat efektif untuk menjangkau audiens lebih luas melalui format digital maupun cetak.

Capaian kinerja yang melampaui target pada 2025 masuk akal jika dibaca dari kombinasi kualitas pelaksanaan dan pemilihan kanal komunikasi. Pada aspek tatap muka, kualitas narasumber/petugas (92,63) dan kualitas konten/informasi (92,26) berada pada level yang kuat, sehingga kegiatan edukasi dinilai baik dari sisi penyampaian dan materi.

Pada saat yang sama, kanal media berfungsi seperti “pengganda jangkauan”, karena informasi dapat diakses lebih fleksibel dan berulang, serta tampil dalam berbagai format yang lebih mudah diterima masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kinerja pada 2025 tidak semata karena kegiatan lebih banyak, tetapi karena strategi komunikasinya lebih tepat: tatap muka menjaga kedalaman pesan, sedangkan media memperluas daya sebar.

Meski demikian, dokumen survei juga mengingatkan adanya ruang perbaikan yang penting untuk menjaga keberlanjutan hasil. Nilai pada aspek pemahaman audiens dan manfaat tercatat lebih rendah (86,18), yang berarti sebagian peserta sudah menerima materi, tetapi belum selalu mudah mengubahnya menjadi pemahaman mendalam atau praktik sehari-hari. Karena itu, perbaikan yang relevan bukan menambah materi baru sebanyak-banyaknya, melainkan memperkuat cara penyampaian agar lebih interaktif dan kontekstual, misalnya melalui diskusi kelompok atau studi kasus, penggunaan metode visual, serta peningkatan kapasitas narasumber dalam teknik komunikasi. Dengan penguatan ini, KIE 2026 berpeluang tidak hanya tetap tinggi secara skor, tetapi juga lebih terasa dampaknya pada perubahan pengetahuan dan perilaku sasaran.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Pada tahun 2025, pencapaian indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan ditopang oleh pelaksanaan program KIE yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan KIE yang dijalankan melalui **dua pendekatan utama**, yaitu tatap muka dan media, disertai pengukuran efektivitas sebagai umpan balik perbaikan. Survei efektivitas KIE mencatat total 2.188 responden (1.925 tatap

muka dan 263 media) dengan Indeks Rata-Rata Final 93,16, yang menunjukkan bahwa secara umum kegiatan KIE BPOM di Bengkulu telah efektif dalam mencapai tujuan edukasi publik.

- Upaya peningkatan **penyebarluasan KIE memanfaatkan media**. Keberhasilan capaian ini didukung oleh kinerja kanal media yang sangat tinggi, dengan Indeks Media 97,02, sehingga memperluas jangkauan dan memperkuat daya sebar pesan melalui bentuk digital maupun cetak seperti brosur, video, dan platform digital lainnya.
- Upaya **selektif dalam pemilihan narasumber dan materi KIE** mempertimbangkan karakteristik responden serta daya tarik dan kejelasan informasi materi. Hal ini turut berkontribusi pada kualitas pelaksanaan yang dinilai baik pada dimensi narasumber/petugas (92,63) dan konten/informasi (92,26), yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dan kompetensi penyampai telah memadai untuk mendukung proses edukasi.
- Adanya kegiatan bersama Komisi IX DPR RI Ibu Eko Kurnia Ningsih, sebanyak 10 titik dengan total peserta sebanyak 2000 orang yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 650.057.022 (realisasi 100%). Adapun pelaksanaan ke 10 titik itu adalah sebagai berikut:
 1. TITIK I: DESA BUMI HARJO, KEC. PINANG RAYA, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 24 MEI 2025 pagi hari, dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum laki-laki yaitu 135 orang dan perempuan 65 orang.
 2. TITIK II: DESA SUMBER MULIA, KEC. PINANG RAYA, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 24 MEI 2025 sore hari dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum laki-laki yaitu 125 orang dan perempuan sebanyak 75 orang
 3. TITIK III: DESA GIRI KENCANA, KEC. KETAHUN, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 25 MEI 2025 pagi hari, dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum laki-laki yaitu 146 orang dan perempuan sebanyak 54 orang.
 4. TITIK IV: DESA SKAMANAK DAN MARGA BAKTI, KEC. PINANG RAYA, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 25 MEI 2025 sore hari, dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum laki-laki yaitu 120 orang dan perempuan sebanyak 80 orang.
 5. TITIK V: DESA AIR PANDAN, KEC. PUTRI HIJAU, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 21 AGUSTUS 2025 pagi hari, dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum laki-laki yaitu 55 orang dan kaum Perempuan yaitu 145 orang .
 6. TITIK VI: DESA KARANG TENGAH, KEC. PUTRI HIJAU, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 20

- AGUSTUS 2025 dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum laki-laki yaitu 85 orang dan kaum Perempuan yaitu 115 orang
7. TITIK VII: DESA AIR PUTIH, KEC. MARGA SAKTI, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 23 AGUSTUS 2025 pagi hari, dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum Laki-laki yaitu 128 orang dan kaum Perempuan yaitu 72 orang .
 8. TITIK VIII: DESA SUKA MAKMUR, KEC. MARGA SAKTI, KAB. BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU dilaksanakan TANGGAL 23 AGUSTUS 2025 Sore hari, dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum Laki-laki yaitu 128 orang dan kaum Perempuan yaitu 72 orang .
 9. TITIK IX: DESA GIRI MULYA KEC. GIRI MULYA KABUPATEN BENGKULU UTARA, dilaksanakan 15 OKTOBER 2025 pagi hari dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum Laki-laki yaitu 129 orang dan kaum Perempuan yaitu 71 orang .
 10. Titik X: DESA WONOHARJO KEC. GIRI MULYA KABUPATEN BENGKULU UTARA, dilaksanakan tanggal 15 OKTOBER 2025 sore hari dengan jumlah peserta 200 orang terdiri dari kaum Laki-laki yaitu 134 orang dan kaum Perempuan yaitu 66 orang .

Secara keseluruhan peserta KIE Tomas dengan total 2000 orang peserta di 10 titik pelaksanaan KIE, diperoleh komposisi kaum perempuan total sebanyak 815 orang dan laki-laki sebanyak 1185, dengan persentase komposisi kaum perempuan sebesar 40,75 %.

Meskipun demikian, terdapat faktor yang perlu dicermati sebagai potensi penyebab “kegagalan relatif” apabila tidak ditangani, yaitu pada aspek yang paling dekat dengan dampak, yakni pemahaman audiens dan manfaat yang dirasakan. Pada KIE tatap muka, komponen pemahaman dan manfaat memperoleh nilai 86,18, lebih rendah dibanding kualitas narasumber dan konten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian peserta telah menerima informasi, namun belum seluruhnya mampu menangkap makna praktis atau menerapkan pesan KIE secara lebih mendalam dalam konteks keseharian. Dengan kata lain, program KIE sudah kuat pada sisi penyampaian dan relevansi materi, tetapi masih memerlukan penguatan pada sisi internalisasi pesan agar manfaatnya lebih nyata dirasakan oleh sasaran.

Sejalan dengan temuan tersebut, arah tindak lanjut yang paling relevan adalah memperbaiki desain kegiatan agar lebih partisipatif dan mudah dipahami. Rekomendasi yang mengemuka dalam hasil survei menekankan perlunya pendekatan tatap muka yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok atau studi kasus, penggunaan metode yang lebih visual dan berbasis pengalaman, pelatihan teknik komunikasi bagi narasumber, serta penyederhanaan materi tanpa mengurangi substansi. Dengan penguatan ini, program KIE tidak hanya mempertahankan capaian yang sudah tinggi,

tetapi juga meningkatkan kualitas dampak, khususnya pada peningkatan pemahaman dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	735.462.000	735.436.298	100	106,7	0,07	Efisien

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp735.462.000, dengan realisasi sebesar Rp735.436.298. Tingkat penyerapan anggaran ini mencapai 100%, menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan telah berjalan sangat tertib serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Di sisi lain, capaian indikator kinerja mencapai 106,7%, yang berarti hasil pelaksanaan kegiatan KIE tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya. Kombinasi antara realisasi anggaran yang terkendali dan capaian kinerja yang melampaui target menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,07 dan diklasifikasikan dalam kriteria Efisien. Secara substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah memberikan hasil yang optimal, di mana peningkatan efektivitas KIE dapat dicapai tanpa adanya pemborosan anggaran.

Pada tahun anggaran 2025, setelah adanya penyesuaian anggaran POK dari kementerian keuangan, terjadi revisi anggaran tahun berjalan pada kegiatan KIE dilakukan melalui penyesuaian volume kegiatan massal serta rasionalisasi paker perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas substansi program.

1. Pada POK awal 2025 kegiatan KIE pada MAK 3165.BDC. melalui skema pemberdayaan masyarakat melalui KIE dengan tokoh masyarakat dirancang sebanyak 30 kegiatan dengan 300 peserta kegiatan sehingga total sasaran mencapai 9.000 peserta. Namun pada POK akhir 2025, volume kegiatan direstrukturisasi menjadi 10 kegiatan dengan 200 peserta per kegiatan, sehingga total sasaran menjadi ± 2000 peserta. Penyesuaian ini diikuti dengan

rasionalisasi belanja perjalanan dinas dan paket meeting, serta pengurangan frekuensi kegiatan massal. Meskipun terjadi penurunan volume peserta secara kuantitatif, pendekatan pelaksanaan menjadi lebih terfokus dan berbasis kualitas, dengan optimalisasi peran tokoh masyarakat serta penguatan kanal media sebagai pengganda jangkauan informasi.

2. Dilakukan pemanfaatan anggaran dimana hanya terdapat pada POK 3 paket kegiatan KIE stunting, menjadi 7 paket kegiatan KIE stunting dengan melakukan kerjasama bersama Pemerintah desa pada kegiatan posyandu desa dengan total peserta sebanyak 269 orang dan total anggaran sebesar Rp. 25.746.000,-

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk meningkatkan realisasi kinerja tahun 2026 seiring dengan peningkatan target setiap tahun, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko / Risk Event
01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Metode KIE tatap muka masih dominan satu arah sehingga audiens kurang terlibat aktif dan pemahaman inti pesan belum optimal	tindak lanjut KIE Tatap muka dengan mengubah format KIE dari yang dominan satu arah menjadi lebih interaktif dan kontekstual, misalnya melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi sederhana, dan penggunaan media visual yang memudahkan peserta memahami inti pesan	Peningkatan kapasitas narasumber melalui pelatihan komunikasi publik	Tw 2	Y	S-13	Materi KIE yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh audiens

IKSS 3.2 - JUMLAH SEKOLAH YANG MEMBUDAYAKAN KEAMANAN PANGAN (INTERVENSI PJAS)

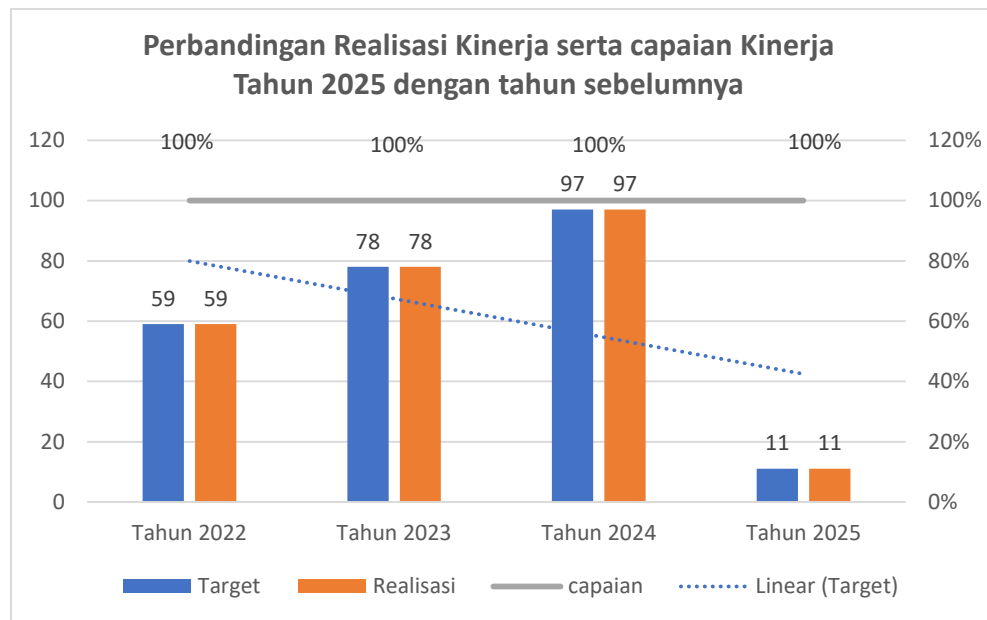
A. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan	11	11	100	BAIK

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada indikator Jumlah sekolah yang membudayakan keamanan pangan (Intervensi PJAS) mendapatkan intervensi PJAS, dengan jumlah sekolah target awal tahun 2025 sebanyak 11 sekolah target dan BPOM di Bengkulu mampu mencapai realisasi target tahun 2025 sebanyak 11 sekolah. Sehingga persentase capaian program nasional PJAS aman tahun 2025 adalah 100 % dengan kriteria BAIK.

Keberhasilan kegiatan Pro-PN PJAS Aman Tahun 2025 dapat dilihat pada jumlah sekolah intervensi target sebanyak 11 Sekolah di Kabupaten Seluma yaitu a.l: SDN 15 Seluma, SDN 04 Seluma, SDN 88 Seluma, SDN 140 Seluma, SDN 81 Seluma, SDN 83 Seluma, SDN 43 Seluma, SDN 55 Seluma, SDN 66 Seluma, SMPN 17 Seluma dan SMPN 23 Seluma, yang mendapatkan Intervensi PJAS Tahun 2025 telah memiliki Tim Keamanan pangan Sekolah dan pernyataan komitmen Kepala sekolah dalam menerapkan rencana aksi yang telah dibuat dalam rangka pembudayaan keamanan PJAS aman disekolahnya. Selanjutnya 11 Sekolah Yang diintervensi mampu menerapkan budaya keamanan pangan PJAS Aman disekolah dan hasil Nilai skor PSP adalah minimal 70 didapatkan dari hasil pengisian Formulir Sertifikasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Dengan demikian sekolah tersebut diberikan sertifikat dan mampu secara mandiri menerapkan budaya keamanan pangan disekolah. Adanya Dukungan Pemda, berupa Dukungan moril dan anggaran, untuk menggerakkan Sekolah yang telah diintervensi PJAS aman tahun 2025 ini melakukan replikasi kesekolah yang ada disekitar nya, bisa disekitar Desa dan antar desa dalam kecamatan

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Jumlah sekolah intervensi Pro PN PJAS aman, terlihat bahwa pada periode 2022–2024 kinerja BPOM di Bengkulu berada pada kondisi stabil karena realisasi selalu sejalan dengan target dengan tingkat capaian 100% setiap tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pada tiga tahun tersebut, perencanaan program dan dukungan sumber daya relatif memadai sehingga intervensi dapat dituntaskan sesuai jumlah sekolah PJAS aman yang ditetapkan sebagai sasaran.

Berdasarkan data kinerja pelaksanaan program pada periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terlihat adanya dinamika target jumlah sekolah yang menjadi sasaran intervensi, dengan tingkat capaian kinerja yang secara konsisten mencapai 100% pada setiap tahun pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas pencapaian target, program telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Periode 2022–2024 kinerja BPOM di Bengkulu terkait jumlah sekolah yang mendapatkan intervensi Pangan PJAS adalah masa periode 5 tahunan yaitu Tahun 2020-2024 dimana tahun 2022-tahun 2024 adalah masuk dalam tahun ke 3,4 dan 5 pada akhir masa periode 5 tahunan. Adapun pelaksanaan program Pro PN PJAS aman masa periode 5 tahunan yaitu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2020 dilakukan intervensi PJAS di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang sebanyak 6 sekolah dan Kabupaten Kaur sebanyak 10 sekolah, total 16 sekolah
2. Tahun 2021 dilakukan intervensi PJAS di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 17 sekolah dan Kabupaten Lebong sebanyak 7 sekolah, total 24

sekolah. Selain melakukan intervensi PJAS di ahun berjalan, Tahun 2021, BPOM Bengkulu juga melakukan pengawalan PJAS atas sekolah yang telah di intervensi tahun 2020 sebanyak 16 sekolah, jadi total jumlah sekolah yang dilakukan intervensi adalah 24 sekolah + 16 sekolah = 40 Sekolah

3. Tahun 2022 dilakukan intervensi PJAS di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Mukomuko sebanyak 15 sekolah dan Kabupaten Seluma sebanyak 4 sekolah, total 19 sekolah. Selain melakukan intervensi PJAS di ahun berjalan, Tahun 2022, BPOM Bengkulu juga melakukan pengawalan PJAS atas sekolah yang telah di intervensi tahun 2020 sebanyak 16 sekolah dan tahun 2021 sebanyak 17 sekolah, jadi total jumlah sekolah yang dilakukan intervensi adalah 24 sekolah + 16 sekolah + 17 sekolah = 59 Sekolah
4. Tahun 2023 dilakukan intervensi PJAS di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 10 sekolah dan Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 9 sekolah, total 19 sekolah. Selain melakukan intervensi PJAS di ahun berjalan, Tahun 2023, BPOM Bengkulu juga melakukan pengawalan PJAS atas sekolah yang telah di intervensi tahun 2020 sebanyak 16 sekolah, tahun 2021 sebanyak 17 sekolah dan tahun 2022 sebanyak 19 sekolah, jadi total jumlah sekolah yang dilakukan intervensi adalah 24 sekolah + 16 sekolah + 17 sekolah + 19 sekolah = 78 Sekolah
5. Tahun terakhir Fase periode 5 tahun yaitu Tahun 2024, dilakukan intervensi PJAS di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 9 sekolah dan Kota Bengkulu sebanyak 10 sekolah, total 19 sekolah. Selain melakukan intervensi PJAS di ahun berjalan, Tahun 2024, BPOM Bengkulu juga melakukan pengawalan PJAS atas sekolah yang telah di intervensi tahun 2020 sebanyak 16 sekolah, tahun 2021 sebanyak 17 sekolah, tahun 2022 sebanyak 19 sekolah dan tahun 2023 sebanyak 19 sekolah, jadi total jumlah sekolah yang dilakukan intervensi adalah 24 sekolah + 16 sekolah + 17 sekolah + 19 sekolah + 19 sekolah = 97 Sekolah

Pada Tahun 2022, target kinerja ditetapkan sebanyak 59 sekolah, dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan (100%). Capaian ini mencerminkan fase awal pelaksanaan program yang telah didukung oleh perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kapasitas pelaksana yang memadai dalam menjangkau seluruh sekolah sasaran.

Selanjutnya, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan target kinerja menjadi 78 sekolah, yang menunjukkan adanya eskalasi skala program. Peningkatan jumlah sekolah sasaran ini tetap diikuti dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa sistem pelaksanaan program mampu beradaptasi terhadap peningkatan beban kerja tanpa menurunkan kualitas pelaksanaan. Secara ilmiah, kondisi ini mencerminkan adanya penguatan tata kelola program, peningkatan pengalaman pelaksana, serta pembelajaran kebijakan (policy learning) dari tahun sebelumnya.

Tren peningkatan berlanjut pada Tahun 2024, dengan target yang kembali meningkat menjadi 97 sekolah. Pencapaian target secara penuh (100%) pada tahun ini menegaskan bahwa program telah berada pada fase maturitas implementasi, di mana mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring telah berjalan secara sistematis dan terstandar. Konsistensi capaian ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam manajemen risiko, terutama terkait keterbatasan sumber daya, waktu, dan kompleksitas lapangan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2022-2024, dimana target kinerja PJAS berdasarkan jumlah sekolah yang telah mendapatkan intervensi PJAS dan sudah pada tahap akhir program lima tahunan yaitu tahun 2024 (dimulai tahun 2020 hingga 2024), jumlah sekolah yang mendapatkan intervensi PJAS adalah akumulasi sekolah yang telah diintervensi dari tahun 2019 hingga 2024, dengan jumlah 97 sekolah. Sementara pada Tahun 2025 target kinerja ditetapkan sebagai jumlah sekolah yang membudayakan keamanan PJAS aman.

Pada tahun 2025 adalah tahun awal program lima tahunan sehingga jumlah sekolah yang membudayakan PJAS aman dimulai dari awal kembali. Pada tahun 2025, penetapan target semula diawal tahun yaitu sebesar 11 sekolah, lalu akibat adanya efisiensi dan atau pengurangan anggaran kegiatan PJAS maka jumlah sekolah target diturunkan menjadi 6 sekolah berdasarkan hasil Desk dengan Direktorat pengampu di Badan POM. Akan tetapi sejalan berjalannya waktu, setelah dilakukannya advokasi komitmen lintas sektor dalam program Pro PN meliputi Desa Pangan aman, Pasar aman dan Sekolah yang membudayakan PJAS aman, yang dilakukan pada tanggal 17 April 2025 di Aula Hotel Rizki, Tais, Kab. Seluma, maka dengan inisiatif Tim Infokom di akhir bulan April 2025 berdasarkan pertimbangan Sumberdaya dan subsidi silang anggaran maka dilakukan penetapan target menjadi 11 sekolah.

Pada tahun 2025 diperoleh keberhasilan capaian sebanyak 11 sekolah yang membudayakan PJAS aman dengan capaian seluruh tahapan PJAS aman mencapai 100%. Penurunan jumlah target ini tidak mencerminkan penurunan kinerja, dikarekan tahun 2025 adalah tahun awal program 5 tahunan sebagai base atau start awal dan lebih dapat dipahami sebagai penyesuaian kebijakan strategis, seperti fokus pada pendalaman kualitas intervensi dan keterbatasan anggaran. Dari perspektif evaluasi kinerja, 11 sekolah target telah mendapat capaian penuh sebanyak 100 persen seluruh tahapan PJAS adalah ukuran keberhasilan jumlah sekolah yang membudayakan keamanan pangan PJAS dan telah menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan konsistensi komitmen terhadap pencapaian indikator kinerja.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022–2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa program memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, ditandai dengan capaian target 100% secara berkelanjutan, meskipun terjadi fluktuasi jumlah sekolah sasaran. Hal ini disebabkan 2 fase yang berbeda dalam program 5 tahunan, dimana fase tahun 2022-2024 masuk dalam program fase Tahun 2020 - 2024, sementara program fase tahun 2025 adalah tahun awal pelaksanaan fase tahun 2025-2029. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan perencanaan berbasis kinerja, kapasitas implementasi yang stabil, serta dukungan pemangku kepentingan yang memadai. Dengan demikian, secara ilmiah dapat disimpulkan bahwa program tidak hanya berhasil memenuhi target kuantitatif, tetapi juga menunjukkan keberlanjutan kinerja yang positif dari tahun ke tahun.

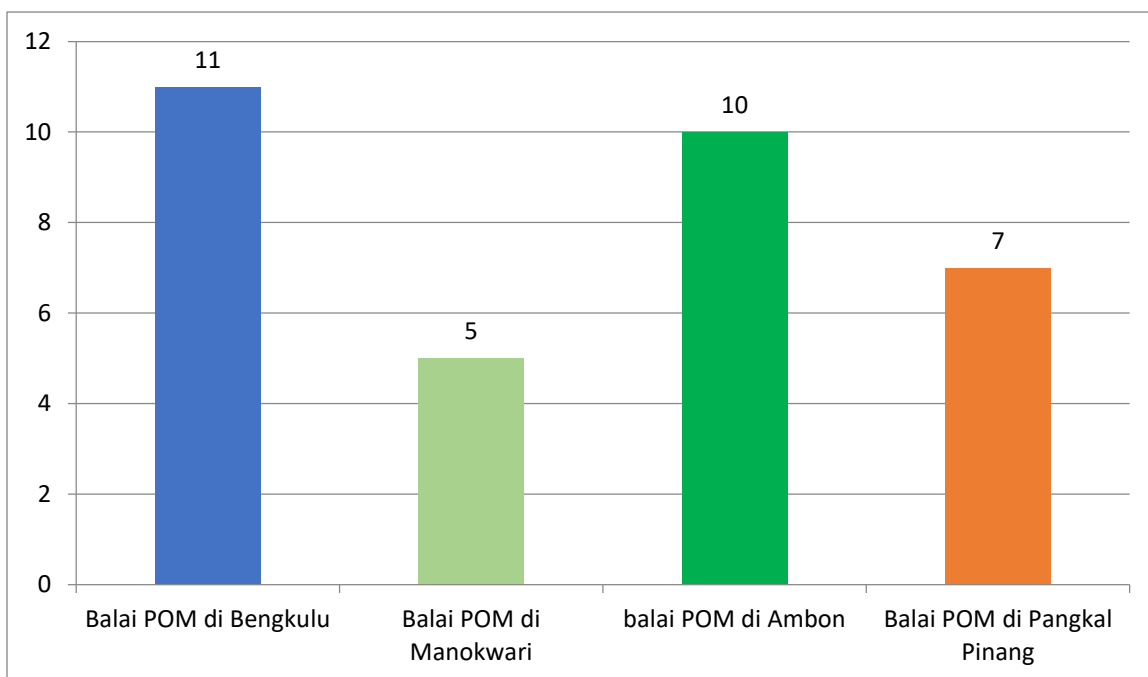
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan	15	11	73,33 %	Akan Tercapai

Berdasarkan perbandingan target kinerja, diketahui bahwa target Tahun 2029 ditetapkan sebanyak 15 sekolah, sedangkan target kinerja pada Tahun 2025 sebesar 11 sekolah. Secara kuantitatif, target Tahun 2025 baru mencapai 73,33% dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025, meskipun telah terealisasi 100% terhadap target tahunan, belum sepenuhnya memadai apabila dipandang dalam kerangka pencapaian target jangka menengah.

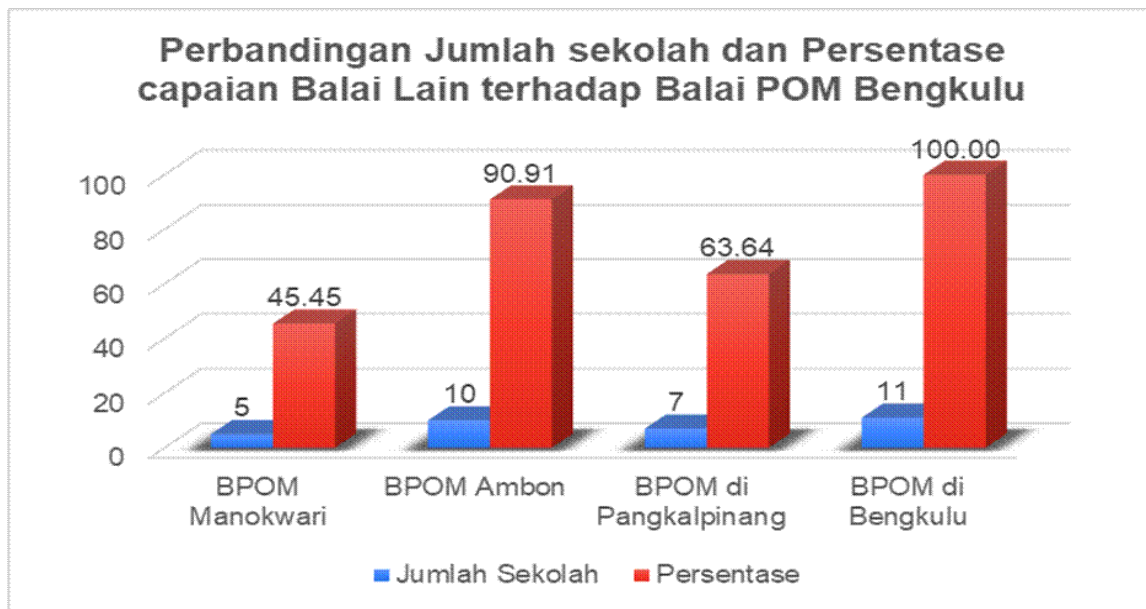
Perbedaan sebesar 4 sekolah antara target Tahun 2025 dan target Tahun 2029 mengindikasikan adanya kesenjangan kinerja (*performance gap*) yang perlu dikelola secara sistematis. Kesenjangan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kuantitas, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam optimalisasi perencanaan, alokasi sumber daya, serta perluasan jangkauan intervensi program pada periode berikutnya.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.22. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan Balai POM sejenis

Berdasarkan grafik di atas, realisasi jumlah sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan pada Balai POM di Bengkulu sejumlah 11 sekolah menduduki urutan pertama dibanding realisasi Balai POM lain sejenis, diantaranya Ambon (10), Pangkalpinang (7) dan Manokwari (5). Walaupun seluruh realisasi Balai POM telah mencapai target, dapat disimpulkan melalui realisasi tersebut bahwa Balai POM di Bengkulu tetap memiliki keunggulan dalam implementasi membentuk sekolah untuk membudayakan keamanan pangan.



Gambar 3.23. Realisasi Perbandingan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan capaian kinerja Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM lain sejenis

Berdasarkan data capaian indikator jumlah sekolah yang dibina dalam rangka pembudayaan keamanan pangan, Balai POM di Bengkulu menunjukkan kinerja yang paling optimal dibandingkan dengan balai pembanding antara lain BPOM Manokwari, BPOM Ambon dan BPOM di Pangkalpinang. Pada Tahun 2025, BPOM Bengkulu berhasil membina 11 sekolah dengan tingkat capaian 100,00%, yang menjadi standar pembanding bagi unit kerja lainnya.

BPOM Bengkulu dengan capaian **11 sekolah (100,00%)** menempati posisi tertinggi di antara balai pembanding. Capaian ini menunjukkan bahwa: Perencanaan program telah disusun secara realistis dan terukur, Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, Koordinasi lintas sektor berlangsung optimal dan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan. Keberhasilan ini mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik serta penerapan prinsip manajemen kinerja yang konsisten.

Sementara itu, jika dibandingkan capaian yang telah diperoleh BPOM Bengkulu terhadap tiga balai pembanding menunjukkan capaian yang bervariasi, baik dari sisi jumlah sekolah maupun persentase capaian relatif terhadap BPOM Bengkulu, yaitu:

- BPOM Manokwari: 5 sekolah (45,45% dari capaian BPOM Bengkulu)
- BPOM Ambon: 10 sekolah (90,91% dari Capaian BPOM Bengkulu)
- BPOM Pangkalpinang: 7 sekolah (63,64% dari Capaian BPOM Bengkulu)

Analisis Perbandingan Antar Balai POM di Bengkulu dibandingkan dengan Balai POM di Manokwari, Balai POM di Ambon dan Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

* BPOM Manokwari membina sebanyak 5 sekolah, dengan persentase capaian jumlah sekolah sebesar 45,45% dibandingkan BPOM Bengkulu. Capaian ini menunjukkan bahwa

realisasi kinerja BPOM Manokwari masih berada di bawah separuh capaian BPOM Bengkulu.

* BPOM Ambon mencatat capaian 10 sekolah dengan persentase 90,91% capaian jumlah sekolah BPOM Bengkulu. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja BPOM Ambon relatif mendekati capaian BPOM Bengkulu.

* BPOM Pangkalpinang membina 7 sekolah dengan persentase capaian 63,64% capaian jumlah sekolah BPOM Bengkulu. Capaian ini berada pada kategori menengah, lebih tinggi dari BPOM Manokwari, namun masih cukup jauh dari BPOM Bengkulu.

Secara keseluruhan, BPOM Bengkulu menunjukkan kinerja terbaik dengan capaian jumlah sekolah terbanyak yaitu 11 sekolah dengan persentase 100,% dan menjadi benchmark bagi balai pembandingan untuk Balai POM Manokwari, Balai POM Ambon dan Balai POM di Pangkalpinang.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Program Nasional PJAS Aman Sekolah Tahun 2025 di Kabupaten Seluma, yang ditandai dengan terealisasinya seluruh target kinerja (100%), tidak terlepas dari adanya sejumlah faktor pendukung yang berperan signifikan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Faktor-faktor tersebut mencerminkan keterpaduan antara perencanaan yang adaptif, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta komitmen dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan di tingkat pelaksana.

Pertama, perencanaan kegiatan yang disusun telah dilakukan secara sistematis dan disertai dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan merupakan faktor kunci keberhasilan. Perencanaan awal telah dirancang berdasarkan target kinerja dan kondisi riil lapangan, sehingga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, adanya fleksibilitas dalam penyesuaian jadwal pelaksanaan menunjukkan kemampuan manajerial dalam merespons dinamika dan kendala operasional yang muncul selama tahun berjalan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketercapaian target, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pelaksanaan kegiatan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Kedua, keterbatasan alokasi anggaran yang dihadapi dapat dikelola secara efektif melalui koordinasi dan kolaborasi lintas tim, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan advokasi. Selain itu, strategi pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan secara daring (online) menjadi langkah adaptif yang mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi substansi dan jangkauan kegiatan. Pengelolaan anggaran yang efisien ini mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam pelaksanaan program, di mana keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghambat pencapaian kinerja, melainkan mendorong inovasi dalam metode pelaksanaan.

Ketiga, petugas aktif dalam melakukan pembinaan dan memberikan umpan balik melalui WA Grup yang terwujud dengan hasil :

1. Terbentuknya peran aktif Kader Keamanan Pangan di masing-masing sekolah.

Kader tidak hanya berfungsi sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai agen

perubahan di lingkungan sekolah. Sikap proaktif kader dalam bekerja sama dengan tim pelaksana program menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kepemilikan (ownership) terhadap Program Nasional PJAS Aman Sekolah. Partisipasi aktif ini berkontribusi langsung terhadap kelancaran implementasi kegiatan di tingkat sekolah, sekaligus memperkuat keberlanjutan program setelah intervensi selesai.

2. komitmen dan keterlibatan aktif sebagian besar kepala sekolah dalam menggerakkan kader keamanan pangan di sekolah masing-masing memberikan legitimasi kelembagaan terhadap pelaksanaan program. Dukungan Kepala sekolah berperan penting dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif, mendorong partisipasi seluruh komunitas sekolah, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan dan agenda sekolah. Secara manajerial, keterlibatan kepala sekolah memperkuat koordinasi internal dan mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan.

Keempat, kecermatan petugas dalam melaksanakan kegiatan mempertimbangkan faktor geografis berupa jarak target pelaksanaan pembudayaan sekolah pangan aman yang relatif dekat antara Kota Bengkulu dan lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Seluma turut mendukung efisiensi pelaksanaan program. Kondisi ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan lapangan tanpa memerlukan alokasi sumber daya yang besar untuk transportasi dan waktu tempuh. Efisiensi ini memberikan ruang bagi optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan inti program, sehingga berkontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja Program Nasional PJAS Aman Sekolah Tahun 2025 di Kabupaten Seluma merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan yang adaptif, pengelolaan anggaran yang efisien, partisipasi aktif pelaksana di tingkat sekolah, komitmen pimpinan satuan pendidikan, serta dukungan kondisi geografis yang mendukung. Faktor-faktor tersebut secara kolektif membentuk fondasi kuat bagi pencapaian kinerja yang optimal dan menjadi praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi dalam pelaksanaan program serupa pada periode berikutnya.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Program Nasional PJAS Aman Sekolah Tahun 2025 di Kabupaten Seluma, yang ditandai dengan tercapainya target 11 sekolah (100%) mendapatkan intervensi PJAS dan terselesaikannya seluruh tahapan kegiatan, merupakan hasil dari keterpaduan program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis, berjenjang, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Capaian ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pada aspek kualitas dan keberlanjutan hasil program.

Sebanyak 11 sekolah sasaran, yaitu SDN 15 Seluma, SDN 04 Seluma, SDN 88 Seluma, SDN 140 Seluma, SDN 81 Seluma, SDN 83 Seluma, SDN 43 Seluma, SDN 55 Seluma, SDN 66 Seluma, SMPN 17 Seluma, dan SMPN 23 Seluma, telah memperoleh intervensi PJAS secara menyeluruh sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan intervensi PJAS,

dimulai dari perencanaan dan penetapan sekolah target, advokasi penggalan komitmen lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimtek kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan evaluasi dan terakhir sertifikasi Sekolah PJAS aman telah dilaksanakan secara tuntas dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa desain program tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Dalam tahap Perencanaan dimana persiapan pelaksanaan program ProPN Sekolah yang membudayakan keamanan pangan PJAS dimulai, kegiatannya antara lain melakukan koordinasi dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Cabang Pendidikan wilayah dan kantor Kementerian agama untuk menyampaikan rencana kegiatan program PJAS, selanjutnya kepala Balai POM Bengkulu yang didampingi oleh Ketua 2 tim Kerja Infokom, melakukan audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk mendukung pelaksanaan program PJAS Aman. Berdasarkan masukan Dinas Pendidikan terkait petugas BPOM Bengkulu melakukan survei sekolah yang direkomendasikan pada lokus yang sama dengan lokus program Pasar Aman Berbasis Komunitas dan Desa Pangan Pangan. Petugas BPOM Bengkulu juga melakukan audiensi/koordinasi kepada Kepala Sekolah terpilih intervensi sebelum pelaksanaan intervensi.

Dalam perkembangannya, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini berdampak pada penyesuaian kemampuan dan ketersediaan anggaran. Jumlah sekolah yang dilakukan survey sebanyak 13 sekolah meliputi SD dan SMP kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria sehingga didapat awalnya 6 (enam) sekolah yang dipilih untuk pelaksanaan intervensi program PJAS aman tahun 2025 di Kabupaten Seluma. Kegiatan survey sekolah di Kabupaten Seluma dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya target dikembalikan ke target awal sebanyak 11 sekolah yaitu SDN 15 Seluma, SDN 04 Seluma, SDN 88 Seluma, SDN 140 Seluma, SDN 81 Seluma, SDN 83 Seluma, SDN 43 Seluma, SDN 55 Seluma, SDN 66 Seluma, SMPN 17 Seluma, dan SMPN 23 Seluma

Setelah diperoleh target sekolah maka masuklah kedalam proses tahapan kegiatan Intervensi pembudayaan sekolah pangan aman (PJAS aman sekolah) yang meliputi:

- a. Pertemuan advokasi lintas sektor dengan pemda seluma terealisasi sesuai jadwal pada bulan April 2025

Kegiatan Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Seluma dilaksanakan secara terpadu untuk program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), Desa Pangan Aman dan Sekolah dengan Pasar Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman

pada tanggal Kamis, 17 April 2025 di Aula Hotel Rizki, Tais, Kab. Seluma. Jumlah Peserta pada pertemuan ini 40 orang yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, OPD terkait di Kabupaten Kab Seluma, dan wakil dari desa, sekolah serta pasar yang akan dilakukan intervensi yaitu Desa Purbosari dan Pasar Purbosari yang akan diintervensi gerakan keamanan pangan nasional pada tahun 2025. Untuk sekolah yang terpilih yaitu SD N 158, SD N 04, SDN 43, SD N140, SMP N 17 dan SMP N 23 Seluma.

Advokasi ini **berjalan dengan baik dan berhasil dengan diperolehnya komitmen pemerintah daerah** dalam pelaksanaan Program Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten Seluma dan diwujudkan dalam tandatangan seluruh lintas sektor terkait dalam lembar komitmen bersama BPOM Bengkulu dan Pemerintah daerah *stakeholder* terkait

- b. Sosialisasi keamanan pangan dan Bimtek Kader ke 11 Sekolah secara Hybrid di Kab. Seluma dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimtek Kader (Mei 2025)

Dikarenakan Inpres 1 Tahun 2025, terjadi efisiensi dan pemotongan anggaran sehingga ada penyesuaian Target dan mekanisme pencapaian target. Kemampuan anggaran untuk mengadakan pertemuan sosialisasi memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengumpulkan sekolah sebagai target sosialisasi. Pelaksanaan Sosialisasi keamanan pangan PJAS di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Seluma dilakukan secara daring yaitu zoom (online). Meskipun demikian, tetap dilakukan koordinasi dan permohonan bantuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma untuk dapat mengkoordinir dan membantu mengajak sekolah dalam regional daerah terdekat dari Kota Bengkulu, sehingga dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Adapun target Sosialisasi awalnya adalah 11 sekolah secara online, tetapi dengan bantuan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma yaitu surat edaran Kepala Dinas yang mengajak sekolah-sekolah bekerja sama dan ikut sosialisasi Keamanan Pangan PJAS yang akan dilakukan oleh BPOM Bengkulu.

Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan sekolah-sekolah di Kabupaten Seluma dilaksanakan secara daring pada hari Kamis, 15 Mei 2025 bertempat di Kantor Balai POM di Bengkulu secara Daring (Zoom Meeting) yang dibuka secara langsung oleh Kepala BPOM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. Jumlah Peserta kegiatan berjumlah 129 orang peserta dari 58 sekolah SD, SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Seluma.

Melalui Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan dengan perencanaan matang, diperoleh hasil:

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman;
 - b. Terdukasinya konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan
 - c. Terwujudnya kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman melalui penerapan CEK Klik
- c. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah

Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Seluma dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 bertempat di Hotel Adeeva, Pantai Panjang, Kabupaten Seluma. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang dan hadir secara luring yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Komite dari 10 sekolah yang diintervensi tahun 2025.

Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah menunjukkan keberhasilan melalui:

1. Terciptanya Kader Keamanan Pangan Sekolah dari komunitas sekolah.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan melalui penyampaian materi yang komprehensif dan terstruktur sesuai Juknis meliputi Sinergitas Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan Peran Kantindalam Pembangunan Sekolah Sehat (Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma), Kebijakan Keamanan Pangan PJAS, 5 Kunci Keamanan Memilih Pangan, 5 Kunci Mengolah Pangan, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah Dalam TIM Keamanan Sekolah, Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, Nutrisi Seimbang untuk SDM Unggul, Simulasi penggunaan Test Kit pada sampel pangan jajanan, Sharing Session” Pencapaian MI Humairah Juara 1 Nasional PJAS 2023

Hal ini terwujud melalui peningkatan hasil pre test (nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 50) dengan pos test (nilai tertinggi 100, terendah 70). Selain itu, peserta kader juga diberikan umpan balik untuk memonitor komitmen keamanan pangan melalui pengisian Kuesioner Pengetahuan, Sikap dan Perilaku

- d. Pengawasan sekolah intervensi 2024 pada sekolah di Kab. Rejang Lebong dan Kota Bengkulu (september 2025)

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa.

Intervensi PJAS yang dilakukan Balai POM di Bengkulu telah berhasil dilaksanakan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemandirian komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah yang dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi.

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah **yang berhasil terbentuk** adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang PJAS) yang **berpartisipasi aktif** dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah.

Pelaksanaan program keamanan pangan yang dilakukan telah berjalan secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024 dan 2023 telah dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan program ini di sekolah yang sudah diintervensi. Wujud keberhasilan pengawasan program ini adalah sebagai berikut :

- a. Monitoring keberlanjutan program PJAS ditunjukkan dengan terbitnya dokumen rencana aksi program keamanan pangan yang akan dilaksanakan disekolah tersebut.
- b. Pelaksanaan sampling dan pengujian jajanan di kantin sekolah sesuai dengan target yang ditetapkan

Hasil sampling dan pengujian pada pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

Nama Kabupaten/Kota	Tahun Intervensi	Jumlah Sekolah	Jumlah sampel	Hasil Pengujian
Kota Bengkulu	2024	10	15	MS
Rejang Lebong	2024	9	14	MS
Bengkulu Utara	2023	9	6	MS

Ket: MS = Memenuhi syarat (Negatif mengandung Bahan Berbahaya)

Keberhasilan monitoring pengawalan intervensi PJAS juga terlihat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas antara lain:

- a. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen keamanan pangan di sekolah tergolong memadai, meliputi:
 - SK Keamanan Pangan Sekolah dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab.
 - SK Tim Keamanan Pangan Sekolah.
 - Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah.
 - Rencana Aksi Keamanan Pangan yang telah dan akan dilaksanakan.
- b. Hasil Pemeriksaan Kantin Sekolah oleh Tim TKPS dan Petugas BPOM Bengkulu menunjukkan bahwa jajanan yang dijual aman dikonsumsi dan bebas dari potensi cemaran berbahaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rata-rata kondisi kantin adalah sbb:
 1. Kantin bersih tidak ada sampah
 2. Semua pedagang yang berjualan sudah memakai celemek
 3. Jajanan yang dijual di kantin dinyatakan layak konsumsi, selain dimasak sendiri, ada yang dititip dan pangan kemasan.
- e. Monev Kader keamanan pangan terhadap sekolah intervensi 2025 (Oktober 2025)

Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah di 11 sekolah intervensi Kabupaten Seluma dilaksanakan pada tanggal 15-17 September 2025. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dilakukan dengan datang langsung (luring) ke sekolah target sekolah intervensi PJAS dan mengefektifkan koordinasi dan komunikasi melalui media yang disepakati (WA Grup) dengan pihak sekolah dalam rangka pemantauan kegiatan intervensi keamanan pangan. Adapun Kegiatan yang dimonitoring meliputi:

- a. Pembentukan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah
- b. Pembuatan Surat Pernyataan Komitmen Sekolah
- c. Penyusunan dokumen rencana aksi keamanan pangan sekolah.
- d. Pelaksanaan Implementasi secara mandiri program keamanan pangan kepada komunitas sekolah seperti melakukan sosialisasi ke siswa dan orang tua siswa, penempelan poster keamanan pangan, penggunaan alat game edukasi dan Sosialisasi serta pembagian alat hygiene PJAS kepada panjaja kantin.
- f. Dilakukan pendampingan sampling jajanan di kantin sekolah dan menyusun laporan aktivitas kader di sekolah masing masing. Monitoring dan evaluasi (Monev) yang

dilakukan tidak hanya melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program, tetapi juga berhasil mengidentifikasi hal hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program, mengukur capaian target dan memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program yang dilakukan pada saat tahapan kegiatan dan akhir pelaksanaan program sebagai bentuk laporan dan informasi kepada pemerintah daerah.

- g. Sertifikasi Sekolah Intervensi PJAS Tahun 2025 (November 2025). Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses akhir melalui pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah.
- h. Kegiatan sertifikasi di 11 sekolah intervensi di Kabupaten Seluma dilaksanakan pada tanggal 26-28 November 2025, diawali dengan sekolah melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Output dari self assessment dapat digunakan oleh Balai POM Bengkulu sebagai gambaran kesiapan sekolah dalam pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman oleh Balai POM Bengkulu
- i. Hasil dari sertifikasi menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu telah optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari nilai sertifikasi sekolah dengan PJAS aman.

Tabel. hasil penilaian sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman

No	Nama & Alamat Sarana	Nilai Sertifikasi
1	SD Negeri 88 Seluma	90
2	SD Negeri 04 Seluma	93
3	SD Negeri 158 Seluma	93
4	SMP Negeri 17 Seluma	78
5	SD Negeri 83 Seluma	90
6	SD Negeri 81 Seluma	86
7.	SD Negeri 55 Seluma	87
8	SMP Negeri 23 Seluma	90
9	SD Negeri 66 Seluma	93
10	SD Negeri 140 Seluma	93
11	SD Negeri 43 Seluma	87

Hasil sertifikasi ini menjadi cermin penerapan pernyataan komitmen kepala sekolah dalam menerapkan rencana aksi yang telah disusun menjadi faktor penguat dalam pencapaian kinerja. Komitmen ini menunjukkan adanya dukungan kepemimpinan dan legitimasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan, sehingga rencana aksi yang dirumuskan tidak bersifat normatif, melainkan diimplementasikan secara nyata. Kepala

sekolah berperan strategis dalam menggerakkan sumber daya sekolah, mengoordinasikan peran tim keamanan pangan, serta memastikan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam pembudayaan keamanan PJAS Aman.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Jumlah Sekolah yang membudayakan PJAS aman	50,628,000	50,053,000	99.98	100 %	(1,00)	Efisien

Berdasarkan data pelaksanaan anggaran Tahun 2025, diketahui bahwa target anggaran yang dialokasikan sebesar Rp50.628.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp50.053.000. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,98%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sangat optimal dan mendekati perencanaan awal. Selisih anggaran yang relatif kecil mencerminkan akurasi perencanaan serta efektivitas pengendalian pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.

Dari perspektif efisiensi, tingkat efisiensi sebesar 1,00 mengindikasikan bahwa realisasi anggaran berada dalam batas yang proporsional terhadap capaian kinerja yang dihasilkan. Dengan capaian indikator kinerja mencapai 100% dan penyerapan anggaran di bawah pagu yang ditetapkan, pelaksanaan program dapat dinyatakan **efisien**, karena target kinerja tercapai secara penuh tanpa adanya pemborosan anggaran. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *value for money*, di mana sumber daya keuangan dikelola secara hemat, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, efisiensi ini juga menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan belanja melalui:

- Perencanaan yang realistis,
Perencanaan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan capaian dan **kemampuan anggaran**, dilakukan monitoring evaluasi dengan melihat sejauh mana tahapan yang sudah dilaksanakan dan apa tahapan yang belum. Setelah diperoleh gambaran selanjutnya dilakukan perencanaan secara rutin dan terukur.
- pemilihan metode pelaksanaan kegiatan yang tepat,
Metode pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti sosialisasi dan bimbingan teknis. Pada tahapan ini misalnya pada kegiatan sosialisasi keamanan pangan murni dilakukan secara online / zoom meeting sedangkan Bimtek kader keamanan pangan dilakukan secara hybrid
- pengendalian biaya yang efektif.

Biaya pelaksanaan kegiatan diperuntukan secara khusus pada kegiatan utama yang memerlukan kehadiran petugas dan kehadiran peserta sekolah yang memerlukan pertemuan khusus yaitu bimbingan teknis. Anggaran tidak digunakan sembarang tetapi dapat memberikan efek dan kegunaan yang lebih baik.

- d. Optimalisasi penggunaan anggaran memungkinkan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sesuai rencana, sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan tanpa melebihi alokasi anggaran yang tersedia.

Penggunaan anggaran diarahkan agar memungkinkan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan terlaksana sesuai rencana dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan tanpa melebihi alokasi anggaran yang tersedia.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Terdapat beberapa upaya rekomendasi tahun 2026 agar tercapai peningkatan kinerja diantaranya :

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko / Risk Event
02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kurangnya Komitmen dari sekolah terkait pelaksanaan pembudayaan PJAS ditunjukkan dengan banyak Kantin tutup	Mendorong Sekolah untuk menerapkan komitmen keamanan pangan	Melakukan pertemuan advokasi dengan sekolah-sekolah yang diintervensi	TW II	Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2026 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu
	Komitmen dan upaya kemandirian yang dilakukan oleh sekolah intervensi PJAS (tahun lalu, 2025) dalam membudayakan keamanan pangan berkurang	Institusionalisasi peran kader dan kepala sekolah melalui Pelembagaan peran kader keamanan pangan sebagai bentuk komitmen kepala sekolah melalui kebijakan internal sekolah, seperti surat keputusan, integrasi dalam	Mendorong komitmen dan upaya kepala sekolah dan kader keamanan pangan sekolah dalam mewujudkan kemandirian sekolah dalam mewujudkan	Tw IV	Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2026 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu

		program UKS.	keamanan pangan PJAS di sekolah yang diintervensi tahun 2025				

IKSS 3.3 - JUMLAH DESA PANGAN AMAN

A. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	3	1	33.33	Kurang

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman, dapat dijelaskan bahwa BPOM di Bengkulu menetapkan target tahun 2025 sebanyak 3 desa, namun realisasi yang berhasil dicapai hingga akhir tahun adalah 1 desa. Kondisi ini menghasilkan tingkat capaian sebesar 33,33% dan berada pada kriteria Kurang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan efektivitas program Desa Pangan Aman telah berjalan, tetapi belum memenuhi target yang direncanakan.

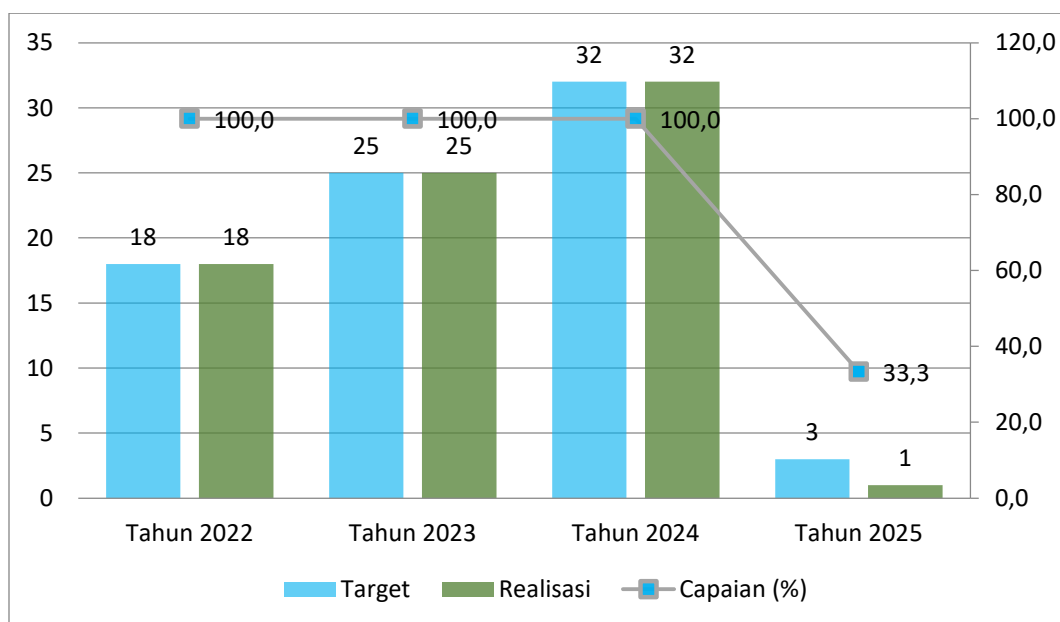
Meski target akhir tahun belum tercapai, pelaksanaan tahapan program sepanjang 2025 pada dasarnya telah dilakukan secara bertahap. Dokumen pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan dimulai sesuai rencana pada bulan April melalui advokasi, kemudian dilanjutkan pada bulan Mei dengan pelatihan kader, bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan, dan pada bulan Juli telah dilakukan monitoring program.

Dengan demikian, rendahnya capaian bukan disebabkan oleh tidak adanya aktivitas, melainkan karena intervensi yang direncanakan untuk seluruh target desa tidak dapat dituntaskan sampai tahap penetapan capaian akhir.

Faktor utama yang memengaruhi belum tercapainya target adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi pada 3 desa, sehingga pada akhir tahun tercatat

bahwa intervensi hanya dapat terlaksana pada 1 desa dari target 3 desa. Temuan ini menegaskan bahwa capaian indikator sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan lengkap pada seluruh lokasi sasaran. Oleh karena itu, hasil tahun 2025 dapat menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat perencanaan program pada tahun berikutnya, khususnya dalam memastikan kecukupan dukungan anggaran, penajaman prioritas lokasi sasaran, serta penguatan strategi kolaborasi lintas sektor agar tahapan intervensi dapat dituntaskan sesuai target.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman, terlihat bahwa pada periode 2022–2024 kinerja BPOM di Bengkulu berada pada kondisi stabil karena realisasi selalu sejalan dengan target dengan tingkat capaian 100% setiap tahun, sekalipun terdapat peningkatan target secara berkala mulai 18 desa (2022) hingga 32 desa (2024). Pola ini menunjukkan bahwa pada tiga tahun tersebut, perencanaan program dan dukungan sumber daya relatif memadai sehingga intervensi dapat dituntaskan sesuai jumlah desa yang ditetapkan sebagai sasaran.

Pada tahun 2025, tahapan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) mengalami penyederhanaan dan penajaman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan fokus pada penguatan kapasitas dan efektivitas intervensi. Beberapa tahapan seperti Pengadaan PIKP, Pengawasan Keamanan Pangan, dan Lomba Desa

dihilangkan, sementara materi PIKP dialihkan ke sistem digital. Bobot Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) meningkat dari 15–17% menjadi 25%, dan Monitoring serta Evaluasi diperkuat dari 15–17% menjadi 20–25%, menunjukkan penekanan pada kualitas pembinaan dan evaluasi hasil. Selain itu, mekanisme bimtek komunitas dipertegas melalui kewajiban kader melakukan pembinaan lanjutan kepada masyarakat, sehingga pendekatan tahun 2025 lebih menekankan internalisasi pengetahuan dan keberlanjutan program dibandingkan sekadar pelaksanaan tahapan administratif.

Pada tahun 2025 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Target indikator ditetapkan sebanyak 3 desa, sementara realisasi yang tercapai hanya 1 desa, sehingga tingkat capaian menurun menjadi 33,33%. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program Desa Pangan Aman pada tahun 2025 menghadapi keterbatasan yang berdampak langsung pada kemampuan BPOM di Bengkulu untuk memenuhi target kuantitatif yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang konsisten tercapai, tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan hasil, yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

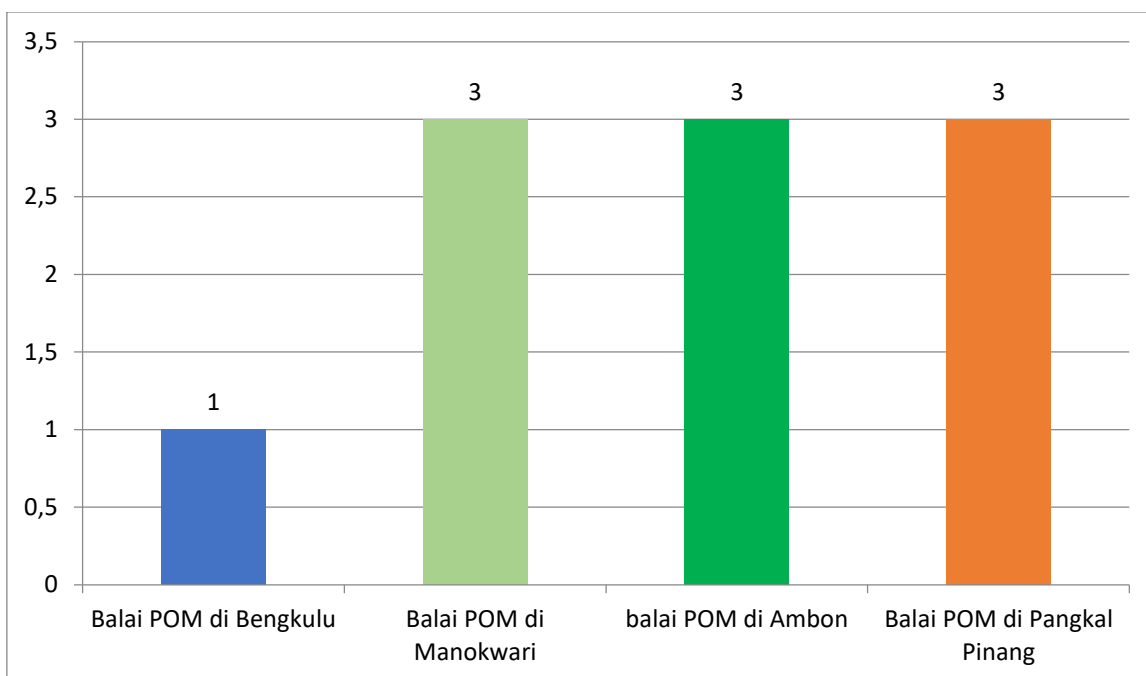
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	7	1	14.29	Perlu Upaya keras

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah, indikator Jumlah Desa Pangan Aman yang mendukung sasaran meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BPOM di Bengkulu menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 masih perlu diperkuat dalam konteks pencapaian target strategis. Target jangka menengah tahun 2029 ditetapkan sebanyak 7 desa, sementara realisasi pada tahun 2025 baru mencapai 1 desa. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target jangka menengah berada pada 14,29% dan dikategorikan **Perlu Upaya Keras**.

Capaian ini mengindikasikan bahwa tahun 2025 merupakan fase awal yang penting, tetapi kontribusinya terhadap target jangka menengah masih terbatas. Secara substantif, hasil tersebut menunjukkan perlunya akselerasi pelaksanaan program Desa

Pangan Aman pada tahun-tahun berikutnya, baik melalui perluasan cakupan desa sasaran maupun penguatan kualitas pendampingan agar seluruh tahapan program dapat dituntaskan secara konsisten. Dengan memperhatikan capaian yang masih rendah terhadap target 2029, fokus perbaikan perlu diarahkan pada penguatan perencanaan yang lebih realistis, pengamanan dukungan sumber daya, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat desa agar proses pembinaan dan intervensi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.25. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman dengan Balai POM sejenis

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, indikator Jumlah Desa Pangan Aman menunjukkan bahwa Balai POM di Bengkulu mencapai 33,33% (realisasi 1 dari target 3 desa), lebih rendah dibandingkan Balai POM di Manokwari, Ambon, dan Pangkal Pinang yang masing-masing mencapai 100% (realisasi 3 desa, target 3 desa). Tidak tercapainya target di Balai POM di Bengkulu disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga,

yang berdampak pada penyesuaian kegiatan pendampingan desa secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan pelaksanaan intervensi lapangan yang diperlukan untuk pemenuhan target Desa Pangan Aman, sehingga capaian indikator belum optimal meskipun upaya pendampingan tetap dilakukan secara selektif dan terfokus.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025, capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman di BPOM di Bengkulu belum memenuhi target yang ditetapkan. Target tahunan sebanyak 3 desa, sedangkan realisasi yang dapat dituntaskan hingga akhir tahun baru 1 desa, sehingga tingkat capaian berada pada 33,33% dan dikategorikan kurang. Kondisi ini sekaligus menjelaskan terjadinya penurunan capaian pada 2025 dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena keluaran program secara kuantitatif belum sebanding dengan target yang direncanakan.

Dari sisi pelaksanaan, tahapan program telah dijalankan secara bertahap dan terstruktur. Kegiatan dimulai pada April 2025 melalui advokasi kepada pemangku kepentingan, dilanjutkan pada Mei 2025 dengan pelatihan kader, bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan pelaksanaan, dan pada Juli 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi program. Artinya, proses pembinaan dan penguatan kapasitas desa sudah berjalan, namun keluaran akhir berupa jumlah desa yang dapat diintervensi penuh belum sesuai rencana tahunan.

Faktor utama yang memengaruhi belum tercapainya target adalah **keterbatasan anggaran** untuk melakukan intervensi pada 3 desa, sehingga pendampingan yang dapat dituntaskan pada tahun berjalan baru menjangkau 1 desa dari target. Sebagai penguatan tindak lanjut, BPOM di Bengkulu juga telah melakukan koordinasi formal melalui penyampaian surat kepada Direktur PMPUPO dan Kepala Roren BPOM Nomor : B-HM.03.01.2B.01.26.34 Tanggal 09 Januari 2026 perihal perubahan target desa pangan aman tahun 2025 dan untuk mendorong dukungan kebijakan serta penguatan sumber daya, agar perluasan intervensi Desa Pangan Aman pada periode berikutnya dapat dipenuhi secara lebih realistis dan berkelanjutan. Akan tetapi didapatkan jawaban bahwa untuk kegiatan Pro PN tidak ada terjadi penurunan target.

Meskipun secara kuantitatif pemenuhan 3 target desa tidak terealisasi, terdapat bukti penguatan kualitas pembinaan desa yang menghasilkan pengakuan eksternal, yaitu Desa Kungkai Baru meraih Juara 2 Nasional Lomba Desa Pangan Aman Regional Barat Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mampu membentuk praktik baik dan berdaya saing di tingkat nasional.

Keberhasilan program Gerakan Keamanan Pangan Desa pada lokasi intervensi 2025 juga ditopang oleh sinergi lintas pihak. Di Kabupaten Seluma, dukungan OPD menjadi pengungkit penting melalui kegiatan yang beririsan langsung dengan ketahanan dan

keamanan pangan di tingkat desa, antara lain fasilitasi pembinaan masyarakat dan kelembagaan desa, penguatan edukasi kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih, pembinaan pangan segar dan olahan rumah tangga, serta pendampingan pelaku usaha/komunitas dalam penerapan praktik higienis dan aman. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu (UNIB) dan Poltekkes Kemenkes Bengkulu di Desa Purbosari Kabupaten Seluma sebagai desa intervensi tahun 2025 memperkuat aspek perubahan perilaku dan penguatan kapasitas masyarakat, sehingga program tidak hanya berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi juga bergerak pada penguatan praktik sehari-hari di tingkat rumah tangga dan komunitas. Dengan demikian, kinerja 2025 memperlihatkan dua pesan penting: secara kuantitatif capaian desa masih terbatas karena kendala sumber daya, namun secara kualitas pembinaan telah menunjukkan hasil yang kuat dan layak direplikasi melalui penguatan dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor pada tahun berikutnya.



Gambar 3.26. Penghargaan Juara 2 Desa Kungkai Baru dalam Lomba Desa Pangan Aman Nasional Regional Barat

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Desa Pangan Aman pada tahun 2025 pada dasarnya telah dirancang sebagai intervensi bertahap yang menggabungkan penguatan komitmen, peningkatan

kapasitas, dan pemantauan pelaksanaan di tingkat desa. Tahapan kegiatan telah dijalankan secara berurutan dan sesuai prosedur, diantaranya:

1. **Advokasi Program Prioritas Nasional** pada tanggal 17 April 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma dengan melibatkan lintas sektor terkait, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, serta perwakilan desa. Tahapan ini bertujuan membangun komitmen pemerintah daerah, menyepakati lokus intervensi, dan menyelaraskan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program.
2. Pada tanggal 19 Mei 2025 dilaksanakan **Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)** di Kabupaten Seluma yang diikuti oleh 9 kader desa. Pelatihan ini menjadi dasar penguatan kapasitas sumber daya lokal agar kader mampu melakukan pembinaan dan edukasi keamanan pangan secara mandiri di desa.
3. Dilakukan kegiatan **Bimbingan Teknis Komunitas Desa Pangan Aman pada tanggal 27 Mei 2025** di Desa Purbosari, Kabupaten Seluma, yang diikuti oleh 30 orang perwakilan komunitas desa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelatihan kader untuk memperluas transfer pengetahuan kepada masyarakat.
4. Tahap berikutnya adalah **fasilitasi dan pengawalan implementasi rencana aksi desa** pada periode Mei hingga Juni 2025 di Desa Purbosari, yang mencakup pendampingan teknis, pembinaan pelaku usaha dan komunitas, serta pengujian keamanan pangan menggunakan rapid test kit.
5. Untuk memastikan keberlanjutan dan menilai kemajuan pelaksanaan, pada tanggal 10 Juli 2025 dilaksanakan **Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional** di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari lintas sektor dan perwakilan desa/pasar.

Rangkaian kegiatan ini mencerminkan keberlangsungan tahapan proses, karena menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan sudah bergerak sesuai siklus program, serta menghasilkan pembelajaran implementasi di lapangan pada lokasi yang dapat diintervensi. Namun demikian, pencapaian pernyataan kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman belum optimal. Dari target 3 desa, realisasi yang dapat dituntaskan sampai akhir tahun baru 1 desa, sehingga capaian hanya 33,33% dan masuk kategori kurang. Kegagalan pencapaian target ini terutama dipengaruhi oleh faktor sumber daya, yakni keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi pada 3 desa, sehingga pelaksanaan program pada tahun berjalan baru mampu menjangkau 1 desa dari target.

Dengan demikian, hambatan utama tidak terletak pada ketiadaan kegiatan, melainkan pada keterbatasan daya dukung pembiayaan yang membatasi perluasan cakupan intervensi. Sebagai langkah tindak lanjut untuk memperkuat dukungan pelaksanaan program, BPOM di Bengkulu juga telah melakukan koordinasi formal melalui penyampaian surat kepada Direktur PMPUPO dan Kepala Roren BPOM, sebagai

upaya memperoleh penguatan kebijakan dan sumber daya agar cakupan intervensi dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	88.164.000	88.156.750	99,99	0,33	(0,67)	Tidak efisien

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 BPOM di Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp88.164.000 dengan realisasi sebesar Rp88.156.750, sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 99,99%. Dari sisi pengelolaan keuangan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan tertib dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Namun demikian, capaian indikator kinerja hanya mencapai 0,33 atau setara dengan 33,33% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini berdampak langsung pada hasil analisis efisiensi, di mana tingkat efisiensi tercatat (0,67) dan dikategorikan tidak efisien. Secara substantif, temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output, yaitu penggunaan sumber daya yang hampir sepenuhnya terserap belum mampu dikonversi secara optimal menjadi capaian kinerja yang diharapkan.

Dari perspektif manajemen kinerja sektor publik, situasi ini tidak semata-mata mencerminkan lemahnya pengelolaan anggaran, tetapi lebih menunjukkan bahwa keterbatasan pada aspek pelaksanaan program membatasi efektivitas pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks program Desa Pangan Aman, pembelajaran utama tahun 2025 adalah bahwa meskipun tahapan kegiatan telah dijalankan, keterbatasan daya dukung untuk menjangkau seluruh desa sasaran menyebabkan hasil akhir belum sebanding dengan besarnya sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain, efisiensi belum tercapai bukan karena pemborosan anggaran, melainkan karena capaian output yang belum optimal.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk memperoleh peningkatan kinerja pada tahun 2026, diperlukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko / Risk Event
03 - Jumlah desa pangan aman	Ketepatan pemilihan desa sesuai Juknis GKPD belum sepenuhnya optimal	penajaman rencana kerja dan prioritas lokasi desa sesuai dengan Juknis GKPD	Menyusun pemetaan desa sesuai Juknis GKPD berdasarkan kriteria utama Stunting dan kriteria lain	Triwulan I 2026	Y	S-14	Program prioritas nasional Desa, pasar, sekolah yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan
	Kurangnya komitmen desa yang diintervensi tahun 2025 dalam pemenuhan desa pangan aman	Advokasi kepada kepala desa yang diintervensi tahun 2025 dalam memenuhi desa pangan aman	Advokasi kepada kepala desa yang diintervensi tahun 2025 dalam memenuhi desa pangan aman	Triwulan IV	Y	S-14	Program prioritas nasional Desa, pasar, sekolah yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan

IKSS 3.4 - JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

A. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

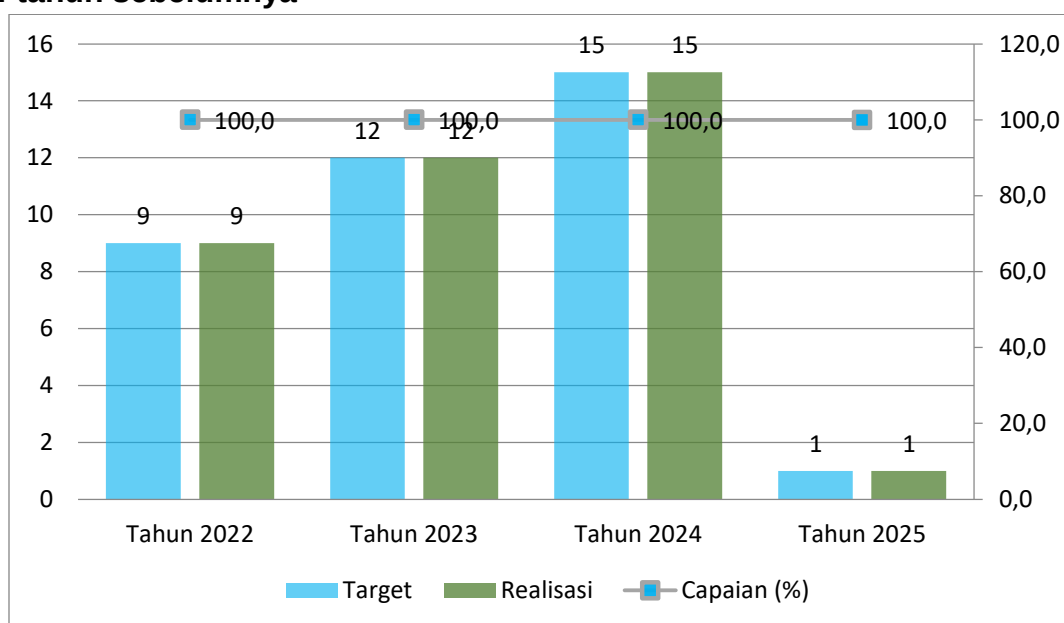
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mendukung sasaran meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BPOM di Bengkulu

menunjukkan hasil yang sesuai dengan rencana. Target tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1 pasar, dan realisasi yang dicapai juga 1 pasar, sehingga tingkat capaian mencapai 100 persen dan dikategorikan Baik.

Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program pengembangan pasar pangan aman berbasis komunitas telah berjalan efektif, khususnya dalam membangun peran serta masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kuantitatif, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu menjadi sarana yang tepat untuk memperkuat pesan KIE agar lebih kontekstual, mudah diterima, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan komunitas secara langsung, upaya peningkatan kesadaran dan praktik keamanan pangan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, melainkan berlanjut dalam bentuk perubahan perilaku di tingkat lokal.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, terlihat bahwa kinerja BPOM di Bengkulu menunjukkan konsistensi yang sangat baik sepanjang periode 2022–2024. Pada setiap tahun, realisasi kegiatan selalu sejalan dengan target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 100 persen secara berkelanjutan sekalipun terdapat peningkatan target per tahun. Pola ini menegaskan bahwa program pengembangan pasar pangan aman berbasis komunitas

telah dikelola secara stabil dan terencana, tanpa adanya deviasi yang berarti antara rencana dan pelaksanaan.

Sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap tahapan pelaksanaan program keamanan pangan, termasuk GKPD dan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025. Penyesuaian ini diarahkan pada penyederhanaan tahapan, optimalisasi sumber daya, digitalisasi materi informasi, serta integrasi kegiatan agar tetap efektif dalam kerangka efisiensi anggaran.

Adapun progres tahapan terbaru Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 meliputi: (1) survei dan identifikasi pasar sebagai dasar penetapan lokus intervensi; (2) advokasi dan penguatan komitmen lintas sektor dengan Pemerintah Daerah; (3) bimbingan teknis dan penyuluhan kepada pengelola serta komunitas pasar; (4) pengawalan penerapan prinsip keamanan pangan; serta (5) monitoring dan evaluasi terpadu untuk memastikan keberlanjutan implementasi di pasar intervensi. Tahapan ini dirancang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi pada penguatan peran komunitas pasar sebagai pelaku pengawasan mandiri.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

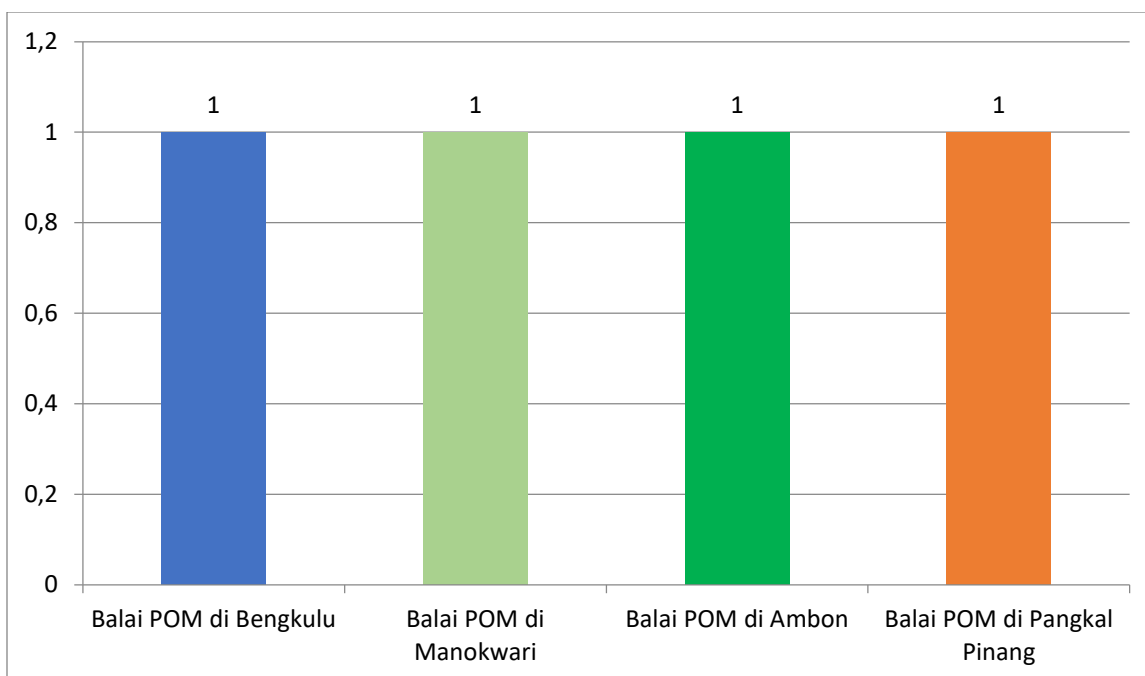
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	1	50,0	Perlu upaya keras

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 masih perlu diperkuat dalam kerangka pencapaian sasaran strategis. Target jangka menengah tahun 2029 ditetapkan sebanyak 2 pasar, sementara realisasi pada tahun 2025 baru mencapai 1 pasar. Dengan demikian, tingkat

capaian terhadap target jangka menengah berada pada 50,0 persen dan dikategorikan perlu upaya keras.

Capaian ini menandakan bahwa meskipun pelaksanaan program pada tahun 2025 telah menghasilkan output yang nyata, kontribusinya terhadap pemenuhan target strategis masih terbatas. Secara substantif, kondisi tersebut menunjukkan perlunya akselerasi pengembangan pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun-tahun berikutnya, baik melalui perluasan cakupan lokasi sasaran maupun melalui penguatan kualitas pendampingan agar model yang telah berhasil di satu lokasi dapat direplikasi secara lebih sistematis.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.28. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai POM sejenis

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menunjukkan bahwa seluruh Balai POM pembanding, termasuk Balai POM di Bengkulu, berhasil mencapai realisasi 100% (realisasi 1 dari target 1 pasar). Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan pendampingan dan penguatan komunitas pasar pangan aman telah berjalan efektif, konsisten, dan selaras dengan target nasional, sekaligus menunjukkan kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam menjaga

keberlanjutan intervensi keamanan pangan berbasis masyarakat meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target nasional disebabkan merupakan pembagian pelaksanaan target nasional yang dilaksanakan di masing-masing UPT.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025, kinerja indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di BPOM di Bengkulu memperlihatkan dua sisi yang perlu dibaca secara seimbang, yakni keberhasilan pada kualitas pelaksanaan dan keterbatasan pada capaian kuantitatif. Dari sisi proses, tahapan kegiatan telah dijalankan secara sistematis dan berurutan, dimulai dengan forum advokasi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor pada April, dilanjutkan bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar serta sosialisasi keamanan pangan pada Mei, kemudian pengawasan dan monitoring evaluasi pada Juli, serta pengawalan realisasi hingga akhir tahun. Rangkaian ini menunjukkan bahwa desain program dan disiplin implementasi telah berjalan sesuai rencana kerja, sehingga fondasi proses dapat dinilai kuat dan konsisten.

Keberhasilan dan peningkatan kinerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dianalisis melalui pendekatan 5M + 1L. Dari aspek Man (SDM), peningkatan kapasitas pengelola pasar, kader, dan pedagang melalui bimtek serta penguatan komitmen lintas sektor berkontribusi terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kepatuhan. Dari aspek Method (Metode), penerapan tahapan berbasis survei awal, advokasi, pelatihan partisipatif, serta monitoring terintegrasi menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dari aspek Material, ketersediaan materi KIE, alat peraga edukatif, serta pemanfaatan media digital meningkatkan efektivitas penyampaian pesan keamanan pangan. Dari aspek Money (Anggaran), meskipun dilakukan dalam kerangka efisiensi belanja, optimalisasi alokasi anggaran pada kegiatan berdampak langsung (capacity building dan monitoring) justru meningkatkan efektivitas program. Dari aspek Measurement (Pengukuran), penggunaan instrumen survei, pre-post test, serta evaluasi monitoring memungkinkan pengukuran capaian secara objektif dan terukur. Sementara itu, dari aspek Lingkungan (Environment), dukungan kebijakan Pemerintah Daerah, komitmen lintas sektor, serta kondisi sosial masyarakat pasar yang terbuka terhadap pembinaan menjadi faktor eksternal yang memperkuat keberlanjutan program. Sinergi keenam faktor tersebut menjadi determinan utama keberhasilan dan peningkatan kinerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

Keberhasilan paling nyata dari sisi kualitas tercermin pada pengakuan nasional yang diraih salah satu pasar binaan, yakni Pasar Kota Medan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang memperoleh Juara 3 Nasional Regional Barat sebagai Pasar Pangan Aman Tahun 2025. Pencapaian ini menjadi indikator penting bahwa pendekatan pembinaan yang diterapkan BPOM di Bengkulu efektif dalam meningkatkan standar



keamanan pangan di tingkat komunitas pasar. Prestasi tersebut juga sejalan dengan pemberitaan internal pada subsite bengkulu.pom.go.id, yang menegaskan bahwa upaya advokasi, pendampingan teknis, serta penguatan peran komunitas pasar telah menghasilkan praktik baik yang diakui di tingkat nasional.

Namun demikian, dari sisi capaian kuantitatif, kinerja tahun 2025 menunjukkan keterbatasan. Target tahunan untuk indikator ini adalah 1 pasar dan realisasi juga 1 pasar, sehingga secara tahunan tercapai 100%. Akan tetapi, ketika dibaca dalam perspektif target pertengahan Renstra (2027), capaian ini baru setara 33,33% dari target 2027 yang ditetapkan sebanyak 3 pasar, sehingga dikategorikan perlu upaya keras. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa pada analisis efisiensi, meskipun serapan anggaran hampir sempurna, tingkat efisiensi dinilai tidak efisien, karena output yang dihasilkan belum sebanding dengan besaran input yang telah digunakan. Dengan kata lain, persoalan utama bukan pada kualitas pelaksanaan kegiatan, melainkan pada skala jangkauan intervensi yang masih terbatas.

Faktor penyebab yang paling menentukan terletak pada keterbatasan sumber daya untuk memperluas cakupan intervensi, sehingga pada tahun berjalan program baru mampu difokuskan secara mendalam pada satu pasar. Strategi ini memang berhasil menghasilkan kualitas yang tinggi pada lokasi binaan, tetapi secara bersamaan membatasi jumlah pasar yang dapat dijangkau dalam satu tahun anggaran. Situasi ini menjelaskan dinamika kinerja 2025: kualitas meningkat, tetapi kuantitas belum bertambah signifikan, sehingga secara agregat capaian terhadap target strategis masih tertahan.

Dengan demikian, analisis kinerja indikator ini menunjukkan bahwa keberhasilan BPOM di Bengkulu pada 2025 lebih menonjol pada dimensi mutu dan reputasi program, sementara keterbatasan kinerja terletak pada dimensi perluasan cakupan. Ke depan, tantangan utama bukan lagi membuktikan bahwa model pembinaan pasar pangan aman efektif, karena hal tersebut telah terkonfirmasi melalui prestasi nasional, melainkan bagaimana mereplikasi praktik baik tersebut ke lebih banyak pasar melalui penguatan dukungan sumber daya, perluasan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar, serta penajaman strategi pendampingan agar keseimbangan antara kualitas dan kuantitas capaian dapat terwujud secara lebih proporsional.



Gambar 3.29. Penghargaan Juara 3 Pasar kota Medan dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 dengan rincian output 3165.QDB.003 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator ini didukung oleh kesinambungan tahapan kegiatan yang terstruktur. Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur melalui pendekatan survei, advokasi lintas sektor, peningkatan kapasitas komunitas pasar, serta monitoring dan evaluasi keberlanjutan program. Pola tahapan ini dirancang untuk memastikan intervensi tidak bersifat seremonial, melainkan berbasis data, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan perubahan perilaku komunitas pasar

1. Tahap awal dilakukan melalui kegiatan survei pasar pada tanggal 28 Februari 2025 di Pasar Desa Purbosari Kabupaten Seluma. Survei dilakukan menggunakan instrumen penilaian pasar (Form P01, P02, dan P03) untuk mengidentifikasi kondisi sanitasi, bangunan, zonasi pedagang, serta potensi peredaran bahan berbahaya. Hasil penilaian menunjukkan tingkat pemenuhan kriteria sebesar 70% dengan kategori cukup. Berdasarkan hasil tersebut, Pasar Desa Purbosari ditetapkan sebagai pasar intervensi Program PPABK Tahun 2025. Tahapan survei ini berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan capaian karena menjadi dasar penyusunan strategi intervensi yang tepat sasaran dan berbasis kondisi riil di lapangan.

2. Selanjutnya dilakukan kegiatan advokasi dan penguatan komitmen lintas sektor pada tanggal 17 April 2025 bertempat di Aula Hotel Rizki Kabupaten Seluma. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan desa, sekolah, dan pasar yang akan diintervensi. Advokasi ditandai dengan penandatanganan komitmen lintas sektor sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program keamanan pangan di Kabupaten Seluma. Tahapan ini berkontribusi dalam memperkuat sinergi antara BPOM dan Pemerintah Daerah, memastikan integrasi program keamanan pangan dengan program daerah, serta membuka ruang dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan program.
3. Tahap peningkatan kapasitas komunitas pasar dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan pada tanggal 15 Mei 2025 di Aula Kantor Desa Purbosari. Kegiatan ini diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari pengelola pasar, pedagang pangan, dan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Materi yang diberikan meliputi Keamanan Pangan, Ciri Pangan Mengandung Bahan Berbahaya, Cek KLIK, Call Center Halo BPOM, serta 5 Kunci Keamanan Pangan di Sarana Peredaran. Metode pembelajaran dilakukan secara partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, penggunaan alat peraga, simulasi identifikasi produk ilegal, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen peserta dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di pasar. Tahapan ini berkontribusi pada perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas komunitas pasar sebagai pelaku pengawasan mandiri.
4. Sebagai bentuk pengendalian mutu program, dilakukan monitoring dan evaluasi keberlanjutan melalui kunjungan lapangan dan pengawalan penerapan prinsip keamanan pangan. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara luring dan mencakup penilaian terhadap sanitasi, zonasi pedagang, praktik higiene, serta kepatuhan terhadap ketentuan label dan izin edar produk. Pendekatan monitoring dilakukan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga pembinaan melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), distribusi leaflet, serta penguatan peran fasilitator pasar. Pola monitoring ini memastikan bahwa intervensi yang telah diberikan pada tahap bimtek benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Selain tahapan kegiatan utama, keberhasilan IKU ini juga didorong oleh upaya petugas melalui pemberitaan pada subsite resmi BPOM Bengkulu yang mendokumentasikan kegiatan pembekalan komunitas pasar melalui bimtek serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pasar aman berbasis komunitas. Hal ini turut mendorong penguatan reputasi hasil pembinaan melalui muatan rangkaian aktivitas yang mengarah pada penguatan standar keamanan pangan di pasar binaan, termasuk proses

wawancara/lomba dan dukungan pemerintah daerah pada Pasar Kota Medan di Kabupaten Bengkulu Selatan serta pengawalan penerapan pasar aman berbasis komunitas melalui kegiatan lapangan di beberapa pasar. Selaras dengan itu, Pasar Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh Juara III Nasional Regional Barat sebagai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025, yang menjadi bukti bahwa kualitas pembinaan mampu mencapai pengakuan eksternal. Prestasi ini menguatkan narasi bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif membangun kepatuhan pedagang dan pengelola pasar terhadap praktik keamanan pangan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	28.560.000	28.554.500	99,98	100	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, indikator **jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas** menunjukkan bahwa dari target anggaran tahun 2025 sebesar Rp28.560.000, realisasi anggaran mencapai Rp28.554.500 atau sebesar **99,98%**. Capaian indikator kinerja tercatat **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh target output berhasil dicapai secara optimal. Dengan tingkat efisiensi sebesar **0,00**.

Pemanfaatan anggaran indikator ini didukung oleh rincian output 3165.QDB.003 berupa pelaksanaan kegiatan survei pasar, advokasi dan penguatan komitmen lintas sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan bagi pelaku usaha pasar dan monitoring dan evaluasi keberlanjutan melalui kunjungan lapangan dan pengawalan penerapan prinsip keamanan pangan.

kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah menggunakan anggaran secara sangat tepat tanpa adanya deviasi signifikan antara perencanaan dan realisasi. Oleh karena itu, kriteria efisiensi dikategorikan sebagai **efisien**, yang mencerminkan keselarasan antara penggunaan sumber daya dengan hasil kinerja yang diperoleh, serta menunjukkan perencanaan dan pengendalian anggaran yang efektif.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk memperoleh peningkatan kinerja tahun 2026 dimana terdapat peningkatan target dari 1 menjadi 2 pasar, diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan diantaranya:

Tabel 3.3. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko / Risk Event
04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Perluasan jumlah pasar binaan berpotensi menurunkan kualitas pendampingan apabila tidak diikuti penguatan standar pembinaan dan kesiapan SDM pendamping.	perencanaan tahun 2026 perlu menempatkan perluasan jumlah pasar binaan sebagai prioritas utama dengan tetap menjaga standar mutu pendampingan, melalui penetapan skema pembinaan bertahap, di mana pasar yang telah berhasil dibina pada 2025 dijadikan sebagai model rujukan, sementara pasar baru diarahkan mengikuti pola yang sama dengan pendampingan yang lebih terstruktur	Menetapkan klasifikasi pasar (model, penguatan, baru) serta menyusun daftar pasar sasaran 2026 sebagai dasar intervensi bertahap.	Triwulan I 2026	Y	O-07	Program prioritas nasional pasar pangan aman berbasis komunitas yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan
	Komitmen dari pasar yang diintervensi tahun 2025 dalam pemenuhan PPABK masih kurang	Advokasi kepada pimpinan pasar, kepala desa, disperindag terkait pembangunan keberlanjutan PPABK pasar yang diintervensi 2025	Advokasi kepada pimpinan pasar, kepala desa, disperindag terkait pembangunan keberlanjutan PPABK pasar yang diintervensi 2025	Triwulan 4	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko / Risk Event
	Variasi kapasitas komunitas pasar menyebabkan implementasi standar keamanan pangan tidak seragam.	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan advokasi dan KIE	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan advokasi dan KIE	Triwulan II 2026	T		

SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, Balai POM di Bengkulu berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar.

Capaian sasaran ini, diukur melalui 1 indikator kinerja yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan peningkatan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Hal ini didukung oleh terpenuhinya capaian indikator kinerja Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB sebesar 116,64%. Secara kriteria, capaian tersebut masuk ke dalam “Tidak Dapat Disimpulkan”. Namun, dari segi pencapaian realisasi terhadap target tahun 2025, hal ini menunjukkan keberhasilan melampaui target yang ditetapkan.

4.1- PERSENTASE UMKM DIDAMPINGI CPOTB, CPKB DAN IP CPPOB

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB	14,12	16,47	116,64	Tidak Dapat disimpulkan

Target sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan indikator kinerja Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB di Balai POM di Bengkulu Tahun 2025 ditetapkan sebesar 14,12%. Realisasi capaian mencapai 16,47%, sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 116,64% dan termasuk kategori tidak dapat disimpulkan.

Capaian tersebut diperoleh dari 14 UMKM yang telah memenuhi standar dari total target 5 tahun (2025-2029) sebanyak 85 sarana UMKM yang menjadi sasaran pengukuran ($14/85 \times 100\% = 16,47\%$). Adapun rincian UMKM yang memenuhi standar terdiri atas 12 UMKM Pangan Olahan, serta masing-masing 1 UMKM Kosmetik dan 1 UMKM Obat Bahan Alam.

Kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam di mulai dengan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM di Maksud berlanjut dengan Bimbingan Teknis, Pendampingan Teknis Sertifikasi dan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dengan :pelaporan kemajuan capaian kepada Unit Pengampu Pusat.

Pemenuhan tahapan pendampingan untuk UMKM Pangan Olahan, sebagai berikut :

KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (Jan - Maret) Bobot 5%	Seleksi dan Penetapan UMK PO target pendampingan (Maret) Bobot 10%	Bimtek CPPOB (Maret - April) Bobot 30%	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB Bobot 50%	Monev dan Pelaporan (Nov-Des) Bobot 5%	Jumlah	UMKM yang mendapatkan IP CPPOB
25	120	360	600	60	1165	12

Pemenuhan tahapan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam, adalah sebagai berikut :

Penetapan target UMKM obat tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress	Jumlah rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap	Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada Tahun Berjalan
10.00	40.00	40.00	20.00	10	120.00	1	1

Pemenuhan tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik, adalah sebagai berikut :

Penetapan target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monev dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress	Jumlah rekomendasi SPA CPKB	Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan
10.00	20.00	40.00	20.00	10	100.00	1	1

Sehingga di peroleh capaian total pendampingan adalah :

Target Indikator	UMKM Pangan Olahan	UMKM OBA	UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
14	12	1	1.00	14	14

Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 UMKM yang telah memenuhi ketentuan dan memperoleh IP CPPOB pada tahun berjalan, namun tidak dihitung sebagai capaian indikator. Kedua UMKM tersebut sebelumnya telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE), namun belum memiliki IP CPPOB karena pada saat penerbitan NIE ketentuan IP CPPOB belum menjadi persyaratan wajib seperti saat ini.

Satu UMKM telah habis masa berlaku izin edarnya, dan satu UMKM lainnya mendekati masa kedaluwarsa izin edar, sehingga keduanya mengajukan permohonan IP CPPOB sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan perpanjangan izin edar. Dengan demikian, fasilitasi yang dilakukan lebih bersifat pemenuhan kewajiban regulatif (compliance adjustment), bukan pendampingan UMKM baru yang menjadi target indikator kinerja.

Selain itu, pada bulan November terjadi pembukaan blokir anggaran pendampingan, sementara target UMKM tahun 2025 pada saat tersebut telah tercapai. Pemanfaatan anggaran yang tersedia selanjutnya diarahkan untuk mendukung UMKM yang memerlukan pemenuhan persyaratan administratif lanjutan, termasuk kedua UMKM dimaksud. Namun demikian, sesuai dengan definisi operasional indikator, capaian hanya dihitung terhadap UMKM sasaran yang ditetapkan dalam target awal tahun, sehingga kedua UMKM tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian indikator.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB merupakan IKU yang baru ada pada tahun 2025 seiring dengan penetapan Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2020-2024, indikator kinerja yang terkait dengan pendampingan UMKM diukur dalam Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Pada indikator di tahun sebelumnya pengukuran dilakukan berdasarkan banyaknya UMKM yang telah memenuhi standar setelah pendampingan. UMKM yang memenuhi standar tahun 2024 yang dimaksud adalah :

1. UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai POM
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPACPOTB) secara bertahap
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - Persetujuan denah (seusai petunjuk teknis penyusunan denah bangunan industri kosmetik golongan B)
 - Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) sesuai petunjuk teknis penerbitan SPA CPKB.

Dalam pelaksanaan indikator pada kedua tahun tersebut, kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan, meliputi penetapan target, pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan kepada pelaku UMKM, hingga penerbitan sertifikat dan pelaporan kepada Badan POM.

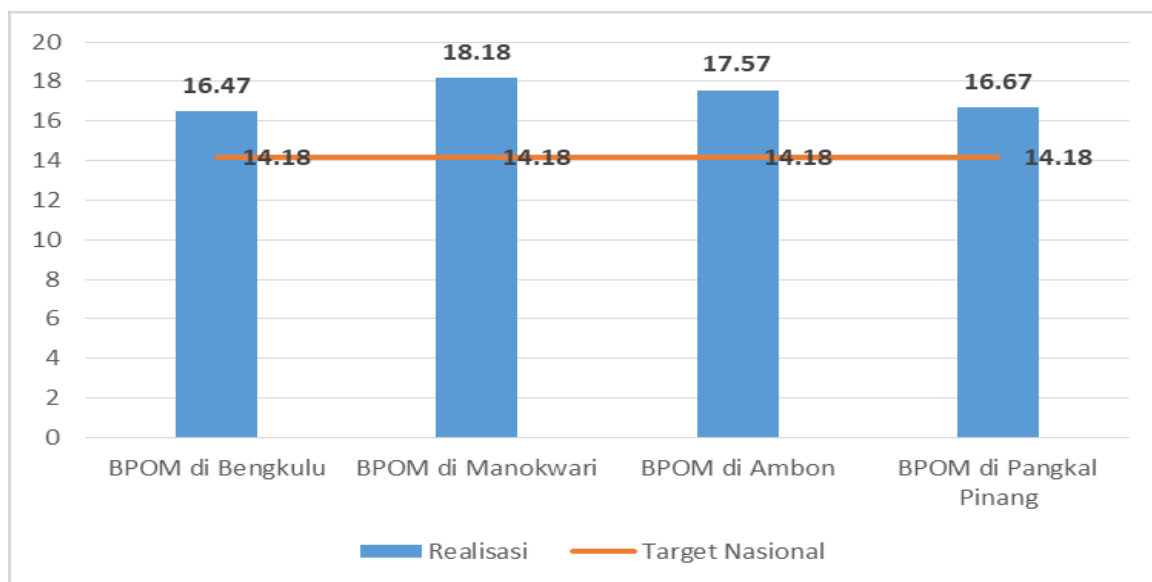
Tahun 2024, untuk pengukuran indikator *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik* dilakukan dengan membandingkan jumlah UMKM yang berhasil didampingi hingga memenuhi standar pada tahun berjalan dengan target tahunan tersebut. **Sementara pada tahun 2025**, Indikator Persentase UMKM didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB perhitungan capaian tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan jumlah UMKM yang berhasil memenuhi standar pada tahun berjalan dengan target Renstra lima tahunan, yaitu 85 UMKM. Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2024, karena perbedaan metode perhitungan target, yaitu target tahunan pada 2024 dan target kumulatif lima tahunan pada 2025.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Realisasi Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini, dengan hasil termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras karena selisih antara target 2029 dengan realisasi 2025 sangat jauh. Hal ini menggambarkan perlu upaya ekstra dan terobosan inovatif pada tahun berikutnya sehingga selisih tersebut dapat diraih secara maksimal, tentunya selain peningkatan kapasitas petugas sertifikasi juga bagi pelaku usaha perlu komitmen dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB	92,94	16,47	17,72	Perlu Upaya Keras

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.30. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB dengan Balai POM sejenis serta target nasional

Realisasi Pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap UMKM menunjukkan capaian persentase UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB/OBA), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Izin Penerapan CPPOB Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu merupakan yang paling rendah (14,12%) dibandingkan dengan Balai POM lain sejenis. Namun, realisasi Balai POM di Bengkulu telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 116,64%. Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB

Capaian di atas target ini disebabkan oleh adanya tambahan UMKM yang berhasil didampingi hingga memperoleh rekomendasi sertifikat di luar target awal, sebagai respons terhadap kebutuhan pembinaan di lapangan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pendampingan serta komitmen Balai POM dalam mendorong penerapan standar Cara Pembuatan yang Baik guna meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk UMKM.

Jika dibandingkan dengan target nasional seluruh Balai pada kluster II sudah melampaui target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tingkat keberhasilan Indikator kinerja Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan petugas fungsi pemeriksaan Balai POM di Bengkulu dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan Sertifikasi pelaku Usaha UMKM yang akan dinaikkan kelasnya, dimulai dengan ketepatan dan komunikasi yang sangat baik dengan para pelaku usaha masing – masing terutama mengenai komitmen para pihak dalam memenuhi semua hal yang dipersyaratkan dalam sertifikasi dan pendampingan sehingga setiap tahapan yang dilalui menjadi perhatian khusus dan sangat serius di selesaikan, pelaku usaha menyiapkan dokumen dan sarana serta semua hal yang dibutuhkan, petugas melakukan pendampingan dan fasilitasi sesuai yang dibutuhkan sesuai ketentuan.

- a. Kompetensi personil memadai dengan tugas yang diemban, melalui pelatihan di sertifikasi dan pendampingan UMKM Baik produk kosmetik, obat bahan alam maupun Pangan Olahan
- b. Adanya peraturan yang memadai tentang pendampingan dan sertifikasi produk kosmetik, obat bahan alam dan pangan olahan
- c. Dukungan anggaran yang memadai pada kegiatan pendampingan dan sertifikasi produk kosmetik, obat bahan alam dan pangan olahan dalam bentuk perjalanan dinas maupun ketersediaan infrastruktur internet dalam pendampingan dan pelaporan melalui saluran yang telah disampaikan unit pengampu pusat
- d. Keterlibatan tim IT dalam memastikan kestabilan jaringan pada saat melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring maupun pada saat melakukan pelaporan menggunakan SIPT

Selain itu, telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko :

1. Penyesuaian pelaksanaan renlak pendampingan dan prosedur sertifikasi setiap bulannya dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan time line pelaporan

2. Komunikasi antar petugas pada saat pengambilan Keputusan akhir mengenai Kesimpulan apakah suatu data sarana maupun ajuan dokumen dari pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan atau masih perlu disempurnakan sebelum akhirnya diterbitkan rekomendasi sertifikasi baik CPKB, CPOTB atau IP CPPOB.
3. Bahwa sepanjang tahun 2025 ini pengukuran indikator ini telah direncanakan dengan baik, dilaksanakan, lalu dimonev berkala dengan tools pelaporan yang telah disiapkan oleh unit pengampu pusat. Dalam monev, terdapat beberapa saran perbaikan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti antara lain kesesuaian antara realisasi setiap bulannya di sandingkan dengan perencanaan bulanan yang telah disampaikan ke Unit Pusat pada awal tahun 2025. sehingga memberikan hasil yang baik di akhir tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pengawasan Obat dan Makanan untuk indikator ini didukung oleh rincian output 3165.QDG.001. Kegiatan ini telah disusun dalam rencana pelaksanaan kegiatan pada awal tahun dan direalisasikan sesuai target pendampingan dan sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tindak lanjut akhir yang diambil oleh petugas sesuai dengan panduan yang ada sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Balai POM di Bengkulu untuk senantiasa melakukan pengawasan sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Bengkulu dan memberikan jaminan keamanan, mutu dan khasiat. Kerja – kerja pengawasan ini dilakukan dengan professional dan petugas yang kompeten di bidang nya dalam mendukung tercapainya target kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM dilakukan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan hingga penerbitan sertifikat, dengan pendekatan pembinaan yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. sosialisasi keamanan pangan pada awal Maret 2025 sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang pelaku usaha skala UMKM di bidang pangan sebagai tahap awal untuk menjangkau dan memotivasi pelaku usaha yang berpotensi mengikuti program pendampingan.
2. Penetapan target UMKM yang akan didampingi dengan mempertimbangkan kesiapan sarana, jenis produk dan komitmen pelaku usaha.
3. Pelaksanaan Bimtek CPPOB pada akhir April 2025 untuk memberikan pemahaman teknis mengenai persyaratan sarana produksi, sanitasi,

- dokumentasi, dan sistem jaminan mutu. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dengan materi teori, diskusi, serta contoh penerapan di sarana produksi.
4. Bimtek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait persyaratan teknis sesuai jenis produk yang dihasilkan.
 5. Setelah pelaksanaan bimtek, dilakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha, baik dalam pemenuhan aspek sarana produksi maupun kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung, konsultasi, serta evaluasi terhadap progres perbaikan yang dilakukan pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pelaku usaha yang telah ditargetkan pada awal tahun namun tidak memberikan respons atau progres sesuai yang diharapkan. Terhadap kondisi tersebut dilakukan revisi target pendampingan dengan menggantikan pelaku usaha yang lebih siap dan memiliki komitmen. Untuk mempercepat pemenuhan persyaratan, kembali dilaksanakan Bimtek CPPOB bagi pelaku usaha pengganti maupun pelaku usaha yang masih memerlukan penguatan pemahaman.

Pendampingan kemudian dilanjutkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi dan pelaku usaha memperoleh izin penerapan CPPOB. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, tepat waktu, serta disertai pendampingan intensif menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target indikator. Selain itu, fleksibilitas dalam melakukan revisi target serta penguatan pembinaan melalui bimtek tambahan turut mendukung tercapainya hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB	4.872.000,00	4.863.160,00	99,82	93,20	0,17	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,17 % dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM Didampingi CPOTB, CPKB dan IP CPPOB

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah perjalanan dinas pelaksanaan pengawasan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan, sosialisasi keamanan pangan pada awal Maret 2025 sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha, Bimtek CPPOB bagi pelaku usaha produksi pangan dan Bimtek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi pelaku usaha produksi Obat bahan Alam dan kosmetik.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Rencana tindak lanjut untuk periode 2026 dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya

Tabel 3.4. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Belum ada sarana OBA dan Kosmetik yang akan mengajukan Sertifikasi CPKB dan CPOTB	Perencanaan yang lebih baik	Identifikasi daftar UMKM yang siap didampingi memperoleh sertifikat IP CPPOB, CPOTB dan CPKB	TW 1	Y	S-18	Pendampingan UMKM tidak menghasilkan perolehan rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai target indikator kinerja.
	Petugas yang baru ditunjuk mengampu UMKM belum mengikuti pelatihan sertifikasi dan pendampingan UMKM	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia melalui pelatihan yang relevan	Pelatihan Fasilitator UMKM OBA, Kosmetik	TW 2	Y	S-18	Pendampingan UMKM tidak menghasilkan perolehan rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai target indikator kinerja.

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Sarana OBA dalam perkembangannya belum mampu memenuhi persyaratan teknis dan administratif	Komunikasi dengan pelaku usaha yang akan direkomendasikan untuk dilakukan pendampingan dan sertifikasi serta dengan unit pengampu pusat agar apabila terjadi kondisi yang tidak berjalan sesuai ketentuan dapat segera dilakukan mitigasi.	Konfirmasi kembali kesiapan pelaku usaha sebelum memasuki tahapan pelaksanaan sertifikasi selanjutnya	TW 1	Y	S-18	Pendampingan UMKM tidak menghasilkan perolehan rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai target indikator kinerja.
	Adanya target pemenuhan tahapan sertifikasi sarana OBA dari pusat secara berjenjang dan berkala diawali Bimtek bagi UMKM oleh fasilitator, pendampingan (administrasi perizinan NIB, Denah, dokumen CPOTB, dokumen pengajuan sertifikasi) dan pelaksanaan sertifikasi (pendampingan CAPA dan penerbitan rekomendasi CPOTB bertahap)	Penyempurnaan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjangkau kelemahan di setiap tahapan kegiatan	Monev bulanan pencapaian setiap tahapan pelaksanaan sertifikasi	TW 1	Y	S-18	Pendampingan UMKM tidak menghasilkan perolehan rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai target indikator kinerja.

SASARAN STRATEGIS 5 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BENGKULU

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan illegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai POM di Bengkulu berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu.

Pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu telah berhasil mewujudkan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 105,26% yang juga menjadi capaian sasaran ke-5.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Balai POM di Bengkulu	95	100	105,26	Sangat Baik

Penilaian keberhasilan penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30% -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[d / \text{jumlah perkara}]$

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah yang merupakan kesinambungan dari realisasi perkara terhadap target, mulai tahap awal (SPDP) hingga Tahap II (Penyerahan Tersangka dan barang bukti) sesuai dengan pembobotan per tahapan :

Perkara	SPDP (15%)	Tahap I (40%)	P21 (30%)	Tahap II (15%)	Jumlah
	A	B	C	D	
Perkara 1	0,15 (April 2025)	0,4 (Mei 2025)	0,3 (Juli 2025)	0,15 (Agustus 2025)	1
Perkara 2	0,15 (Juni 2025)	0,4 (Juli 2025)	0,3 (Juli 2025)	0,15 (Agustus 2025)	1
				Total Realisasi	2
				Target Perkara	2
				%Realisasi	100%

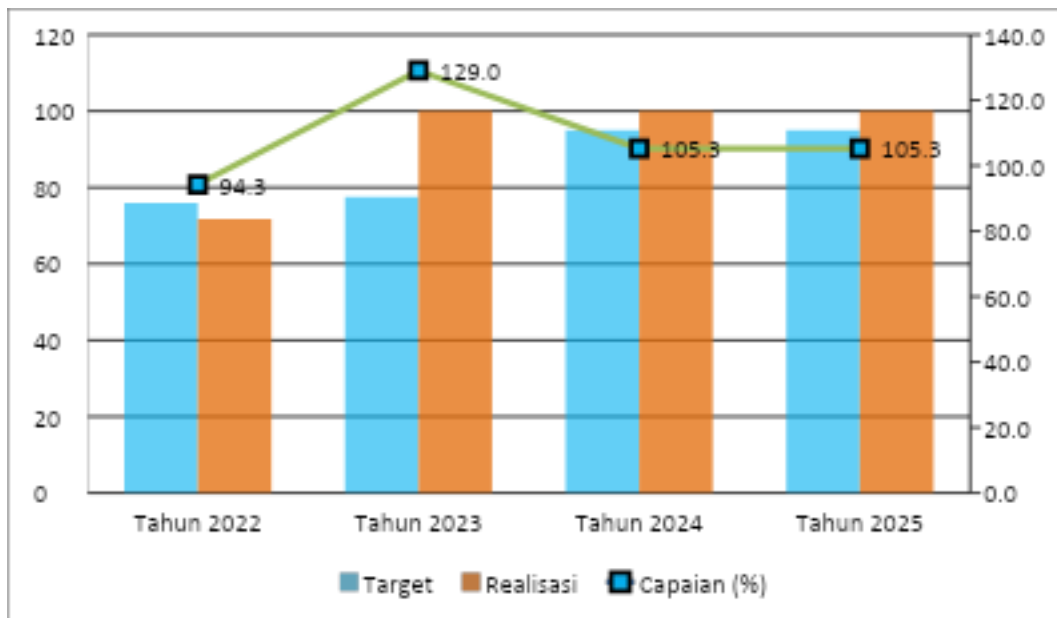
Keterangan:

- SPDP : Tahap awal berupa penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan tinggi yang menandakan bahwa penyidikan baru dimulai
- Tahap I : Penyerahan berkas perkara oleh PPNS Balai POM di Bengkulu kepada kejaksaan tinggi
- P21 : Pemberitahuan dari kejaksaan tinggi bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap
- Tahap II : Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tinggi yang menandakan adanya peralihan tanggungjawab peradilan dari penyidikan oleh PPNS Balai POM di Bengkulu menjadi tahap penuntutan oleh Kejaksaan tinggi atau negeri.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n & perkara carry over. Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu tahun 2025 adalah Sangat Baik dengan capaian sebesar 105,26%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu telah berhasil memenuhi sasaran kegiatan yang ditetapkan yakni Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan kriteria **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa antara penyusunan target dengan realisasi telah dilaksanakan/ tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Target indikator “Persentase keberhasilan Penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” pada tahun 2025 ini adalah 95 dengan realisasi sebesar 100 atau 105,26% yang masuk dalam kriteria “sangat baik”. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja selama periode Renstra tahun 2022 hingga 2025 tercantum dalam gambar berikut:



Gambar 3.31. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

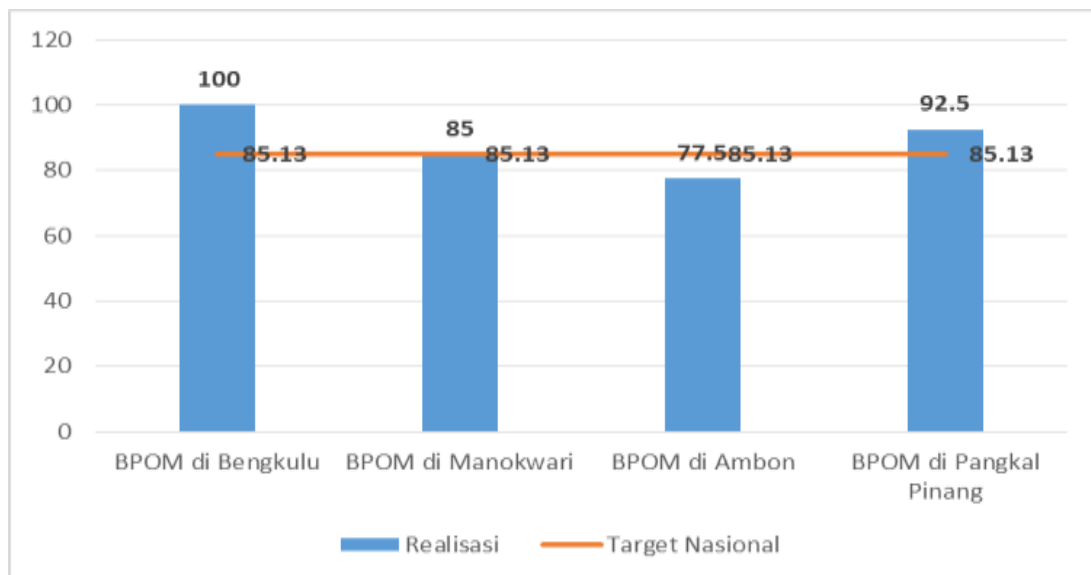
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, BPOM di Bengkulu telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, Dimana pencapaian rata-rata diatas 100% dengan kriteria “sangat Baik” kecuali pada tahun 2022 (Baik). Hal ini terjadi dikarenakan adanya penambahan 1 perkara yang masih berproses sampai pada tahap SPDP dan pada akhir tahun perkara belum bisa diselesaikan karena calon tersangka melarikan diri. Pencapaian kinerja ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara yang ditargetkan tiap tahunnya dapat dilakukan penanganan perkara selama tahun 2022 hingga 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Balai POM di Bengkulu	99	100	101,01%	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %, jika di bandingkan dengan target renstra jangka menengah sebesar 99,0 % maka target 2029 tergolong telah tercapai/ terlampaui dengan capaian 101,01%. Namun, pencapaian IKU ini ditujukan dari seluruh perkara yang ditangani pada tahun berjalan telah selesai hingga Tahap II sehingga peningkatan target berkala hingga 2029 masih tergolong sesuai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.32. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Pangkal Pinang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Ambon. Kinerja 4 (empat) UPT ini disajikan pada grafik di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, realisasi Balai POM di Bengkulu merupakan yang tertinggi sebesar 100%. Selain itu, realisasi ini juga telah **melampaui target Badan POM (pusat) sebesar 85,13%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penindakan Balai POM di Bengkulu dibanding Balai POM lain sejenis lebih baik.

Jika dibandingkan dengan target nasional diantara ke 4 balai pada kluster 2 Balai POM di Ambon dan BPOM di Manokwari masih berada dibawah target nasional, sedangkan BPOM di Bengkulu dan Pangkal Pinang sudah melampaui target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi **Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** diperoleh 100,0% dengan capaian sebesar 105,26 % (**Sangat Baik**), dimana target penyelesaian perkara tindak pidana di bidang sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan pada tahun 2025 sebanyak 2 perkara dapat diselesaikan hingga tahap II pada triwulan 3 tahun 2025. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pemantauan melalui monitoring dan evaluasi kinerja yang ditetapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen dilakukan secara berkala tiap bulannya. Seluruh personel tim penindakan dilibatkan dalam penyelesaian setiap target pelaporan dan pemantauan penyelesaian perkara. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring maupun luring) sebagai gelar kasus membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Kinerja pemenuhan indikator ini juga ditentukan pada rangkaian kegiatan mulai dari siber, intelijen, dan Penyidikan. Target jumlah perkara dapat tercapai dimana tahapan kegiatan tersebut telah dijalankan dengan optimal. Dengan pemanfaatan sistem monev yang efektif, maka Ketua tim Penindakan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seluruh Tim. Selain itu diadakan juga dialog kinerja setiap bulan bersama dengan Kepala Balai POM di Bengkulu sehingga progres penyelesaian perkara dan kegiatan penindakan lainnya dapat dipantau dengan optimal.

2. Kemampuan PPNS dalam menjalin Koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System (CJS)

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Bengkulu. Sebagai hasil dari koordinasi yang dilakukan berkala tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat penyelesaian atas beberapa perkara DPO melalui penetapan SP3 pada tahun 2025, Dimana telah dilakukan SP3 untuk 2 Perkara dari 3 Perkara dengan status DPO. Tindak pidana yang ditangani PPNS BPOM di Bengkulu merupakan ranah spesialis, yakni tindak pidana terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui koordinasi yang baik dan rutin, telah terjalin kesepahaman antara PPNS dengan CJS untuk dalam penyelesaian perkara terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Hasilnya, berkas perkara dapat diselesaikan oleh PPNS tepat waktu dan arahan jaksa dapat ditindaklanjuti dengan maksimal. Hal ini sangat berkontribusi pada pencapaian kinerja keberhasilan penindakan dan penanganan perkara di wilayah kerja BPOM di Bengkulu.

3. Dukungan dari pemangku kepentingan berupa terlaksananya berbagai peningkatan kerja sama di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber. Pada tahun 2025, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap peredaran obat tradisional mengandung BKO, peredaran Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya dan peredaran bahan tambahan pangan yang dilarang, dan juga peredaran obat-obat tertentu secara bebas dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang menyebabkan penyalahgunaan obat. Kerja sama juga dijalin dengan jasa ekspedisi dalam upaya cegah tangkal terhadap pengiriman produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal melalui penjualan online yang disalahgunakan dari tujuan pemakaian pribadi menjadi tujuan komersial.

Selain itu juga dilakukan upaya penggalangan yang melibatkan jajaran penyidik di wilayah tugas Kepolisian Daerah Bengkulu, mulai dari Polsek hingga Polres terkait penyamaan persepsi penanganan kasus peredaran OOT yang sering disalahgunakan yang hampir merata masif di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Penggalangan juga dilakukan terhadap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan jajarannya, Satpol Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Pemerintahan daerah Kecamatan, serta satuan kerja lainnya. Tujuan kegiatan penggalangan ini adalah untuk membangun jejaring pertukaran informasi dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah Provinsi Bengkulu.

4. Pelaksanaan kegiatan operasi terkait penindakan secara optimal. Sepanjang tahun 2025 ini, kegiatan intelijen dan siber dilakukan lebih intensif. Kegiatan pelaporan dan analisis atas hasil verifikasi informasi yang diperoleh dilakukan

sesuai rencana. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut menjadi rumusan untuk penyusunan rencana operasi penindakan. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kinerja.

5. Tindak lanjut dari rekomendasi Laporan kinerja tahun 2024 telah dilaksanakan pada tahun 2025 berupa penyelesaian hutang perkara yang tersangkanya telah ditetapkan DPO, dari 3 perkara yang ditetapkan DPO, sebanyak 2 perkara telah ditetapkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di bulan Februari 2025 terhadap tersangka a.n lin Soneta Bin Yamin dan pada bulan Oktober terhadap perkara a.n Arman Bin Zaharuddin. Putusan SP3 diambil atas pertimbangan adanya asas keadilan hukum dan ketidakcukupan alat bukti (ybs telah dihukum dengan tindak pidana yang sama di Kabupaten Bengkulu Selatan), sementara pada perkara a.n Arman, perkara telah memasuki waktu kadaluarsa pada tahun 2025. Penetapan SP3 terhadap dua perkara di atas telah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Aspidum dan Tim JPU Kejaksaan Tinggi Bengkulu melalui proses gelar perkara yang menghadirkan Kepala Balai POM Bengkulu sebagai atasan penyidik, PPNS, Korwas PPNS Polda Bengkulu dan perwakilan dari Direktorat Penyidikan Badan POM. Penyelesaian.

Pengendalian risiko

Selain itu, telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko tidak tercapainya efektivitas Penyidikan terkait dengan adanya intervensi Aparat terhadap penyelesaian perkara, Penanganan calon tersangka sampai proses tahap 2 dan upaya Praperadilan terhadap perkara yang sedang ditangani. Pengendalian dilakukan melalui :

1. Peningkatan Koordinasi dan permintaan komitmen dengan pimpinan Polda Bengkulu, kapolda dan wakapolda Bengkulu melalui Kabid Propam terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh personil aparat terhadap kasus atau perkara yang sedang ditangani. Antisipasi juga dengan perkuatan back Up korwas PPNS pada operasi Penindakan di lapangan.
2. Terhadap kasus yang diangkat menjadi pro-justicia, penanganan tersangka dilakukan upaya penahanan untuk menghindari tersangka melarikan diri dengan bantuan Polri. Akan tetapi pada tahun 2025, terdapat tersangka yang tidak dilakukan penahanan selama proses penyidikan disebabkan kendala kesehatan dari tersangka, dan dalam hal ini penyidik meminta komitmen dari tersangka dan keluarga untuk bisa kooperatif selama proses penyidikan berjalan. Hal ini juga dilengkapi dengan surat jaminan dari keluarga tersangka jika tersangka melarikan diri atau tidak kooperatif selama proses penyidikan hingga penyerahan ke Jaksa Penuntut Umum.
3. Melaksanakan manajemen penyidikan sesuai dengan KUHAP dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai antisipasi gugatan praperadilan dari tersangka terhadap proses penyidikan yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan mengingatkan praperadilan dapat memperlambat penyelesaian perkara. Selain itu juga dilakukan perkuatan pendampingan penyelesaian

perkara dengan korwas PPNS dan Jaksa Penuntut Umum dengan menindaklanjuti arahan Jaksa dalam P-19. Melalui tindakan pengendalian yang berjalan efektif, mampu menurunkan level residu risiko ke level dibawah selera risiko.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program pengawasan obat dan makanan yang mengampu indikator tersebut adalah rincian output 3165.QCD.U60. Pencapaian kinerja indikator kinerja **Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** ditunjang dari 4 (empat) kegiatan utama yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan yang seluruhnya telah berjalan dengan sinergis, berkesinambungan dan berorientasi pada hasil akhir pemenuhan target perkara yang dilakukan upaya penyidikan.

1. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan telah dilakukan dengan optimal. Pemetaan rawan kasus telah dilakukan secara berkala setiap bulan, memenuhi timeline yang ditetapkan, serta memuat seluruh unsur yang ditetapkan oleh Deputi Penindakan Badan POM. Hal ini terwujud dari hasil evaluasi Direktorat Cegah Tangkal Badan POM melalui Nota dinas Nomor PD.01.02.61.01.26.11 tanggal 7 Januari 2026 dimana hasil monitoring dan evaluasi pelaporan analisis kerawanan kejahatan Balai POM di Bengkulu periode Januari-Desember 2025 bernilai sempurna 100%.
2. Pelaksanaan kegiatan patroli siber oleh tim siber telah dilakukan dengan intensif dan menjangkau pemasok yang tidak hanya di propinsi Bengkulu, melainkan juga pemasok dari luar Propinsi Bengkulu sebagai input data pengedar di wilayah propinsi Bengkulu dan sebagai informasi awal kegiatan/operasi intelijen. Hal ini terwujud dari hasil evaluasi Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM melalui Nota dinas Nomor PR.09.02.63.01.26.25 tanggal 5 Januari 2026 dimana hasil Analisis penelusuran siber sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Bengkulu periode Januari-Desember 2025 bernilai sempurna 100%.
3. Kegiatan dan Operasi Intelijen telah dilakukan secara terencana dengan persiapan yang baik dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya, strategi cover dan desepsi sesuai hasil *casing* dan situasi yang ada. Balai POM di Bengkulu juga telah mampu memanfaatkan analisis hasil kerawanan, pengawasan serta diperkuat data pengiriman dari ekspedisi sebagai sumber informasi awal yang dapat ditindaklanjuti. Selain itu, informasi juga digali dari berbagai sumber melalui rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi.

Operasi Intelijen yang telah dilakukan Balai POM di Bengkulu adalah 17 kegiatan di luar kota dan 13 di dalam kota Bengkulu. Melalui kegiatan dan

operasi intelijen, telah dihasilkan dan dilaporkan **23 Laporan Intelijen** dengan level informasi A1 ke aplikasi dashboard penindakan <https://penindakan.pom.go.id/> yang seluruhnya telah ditindaklanjuti ke operasi Penindakan.

4. Kegiatan Operasi penindakan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu telah terencana dengan baik mempertimbangkan hasil laporan intelijen dengan level A1. Pada tahun 2025, telah dilakukan 10 kegiatan operasi penindakan di luar kota Bengkulu dan 7 kegiatan di Kota Bengkulu. Jumlah pelaku kejahatan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan penindakan sejumlah **23 orang pelaku tindak pidana** meliputi :
 - a. Mengedarkan Obat-Obat Tertentu tanpa keahlian dan kewenangan : 15 pelaku
 - b. Mengedarkan kosmetik tanpa izin edar : 2 pelaku
 - c. Memproduksi pangan mengandung bahan dilarang : 2 pelaku
 - d. Mengedarkan obat bahan alam Tanpa Izin edar dan mengandung BKO : 3 pelaku
 - e. Mengedarkan Obat keras tanpa keahlian dan kewenangan : 1 pelaku

Dari 23 pelaku tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan tersebut, sejumlah 2 pelaku ditingkatkan menjadi tahap penyidikan yaitu:

- Perkara ke-1 : mengedarkan sediaan farmasi OOT tanpa keahlian dan kewenangan dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu
 - Perkara ke-2 : mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat..
5. Kegiatan penyidikan terhadap 2 target perkara tindak pidana hasil operasi penindakan, dimana penyelesaian perkara melalui pemberkasan telah dilakukan secara **tertib dan sesuai prosedur**. Kegiatan penyidikan juga menjadi pengukuran utama keberhasilan capaian indikator kinerja. Terdapat beberapa kegiatan penyidikan yang menunjang keberhasilan IKU ini diantaranya:
 - a. Penyusunan berkas perkara (pemberkasan) terhadap 2 tindak pidana, masing-masing dibuat 4 rangkap untuk pemangku kepentingan (2 Kejaksaan, 1 Korwas PPNS Polda Bengkulu, 1 arsip)
 - b. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara (Tahap I) ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu:
 - i. Perkara pertama : 15 Mei 2025
 - ii. Perkara kedua : 14 Juli 2025
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan korwas dan kejaksaan dalam rangka penyelesaian perbaikan atas petunjuk jaksa (P-19).
 - d. Pelaksanaan kegiatan berupa perjalanan dinas dalam upaya melengkapi petunjuk jaksa diantaranya berupa:
 - i. Pemeriksaan tambahan saksi-saksi

- ii. Pemeriksaan lanjutan tersangka
 - e. Koordinasi dalam rangka Penyerahan berkas perkara hasil perbaikan sebagai tindak lanjut petunjuk jaksa.
 - f. Koordinasi dalam rangka penyerahan Barang Bukti dan tersangka (Tahap II) yang merupakan output akhir pengukuran kinerja, perkara ke-1 dilaksanakan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (13 Agustus 2025) dan perkara ke-2 ke Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu (21 Agustus 2025).
6. Pelaksanaan persidangan yang merupakan upaya akhir tahapan proses peradilan. Persidangan dilakukan melalui menghadirkan saksi dan ahli dari Balai POM di Bengkulu untuk memberi keterangan di Pengadilan Negeri Bengkulu (23 September 2025) dan Pengadilan Negeri Bengkulu Utara (7 Oktober 2025)

Kombinasi dari kegiatan-kegiatan tersebut menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator. Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Bengkulu dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara. Capaian yang maksimal juga didukung oleh semakin efektifnya kerja sama dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut dari Kejati Bengkulu.

Pelaksanaan Inovasi SIKAT GALO

Hal lain yang turut menunjang keberhasilan indikator ini adalah pelaksanaan intensifikasi pemeriksaan paket di jasa logistik yang ada di Provinsi Bengkulu melalui inovasi SIKAT GALO (Sinergi Bersama Jasa Ekspedisi Tangkal Peredaran Ilegal OOT). Dengan adanya inovasi ini telah terjalin Kerjasama yang sangat baik antara BPOM Bengkulu dengan Jasa ekspedisi yang tergabung dalam ASPERINDO baik dalam hal pertukaran informasi maupun dalam pengungkapan peredaran ilegal Sediaan Farmasi dan pangan Olahan di wilayah Bengkulu. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran ilegal Produk OOT yang mengandung Dekstrometorfan Kombinasi yang marak penyalahgunaannya di wilayah Provinsi Bengkulu. Upaya pencegahan ini telah dapat mencegah peredaran Produk OOT Dekstrometorphan HBr Kombinasi dijalur ilegal dalam jumlah yang sangat besar pada tahun 2025 (Jan-Des 2025) yaitu sejumlah 354.550 tablet dengan nilai keekonomian Rp. 479.273.989. Tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya dengan melakukan pengamanan tetapi juga dengan mengirimkan rekomendasi ke UPT BPOM di wilayah sumber pengadaan untuk dilakukan tindak lanjut informasi berupa penelusuran kebocoran peredaran melalui penjualan online, diantaranya ke BBPOM di Jakarta, BBPOM di Bandung, BPOM di Tasikmalaya, BBPOM di Banjarbaru serta BBPOM di Surabaya.

Melalui rekomendasi yang diberikan, terkonfirmasi melalui jawaban surat dari UPT terkait bahwa terdapat kebocoran penyaluran sediaan farmasi OOT

mengandung Dextromethorphan dari fasilitas distribusi PBF dan apotek ke jalur ilegal pada marketplace shopee, tiktokshop dan tokopedia. Tindak lanjut terhadap fasilitas tersebut juga telah dilaksanakan berupa sanksi peringatan keras dan Penghentian Sementara Kegiatan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	229.080.000,-	229.035.415,-	99,98	105,26%	0,05	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,05 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM Bengkulu. Penggunaan anggaran untuk indikator persentase keberhasilan penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Bengkulu mencapai 99,98%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 229.080.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 229.035.415,-. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.05 yang tergolong kategori efisien. **Pemanfaatan anggaran** pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan dan penelitian, pelaksanaan operasi intelijen, Pelaksanaan Operasi Penindakan, Pemberkasan dan Penyelesaian berkas Perkara hingga tahap persidangan di Pengadilan kab/kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini juga terwujud melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala yang ditindaklanjuti dengan **revisi anggaran**. Sehubungan dengan 2 tindak pidana yang diperoleh bersumber dari kabupaten yang tergolong dekat yaitu Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara, pelaksanaan revisi anggaran telah berkontribusi pada pemanfaatan anggaran yang lebih fleksibel melalui:

- Penambahan frekuensi kegiatan lain seperti keberlanjutan kegiatan operasi intelijen dan operasi penindakan untuk tetap menjamin sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman
- Kegiatan cegah tangkal berupa penggalangan pemangku kepentingan, meliputi Babinkamtibmas, Babinsa, Polres dan Polsek, Kepala Desa dan sekolah yang diselenggarakan di Kabupaten Seluma sebagai wilayah terbanyak penyaluran Obat-Obat Tertentu.

- c. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan produk ilegal di jasa pengiriman untuk memperoleh informasi awal pengedar lain yang belum teridentifikasi
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas penindakan melalui Forum Komunikasi Intelijen dan Bimbingan Teknis Siber

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu pada tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan diantaranya:

Tabel 3.5. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Kurangnya pemahaman petugas seiring dengan perkembangan penerapan hukum pidana, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam giat intelijen serta pengetahuan pendukung lainnya seperti Tindak pidana pencucian Uang, dll.	Peningkatan kompetensi petugas secara berkelanjutan, berupa Pemetaan kebutuhan kompetensi petugas agar upaya peningkatan kompetensi dapat tepat sasaran dan efektif. Diwujudkan berupa kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antartetugas, baik di lingkungan BPOM maupun dengan kementerian/lembaga terkait, pelatihan yang mencakup aspek teoretis dan teknis, serta pendidikan formal dan nonformal, baik yang menghasilkan gelar maupun non-gelar.	- Mengikuti bimtek terkait peraturan KUHAP yang baru berlaku pada tahun 2026 secara daring maupun luring. - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan CJS baik JPU ataupun Korwas PPNS dalam Penyidikan berkas perkara	Triwulan I Triwulan II	Y	S-19	Adanya Upaya Praperadilan dari pihak tersangka terhadap proses penyidikan perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik PPNS BPOM Bengkulu

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Tingginya pengiriman produk OOT dan kosmetik TIE melalui jasa pengiriman dan melibatkan transaksi di platform marketplace	Intensifikasi patroli siber, diharapkan efektivitas kinerja penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal dapat semakin meningkat.	Pengawasan di Sarana ekspedisi terhadap barang masuk Membangun jejaring dengan pihak marketplace maupun ekspedisi dalam penindakan sediaan farmasi dan Pangan Olahan Ilegal	Triwulan I Triwulan II	Y	S-22	Masih tingginya intensitas peredaran OOT Dextrometorfan Kombinasi melalui jalur online Ke Bengkulu
	Pelibatan stakeholder belum cukup sebanding dengan tingginya permasalahan peredaran OOT di masyarakat serta penjualan kosmetik TIE dalam upaya cegah tangkal dan pertukaran informasi guna giat penindakan	Upaya cegah tangkal berupa penggalangan terhadap berbagai kalangan. Lintas sektor yang dapat dijadikan sasaran penggalangan antara lain K/L yang terkait kegiatan pengawasan BPOM di Bengkulu, pelaku usaha termasuk pelaku usaha daring, komunitas, dan organisasi profesi. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki BPOM di Bengkulu dapat diatasi dengan pelaksanaan penggalangan secara intensif.	- Mengadakan kegiatan penggalangan melibatkan lintas sektor dalam membangun kesadaran bersama untuk penindakan kejahatan Obat dan Makanan.	Agst 2026	Y	S-23	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Provinsi Bengkulu, sehingga pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan secara optimal
	Hingga tahun 2026 masih terdapat hutang perkara tersangka DPO yang mejadi tanggaung jawab BPOM Bengkulu	- Berkoordinasi dengan BBPOM di Padang dalam rangka pencarian DPO tersangka a,n FR - Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dir	- Melakukan koordinasi dengan BBPOM padang dalam rangka pencarian DPO Tersangka FR - Mengirimkan surat permintaan	Triwulan I Triwulan	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Penyidikan BPOM dan Kejati untuk kemungkinan dilakukannya SP3 Perkara.	tanggapan terkait kemungkinan dilakukannya SP3 ketika hasil pencarian DPO tidak menemukan tsk DPO	II			
	Pemberlakuan KUHAP yang baru menuntut pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan jaksa harus didokumentasikan secara tertib dan minimal 3 kali	Menjaga hubungan yang baik dan koordinasi yang efektif dan efisien dengan CJS	-Dilakukan koordinasi sebelum dikirimkan SPDP dengan JPU dalam menetapkan apakah kasus dilanjutkan ke tahap projusticia untk menghindari kekurangan dalam tahap penyidikan yang akan dilakukan	Triwulan I	Y	S-19	Adanya Upaya Praperadilan dari pihak tersangka terhadap proses penyidikan perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik PPNS BPOM Bengkulu

SASARAN STRATEGIS 6
PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI
STANDAR

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut Balai POM di Bengkulu untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT Balai POM di Bengkulu mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengetahui capaian sasaran kegiatan ini, diukur pada 1 indikator yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang baik sebagai bagian dari upaya cegah tangkal dan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini

didukung oleh terpenuhinya capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 111,11%. Secara kriteria, capaian tersebut masuk ke dalam “Tidak Dapat Disimpulkan”. Namun, dari segi pencapaian realisasi terhadap target tahun 2025, hal ini menunjukkan keberhasilan melampaui target yang ditetapkan.

IKU 6.1. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan, dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%) Nilai Perolehan Persentase: $\{(50\% \times A) + (25\% \times B) + (25\% \times C)\}$

Berdasarkan Nota dinas Direktur Siber Obat dan Makanan nomor : PR.09.02.63.01.26.25 tanggal 5 Januari 2026, realisasi perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional untuk Balai POM di Bengkulu adalah sebagai berikut :

Bulan	Fungsi/Nilai Kinerja	
	Patroli Siber	Profiling siber
B1	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)

B2	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B3	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B4	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B5	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B6	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B7	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B8	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B9	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B10	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B11	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)
B12	Tepat waktu (100)	Tepat waktu (100)

Perhitungan keseluruhan indikator ini dihitung berdasarkan pembobotan sesuai Nota Dinas Direktur Cegah Tangkal Nomor PR.09.02.61.01.26.21 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, sebagaimana tabel di bawah ini:

Nilai	Ketepatan Waktu pelaporan siber (50%)	Nilai Kualitas analisis (25%)	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal (25%)
Nilai Komposit (%)	100	100	100
Nilai Konversi sesuai Bobot	50	25	25
Total Nilai	100		

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan pada tahun 2025 merupakan indikator yang baru dalam pencapaian Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. Pencapaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 111,11% dengan kriteria “Tidak dapat Disimpulkan”. Hasil perhitungan dengan menjumlahkan persentase ketepatan pelaporan Siber, kualitas pelaporan analisis Kerawanan Kejahatan dan Persentase Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT. Penilaian pencapaian indikator ini sebesar 100% dari Direktorat Cegah Tangkal dalam pencapaian indikator ini menunjukkan BPOM Bengkulu berhasil memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan target capaian maksimal untuk ketiga unsur penilaian meliputi pelaporan siber, Pelaporan analisis dan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh BPOM di Bengkulu.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Target indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan” pada tahun 2025 ini adalah 90% dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 111,11%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum pernah ada pada tahun sebelumnya atau pada periode Renstra 2019-2024. Pada periode Renstra sebelumnya, tidak terdapat indikator kinerja yang mengukur pencapaian kegiatan cegah tangkal seperti laporan siber, laporan analisis dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal.

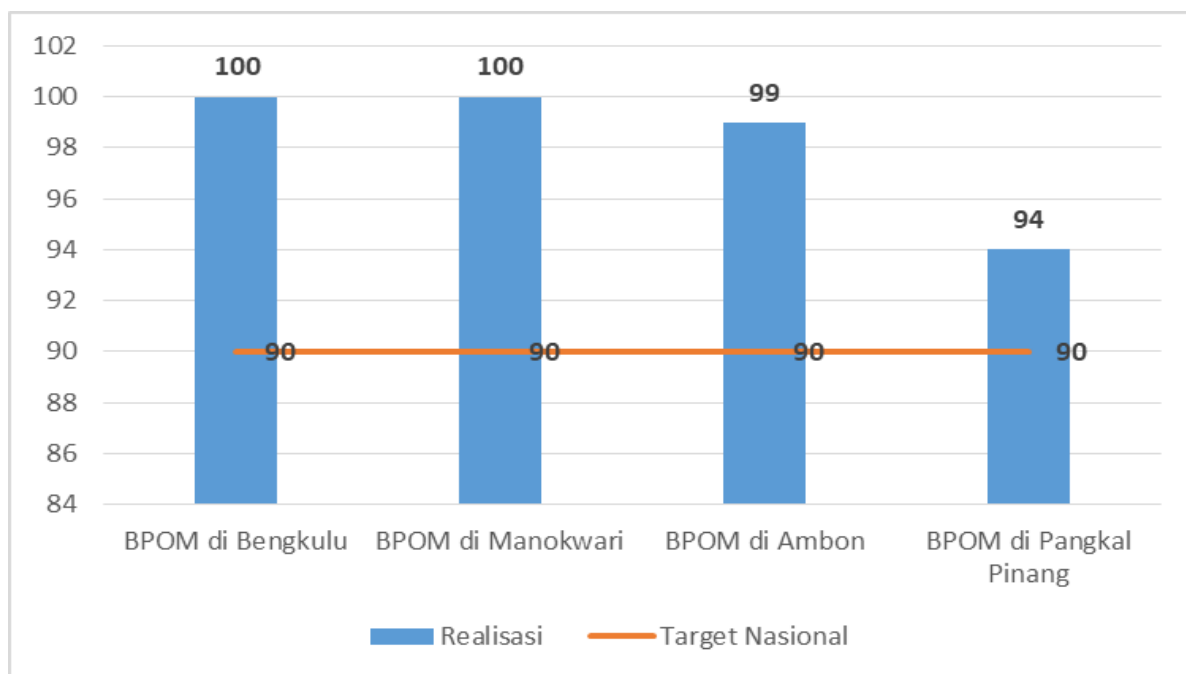
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	100	106,38%	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah sebesar 94% maka target 2029 telah tercapai/ terlampaui.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja ini dilakukan antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Manokwari, Balai POM di Ambon, dan Balai POM di Pangkal Pinang. Kinerja keempat UPT tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini. Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Manokwari memperoleh realisasi 100%, paling tinggi dibanding Pangkalpinang (94%) dan Ambon (99%). Seluruh realisasi keempat Balai POM telah melebihi target nasional sebesar 90%. Selain itu, realisasi Balai POM di Bengkulu juga melebihi realisasi nasional (96,51%).



Gambar 3.33. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan Balai POM sejenis dan target nasional

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan* pada tahun 2025 mencapai 100,0% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% (tidak dapat disimpulkan). Target indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, yang meliputi ketepatan pelaporan siber, persentase penilaian laporan analisis kerawanan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh Balai POM di Bengkulu. Meskipun melebihi target hingga tidak dapat disimpulkan, pada dasarnya realisasi yang diperoleh tetap menunjukkan keberhasilan mengingat capaian hanya selisih 1,1% dibanding kriteria sangat baik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut:

1. **Sumber Daya Manusia yang Kompeten**
Tim yang melaksanakan Patroli Siber dan *Profiling* Siber di Balai POM di Bengkulu memiliki kualifikasi, pelatihan, serta pengalaman yang memadai dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menindaklanjuti aktivitas kejahatan siber terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai**
Dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta akses jaringan yang stabil dan mutakhir, sangat menunjang pelaksanaan kegiatan siber. Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi secara optimal berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja.
3. **Prosedur Operasi Standar (SOP) yang Jelas dan Diterapkan secara Konsisten**
Tersedianya SOP yang terperinci pada setiap tahapan deteksi, analisis, dan

pelaporan, serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap SOP tersebut, memastikan konsistensi proses dan kualitas hasil kerja terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan siber.

4. **Koordinasi Internal yang Kuat**

Kolaborasi yang efektif antar unit kerja di Balai POM di Bengkulu, khususnya di antara personil yang melaksanakan Patroli Siber dan *Profiling* Siber, mendukung kelancaran alur kerja dan penanganan kasus kejahatan serta mempercepat diperolehnya data dan informasi untuk segera dilaporkan.

5. **Dukungan Pimpinan**

Komitmen dan dukungan pimpinan Balai POM di Bengkulu, baik dalam penyediaan anggaran, sarana prasarana, maupun kebijakan yang mendukung fungsi pengawasan siber, berperan penting dalam pencapaian indikator kinerja ini.

6. **Responsivitas terhadap Perkembangan Modus Kejahatan Siber**

Kemampuan tim untuk terus memperbarui pengetahuan serta beradaptasi dengan perkembangan modus kejahatan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas upaya deteksi dan analisis.

Telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko tidak tercapainya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan. Pengendalian risiko tersebut dilaksanakan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kompetensi Petugas Patroli Siber**

Peningkatan kompetensi petugas dilakukan melalui penguatan kemampuan dalam pelaksanaan patroli siber menggunakan aplikasi *Crawler*. Upaya ini dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Siber sepanjang tahun 2025. Selain itu, koordinasi yang intensif dan berkesinambungan dengan petugas Siber Pusat juga dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis maupun operasional dalam pelaksanaan patroli siber.

2. **Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Web**

Pengendalian risiko juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis web yang mendukung pengelolaan barang temuan dan barang bukti. Aplikasi tersebut mempermudah proses pemetaan kerawanan kejahatan berdasarkan komoditas barang bukti dan/atau barang temuan yang dikelola, sehingga mendukung ketepatan analisis dan pengambilan keputusan tindak lanjut.

Hal ini menyebabkan pengendalian berjalan efektif dan mampu menurunkan level residu risiko ke level dibawah selera risiko.

F. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,**

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pencapaian indikator ini dengan rincian output AEA.001 dengan bobot 100% dimana kegiatan berupa Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT dengan jumlah output sebanyak 14 kegiatan. Berdasarkan realisasi capaian output sampai bulan Desember 2025 sudah tercapai 14 laporan atau 100% ketepatan waktu pelaporan dari B1-B12 realisasi 100%.

Pencapaian kinerja Tim Penindakan dalam memenuhi indikator kinerja *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar* tidak terlepas dari kolaborasi tim yang solid dalam pelaksanaan berbagai

kegiatan strategis, antara lain penyusunan analisis data kerawanan kejahatan aktual Obat dan Makanan, penjejak digital kejahatan Obat dan Makanan, serta koordinasi lintas sektor dalam kinerja Penindakan Obat dan Makanan.

- Kegiatan pengumpulan data kerawanan kasus diperoleh **secara komprehensif** baik melalui hasil uji sampel pro justitia yang masuk ke Balai POM, permintaan keterangan ahli dari lintas sektor (kepolisian), kegiatan patroli siber, informasi masyarakat, laporan pengaduan, dan hasil investigasi awal dan intelijen sebelumnya, dll.
- Analisis data kerawanan kasus kejahatan yang mendominasi di Provinsi Bengkulu, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun tertutup. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada para pihak terkait sebagai upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
- Koordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan penggalangan dalam rangka penyamaan persepsi dan penentuan langkah strategis pencegahan dalam menekan tingkat kejahatan di daerah. Kegiatan penggalangan yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah berhasil menghimpun jejaring *Criminal Justice System* dalam upaya penanganan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) yang cukup marak di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut terwujud pada:
 - a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan antara Polda Bengkulu dan Balai POM di Bengkulu pada tanggal 16 Mei 2025 yang dilanjutkan dengan konferensi pers dan pemusnahan barang temuan hasil operasi penindakan periode Januari 2024 – April 2025 senilai Rp. **831.796.500**.
 - b. Penggalangan pada wilayah dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dalam kriteria tinggi, seperti Kabupaten Seluma pada tanggal 26 Agustus 2025 yang dilaksanakan di MAN 2 Seluma. Kegiatan melibatkan pemerintahan Kecamatan, perangkat daerah, tenaga pendidik, pelajar SMA/MAN, kepala desa beserta perangkat desa, serta unsur pengamanan Babinsa dan Babinkamtibmas di desa/kelurahan wilayah Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut mendapatkan respons positif dari pemerintah kecamatan hingga kelurahan/desa untuk bersinergi dalam menekan tingkat kerawanan kejahatan penyalahgunaan OOT yang telah meresahkan masyarakat.

Upaya pencegahan melalui kegiatan penggalangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 tersebut memperoleh apresiasi dari Direktorat Cegah Tangkal dengan dianugerahkannya predikat **Balai Terbaik II** kepada Balai POM di Bengkulu dalam kategori **Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**. Penghargaan ini diberikan pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan bertema “*Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat*” yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2025.



Gambar 3.34. Sertifikat predikat Balai Terbaik II kepada Balai POM di Bengkulu dalam kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Selain kegiatan penggalangan pemangku kepentingan, upaya lain yang turut menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ***Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*** adalah konsistensi dalam penginputan data kerawanan. Data tersebut bersumber dari hasil *crawler*, data *profiling* penjejak digital, serta tindak lanjut atas rekomendasi kerawanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bengkulu. Kepatuhan dalam inputan pemetaan kerawanan kasus tersebut mengantarkan Balai POM di Bengkulu pada tahun 2025 meraih predikat **Balai Terbaik III** dalam kategori **Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan**, yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2025.



Gambar 3.35. Sertifikat predikat Balai Terbaik III dalam kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	44.885.000,- -	44.884.000,- ,-	100,0	100%	0,11	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, Penggunaan anggaran mencapai 100,0% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 44.885.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 44.884.000,00. Hasil perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan nilai sebesar 0,11 yang termasuk dalam kategori **efisien**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran Tahun 2025 telah dimanfaatkan secara optimal dan efisien dalam mendukung pencapaian indikator kinerja *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar* di Balai POM di Bengkulu.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini bersumber dari 3165.AEA.001 diantaranya Pembelian bahan untuk penyusunan laporan analisis kejahatan, Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait yaitu jasa pengiriman, serta kegiatan penggalangan dengan perangkat pemerintahan daerah, penegak hukum, pelajar dan masyarakat.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini juga terwujud melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala yang ditindaklanjuti dengan **revisi anggaran**. Melalui fleksibilitas penggunaan anggaran, telah dilakukan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan efisiensi diantaranya:

- a. Penambahan frekuensi kegiatan koordinasi dan pengumpulan bahan keterangan di jasa pengiriman. Hal ini turut memperkuat data kerawanan kejahatan di Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya dianalisis lebih mendalam.
- b. Optimalisasi frekuensi dalam kegiatan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Melalui pemanfaatan anggaran yang efisien dengan kualitas yang sudah menjawab rekomendasi, pemanfaatan anggaran dapat dipergunakan untuk mendorong kegiatan lain yang menjadi komponen penilaian indikator ini yaitu penggalangan dan pengumpulan bahan keterangan data kerawanan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan cegah tangkal berupa penggalangan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Bengkulu tanggal 16 Mei 2025 yaitu Kapolda Bengkulu beserta jajaran (Direktur Reserse Narkoba, Direktur Propam dan Direktur Reserse Kriminal Khusus), kepala Organisasi perangkat daerah dan pimpinan jasa pengiriman. Melalui kegiatan ini yang diikuti pemusnahan barang bukti, seluruh pemangku kepentingan menjadi lebih terbuka terkait permasalahan peredaran produk ilegal dan sediaan farmasi OOT.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Balai POM di Bengkulu pada tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan diantaranya:

Tabel 3.6. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Kerawanan kejahatan belum tergambar secara faktual dikarenakan inputan pada aplikasi ADP terkait pemetaan kerawanan kasus kejahatan obat dan Makanan pada tahun 2025 belum berasal dari data inputan	Menerapkan konsistensi dalam melakukan input data pengawasan di aplikasi ADP yang dimulai dengan adanya transfer data dari substansi Pemeriksaan kepada Penindakan. Untuk kendala ini pada akhir tahun 2025 telah di launching aplikasi ADP baru oleh pusdatin dimana	Melakukan monitoring inputan Rawan kasus memuat 10 data sumber sesuai dengan pedoman CT	TW 1	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	rawan kasus khususnya hasil pengawasan Obat dan Makanan dari substansi Pemeriksaan, hal ini terkendala dengan integrasi Data SIPT dengan ADP	mengintegrasikan hasil SIPT pengawasan dengan data rawan kasus di ADP. Kedepannya diperlukan pemantauan dalam konsistensi inputan dari 10 jenis data sumber rawan kasus sesuai dengan pedoman Cegah Tangkal sehingga kondisi kerawanan kasus memang dapat dipastikan akurat sesuai dengan kondisi kerawanan di Provinsi Bengkulu.					
	Belum terdapatnya regulasi yang tegas dan jelas terkait peredaran Obat-Obat Tertentu khususnya yang mengandung Dekstrometorfan HBr kombinasi secara daring. Hal ini menyebabkan masih dominannya peredaran ilegal dari OOT ini di jalur online.	Terdapat peraturan yang lebih tegas yang memasukkan OOT yang mengandung Dekstrometorfan HBR ke dalam Obat yang dilarang diperjualbelikan secara online.	Mengirimkan rekomendasi kepada Ditwas Peredaran ONAPZA untuk menambahkan OOT yang Mengandung Dekstrometorfan HBR sebagai obat yang dilarang dijual secara daring atau melalui PSEF.	Des 26	Y	S-22	Masih tingginya intensitas peredaran OOT Dekstrometorfan Kombinasi melalui jalur online Ke Bengkulu
	Lemahnya fungsi deteksi dini terhadap kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu dikarenakan belum terbangun jejaring informasi	1. Upaya yang dilakukan untuk memperkuat fungsi ini dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya obat dan makanan yang ilegal dan tidak memenuhi standar keamanan	1. Peningkatan Kapasitas petugas dalam Intelijen, Siber, Cegah Tangkal 2. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan di	Sept 2025 Maret 2026	Y	S-23	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	intelijen	dan mutu melalui kegiatan Penggalangan stakeholder, pelaku usaha, jasa pengiriman, Aparat Penegak Hukum, OPD Provinsi dan kabupaten, Pemerintah daerah, perangkat lingkungan, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pendidik, kalangan pelajar dan masyarakat secara umum yang menghasilkan gerak bersama yang saling sinergi untuk menekan peredaran, penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal di Provinsi Bengkulu. 2. Melakukan intensifikasi pengawasan di sarana jasa pengiriman dan upaya Koordinasi dengan penyedia e-commerce untuk pengembangan kasus dalam rangka penindakan dan Cegah tangkal,	perusahaan ekspedisi sesuai dengan modus kejahatan yang berkembang 3. Penggalangan stakeholder dalam rangka Cegah tangkal 4. Upaya Koordinasi dengan penyedia-commerce untuk pengembangan kasus dalam rangka penindakan dan Cegah tangkal	Des 2026 Juni 2026			Olahan di wilayah kerja Provinsi Bengkulu, sehingga pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan secara optimal

SASARAN STRATEGIS 7 LAYANAN PUBLIK UPT BALAI POM DI BENGKULU YANG PRIMA

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan Layanan Publik UPT Balai POM di Bengkulu yang prima. Hal ini didukung oleh terpenuhinya capaian 1 indikator pada sasaran ini yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT Balai POM di Bengkulu sebesar 102,55%.

Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Layanan publik yang prima UPT Balai POM di Bengkulu diperoleh melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi dalam jangka panjang.

IKSS 7.1 - INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

A. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

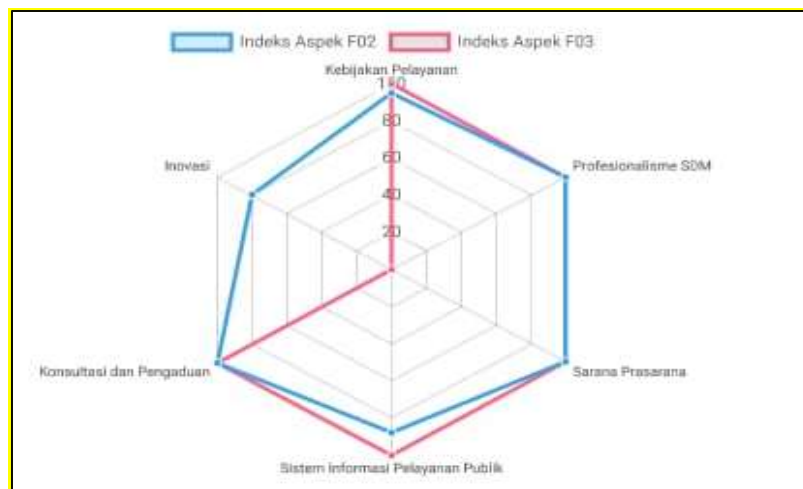
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.82	102.55	Sangat Baik

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan target tahun 2025 sebesar 4,70 dan realisasi sebesar 4,82. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 102,55% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik.

Rincian perhitungan indeks Pelayanan Publik Balai POM di Bengkulu dijabarkan sesuai Tabel berikut.

Tabel 3.. Komponen penilaian realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Balai POM di Bengkulu

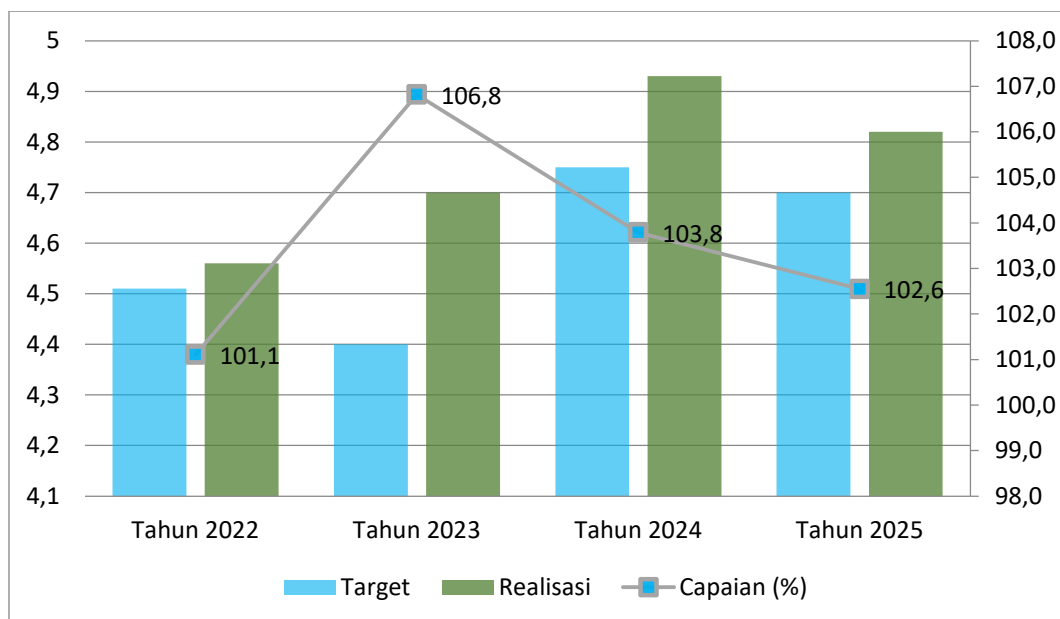
Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	4,76
	II	Profesionalisme SDM	25%	5
	III	Sarana Prasarana	18%	5
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,4
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5
	VI	Inovasi	12%	4
Indeks Formulir F02			4,76	
F03	Indeks Formulir F03			5
Indeks Pelayanan Publik			4,82	



Pengukuran komponen Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Bengkulu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, system informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta ketersediaan inovasi. Keenam aspek tersebut tergabung dalam F02 dengan bobot 25%. Selain itu, pengukuran juga dilakukan melalui F03 yang didapat dari penilaian responden dan/atau pelanggan Balai POM di Bengkulu dengan bobot 75%. Keseluruhan nilai indeks dari formulir F02 dan F03 memberikan indeks Pelayanan public Balai POM di Bengkulu 4,82.

Capaian yang melampaui target ini mencerminkan bahwa upaya perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik telah berjalan efektif. Secara substantif, peningkatan indeks menunjukkan adanya penguatan pada aspek-aspek yang biasanya menjadi penentu kualitas pelayanan, seperti kejelasan prosedur, kepastian waktu layanan, keterjangkauan akses, responsivitas petugas, serta konsistensi standar pelayanan. Dalam konteks laporan kinerja, hasil ini mengindikasikan bahwa BPOM di Bengkulu mampu menjaga mutu layanan secara berkelanjutan, sekaligus melakukan perbaikan yang terarah sehingga nilai pelayanan publik meningkat dibandingkan ekspektasi yang ditetapkan pada awal tahun.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa Indeks Pelayanan Publik BPOM di Bengkulu menunjukkan kinerja yang konsisten berada di atas target sepanjang periode 2022 hingga 2025. Pada setiap tahun, realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian yang bergerak pada kisaran 101 hingga 107 persen. Pola ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik bukan merupakan hasil sesaat, melainkan buah dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola dan standar layanan.

Secara lebih rinci, capaian tertinggi terlihat pada tahun 2023 dengan persentase sekitar 106,8 persen, yang mencerminkan fase penguatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi pelayanan. Pada tahun 2024 dan 2025, meskipun persentase capaian sedikit menurun dibandingkan puncak 2023, kinerja tetap berada pada kategori sangat baik, yakni 103,8 persen pada 2024 dan 102,6 persen pada 2025. Penurunan tipis ini tidak dapat dimaknai sebagai kemunduran, melainkan sebagai bentuk stabilisasi kinerja setelah fase peningkatan yang cukup tajam pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks manajemen kinerja, pola seperti ini justru sering menandai bahwa organisasi telah memasuki tahap kematangan, di mana fokus bergeser dari sekadar mengejar kenaikan nilai menjadi menjaga kualitas layanan agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

Dari perspektif tata kelola, konsistensi capaian di atas target ini menunjukkan bahwa BPOM di Bengkulu telah berhasil membangun sistem pelayanan yang relatif solid, baik dari sisi prosedur, kapasitas sumber daya manusia, maupun mekanisme evaluasi. Realisasi kinerja yang terus melampaui target juga mengindikasikan adanya budaya perbaikan berkelanjutan, di mana umpan balik masyarakat dan hasil evaluasi internal digunakan sebagai dasar penyempurnaan layanan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, grafik ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan numerik dalam pencapaian indikator, tetapi juga merefleksikan proses pembelajaran organisasi yang semakin matang dalam mengelola pelayanan publik. Ke depan, tantangan utama bukan lagi pada pencapaian angka semata, melainkan pada bagaimana menjaga mutu pelayanan agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja, serta konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

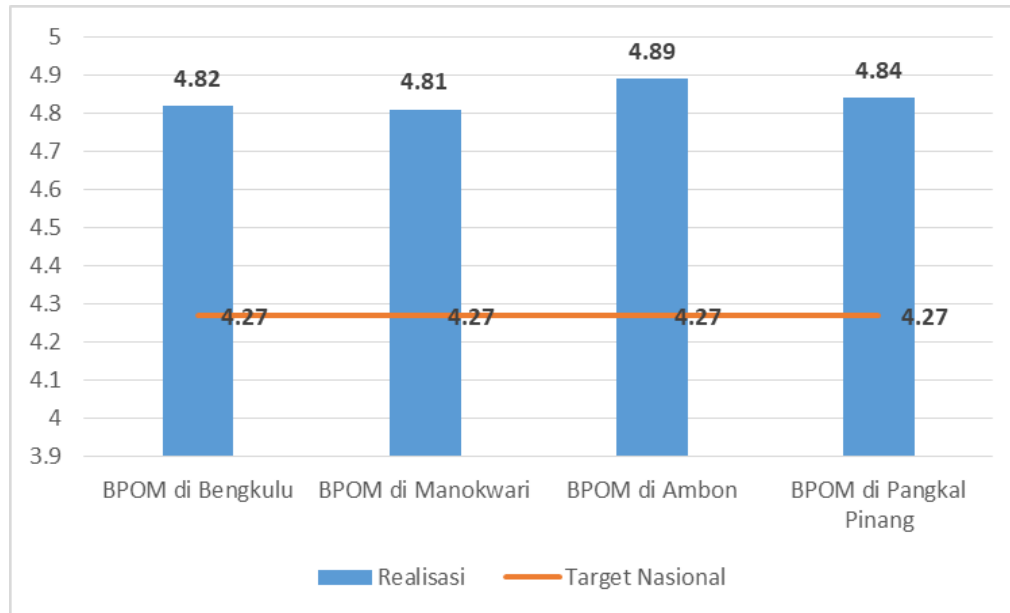
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.90	4.82	98,37	Akan Tercapai

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target akhir periode Renstra, dapat dijelaskan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM di Bengkulu menunjukkan capaian yang cukup positif. Target jangka menengah pada akhir periode renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 4,90, sementara realisasi pada tahun 2025 telah mencapai 4,82. Dengan demikian, capaian yang dihasilkan

setara dengan 98,37% sehingga masuk dalam kriteria akan tercapai. Hal ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di BPOM di Bengkulu telah berada pada jalur yang tepat dan bahkan lebih cepat dari yang direncanakan mengingat proyeksi capaian hampir 100%. Dengan mempertahankan hal yang telah berjalan baik diikuti dengan sedikit upaya perbaikan yang memadai target 2029 dapat terlampaui pada tahun mendatang.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.37. Grafik realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik dibandingkan dengan Balai sejenis dan target nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, indikator Indeks Pelayanan Publik UPT menunjukkan bahwa Balai POM di Bengkulu mencapai 102,55% (realisasi 4,82 dari target 4,70), yang menandakan kualitas pelayanan publik telah melampaui standar yang ditetapkan. Capaian ini sebanding dengan Balai POM sejenis/setara seperti Manokwari (102,34%), Ambon (105,16%), dan Pangkal Pinang (102,98%), sehingga menegaskan bahwa kinerja pelayanan publik Balai POM di Bengkulu berada pada kategori sangat baik dan konsisten dengan capaian nasional, serta mencerminkan efektivitas penerapan standar pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025, kinerja pelayanan publik BPOM di Bengkulu menunjukkan penguatan yang nyata, baik pada capaian kinerja utama maupun pada pengakuan eksternal atas mutu layanan. Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,82, melampaui target tahunan 4,70 dengan capaian 102,55% dan kriteria Sangat Baik. Capaian ini selaras dengan pengakuan Badan POM melalui Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan kategori “Pelayanan Prima” untuk BPOM di Bengkulu, yang menegaskan bahwa kualitas layanan tidak hanya baik secara angka, tetapi juga tervalidasi dalam penilaian kelembagaan.

Keberhasilan tersebut secara umum ditopang oleh sebab-sebab berikut:

- Pelaksanaan monitoring yang memadai atas monitoring umpan balik pemahaman masyarakat terkait pelayanan publik. Penguatan komunikasi publik dilakukan melalui pelaksanaan KIE yang berjalan melalui kanal tatap muka dan media, dengan efektivitas yang tinggi. KIE yang efektif berfungsi sebagai “pencegah macet” layanan karena meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan, menurunkan kesalahan berkas, serta mengurangi misinformasi yang sering menjadi sumber keluhan.
- Ketiga, capaian layanan juga diperkuat oleh inovasi dan keterbukaan informasi. Masuknya inovasi “Salam Pramuka” dalam Top 22 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2025 menunjukkan adanya budaya pembaruan layanan berbasis solusi, sementara penghargaan pelayanan informatif dari Badan POM dan pengakuan PPID Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa BPOM di Bengkulu tidak hanya melayani, tetapi juga menyediakan informasi publik secara lebih terbuka, rapi, dan mudah diakses. Dalam praktik, keterbukaan informasi ini biasanya berdampak langsung pada kualitas layanan karena memperjelas alur, mengurangi ketidakpastian, dan mempercepat penyelesaian layanan.
- Keberhasilan pemenuhan nilai indeks pelayanan publik F02 secara langsung :
 - a. Kebijakan Pelayanan. Adanya kebijakan pelayanan publik dan maklumat pelayanan Balai POM di Bengkulu pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca pelanggan di area pelayanan publik serta secara berkala disosialisasikan di medsos Balai POM di Bengkulu.
 - b. Profesionalisme SDM. Adanya dukungan personil yang telah dibekali dengan pelatihan yang memadai, kompeten dan memahami pelayanan publik yang terwujud melalui pelayanan prima dan menjunjung tinggi profesionalisme. Hal ini turut mendorong terbentuknya konsistensi pemenuhan dan penerapan standar layanan, penguatan tata kelola internal, serta responsivitas pelaksana layanan,

- sehingga pengalaman layanan menjadi lebih pasti, tertib, dan dapat diprediksi oleh pengguna.
- c. Sarana prasarana. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai meliputi area bermain anak, ruang menyusui, ruang konsultasi, dll
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik, didukung dengan adanya Inovasi Ruang virtual yang memudahkan pelanggan berkonsultasi dari jarak jauh serta adanya system antrian pelayanan dan buku tamu elektronik.
 - e. Konsultasi dan Pengaduan. Adanya layanan konsultasi bagi pelanggan dan pengaduan melalui berbagai saluran. Selain itu, pengaduan yang masuk ke Balai POM di Bengkulu telah ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku, disampaikan kembali kepada pelapor dan diperoleh umpan balik yang positif.
 - f. Inovasi. Adanya inovasi **Percaya Juara Keren**, (pria perempuan menuju sejahtera kelompok rentan), sebagai bentuk komitmen mendukung kelompok difabel memproduksi pangan sesuai standar serta memfasilitasi pengurusan izin edar melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Mal Pelayanan Publik Kota Bengkulu, guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka. Pada bulan Agustus 2025 telah dilakukan penyerahan sertifikat keamanan pangan bagi 15 pelaku usaha kelompok rentan yang merupakan binaan PMMI (Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi). Melalui inovasi ini, Balai POM di Bengkulu memperoleh nilai tertinggi pertama untuk tingkat Balai POM sebesar 96,55% (Terbaik) berdasarkan penilaian dari Badan POM pada Monev Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 menunjukkan bahwa BPOM di Bengkulu telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, dan semakin informatif. Penghargaan “Pelayanan Prima” menjadi bukti penguatan mutu layanan, sementara capaian keterbukaan informasi dan inovasi menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada transparansi dan pembaruan cara melayani. Ke depan, penguatan konsistensi dokumentasi, integrasi informasi layanan, serta pendalaman dampak KIE akan membuat capaian kinerja tidak hanya tinggi, tetapi juga semakin tahan uji dan berkelanjutan.



Penghargaan yang diperoleh Balai POM di Bengkulu terkait Pelayanan Publik

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pengawasan obat dan makanan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah 3165.BAH.001.

Capaian Indeks Pelayanan Publik BPOM di Bengkulu tahun 2025 yang mencapai 4,82 dengan kategori A (Pelayanan Prima) menunjukkan bahwa program dan kegiatan pelayanan publik yang dijalankan telah bekerja efektif dan mampu melampaui ekspektasi kinerja.

Keberhasilan ini terutama ditopang oleh berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Penguatan tata kelola pelayanan secara terstruktur, mulai dari:
 - penataan kebijakan pelayanan melalui penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik BPOM di Bengkulu Tahun 2025.
 - penguatan profesionalisme pelaksana layanan melalui pemberian penganugerahan best employee pelayanan publik setiap bulannya
 - perbaikan mekanisme layanan yang membuat pengalaman pengguna lebih tertib, jelas, dan responsif, diantaranya terdapat Prosedur pelayanan publik prioritas untuk kelompok rentan, perbaikan mekanisme untuk pemberian layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan serta perbaikan mekanisme layanan pengujian sampel PNBP Pihak ketiga.
 - Pelaksanaan **Forum Konsultasi Publik (FKP)** dilaksanakan pada **Kamis, 8 Mei 2025**, bertempat di **Aula Rafflesia Balai POM di Bengkulu**, dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri dari unsur penyelenggara layanan, pengguna layanan (Polres Kota Bengkulu, Dir Narkoba Polda Bengkulu, BNN Kota Bengkulu), akademisi (UNIB, Poltekkes Kemenkes), OPD terkait (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, Disperindag, DPMPTSP, Diskominfo), Ombudsman Perwakilan Bengkulu, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta media massa. Forum ini dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi dan peninjauan ulang standar pelayanan, sekaligus menindaklanjuti hasil monitoring serta temuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun sebelumnya. Melalui diskusi partisipatif dan FGD, diperoleh identifikasi permasalahan pada unsur biaya/tarif, sistem dan prosedur pelayanan, serta penguatan akses pengaduan, yang kemudian dituangkan dalam berita acara peninjauan ulang standar pelayanan. Hasil FKP menghasilkan rumusan rekomendasi yang kontekstual dan berbasis realita lapangan. Penyesuaian standar pelayanan tahun 2025 antara lain mencakup: (1) penegasan kembali ketentuan biaya/tarif pengujian berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 489 Tahun 2024 tentang tarif PNBP jasa pengujian yang bersifat volatil; (2) inovasi layanan berupa penguatan **ruang tamu virtual** untuk konsultasi UMKM, permintaan informasi, dan pengaduan

masyarakat; (3) penyederhanaan dan klarifikasi persyaratan serta prosedur layanan agar lebih mudah dipahami publik; serta (4) penguatan kanal pengaduan dan komunikasi layanan publik. Dengan demikian, FKP tahun 2025 tidak hanya bersifat seremonial, tetapi membentuk siklus perbaikan pelayanan yang terdokumentasi, terukur, dan dapat ditelusuri, sekaligus memperkuat komitmen BPOM di Bengkulu dalam peningkatan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

2. Adanya persiapan yang memadai dalam upaya peningkatan layanan terkait SKI dan SKE, termasuk kesiapan akun dan proses pada sistem yang relevan, dan akan mengirimkan petugas untuk peningkatan kompetensi dalam pelayanan SKI SKE.
3. Kegiatan KIE yang dijalankan BPOM di Bengkulu sepanjang 2025 juga memberi kontribusi pendukung bagi kualitas pelayanan, karena edukasi publik yang efektif membantu masyarakat lebih memahami layanan dan persyaratan, sehingga interaksi layanan cenderung lebih lancar. Hal ini selaras dengan hasil survei efektivitas KIE yang menunjukkan Indeks Rata-Rata Final 93,16.

Arah ini menggambarkan bahwa BPOM di Bengkulu sudah berada pada jalur peningkatan berkelanjutan, karena layanan tidak hanya dijalankan, tetapi juga dinilai, dikoreksi, lalu disempurnakan kembali dalam standar kerja. Selain itu, penguatan dukungan layanan juga ditunjukkan melalui.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	30.885.000	30.800.900	99.73	105.26	0.03	Efisien

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja, dapat dijelaskan bahwa dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM di Bengkulu pada tahun 2025 dikelola secara efisien. Target anggaran tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp30.885.000, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp30.800.900, sehingga tingkat realisasi anggaran mencapai 99,73%. Pada saat yang sama, capaian indikator kinerja mencapai 105,26%, yang menunjukkan bahwa kualitas kinerja pelayanan publik tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya.

Hasil tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,03 dengan kriteria Efisien. Secara substantif, kondisi ini menggambarkan bahwa BPOM di Bengkulu mampu mengonversi sumber daya yang tersedia menjadi capaian kinerja yang optimal melalui pengendalian belanja yang tertib dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi serapan, tetapi juga dari sisi manfaatnya dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.

Ke depan, capaian efisiensi ini perlu dipertahankan melalui perencanaan anggaran yang semakin berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan agenda perbaikan berkelanjutan. Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan sumber daya juga tetap diperlukan agar efisiensi yang telah dicapai dapat terus diikuti oleh peningkatan kualitas layanan yang konsisten dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun 2026 untuk indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM di Bengkulu dengan target 4,75 diarahkan untuk menjaga mutu layanan yang sudah Pelayanan Prima sekaligus memperkuat aspek-aspek yang menjadi catatan evaluasi agar kenaikan kinerja tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga semakin kokoh pada sistemnya. Pada tahun 2025, hasil pemantauan dan evaluasi menyatakan Indeks Pelayanan Publik 4,82/A (Pelayanan Prima), disertai rekomendasi penguatan yang menjadi pijakan perbaikan tahun berikutnya.

Dengan baseline tersebut, target 2026 sebesar 4,75 pada dasarnya sangat realistis untuk dicapai dan bahkan dilampaui, sepanjang perbaikan dilakukan secara fokus pada tata kelola standar pelayanan, bukti kinerja, dan konsistensi layanan digital. Dengan demikian, tindak lanjut 2026, perlu menekankan pada pengembangan layanan publik pada 9 jenis layanan yang beberapa layanan diantaranya belum terlaksana diantaranya SKI dan SKE.

Tabel 3.7. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

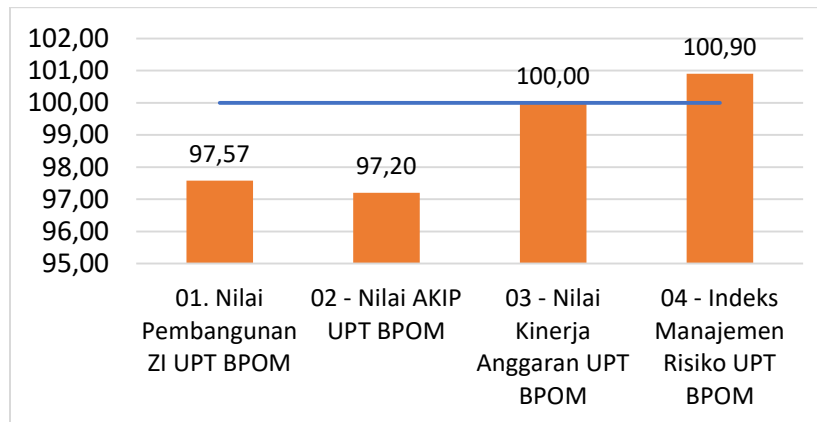
Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Penetapan maklumat dan standar pelayanan belum sepenuhnya dilakukan secara terpisah dan sesuai alur PP No. 96 Tahun 2012, serta	Penetapan maklumat dan standar pelayanan juga perlu dipastikan dilakukan terpisah sesuai alur penetapan standar pelayanan pada PP Nomor 96	1) Menyusun ulang dokumen standar pelayanan dan maklumat pelayanan sesuai alur regulasi. 2) Melakukan reviu internal	Triwulan I–II 2026	Y	O-08	Belum terakomodirnya seluruh layanan publik sesuai standar pelayanan Badan POM di UPT

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	belum seluruh layanan publik terdokumentasi rapi, konsisten, dan mudah ditelusuri oleh evaluator.	Tahun 2012, sehingga dokumen layanan menjadi lebih rapi, jelas, dan mudah diaudit.	atas seluruh dokumen layanan publik sebelum dipublikasikan . 3) Menetapkan SK penetapan standar pelayanan yang diperbarui.				
	Kesiapan layanan yang menjadi perhatian evaluator belum optimal, khususnya layanan SKI dan SKE, kompetensi petugas, akun e-BPOM, serta kesinambungan laporan FKP dari tahun sebelumnya.	memperkuat kesiapan layanan yang menjadi perhatian evaluator, termasuk persiapan pemberian layanan SKI dan SKE melalui pemenuhan aspek kompetensi dan kesiapan akun pada sistem terkait, serta penyempurnaan laporan FKP dengan memasukkan tindakan lanjut tahun sebelumnya agar rangkaian perbaikan terlihat utuh dari tahun ke tahun	1) Melakukan pengisian kompetensi petugas layanan SKI & SKE. 2) Penyelesaian dan aktivasi akun e-BPOM. 3) Penyusunan laporan FKP yang memuat tindak lanjut tahun sebelumnya secara utuh.	Triwulan II	Y	O-08	Belum terakomodirnya semua layanan publik sesuai dengan standar pelayanan Badan PO di UPT
	Informasi layanan belum sepenuhnya terpublikasi secara konsisten dan terintegrasi pada kanal resmi serta belum seluruhnya terhubung	memastikan seluruh layanan, standar pelayanan, dan pembaruan informasi terpublikasi konsisten pada kanal resmi, disertai bukti integrasi atau	1) Pemutakhiran informasi layanan secara berkala pada website dan subsite UPT. 2) Integrasi data layanan ke SIPPN.	Triwulan II	Y	O-08	Informasi pelayanan tidak mutakhir dan tidak terintegrasi

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	dengan SIPPN.	bukti publikasi yang dapat ditelusuri.	3) Penyediaan bukti publikasi yang dapat ditelusuri.				

SASARAN STRATEGIS 8 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. Hal ini terwujud melalui pencapaian rata-rata indikator kinerja pada sasaran ini dengan nilai capaian sasaran 98,9% (Baik).



Gambar 3.38. rata-rata indikator kinerja pada sasaran ini dengan nilai capaian sasaran

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di Balai POM DI Bengkulu telah berhasil mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selain itu, pelaksanaan akuntabilitas kinerja, zona integritas, efisiensi penggunaan anggaran serta penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan konsisten. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang professional.

IKSS 8.1 – NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BPOM

NILAI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI POM DI BENGKULU

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nilai Pembangunan Zona Integritas diukur melalui hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Perhitungan terbagi ke dalam 2 komponen, yaitu Komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%) yang terdiri dari 6 area kerja meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

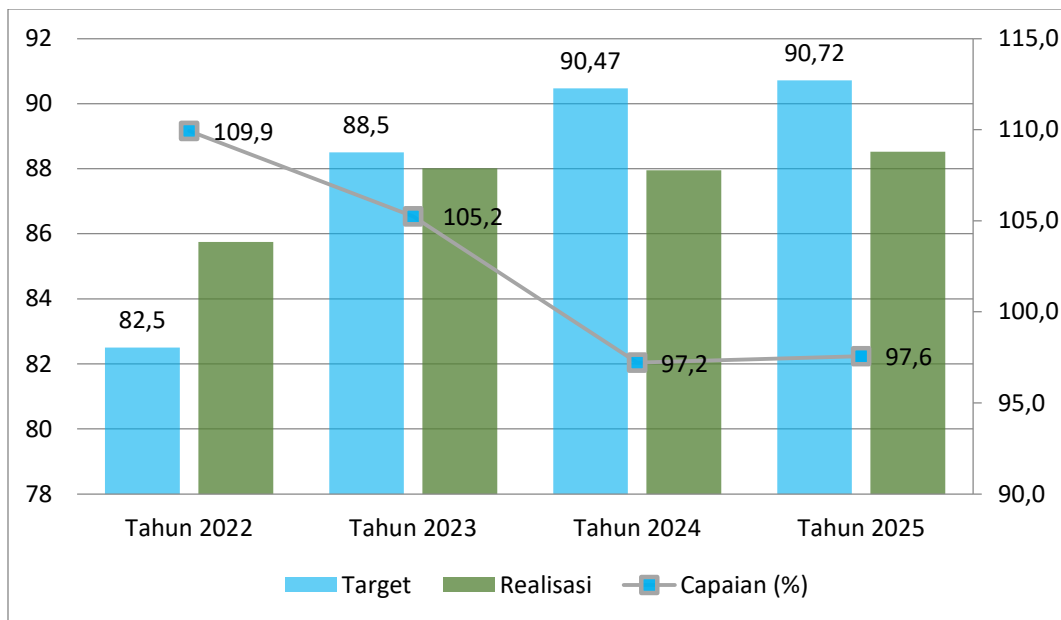
PENILAIAN		BOBOT	ASPEK PEMENUHAN	ASPEK REFORM	NILAI TOTAL
A	PENGUNGKIT	60,00			50,69
	1. Manajemen Perubahan	8,00	3,00	3,13	6,13
	2. Penataan Tatalaksana	7,00	2,35	2,59	4,94
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	4,45	4,25	8,70
	4. Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,27	3,91	8,18
	5. Penguatan Pengawasan	15,00	6,88	7,50	14,38
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,61	3,76	8,37
B	HASIL	40,00			37,83
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			20,90
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			17,15

PENILAIAN			BOBOT	ASPEK PEMENUHAN	ASPEK REFORM	NILAI TOTAL
		b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			16,93
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			16,93
TOTAL NILAI PMPZI			100,00	91,76		88,52

Realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu tahun 2025 sebesar 88.52% dengan capaian sebesar 97.57% dengan katagori “ **baik**”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 Balai POM di Bengkulu belum mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,72	88,52	97,57	Baik

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.39. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai pembangunan ZI tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Zona Integritas (ZI) tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa target ZI mengalami peningkatan konsisten setiap tahun sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap penguatan reformasi birokrasi. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi masih mampu melampaui target dengan capaian masing-masing 109,9% dan 105,2%, yang menandakan pelaksanaan program ZI berjalan efektif dan perencanaan target relatif realistis. Namun, pada tahun 2024 dan 2025, meskipun realisasi cenderung stabil dan sedikit meningkat, kenaikan target yang lebih agresif menyebabkan capaian turun di bawah 100% (97,2% dan 97,6%). Penurunan ini lebih mencerminkan adanya kesenjangan antara peningkatan ekspektasi dan kapasitas implementasi, bukan semata penurunan kinerja.

Ke depan, diperlukan penyesuaian yang lebih kuat antara penetapan target dan kesiapan organisasi, dengan fokus pada penguatan kualitas dan konsistensi eviden ZI, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi peran agen perubahan dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, strategi peningkatan kinerja perlu diarahkan pada aspek-aspek penilaian yang bernilai tinggi namun selama ini belum optimal, sehingga kenaikan target di tahun berikutnya dapat diimbangi dengan peningkatan realisasi secara signifikan dan capaian Indeks ZI kembali berada di atas 100%.

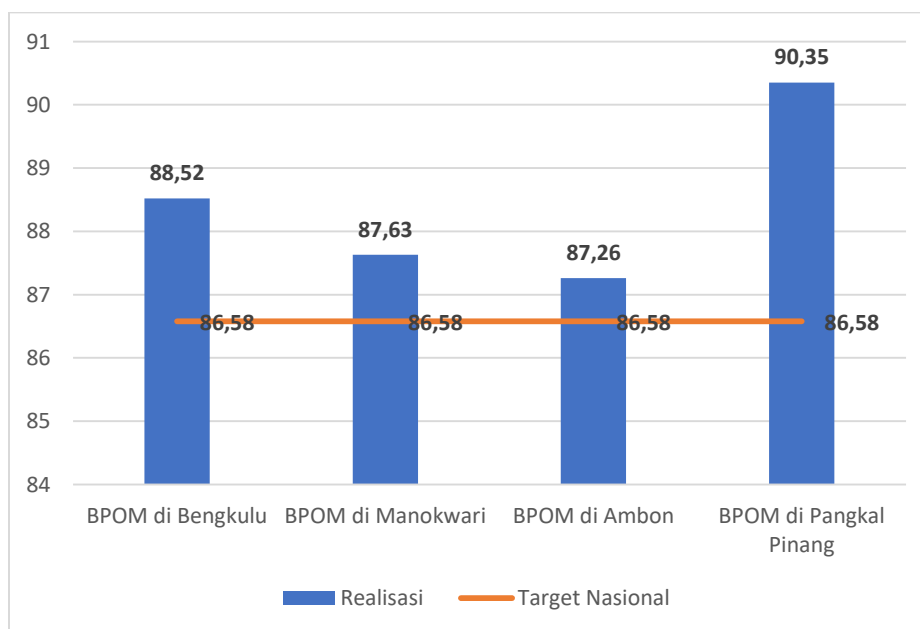
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu	91,72	88,52	96,51	Akan Tercapai

Berdasarkan sasaran kegiatan *terwujudnya tata kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal* yang salah satunya diukur melalui indikator **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT BPOM** menunjukkan realisasi tahun 2025 sebesar **88,52** dari target tahun 2029 sebesar **91,72**, dengan persentase capaian **96,51%**, yang menandakan kinerja pembangunan ZI telah berjalan baik dan berada pada jalur pencapaian target.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian yang mendekati 100% ini mencerminkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi serta konsistensi upaya perbaikan tata kelola, sehingga dengan penguatan kualitas eviden, peningkatan konsistensi pelaksanaan, dan optimalisasi area penilaian yang masih memiliki kesenjangan, target nilai ZI tahun 2027 dinilai **akan tercapai** sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.40. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional

Jika dibandingkan dengan Balai lain pada kluster II, nilai indeks pembangunan ZI yang tertinggi adalah BPOM di Pangkal Pinang dengan 90.35%, disusul BPOM di Bengkulu 88.52 kemudian BPOM Manokwari 87.63 dan BPOM di Ambon 87.26. Jika dibandingkan dengan target nasional dari Balai pada kluster II tersebut sudah semuanya melebihi target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Bengkulu tahun 2025 sebesar 88.52 dengan capaian sebesar 97.57 dengan kategori “baik” jika dibandingkan dengan target tahun 2025 Balai POM di Bengkulu. Namun demikian, realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya target tahun 2025 dapat disebabkan oleh meningkatnya target penilaian ZI yang lebih agresif sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, sementara kapasitas implementasi dan kualitas eviden pada beberapa area perubahan belum meningkat secara sepadan. Selain itu, masih terdapat risiko ketidaksamaan pemahaman standar eviden ZI lintas POKJA serta variasi kualitas dokumentasi yang berdampak pada penilaian substansi dan keberlanjutan perbaikan.

Pengendalian risiko telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi bulanan, asistensi teknis oleh POKJA Manajemen Perubahan, serta tindak lanjut hasil evaluasi internal, sehingga risiko residu dapat ditekan dan capaian tetap berada pada kategori “baik”. Namun demikian, efektivitas pengendalian tersebut lebih berfungsi menahan penurunan kinerja, dan belum sepenuhnya mampu mendorong realisasi melampaui target, sehingga secara manajemen risiko kegagalan ini dikategorikan sebagai risiko dengan dampak terkendali namun masih memerlukan penguatan pengendalian preventif dan peningkatan kualitas mitigasi pada periode berikutnya.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Dari sisi program Pengawasan Obat dan Makanan rincian output yang mendukung indikator ini adalah 3165.BMB.001. Belum tercapainya target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 dapat dijelaskan dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: Beberapa kegiatan yang dilakukan pada area ZI belum tergolong efektif dalam merespons peningkatan target penilaian dan mendukung pencapaian ZI, diantaranya

- Program asistensi dan pendampingan POKJA telah dilaksanakan sesuai perencanaan oleh Manajemen Perubahan, namun masih cenderung berfokus pada pemenuhan administrasi dan kelengkapan eviden dasar, sehingga

- belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas substansi pada area penilaian yang bernilai tinggi.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan belum seluruhnya diikuti dengan percepatan dan konsistensi tindak lanjut lintas area perubahan. Kondisi ini diperkuat oleh masih terbatasnya kesadaran bersama bahwa pembangunan ZI telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja, sehingga tingkat kesadaran prioritas pelaksanaan program ZI belum merata di seluruh lini.
 - Kegiatan penguatan kapasitas SDM terkait ZI juga belum menjangkau seluruh personel kunci secara proporsional, yang berdampak pada perbedaan pemahaman standar penilaian dan implementasi ZI.
 - Belum adanya data dukung yang menunjukkan seluruh SOP telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan.
 - Implementasi keterbukaan informasi publik belum disusun dan belum dievaluasi secara periodik
 - Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai belum seluruhnya mempertimbangkan kesenjangan pada kompetensi masing-masing jabatan
 - Inovasi dinilai masih lemah karena belum dapat menunjukkan monitoring, evaluasi dan implementasi inovasi hingga analisis dampaknya. Inovasi juga belum dapat menunjukkan dampak yang dapat dinilai dan terukur, hanya sebatas before-after.
 - Analisis atas nihilnya WBS belum dibuat secara memadai.
 - Belum terdapat bukti implementasi dan monitoring kesesuaian antara pemberian layanan dengan standar layanan.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dalam menjaga stabilitas capaian kinerja, tetapi belum cukup optimal untuk mendorong percepatan peningkatan nilai ZI sesuai target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya target nilai pembangunan ZI bukan berarti pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Balai POM di Bengkulu tidak berjalan sesuai pedoman yang termuat pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada unit kerja di Lingkungan Badan POM. Realisasi nilai Pembangunan ZI tahun 2025 sebesar 88,52 mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2024 sebesar 87,95. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Balai POM di Bengkulu tetap terlaksana diantaranya melalui kegiatan yang cukup memberikan dampak pada tahun 2025 ini seperti:

- Pembentukan Kelompok Zona Integritas (ZI) tahun 2025 telah dilakukan melalui proses penjaringan yang lebih selektif dan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.
- Adanya launching dan implementasi inovasi aplikasi baru diantaranya:
 - a. SIARAN (Sistem Administrasi Risiko Sampling dan Penandaan) yang memudahkan tim sampling melakukan pengambilan sampel sediaan

farmasi obat sesuai level risiko serta dilengkapi pengadministrasian yang tersistem.

- b. SIBAKTI (Sistem Informasi Barang Bukti) yang memudahkan petugas pengelola barang bukti melakukan pencatatan masuk, penyimpanan dan keluar barang bukti
- Implementasi keberlanjutan aplikasi inovasi SINTAGELIS dan SIPENA, SIMBA, LAPOR PASTI, SIMPAN KANTOR.
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui training need analysis
- Pemanfaatan inovasi Fortuna (Forum Pertukaran Informasi Pegawai) sebagai wadah sosialisasi berbagai hal terkait Zona Integritas dan *Core value* Berakhlak
- Perencanaan dan pengukuran akuntabilitas kinerja sesuai dengan Renstra terbaru periode 2025-2029
- Keberlangsungan implementasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing system melalui Laporpasti dan penanganan benturan kepentingan
- Penerapan budaya pelayanan prima oleh petugas dalam pelayanan publik serta inovasi ruang virtual BPOM dimana konsumen/pelaku usaha dapat berkonsultasi secara online tanpa harus datang ke kantor BPOM di Bengkulu
- Pemenuhan penilaian pengungkit pembangunan Zona Integritas melalui:
 - a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, meliputi aplikasi pengukuran kinerja, tata kelola SDM dan pengembangan kompetensi
 - b. Pernurunan pelanggaran disiplin pegawai tahun 2025 dibanding Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
 - c. Adanya kerangka logis kinerja yang diturunkan dalam bentuk matriks Peran dan Hasil dan cascading indikator kinerja utama hingga indikator kinerja individu atau SKP
 - d. Implementasi mekanisme pengendalian aktivitas berjenjang melalui penerapan ISO 17025, Manajemen mutu terintegrasi, manajemen risiko dan Pengendalian intern Laporan Keuangan (PIPK)
 - e. Pelaporan LHKPN pegawai 100%
- Selain itu, pembangunan Zona Integritas Balai POM di Bengkulu juga terwujud dengan adanya peningkatan capaian perolehan Nilai Berakhlak dari tidak sehat menjadi sehat.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Bengkulu	23.022.000,00	23.016.176,00	99,9	97,57	-0,02	Tidak efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar -0,02 dengan kriteria tidak efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 belum sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Bengkulu.

Penggunaan anggaran indikator kinerja ini berasal dari Klasifikasi Rincian Output KRO 3165.BMB.001. Pemanfaatan anggaran pada KRO tersebut terlaksana melalui adanya kegiatan yang mendukung pertemuan, bimtek dan sosialisasi zona integritas meliputi pengadaan perlengkapan, penyebaran informasi dan optimalisasi peningkatan pelayanan public melalui pengadaan sarana dan prasarana. Namun, masih terdapat dukungan anggaran lain yang menumpang anggaran teknis fungsi pokok pengawasan obat dan makanan pada kelompok substansi teknis.

Penyebab tidak efisiennya penggunaan anggaran pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu disebabkan oleh **belum adanya pemastian akuntabilitas dukungan anggaran** yang tepat terkait pembangunan ZI. Penggunaan anggaran kinerja ini juga memanfaatkan dari anggaran kegiatan substansi teknis. Hal ini terjadi disebabkan pembangunan zona integritas masih sebatas tugas tambahan yang implementasinya melebur dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk memperoleh realisasi tahun 2026 yang mencapai target yang ditetapkan, diperlukan berbagai rekomendasi perbaikan diantaranya:

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
01. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu	Monev RK belum berjalan optimal	Meningkatkan frekuensi monev dari per triwulan menjadi per bulan	menjadwalkan rapat monev bersamaan dengan rapat monev kinerja setiap bulan	Maret 2026	Y	S-24	Monev tidak berjalan efektif sehingga berpengaruh terhadap nilai akhir indeks ZI
	terjadi tumpang tindih pekerjaan pegawai antara tugas ZI dengan tugas tim	Melakukan pemetaan kompetensi berbasis ZI	melakukan penyusunan tim ZI sesuai dengan nota dinas edaran Nomor KP.09.01.2.01.26.24	Februari 2026	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	kerja.						
	Belum adanya pemastian akuntabilitas dukungan anggaran yang tepat terkait pembangunan ZI. Penggunaan anggaran kinerja ini juga memanfaatkan dari anggaran kegiatan substansi teknis	Pemastian akuntabilitas anggaran terkait pembangunan ZI, baik yang terpusat maupun terkelola di substansi	Identifikasi anggaran pembangunan ZI unit kerja melibatkan kontribusi seluruh substansi	Juni 2026	T		
	Inovasi dinilai masih lemah karena belum dapat menunjukkan monitoring, evaluasi dan implementasi inovasi hingga analisis dampaknya. Inovasi juga belum dapat menunjukkan dampak yang dapat dinilai dan terukur, hanya sebatas before-after.	Penyusunan laporan inovasi dengan mengedepankan aspek monitoring, evaluasi, peningkatan berkelanjutan dan dampaknya secara terukur	Penyusunan laporan inovasi (yang diunggulkan) dengan mengedepankan aspek monitoring, evaluasi, peningkatan berkelanjutan dan dampaknya secara terukur	Juni 2026	T		
	Implementasi keterbukaan informasi publik belum	Monitoring implementasi keterbukaan informasi	Monitoring implementasi keterbukaan informasi public	September 2026	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	disusun dan belum dievaluasi secara periodik	public secara berkala Pelibatan auditor internal dalam mengevaluasi Laporan KIP	secara berkala Pelibatan auditor internal dalam mengevaluasi Laporan KIP				

IKSS 8.2 - NILAI AKIP BALAI POM DI BENGKULU

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penguatan akuntabilitas unit kerja untuk menerapkan strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta diturunkan ke dalam Peraturan Kepala Badan POM RI no 83 tahun 2025 bahwa evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM, dengan komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja bobot 24%
2. Pengukuran kinerja bobot 24%
3. Pelaporan kinerja bobot 12%

4. Evaluasi internal bobot 20%
5. Capaian kinerja bobot 20%

Tabel 3.8 Rentang Nilai Pada Penilaian AKIP BPOM

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan.
3	BB	>70-80	Sangat Baik.
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (memadai).
6	C	>30-50	Kurang.
7	D	0-30	Sangat Kurang.

Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu pada tahun 2025 sebesar 78.33, dimana dari rentang tersebut termasuk pada kriteria **“sangat baik”**. Adapun nilai masing – masing komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Nilai AKIP BPOM Bengkulu tahun 2025

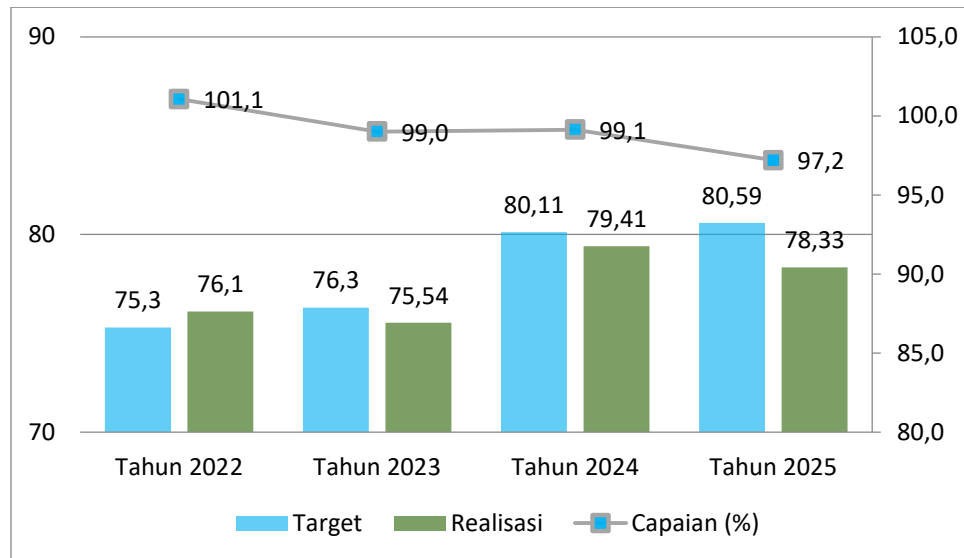
No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1	Perencanaan Kinerja	24	19.44	20.16	0.72
2	Pengukuran Kinerja	24	18	18.48	0.48
3	Pelaporan Kinerja	12	9.12	9.12	0
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15.2	15.2	0
5	Capaian Kinerja	20	17.65	15.37	-2.28
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79.41	78.33	-1.08
	Predikat		BB	BB	Tetap

Perbandingan realisasi dengan target 2025 pada nilai AKIP adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu	80,59	78,33	97,20	Baik

Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu sebesar 78,33 tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 (80,59) sehingga diperoleh capaian 97,20% (baik).

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.41. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi nilai AKIP mengalami tren peningkatan sejak tahun 2022 hingga 2024 kemudian menurun pada tahun 2025. Peningkatan realisasi signifikan dialami pada tahun 2023 dari nilai 75,54 menjadi 79,41 pada tahun 2024 tetapi menurun pada tahun 2025 dengan nilai 78,33.

Jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi paling rendah yaitu pada tahun 2023 (75.54%) hal ini disebabkan rendahnya rendahnya capaian pada komponen evaluasi internal (hanya tercapai 67%). Rendahnya komponen ini disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Laporan Evaluasi Internal belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.
2. Laporan evaluasi internal sudah disusun secara periodik namun belum dimanfaatkan secara parsial dalam proses perbaikan sistem evaluasi kinerja karena adanya kondisi sebagai berikut :
 - a. Belum menyajikan permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja dan analisa keberhasilan/kegagalan secara spesifik dan memadai

- b. Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim belum menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;
- c. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan tidak dilakukan monitoring pada periode selanjutnya

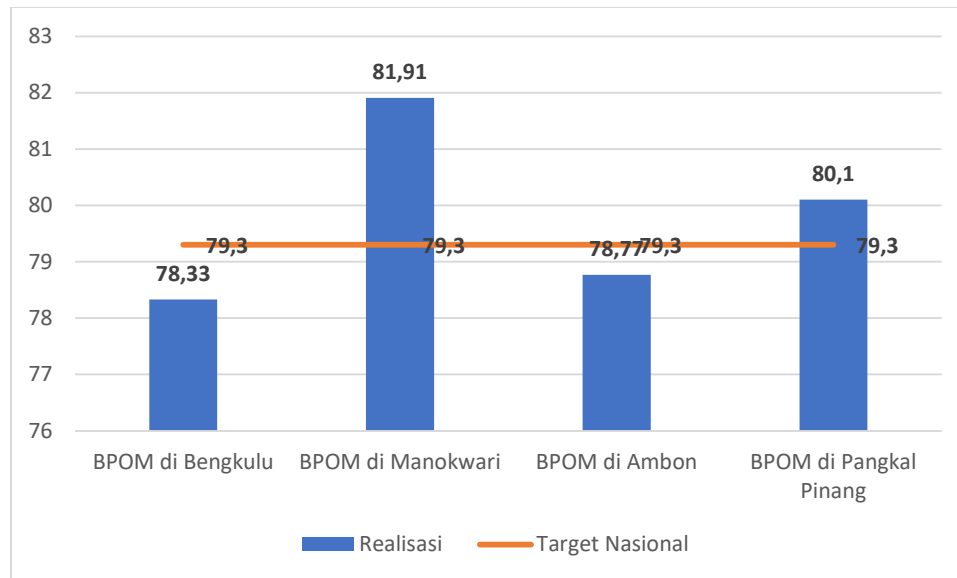
Beberapa rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti sehingga pada tahun 2024, nilai AKIP Balai POM di Bengkulu meningkat dari 75.54% menjadi 79.41% atau sebesar 3,87%. Pada tahun 2025, nilai AKIP mengalami penurunan sebesar (-1.08%) hal ini disebabkan menurunnya komponen pada capaian kinerja sebesar (-2.28%), Akan tetapi, terdapat peningkatan pada komponen lain yaitu perencanaan kinerja (+0.72%) dan Pengukuran kinerja (+0.48%) sedangkan komponen Pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berubah.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu	82,0	78,33	95,52	 Akan tercapai

Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam target 2029 Renstra 2025-2029 sebesar 82,0, akan memberikan proyeksi hasil capaian 95,52% (akan tercapai). Dengan demikian, proyeksi target jangka menengah sudah cukup sesuai, menunjukkan arah ke depan yang telah sesuai dengan peningkatan target tetapi perlu upaya perbaikan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.42. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional

Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu tahun 2025 sebesar 78,33 merupakan yang terendah dibanding dengan Balai POM lain sejenis, diantaranya Balai POM di Manokwari dengan nilai tertinggi (81,91), diikuti Balai POM di Pangkalpinang (80,1) dan Balai POM di Ambon (78,77).

Namun, hal ini lebih disebabkan oleh tidak maksimalnya komponen capaian kinerja yang ditentukan oleh pencapaian realisasi terhadap target dari IKU yang termuat dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025, rata-rata realisasi IKU dan ketercapaiannya terhadap target mengalami penurunan yang berdampak pada nilai AKIP secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan target nasional BPOM di Bengkulu dan BPOM di Ambon masih dibawah target nasional, sedangkan BPOM di Manokwari dan Pangkal Pinang sudah melebihi target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai AKIP pada tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024 dan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi dari 5 komponen penilaian terdapat 1 komponen mengalami penurunan yaitu pencapaian kinerja dimana capaian kinerja tahun pada laporan kinerja 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2025 atau semula 17.65 menjadi 15.37. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pada pengukuran output, 17 dari 20 rincian output (RO) yang diukur tahun 2024 tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya (2023). Hal ini tidak sanggup mendorong nilai capaian kinerja sekalipun dari 20 RO tersebut seluruhnya telah mencapai target kinerja dan anggaran.
- b. Pada pengukuran Outcome, 23 dari 31 IKU tahun 2024 yang dapat diperbandingkan tidak lebih baik dibandingkan ketercapaian tahun sebelumnya (2023). Hal ini tidak mampu mendorong perbaikan komponen capaian kinerja sekalipun realisasi 25 dari 34 IKU telah memenuhi target yang ditetapkan
- Kurangnya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja dalam laporan kinerja interim dimana analisis belum mempertimbangkan aspek yang berkontribusi meliputi 6M (Man, Money, Material, Method, Machine, Measurement), pengendalian risiko, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebelumnya serta analisis SWOT. Hal ini turut menjadi penyebab nilai pelaporan kinerja tidak mengalami peningkatan.
- Kurangnya berjalannya pelaksanaan evaluasi internal dimana masih ditemukan hasil pengukuran yang berbeda antara RAPK dan aplikasi Simetris serta Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan evaluasi internal dilakukan secara terpisah dengan memperhatikan data tunggal RAPK, sehingga jika terdapat perbaikan data pada SIMETRIS menjadi celah perbedaan realisasi.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah dilakukan tertib tiap bulan, tetapi pengisian analisis keberhasilan/kegagalan serta tindak lanjut perbaikan belum sepenuhnya dilaporkan oleh substansi pemegang indikator kinerja.
- Belum adanya monitoring dan evaluasi yang memadai atas pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, baik rekomendasi yang terbit dari monev bulanan, Laporan kinerja interim dan Laporan kinerja tahunan. Hal ini terwujud dari Laporan kinerja interim 2025 dan Laporan Kinerja 2024 yang disusun belum memuat rekomendasi periode sebelumnya dan progress tindak lanjutnya.
- Pemanfaatan informasi kinerja dan pengendalian risiko pada setiap indikator kinerja belum cukup tergambar pada laporan kinerja interim 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Penggunaan anggaran telah termuat pada Laporan Kinerja berupa tingkat efisiensi (TE), tetapi belum tergambar pemanfaatan anggaran apa saja yang berdampak pada capaian TE serta bagaimana pengelolaan dan optimalisasi dari anggaran tersebut pada tahun berjalan melalui revisi anggaran.

Namun, terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan dan turut berkontribusi pada peningkatan 2 dari 5 komponen penilaian AKIP diantaranya :

- Komponen Perencanaan : penyusunan renstra Balai POM di Bengkulu 2025-2029 tepat waktu dan Perjanjian Kinerja Revisi Kepala Balai POM di Bengkulu tahun 2025.
- Komponen Pengukuran : Pelaksanaan pengukuran melalui monitoring dan evaluasi dan berjalan tertib tiap bulan serta pelaporan pengukuran tidak melebihi timeline

- Adanya peningkatan kompetensi implementasi SAKIP bagi seluruh pegawai Balai POM di Bengkulu melalui pelatihan SAKIP di IDEAS yang berlangsung pada bulan April-Mei 2025.
- Telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko ketidaksesuaian penyusunan PK dan RAPK tahun 2025 melalui kegiatan pengendalian :
 1. Melakukan pendampingan pada penyusunan RAPK mempertimbangkan Anggaran dan kinerja.
 2. Melakukan Monev terhadap Realisasi pelaksanaan RAPK tidak hanya terkait kinerja tetapi juga anggaran yang mendukung indikator kinerja tersebut.

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tahun 2024

Walaupun implementasi nilai AKIP belum tercapai target, pada tahun 2025 ini telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan kinerja tahun 2024 yang turut berkontribusi pada keberhasilan capaian kinerja diantaranya:

- Telah diuraikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap sasaran
- Telah termuat pada laporan kinerja 2025 penjelasan adanya indikator baru pada Bab II
- Laporan Kinerja tahun 2025 telah menyajikan:
 - a. tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya serta rekomendasi yang muncul atas hasil monev triwulan
 - b. Adanya pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan mendukung pencapaian kinerja selanjutnya, diantaranya koreksi baseline dan usulan perubahan target, penyebaran informasi kinerja melalui sosial media serta kepada pemangku kepentingan.
 - c. Pemanfaatan anggaran dan pengelolannya (revisi anggaran) sehingga berkontribusi pada tingkat efisiensi.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai AKIP di dukung oleh program Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (BKB) serta Program Sarana Pengawasan Obat dan Makanan (CAB). Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang berlangsung sebagai bentuk pemenuhan langsung dan tidak langsung pada nilai AKIP Balai POM di Bengkulu, diantaranya:

- Pelaksanaan Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip), yang dilaksanakan di Kantor Pusat Badan POM RI pada tanggal 22-23 Januari 2025. Kegiatan berupa sharing session tentang pengawasan kearsipan, ketrampilan berbahasa, menjaga kesehatan mental dalam dinamika pekerjaan.
- Kegiatan yang bersifat suportif yaitu :
 - a. Pembinaan Spiritual jasmani dan rohani berupa pelaksanaan senam seluruh pegawai yang telah dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan

- b. Pelaksanaan bimbingan rohani dalam rangka pembinaan spiritual ASN sebanyak 5 kegiatan,
- c. Sosialisasi mental health awareness dengan tema bebas cemas dari stress dan burnout di dunia kerja.
- Hal ini turut bertujuan untuk meningkatkan motivasi ASN dalam mencapai kinerja SKP yang berkontribusi pada realisasi kinerja organisasi
- Koordinasi manajerial berupa konsultasi hukum ke Kejaksaan Tinggi pada tanggal 21 Januari 2025 terkait dengan pendampingan perencanaan pembangunan fisik pagar kantor BPOM di Bengkulu, dimana kegiatan ini tidak jadi dilanjutkan berkenaan adanya pemblokiran pada anggaran belanja modal tersebut.
- Penyambutan kunjungan kerja Ombudsman RI tanggal 30 Januari 2025 merupakan inisiatif untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan pemahaman bersama mengenai pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik.
- Berbagai kegiatan Implementasi Reformasi birokrasi dalam rangka menuju WBK dan WBBM, khususnya pada area akuntabilitas kinerja.

Selain program diatas beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan dalam mencapai nilai AKIP adalah :

1. Pelaksanaan pembuatan dokumen perencanaan berupa PK dan RAPK di awal tahun melalui aplikasi simetris e planning serta melakukan pemantauan atas ketercapaian target kinerja dan melakukan monitoring atas kendala dan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan.
2. Membuat dokumen POA (*Plan of Action*) sebagai acuan dasar dalam pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) pertriwulan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan melakukan monitoring , evaluasi atas pelaksanaan POA tersebut sehingga membantu mengelola kas negara secara akurat serta memastikan dana cair sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan Pengukuran Kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan, dan terhadap target jangka menengah dalam dokumen renstra. Balai POM di Bengkulu menggunakan link internal melalui link Monev RHPK BPOM Bengkulu, yang mana link tersebut setiap bulan diisi oleh Ketua TIM Kerja selanjutnya sebagai bahan bagi penanggung jawab data (PJ Data) untuk penginputan di link pusat (Capaian UPT 2025) dan simetris e –performance.
4. Pelaporan atas capaian kinerja secara rutin dan tepat waktu dengan agar dapat menginformasikan kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang harus dicapai, serta sebagai upaya berkesinambungan bagi Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan yang dilakukan meliputi penginputan pada capaian RHPK pada Capaian UPT 2025 dan melalui simetris e-performance.

5. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap capaian target, kendala dan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh pimpinan unit.
- 6.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu	91.448.000,0	91.402.896,0	99,95	97,2	-0,03	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar -0,03 dengan kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 belum sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah:

- Pelaksanaan kearsipan digital dalam rangka BPOM Jelajah Media di BPOM yang diselenggarakan pada bulan Januari 2025.
- Meningkatkan Penerapan Implementasi Revolusi Mental Pegawai, dengan melaksanakan senam kesegaran jasmani bersama, Pembinaan Spiritual Pegawai, dan penerapan care value berakhlak dalam rangka membangun reformasi birokrasi di lingkungan BPOM Bengkulu.
- Koordinasi manajerial dalam rangka pendampingan hukum dengan Kejaksaan Tinggi dalam rangka perencanaan pembangunan pagar di lingkungan BPOM Bengkulu.
- Pelaksanaan audit BPKP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pada bulan Juli 2025
- Koordinasi lintas sektor bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Provinsi Bengkulu terutama dalam mendukung program nasional seperti percepatan penurunan *stunting* atau Program Makan Bergizi Gratis.
- Koordinasi dengan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu dalam rangka pengawasan dan peningkatan kualitas **pelayanan publik**. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman memastikan bahwa Balai POM menjalankan fungsinya tanpa ada maladministrasi yang meliputi Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Kepatuhan UU 25/2009), Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pencegahan Maladministrasi dan Pungli, Pendampingan Inovasi Layanan dan Pengawasan Terpadu (Fungsi Penindakan).

- Pelaksanaan Sosialisasi Cemas dari Stres dan Burnout di Dunia Kerja dalam rangka antipasi secara dini dalam mengelola stress bagi pekerja dikantor, **meningkatkan Fokus pada** saat ada *deadline* (tenggat waktu), stres memicu adrenalin yang membuat otak lebih waspada dan cepat memproses informasi, mengaktifkan respon *fight-or-flight*, memberikan energi fisik untuk menyelesaikan tugas berat dalam waktu singkat.

Selain itu, proses **revisi anggaran** juga telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung nilai AKIP, pada RO ini sebagian besar mengalami blokir anggaran sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring, diantaranya yaitu:

- Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Laporan Keuangan dan Laporan DAK NF POM UPT
- Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)
- Bimtek ISO 45001:2018 Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Bimtek Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan lainnya.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Walaupun berkategori “Baik”, realisasi indikator kinerja tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian di bawah 100%. Selain itu, realisasi nilai AKIP tahun 2025 mengalami penurunan dari 79,41 menjadi 78,33. Hal ini menunjukkan masih perlu upaya untuk meningkatkan realisasi pada tahun mendatang seiring dengan peningkatan target setiap tahun, diantaranya:

Tabel 3.10. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Terdapat beberapa indikator kinerja tahun 2025 yang realisasinya jauh melampaui target (Tidak dapat disimpulkan) dan hampir atau telah melampaui target jangka menengah 2027	Melakukan revisi Perjanjian kinerja mencakup beberapa target indikator kinerja yang mengalami perubahan baseline ditunjukkan dengan realisasinya cukup jauh melampaui target tahun 2025 dan jangka menengah 2027	Revisi perjanjian Kinerja Kepala Balai POM Tahun 2026	Triwulan 1 - 2026	T	-	-

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	Terdapat beberapa indikator kinerja tahun 2025 yang realisasinya jauh melampaui target (Tidak dapat disimpulkan) dan hampir atau telah melampaui target jangka menengah 2027	Melakukan penyesuaian target revisi pada renstra 2025-2029	Penyusunan penyesuaian target revisi pada renstra 2025-2029	Triwulan 1 - 2026	T	-	-
	Berdasarkan evaluasi / LHE AKIP tahun 2024 dan 2025, terdapat ketidaksesuaian data di antara media pengukuran kinerja seperti RAPK, Simetris, Lapkin Interim dan evaluasi internal yang berdampak pada nilai AKIP masih BB dan berdampak pada NKO UPT tidak mencapai istimewa tahun 2025	Melakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan mengedepankan mekanisme audit atau verifikasi silang untuk menjamin keselarasan data pada PK, RAPK, Laporan kinerja serta aplikasi kinerja simetris.	Pelaksanaan audit pengukuran kinerja pada Lapkin interim, evaluasi internal dan input data pada RAPK dan simetris	Triwulan 2 - 2026	Y	O-09	Nilai pencapaian akhir kinerja Balai POM di Bengkulu tidak maksimal dalam berkontribusi pada penilaian Nilaian Kinerja Organisasi
	Penyusunan analisis keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian IKU belum mempertimbangkan faktor-faktor dari berbagai sisi seperti kompetensi petugas, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta mempertimbangkan analisis SWOT	Menguatkan analisis keberhasilan/kegagalan pada pengukuran dan pelaporan kinerja dengan mempertimbangkan teori analisis SWOT, 6M, dan pengendalian risiko guna ketepatan menentukan rekomendasi perbaikan berkala	Penyusunan analisis keberhasilan dan kegagalan pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dan dilanjutkan Lapkin interim Tahun 2026	Triwulan 1 - 2026	T	-	-
	Terdapat beberapa poin permasalahan yang teridentifikasi oleh inspektorat perihal implementasi SAKIP BPOM Bengkulu tahun 2025 dan rekomendasi yang perlu diperbaiki	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari APIP atas penilaian SAKIP Tahun 2025	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi inspektorat terkait penilaian AKIP	Triwulan 1 - 2026	Y	S-25	Tidak berjalannya rekomendasi penilaian SAKIP 2025 yang ditindak lanjuti secara periodik oleh BPOM Bengkulu

IKSS 8.3 – NILAI KINERJA ANGGARAN

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari suprasistem dalam hal ini Kementerian Keuangan sehingga dilakukan penyesuaian atas target RAPK yang semula pengukurannya dilakukan setiap bulan menjadi pengukuran diakhir tahun.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran :

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%).

Nilai Kinerja Anggaran = (85,02 x 50%) + 98,15 x 50%)
= 91,59

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu pada akhir tahun 2025 sebesar 91,59 dengan Konversi Nilai 5 Kategori Sangat Baik

Perbandingan realisasi dengan target 2025 pada Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu	5	5	100	Sangat Baik

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran dalam PMK 62/2023

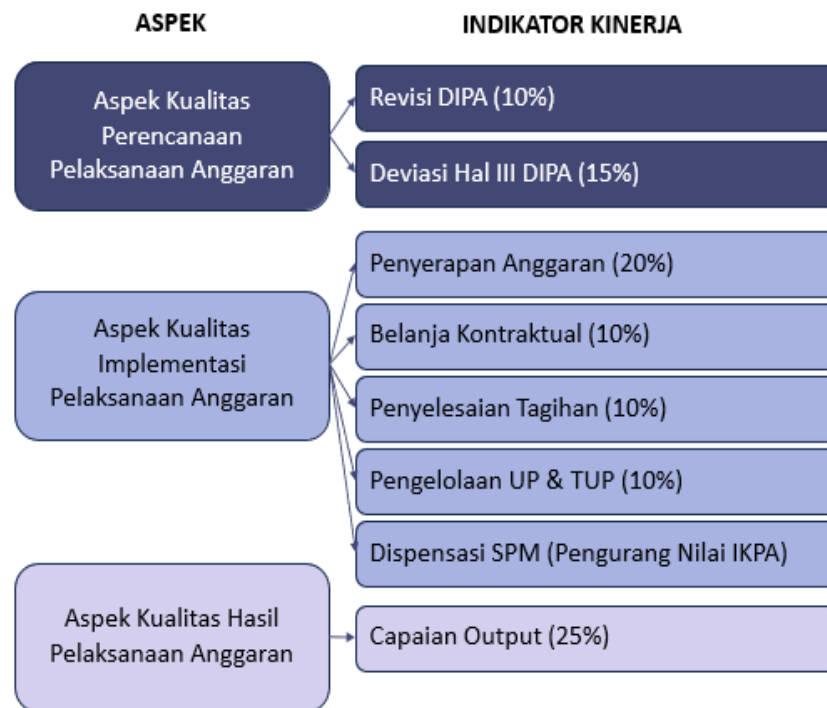
Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Perhitungan Nilai IKPA Tahun 2025

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.



Berikut perolehan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai POM di Bengkulu pada tahun 2025.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	016	063	432991	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	91.48	97.53	100.00	100.00	99.20	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.72	19.51	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	95.74		99.18				100.00				

Berdasarkan laporan akhir Desember 2025, Balai POM di Bengkulu berhasil meraih **Nilai Akhir IKPA sebesar 98,15**, yang menempatkan satuan kerja ini dalam **Kategori Sangat Baik**.

Pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi tiga aspek utama penilaian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (Nilai Aspek: 95,74)

Aspek ini mencerminkan ketepatan satker dalam memetakan rencana kerja sejak awal tahun.

- **Revisi DIPA:** Meraih nilai sempurna (**100,00**), menunjukkan bahwa Balai POM di Bengkulu disiplin dan minim melakukan perubahan rencana anggaran yang tidak terencana.
- **Deviasi Halaman III DIPA:** Tercatat sebesar **91,48**. Poin ini menjadi satu-satunya area yang memiliki ruang kecil untuk optimasi agar realisasi bulanan dapat lebih selaras dengan rencana penarikan dana (RPD).

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Nilai Aspek: 99,18)

Efektivitas operasional Balai POM di Bengkulu terlihat sangat menonjol pada aspek ini:

- **Indikator Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan** berhasil meraih nilai **100,00**, hal ini menandakan proses pengadaan barang/jasa dan pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan sangat cepat dan tepat waktu.
- **Indikator Pengelolaan UP/TUP** : nilai sebesar 99,20 Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam pengajuan revolving UP/TUP pada bulan Februari dan Desember 2025.
- **Penyerapan Anggaran:** Mencapai nilai **97,53**, yang menunjukkan serapan dana proporsional terhadap pagu yang tersedia.

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Nilai Aspek: 100,00)

Pada aspek keberhasilan output, Balai POM di Bengkulu meraih nilai **Sempurna (100,00)** untuk **Capaian Output**. Hal ini membuktikan bahwa

setiap rupiah yang dibelanjakan telah berhasil dikonversi menjadi kinerja nyata sesuai dengan target program kerja yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Nilai EKA diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), di mana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran

Indikator dan Bobot Aspek Implementasi pada Penilaian EKA

Indikator	Bobot (%)
Efektivitas Capaian RO (RVRO/TVRO)	75
Efisiensi - Penggunaan SBK (10) - Efisiensi SBK (15)	25

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Bengkulu pada tahun 2025 sebesar 85,02.

Aspek Efektivitas: Capaian Rincian Output (RO)

Aspek efektivitas merupakan kontributor terbesar dalam penilaian dengan bobot 75%:

- **Capaian RO:** Satker berhasil mencapai nilai sempurna **100** pada indikator Capaian RO (RVRO/TVRO).
- Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target keluaran dari **23 Rincian Output (RO)** yang dikelola telah berhasil direalisasikan secara penuh sesuai dengan target yang ditetapkan.

Aspek Efisiensi: Penggunaan dan Efisiensi SBK

Aspek efisiensi, yang memiliki bobot total **25%**, memberikan gambaran mengenai ketepatan penggunaan standar biaya:

- **Penggunaan SBK:** Meraih nilai **100**, yang menandakan kepatuhan penuh dalam penggunaan standar biaya.
- **Efisiensi SBK:** Tercatat nilai efisiensi sebesar **0,15**.

No	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	85,02	100	100	0,15

Dari total 23 RO, terdapat pemanfaatan standar biaya yang spesifik, yaitu:

- o **1 RO** menggunakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan.
- o **1 RO** menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) yaitu kegiatan Layanan Penatausahaan BMN.

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	BK Badan Pengawas Obat dan Makanan	432991 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	06 Program Pengawasan Obat dan Makanan	1003.003.060 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOK BENGKULU (Perkara)	SBKK		114.540.000	229.005.415	2,00	2,00	114.502.707	37.293	0,03	0,03	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Mulai tahun anggaran **2025**, terdapat kebijakan baru mengenai penyesuaian formulasi perhitungan **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan bobot yang seimbang antara aspek efisiensi belanja dengan kualitas pelaksanaan anggaran.

Perubahan Formulasi Bobot NKA

Perbandingan komposisi perhitungan nilai kinerja adalah sebagai berikut:

- **Semula (Tahun Sebelumnya):** Nilai akhir dibentuk dari kombinasi $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$
- **Menjadi (Tahun 2025):** Nilai akhir kini menggunakan proporsi seimbang, yaitu : $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$

Perubahan skala nilai Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Terdapat pembaruan dalam mekanisme penyajian nilai Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan interpretasi yang lebih jelas terhadap capaian kinerja melalui standarisasi kategori.

- Semula : Nilai NKA disajikan dalam bentuk angka mentah dengan rentang skala 1 s.d. 100
- Menjadi : Nilai NKA kini disajikan melalui Hasil Konversi (Skala 1-5) dan penetapan Kategori Predikat berdasarkan rentang nilai yang dicapai.

Perubahan Indikator Pembentuk IKPA

Selain perubahan pada bobot persentase, terdapat pula penyesuaian pada indikator-indikator yang membentuk nilai IKPA itu sendiri. Jika pada periode sebelumnya penilaian didasarkan pada **13 indikator** yang cukup luas, saat ini sistem penilaian telah dipertajam menjadi **8 indikator utama** :

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Belanja Kontraktual (10%)
5. Penyelesaian Tagihan (10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
7. Capaian Output (25%)
8. Dispensasi SPM (sebagai faktor pengurang nilai)

Sehubungan dengan adanya perubahan fundamental pada bobot formulasi serta rincian indikator pembentuk nilai tersebut, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan (*apple-to-apple*)** dengan capaian nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan basis perhitungan dan parameter evaluasi yang digunakan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu	5	5	5	Akan tercapai

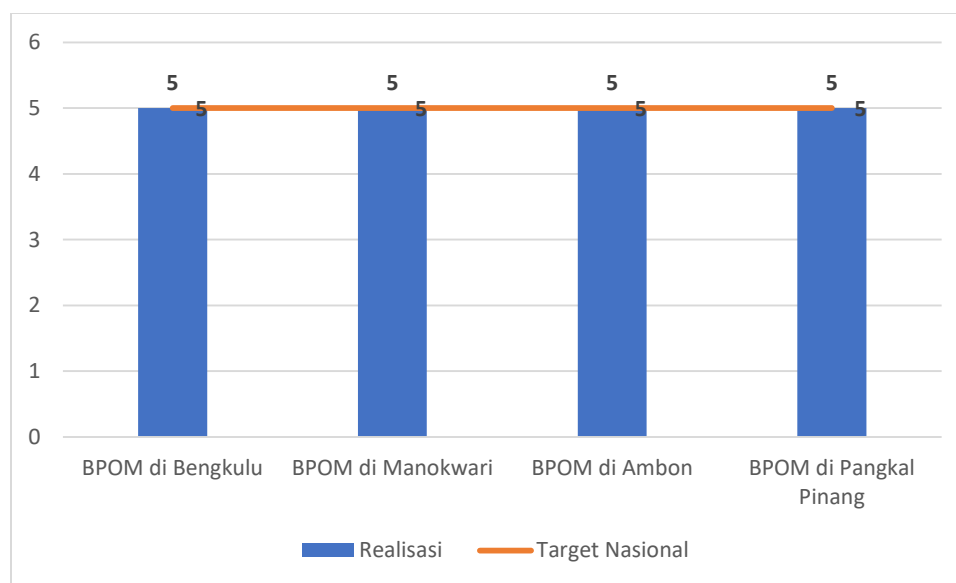
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan instrumen krusial yang mencerminkan kualitas perencanaan, implementasi, dan hasil pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu berhasil mencatatkan nilai realisasi sebesar **5**. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan

dalam Renstra tahun 2027 sebesar **5**, maka diperoleh persentase capaian sebesar **100%** dengan kriteria "**Akan Tercapai**".

Mulai tahun 2025 terdapat perubahan fundamental dalam penghitungan NKA, di mana bobot Nilai IKPA meningkat menjadi **50%** (dari semula 40%) dan bobot Nilai EKA menjadi **50%** (dari semula 60%). Perubahan ini, ditambah dengan penyesuaian pada 8 indikator pembentuk IKPA—seperti Capaian Output (25%) dan Penyerapan Anggaran (20%)—membuat perbandingan kinerja tahun 2025 tidak dapat disandingkan secara langsung (*apple-to-apple*) dengan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan dan mitigasi risiko secara intensif untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional



Gambar 3.43. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Balai POM setara dan target nasional

Dengan realisasi yang sepenuhnya memenuhi target (nilai 5 dari skala 5), maka kualitas kinerja Balai POM di Bengkulu beserta Balai pembanding lainnya pada tahun 2025 dikategorikan sebagai "**Sangat Baik**". Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan ketepatan strategi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Faktor Keberhasilan: Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kontributor utama dalam tingginya nilai NKA adalah capaian IKPA yang sangat optimal sebesar 98,15. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Optimalisasi Capaian Output (100.00) : Satker berhasil menyelaraskan antara penyerapan anggaran dengan target kinerja fisik secara sempurna (Bobot 25%).
- Ketepatan Waktu Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan (100.00): Pengelolaan administrasi belanja pihak ketiga dilakukan secara disiplin sesuai *timeline* yang ditetapkan.
- Efektivitas Penyerapan Anggaran (97.53): Realisasi belanja menunjukkan tren yang positif dan konsisten sepanjang tahun.
- Nihil Penalti: Tidak terdapat pengurang nilai dari faktor Dispensasi SPM, yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap batas waktu pengajuan tagihan akhir tahun.

Analisis Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA sebesar 85,02 menunjukkan performa yang stabil, namun tetap memberikan ruang untuk peningkatan (perbaikan) pada tahun berikutnya. Penilaian EKA ini didasarkan pada dua pilar utama:

- Aspek Efektivitas (Bobot 75%): Fokus pada Capaian Rincian Output (RO), yang menjadi penentu utama apakah kegiatan yang direncanakan memberikan dampak nyata.
- Aspek Efisiensi (Bobot 25%): Mengukur penggunaan dan penghematan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Balai POM di Bengkulu telah menunjukkan tata kelola keuangan yang sangat baik. Meskipun terdapat perubahan kebijakan perhitungan NKA dan indikator IKPA di tahun 2025, Satker mampu beradaptasi dengan cepat sehingga target jangka menengah tetap berada pada jalur yang tepat (*on track*).

Langkah Strategis Selanjutnya: Untuk mempertahankan predikat "Sangat Baik", Balai POM di Bengkulu akan memfokuskan pada penguatan akurasi perencanaan (Halaman III DIPA) untuk meminimalisir deviasi serta terus mendorong efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas *output* yang dihasilkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian nilai maksimal ini didorong secara signifikan oleh **Program Layanan Dukungan Manajemen Internal (6384.994)** melalui kegiatan **Layanan Perkantoran** yang dikelola secara akuntabel. Fokus utama pada program ini meliputi:

- **Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN):** Penguatan tata kelola aset melalui pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan secara periodik untuk memastikan seluruh aset pendukung pengawasan (laboratorium dan sarana kantor) terdata dengan baik serta siap digunakan secara berkelanjutan.
- **Pembayaran Gaji dan Tunjangan:** Pemenuhan hak-hak sumber daya manusia secara tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga motivasi serta produktivitas kerja pegawai dalam mencapai target organisasi.
- **Operasional dan Pemeliharaan Kantor:** Menjamin ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana kantor yang optimal guna mendukung kelancaran tugas pengawasan obat dan makanan tanpa hambatan teknis.

Selain program utama, pencapaian **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)** yang optimal juga didorong oleh implementasi inovasi tata kelola serta efektivitas pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola: Aplikasi SINTAGELIS

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas aset laboratorium, Balai POM di Bengkulu telah meluncurkan inovasi **Sintagelis**. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pencatatan inventaris alat gelas secara *real-time*, mulai dari proses pengadaan (alat masuk) hingga pemantauan kerusakan (alat pecah). Dengan data yang akurat, perencanaan kebutuhan anggaran laboratorium menjadi lebih presisi dan efisien.

2. Faktor Kunci Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Keberhasilan raihan nilai NKA yang tinggi didukung oleh empat pilar utama dalam pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2025:

- **Optimalisasi Capaian Output:** Satker berhasil mencapai sinergi sempurna antara penyerapan anggaran dengan target kinerja fisik, yang dibuktikan dengan perolehan **skor maksimal 100,00**.
- **Disiplin Administrasi yang Ketat:** Ketepatan waktu dalam pengelolaan belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tercermin dari perolehan nilai maksimal (**100,00**), menunjukkan tata kelola administrasi yang sangat rapi.
- **Kepatuhan Tinggi terhadap Regulasi:** Terjaganya kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan tagihan dibuktikan dengan **nihilnya**

penalti pada faktor Dispensasi SPM, yang menandakan kedisiplinan tinggi dalam siklus pencairan dana.

Meskipun secara keseluruhan performa berada pada kategori "Sangat Baik", terdapat ruang peningkatan pada aspek **Akurasi Perencanaan (Halaman III DIPA)** yang mencatatkan nilai 91,48. Untuk tahun 2026, Balai POM di Bengkulu berkomitmen memperkuat akurasi rencana penarikan dana bulanan dan terus mendorong efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

7. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu	8.911.430.000	8.910.854.556	99,99	100,00	0,00	Efisien (100%)

Berdasarkan capaian indikator **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)** tahun 2025, Balai POM di Bengkulu menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Data menunjukkan bahwa dari target anggaran sebesar **Rp8.911.430.000**, realisasi yang terserap adalah sebesar **Rp8.910.854.556** atau mencapai **99,99%**. Dengan persentase capaian indikator yang menyentuh angka **100,00%**, penggunaan anggaran dinilai sangat presisi dan tepat sasaran.

Keberhasilan pencapaian nilai kinerja maksimal ini (Nilai 5 dengan kategori Sangat Baik) didukung Program Layanan Dukungan Manajemen Internal (6384.994) kegiatan **Layanan Perkantoran** yang dikelola secara akuntabel, meliputi:

- **Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN):** Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola aset negara melalui pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara periodik dan akurat. Hal ini memastikan seluruh aset pendukung pengawasan—baik perangkat laboratorium maupun sarana perkantoran—terdata dengan baik, memiliki legalitas yang jelas, dan siap digunakan untuk mendukung operasional lembaga secara berkelanjutan.

- **Pembayaran Gaji dan Tunjangan:** Upaya untuk memastikan hak-hak sumber daya manusia terpenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga motivasi serta produktivitas kerja pegawai dalam mencapai target organisasi.
- **Operasional dan Pemeliharaan Kantor:** Menjamin ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana kantor yang optimal, sehingga seluruh tugas pengawasan obat dan makanan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis fasilitas.

Melalui pengendalian internal yang ketat, Balai POM di Bengkulu berhasil mencapai tingkat efisiensi dengan skor **0,00** (dalam skala deviasi), yang artinya realisasi sangat mendekati perencanaan tanpa adanya pemborosan. Hal ini menempatkan Balai POM di Bengkulu dalam kriteria "**Efisien (100%)**".

8. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Terdapat beberapa kegiatan yang diperlukan untuk mempertahankan capaian kinerja tahun 2026 diantaranya:

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Deviasi halaman III DIPA diatas 5%, disebabkan RPD tidak terealisasi	Melakukan monev POA oleh ketua tim setiap bulan, dengan melakukan evaluasi kegiatan yg tidak terlaksana	Monev POA triwulan I - 2026 Penyusunan pengajuan RPD Triwulan berikutnya (TW_2) menyesuaikan dengan POA revisi hasil Monev	Triwulan 1 - 2026 Triwulan 2	Y	K-01	Deviasi atau Gap Halaman 3 DIPA melebihi batas yang ditetapkan
	Belanja kontraktual paling lambat pada triwulan II tahun 2025 untuk dapat nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Mempercepat pengadaan kontraktual yang sudah disusun di aplikasi SIRUP dilaksanakan sebelum Triwulan II berakhir	Mempercepat pengadaan kontraktual yang sudah disusun di aplikasi SIRUP dilaksanakan sebelum Triwulan II berakhir untuk poin yang sulit dikendalikan berupa Pemeliharaan	Triwulan II	T		

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
			alat Lab				
	Revolving UP TUP tidak sesuai ketentuan (30 Hari kalender)	Mengukur ketepatan waktu dan kepatuhan pertanggungjawaban UP/TUP, dengan komponen utama: ketepatan waktu GUP/PTUP, persentase GUP disebulankan, dan setoran TUP	Monitoring My INTRESS: Pantau batas waktu revolving GUP melalui aplikasi My INTRESS melalui pemantauan pelaporan SPJ dengan nilai yang cukup besar	Triwulan I	T		

IKSS 8.4 - INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT BPOM (Belum)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan nota dinas Inspektur Utama nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 02 Januari 2026 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025, maka diperoleh nilai Balai POM di Bengkulu adalah 2,906 dengan tingkat maturitas (*risk aware*), dimana hasil penerapan manajemen risiko terhadap keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah. Adapun perbandingan dengan target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,88	2,906	100,90	Sangat Baik

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

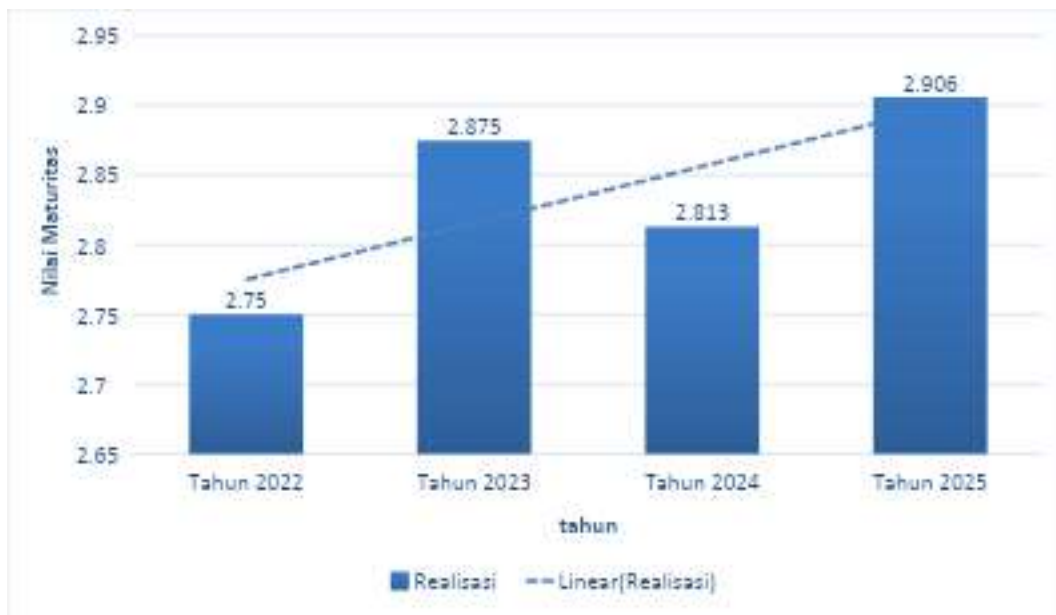
1. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
2. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan salah satu indikator kinerja utama dari sasaran kinerja Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dan merupakan indikator yang baru pada tahun 2025. Pada tahun 2025, skor total yang didapatkan dari pengisian kertas kerja evaluasi yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat Utama Adalah **46,50** dengan Nilai Maturitas sebesar 2,906 dari 2,88 yang menjadi target Nilai Maturitas yang ditetapkan atau 100,90% dengan kriteria “Sangat Baik”.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Target indikator “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” pada tahun 2025 ini adalah 2,88 dengan realisasi sebesar 2,906 atau 100,9% dengan kriteria “Sangat Baik”. Penilaian Maturitas ini telah dilakukan sejak beberapa tahun 2022, namun baru pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah indikator Kinerja Utama. Perbandingan realisasi dan capaian indeks selama periode Renstra tahun 2022 hingga 2025, dapat ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 3.44. Perbandingan realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPOM Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Pencapaian Nilai Indeks Maturitas Manajemen Risiko, secara umum terjadi kenaikan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2025 yaitu berada pada Tingkat maturitas “*Risk Aware*” kecuali pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai sebesar 0,06 poin. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kelemahan dalam pengelolaan risiko mulai dari komunikasi risiko hingga evaluasi risiko dan pada tahun 2025 telah dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi penilaian maturitas risiko yang disampaikan oleh Inspektorat Utama.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

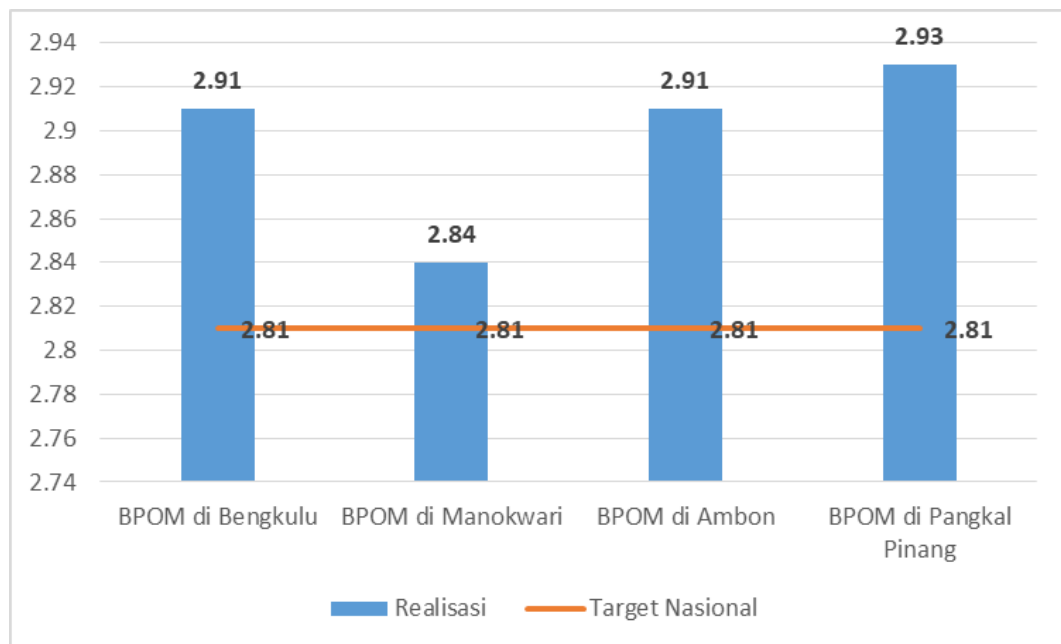
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,8	2,906	76,47%	Akan Tercapai

Dari tabel terlihat realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 2,906 , jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah sebesar 3,8 , terdapat Gap sebesar 0,9

poin atau persentase pencapaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 adalah sebesar 76,47% (rentang 70% - <100% ($70 \leq x < 100$) dengan kategori “Akan Tercapai.”

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai POM sejenis/setara dan target nasional

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Manokwari, Balai POM di Ambon, dan Balai POM di Pangkal Pinang. Kinerja 4 (empat) UPT ini disajikan pada grafik di bawah ini. Berdasarkan realisasi tersebut, Nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Bengkulu (2,91) tidak berbeda dengan Balai POM di Ambon, tetapi masih di bawah Balai POM Pangkalpinang (2,938). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko Balai POM di Bengkulu masih tergolong cukup baik dalam perbandingan Balai POM sejenis. Secara keseluruhan, realisasi keempat Balai POM telah melebihi target nasional 2,81.



Gambar 3.45. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM sejenis dan target nasional

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi **Indeks Maturitas Manajemen Risiko UPT BPOM di Bengkulu** diperoleh 2,906 poin dengan capaian sebesar 100,90 % (**Sangat Baik**). Nilai didapatkan pada akhir tahun setelah dilakukan penilaian Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Dilakukannya penyesuaian atau revisi target indikator pada tahun 2025 dari 3,25 menjadi 2,88. Penyesuaian target ini dilakukan berdasarkan baseline dari hasil penilaian Maturitas pada tahun 2024 yang diperoleh sebesar 2,813
2. Melakukan perbaikan pengelolaan manajemen risiko berdasarkan rekomendasi penilaian inspektorat yang telah dituangkan dalam Surat dari Irtama dengan No. B-PI.06.07.7.12.24.770 tanggal 2 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Balai POM di Bengkulu yang memuat kelemahan pengelolaan manajemen risiko dalam dokumentasi komunikasi risiko, pengujian efektivitas aktivitas pengendalian risiko, ketidaktepatan dalam pengkategorian klasifikasi risiko, analisis risiko serta monev risiko. Terhadap kelemahan ini telah dilakukan perbaikan selama tahun 2025 dan terdapat peningkatan poin sebesar 0,09 dari tahun 2024, walaupun hasil akhir masih pada level maturitas "Risk Aware"
3. Pencapaian pada tahun ini juga didukung faktor keterlibatan lebih masif dari seluruh pegawai dari semua substansi, mulai dari pimpinan hingga bagian teknis dengan menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari proses bisnis. Hal ini dibuktikan dengan menjadi salah satu capaian kinerja di semua substansi dengan mencantumkan sebagai satu capaian indikator kinerja di SKP Pegawai.

Telah dilakukan pengendalian yang memadai atas risiko tidak tercapainya indikator Indeks Maturitas Manajemen Risiko UPT BPOM dengan melakukan pengendalian sebagai berikut :

1. Membuat Rencana aksi dalam pengelolaan Manajemen risiko yang telah memuat 16 karakteristik kunci penilaian maturitas manajemen risiko seperti yang tercantum dalam Kepka BPOM No. HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Badan POM.
2. Pelibatan seluruh komponen organisasi dalam pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan indikator kinerja utama yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi bagian/ unit dimana mereka bertugas, hal ini dikuatkan dengan dijadikannya sebagai satu capaian di SKP pegawai.

3. Dilakukannya monev secara berkala dalam pengelolaan risiko melalui pemantauan keterjadian risiko, pemantauan efektivitas aktivitas pengendalian dan revidi risiko dengan melibatkan 3 komponen “*Threelines Defense*” yaitu tim manajemen termasuk pimpinan, keterlibatan auditor Internal dan semua bagian organisasi secara berkala.

Hal ini menyebabkan pengendalian berjalan efektif dan mampu menurunkan level residu risiko ke level dibawah selera risiko.

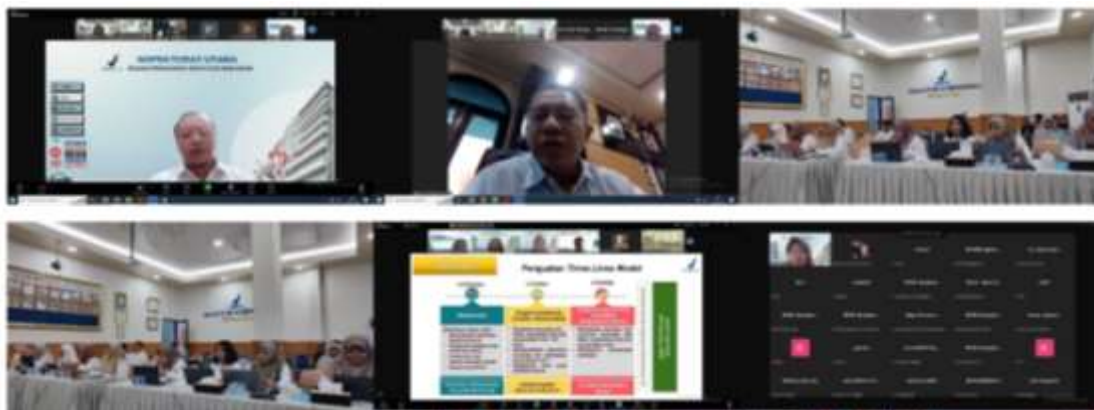
F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh berbagai kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 diantaranya:

- Bimtek Penguatan Implementasi Maturitas Manajemen Risiko dengan narasumber dari Inspektorat I Badan POM pada tanggal 15 Januari 2025 secara daring.
- Penetapan perjanjian Kinerja oleh pimpinan kepada seluruh ketua tim sebagai kontrak kerja yang menjadi komitmen dalam mensukseskan target organisasi dengan memasukkan pertimbangan risiko yang kemungkinan muncul dan perlu dilakukan pengendalian. Hal ini terwujud karena keterlibatan langsung pimpinan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja dan risiko di BPOM Bengkulu.
- Pelaksanaan penyusunan identifikasi risiko, analisis risiko dan penentuan tindakan mitigasi bersama seluruh ketua tim, anggota tim serta auditor internal.
- Pelaksanaan pengujian aktivitas pengendalian terhadap risiko organisasi lebih besar atau sama dengan 16.
- Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko atas 2 risiko yang memerlukan tindakan mitigasi. Upaya pengendalian yang dilaksanakan juga dilakukan uji efektivitas pengendalian risiko yang telah berjalan untuk melihat sejauh mana efektivitas aktivitas pengendalian dapat menekan nilai residual risiko.



- Kegiatan lain yang turut menjadi faktor positif berupa:
 - a. Penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman terkait manajemen risiko secara periodik yang dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan risiko yang menghadirkan narasumber secara offline maupun online dari berbagai institusi internal maupun eksternal.
 - b. Peningkatan kompetensi petugas pengelola manajemen risiko juga ditujukan untuk memperoleh sertifikasi *Risk Officer* melalui pelatihan bersertifikasi QRMA, QRMO, CRMA, CRMO yang diselenggarakan secara mandiri oleh Lembaga pelatihan yang tersertifikasi. Saat ini BPOM Bengkulu sudah memiliki Risk Officer yang tersertifikasi QRMA pada tahun 2023 sebanyak 1 orang, namun hingga tahun 2025 belum ada penambahan petugas yang mengikuti pelatihan tersertifikasi dikarenakan terkendala anggaran.



G. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp79.500.000,0	Rp79.500.000,0	100	100,90	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sebesar 100%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,01 dengan kriteria efisien.

Pengelolaan anggaran yang efisien ini dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek bagi internal pegawai, seperti sosialisasi korupsi dan gratifikasi oleh KPK pada bulan Agustus 2025 yang dilakukan secara hybrid dan minim anggaran. Kegiatan ini merupakan bentuk sinkronisasi dengan KPK dimana tidak terdapat belanja pegawai (narasumber) tetapi juga bentuk dukungan ke KPK selain sebagai pengawas juga sebagai unit pencegah korupsi.
2. Pengadaan alat pengolah data untuk menunjang pencapaian sasaran kegiatan dengan meminimalisasi risiko berupa masih terdapat beberapa APD berupa laptop dengan spesifikasi rendah, diantaranya prosesor intel generasi lama (di bawah core i3) dan RAM rendah yang menyebabkan akses ke google drive dan input data ke aplikasi lebih lama.
3. Peningkatan kompetensi memanfaatkan IDEAS PPSDM POM dan menyeluruh bagi semua pegawai, diantaranya manajemen risiko dan SAKIP.

H. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi Perbaikan Kinerja 2026

Untuk meningkatkan capaian nilai indeks manajemen risiko BPOM di Bengkulu di tahun mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Target indikator Indeks Maturitas Manrisk pada tahun 2026 (3,4) cukup jauh dari capaian pada tahun 2025 (2,901). Terdapat Gap sebesar 0,5 poin	- Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko yang lebih tertata dan terarah dalam pengimplementasian 16 kunci karakteristik maturitas manajemen risiko, dengan diawali penetapan rencana aksi, sosialisasi target kinerja, identifikasi risk even dengan mempertimbangkan tidak hanya target sasaran kinerja dan indikator kinerja utama, namun juga memperhatikan isu internal dan eksternal serta harapan dari pihak berkepentingan yang selama ini bekerjasama dengan BPOM di Bengkulu.- - melakukan reviu target capaian IKU dan mengajukan penyesuaian target di tahun 2026 berdasarkan pencapaian IKU pada tahun 2025. (usulan revisi dari 3,4 menjadi 3,1)	- Membuat rencana kerja pelaksanaan pengelolaan manrisk sesuai 16 karakteristik manrisk - Penyesuaian target melalui revisi target IKU ke Biro perencanaan	Triwulan 1 - 2026 Triwulan 2 - 2026	T		
	Pengelolaan risiko tidak berkelanjutan dan dimonitor secara periodik, hal ini membuat keterjadian risiko akan berulang dengan frekuensi dan dampak yang sama atau lebih dimasa yang akan datang	Mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko dengan menyiapkan kertas kerja yang dapat menjadi data dukung penataan manajemen risiko sudah melalui proses budaya risiko bukan sesuatu yang hadir tanpa proses yang tertelusur dan terdokumentasi.	- Pembuatan dan pengisian Kertas kerja pengelolaan manajemen risiko - Pelibatan Auditor internal dalam mereviu Kertas kerja Identifikasi risiko - Monitoring keterjadian risiko oleh masing2 substansi - Monitoring dan evaluasi Renja maturitas Manrisk secara berkala - Melakukan peningkatan Kompetensi pegawai	Triwulan 1 - 2026 Triwulan 2 - 2026 Triwulan 1 - 2026	Y	S-26	Pengelolaan Manajemen Risiko di BPOM Bengkulu belum mampu mengantisipasi kejadian risiko berulang pada waktu yang akan datang

			terkait pengelolaan Manrisk				
	Masih rendahnya keterlibatan semua pegawai terhadap pengelolaan risiko	Meningkatkan keterlibatan lebih inklusif dari semua bagian lini organisasi mulai dari teknis hingga pihak manajemen, sehingga menjadi satu kesatuan proses pengawalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi	Pembahasan manajemen risiko melibatkan seluruh lini pemegang indikator kinerja dan direviu oleh Kepala Balai POM	Triwulan 1 - 2026	T		
	Belum konsistennya Monev Pelaksanaan Renja Maturitas Manrisk dilakukan	Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penerapan 16 karakteristik Maturitas manajemen risiko dengan melibatkan pimpinan dan seluruh bagian	Dilakukan Rapat Monev Renja Manrisk secara periodik per TW	Triwulan 2	T		

3.2 TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI SEBELUMNYA

Pada tahun 2025, Balai POM di Bengkulu telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi bulanan serta Laporan kinerja interim/triwulan. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis 1 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Tabel 3.11 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1.	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada awal tahun terjadi blokir anggaran akan tetapi tidak ada kejelasan terkait penyesuaian target jumlah sampel,	Penyesuaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Sampel	Merevisi renlak baru, dengan cara realokasi kekurangan sampel pada TW I ke dalam TW berikutnya secara proporsional dan dengan memperhitungkan kesiapan tim pengujian	Selesai			T		
		pemenuhan target pengawasan s.d Bulan Maret 2025 sebesar 45.57%, terkendala dengan adanya pemblokiran anggaran pada Bulan Pebruari 2025. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 84,74%	Menyusun renlak baru, dengan cara realokasi kekurangan sampel pada TW I ke dalam TW berikutnya secara proporsional dan dengan memperhitungkan kesiapan tim pengujian	Menyusun Renlak baru melalui realokasi kekurangan sampel triwulan I ke dalam Tw berikutnya dengan proporsional	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		target 86,5%								
		Terdapat antrian alat pengujian Laboratorium meliputi GC dan KCKT, disebabkan alat rusak	1. pembuatan jadwal antrian penggunaan GC, 2. untuk KCKT meminjam ke lab lain sambil menunggu pemasangan KCKT baru	Penyusunan jadwal antrian penggunaan kromatografi gas (GC)	Selesai			T		
		Penggunaan alat microwave masih antri disebabkan pemeliharaan dan suku cadang yang belum tersedia	1. Melakukan perbaikan alat microwave 2. Pembelian suku cadang microwave 3. Usulan pembelian microwave tahun 2026	1. Perbaikan alat microwave 2. Pembelian suku cadang microwave 3. Mengusulkan pembelian microwave tahun 2026 dan telah disetujui PPPOMN				Y	S-01	Overwork Penggunaan Microwave sebagai alat preparasi pegujian Logam untk komoditi Pangan, OBA, SK, OK, dan Kosmetik berpotensi menyebabkan kerusakan alat sehingga mengganggu pencapaian Time Line Pengujian

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
2	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Pada Tahun 2024 belum ada sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO pada aplikasi E-MESO dikarenakan tenaga kesehatan belum paham terkait farmakovigilans dan cara pelaporannya.	Menyelenggarakan KIE Farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2025	Menyelenggarakan KIE Farmakovigilans pada tanggal 19 Februari 2025	Selesai	-	-	Y	S-04	Sarana Pelayanan kesehatan yang telah diedukasi terkait KTD/ESO tidak melakukan pelaporan diaplikasi ESO
		Pasca pelaksanaan KIE farmakovigilans, baru 3 sarana yang melaporkan KTD/ESO.	Melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan KTD/ESO secara berkala dan menyebarkan ke WAG PIC PV memberikan apresiasi kepada sarana yang telah melakukan pelaporan KTD/ESO berupa piagam penghargaan	1. PIC PV melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan KTD/ESO secara berkala dan menyebarkan ke WAG setiap bulan 2. PIC PV memberikan apresiasi kepada sarana yang telah melakukan pelaporan KTD/ESO berupa piagam penghargaan	Selesai		-	Y	S-04	Sarana Pelayanan kesehatan yang telah diedukasi terkait KTD/ESO tidak melakukan pelaporan diaplikasi ESO
3	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat sampel pangan yang ditindak Lanjuti sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya.	Penyesuaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Sampel / renlak	Melaksanakan sampling dan pengujian produk pangan olahan dengan penyesuaian / perubahan rencana sampling	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		komponen ketepatan waktu dan pelaporan memiliki nilai terkecil (31,25%), s.d Bulan Mei sebanyak 64 sampel, diperiksa dan diuji tepat waktu sesuai pedoman sampling 20 sampel. karena kapasitas microwave kecil (6 vessel) dan kerusakan AAS	1. Mengajukan anggaran pengadaan microwave dengan kapasitas vessel yang lebih banyak (24 atau 36 vessel) untuk mendapatkan rekomendasi pengadaan alat lab 2. Melakukan pengecekan kerusakan AAS dengan teknisi Thermo 3.. Meminta tambahan bantuan personel untuk pengujian pangan	1. Usulan penambahan vessel Microwave dan sudah terdapat Rekomendasi P3OMN 2 Pengecekan AAS untuk ke 2 kalinya oleh teknisi 3. penambahan 1 personil ke Lab Pangan (Yozi)	Belum selesai	Usulan pengadaan Microwave tahun 2026	Tahun 2026	Y	S-01	Overwork Penggunaan Microwave sebagai alat preparasi pengujian Logam untuk komoditi Pangan, OBA, SK, OK, dan Kosmetik berpotensi menyebabkan kerusakan alat sehingga mengganggu pencapaian Time Line Pengujian
4	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Informasi KLB Keracunan Pangan berisiko terlambat ditindaklanjuti	Pembentukan Tim Gerak Cepat	Pembentukan SK Tim Gerak Cepat bulan Juli 2025	Selesai	-	-	Y	O-03	Laboratorium belum bisa menguji beberapa parameter uji kasus KLB keracunan Pangan
		Terdapat kejadian KLB keracunan pangan pada bulan Juli 2025 di Simpang Kandi Kota Bengkulu	Melakukan tindak lanjut penanganan KLB KP melalui salah satunya pengambilan sampel yang diduga menjadi penyebab keracunan	Melakukan pengujian 5 sampel yang disampling dari lokasi kejadian KLB KP	Selesai			Y	O-03	Laboratorium belum bisa menguji beberapa parameter uji kasus KLB keracunan Pangan

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Terdapat KLB KP di dalam acara hajatan masyarakat di Kota Bengkulu yang memerlukan perhatian dari beberapa pelaku usaha catering lainnya agar kejadian tidak terulang	Revisi anggaran untuk edukasi keamanan pangan bagi pelaku usaha catering hajatan masyarakat se-kota Bengkulu	Bimbingan teknis (bimtek) keamanan pangan bagi 22 peserta pelaku usaha pangan siap saji yang menyediakan jasa catering untuk hajatan masyarakat di aula kantor Balai POM, dengan mengundang Dinas Kesehatan sebagai narasumber materi Sertifikat Laik Sehat, sebagai upaya pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada tanggal 14 agustus 2025.	Selesai			T		
		Pada bulan Agustus 2025, terdapat KLB KP di Kabupaten Lebong dan telah dilakukan sampling sejumlah 4 sampel. Namun belum dapat terealisasi pengujiannya pada bulan berjalan (Realisasi turun menjadi 55,56%)	Segera menyelesaikan pengujian 4 sampel KLB KP Rejang Lebong	Pelaksanaan penyelesaian pengujian 4 sampel KLB KP di Rejang Lebong	Selesai			Y	O-03	Laboratorium belum bisa menguji beberapa paramater uji kasus KLB keracunan Pangan
		Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) dalam pemberian MBG di Kabupaten Lebong dengan korban mencapai hampir 500 peserta didik menjadi perhatian serius di	Bersama Badan Gizi Nasional, melakukan edukasi pada Bimbingan teknis untuk SPPG se-provinsi Bengkulu.	Bersama Badan Gizi Nasional, melaksanakan Bimbingan teknis sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan bimtek penjamah makanan untuk 2100 SPPG se-provinsi Bengkulu pada bulan oktober 2025.	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		tingkat nasional								
5	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Penyesuaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Sampel / renlak	Melaksanakan sampling dan pengujian 7 sampel PIRT dengan penyesuaian / perubahan rencana sampling	Selesai			Y	S-03	Pola Tindak Lanjut terkait hasil Pengujian yang TMS terhadap kategori Pangan sampel PIRT tidak dapat terlaksana tepat waktu.
		Terdapat metode uji yang belum dilakukan verifikasi untuk pengawasan PIRT diantaranya parameter uji Arsen dan pewarna makanan silmultan	Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen secara Spektrofotometri Serapan Atom dengan Hydride Vapour Generation (HVG-AAS) dan Penetapan Kadar Simultan Pewarna pada Pangan Olahan secara KCKT-PDA	Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen secara Spektrofotometri Serapan Atom dengan Hydride Vapour Generation (HVG-AAS) pada bulan Juli 2025 dan Penetapan Kadar Simultan Pewarna pada Pangan Olahan secara KCKT-PDA (Agustus 2025)	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Terdapat hasil pengawasan sampel PIRT yang diproduksi di luar wilayah kerja BPOM Bengkulu yang memerlukan tindak lanjut dengan pemangku kepentingan : - Sampel Keripik Pisang Rasa Coklat, diproduksi di kabupaten Rejang Lebong - Sampel keripik Pisang SG, diproduksi di Kabupaten Rejang Lebong - Sampel Gula Merah, diproduksi di Jambi.	Komunikasi melalui BPOM/Loka setempat agar diteruskan ke Dinas Kesehatan setempat untuk pembinaan atau tindakan lanjutan. - Sampel Keripik Pisang Rasa Coklat, diproduksi di kabupaten Rejang Lebong - Sampel keripik Pisang SG, diproduksi di Kabupaten Rejang Lebong - Sampel Gula Merah, diproduksi di Jambi.	Mengirimkan Surat ke BPOM/Loka setempat dan Dinas Kesehatan setempat untuk pembinaan atau tindakan lanjutan. - Sampel Keripik Pisang Rasa Coklat, diproduksi di kabupaten Rejang Lebong (Loka POM di Rejang Lebong) - Sampel keripik Pisang SG, diproduksi di Kabupaten Rejang Lebong (Loka POM di Rejang Lebong) - Sampel Gula Merah, diproduksi di Jambi. (BPOM di Jambi)	Selesai			Y	S-03	Pola Tindak Lanjut terkait hasil Pengujian yang TMS terhadap kategori Pangan sampel PIRT tidak dapat terlaksana tepat waktu.
		Hasil Pengujian yang TMS terhadap kategori Pangan sampel PIRT tidak dapat terlaksana tepat waktu, disebabkan oleh Informasi Label yang tidak lengkap	Berkoordinasi dengan Tempat penjualan (lokasi sampling) dimana produk disampling, supplier produk berasal dari daerah mana	Berkoordinasi dengan Tempat penjualan (lokasi sampling) dimana produk disampling, supplier produk berasal dari daerah mana	Selesai			Y	S-03	Pola Tindak Lanjut terkait hasil Pengujian yang TMS terhadap kategori Pangan sampel PIRT tidak dapat terlaksana tepat waktu.
		Pengadaan microwave dengan kapasitas yang lebih besar	Pengadaan microwave dengan kapasitas yang lebih besar		Belum Selesai	Usulan dan kajian pengadaan alat Microwave ke PPPOMN	2026	Y	S-01	Overwork Penggunaan Microwave sebagai alat preparasi pengujian Logam untuk komoditi Pangan, OBA, SK, OK, dan Kosmetik berpotensi

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
										menyebabkan kerusakan alat sehingga mengganggu pencapaian Time Line Pengujian
6	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Belum ada rekomendasi yang diterbitkan terkait keputusan hasil inspeksi	Seiring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana di bidang obat dan makanan, terhadap temuan ketidaksesuaian disampaikan rekomendasi perbaikan kepada pelaku usaha agar dilakukan perbaikan	Menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada stakeholder agar dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku				Y	S-03	Kurangnya tindak lanjut yang dilakukan pemilik sarana/pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan dr BPOM Bengkulu
		Terdapat ketidaktepatan target RAPK bulanan yang semula tercatat sebagai peningkatan target kumulatif	Melakukan penyesuaian target bulanan menjadi flat, perhitungan realisasi secara kumulatif	Menyesuaikan target RAPK mengikuti DO yang ada, sudah terdapat persetujuan revisi RAPK dengan Surat nomor B-PR.07.21.05.25.156 tanggal 28 Mei 2025 dan sudah dilakukan revisi pada Simetris e planning periode Bulan Mei 2025	Selesai			T		
7	07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang ada dalam wilayah pengawasan Balai POM di Bengkulu adalah Sarana Produksi OBA dan Kosmetik dalam bentuk UMKM. Sarana	Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi yaitu UMKM di Bidang OBA sesuai ketentuan yang berlaku	Sudah dilaksanakan pemeriksaan Sarana Produksi UMKM OBA yaitu BUMDes Manfaat di Kabupaten Seluma termasuk juga melakukan konfirmasi apakah sarana tersebut akan melanjutkan proses registrasi produk	Selesai			Y	S-04	Tidak dapat dilakukan pemeriksaan Sarana Produksi OBA dikarenakan sarana tutup atau tidak beroperasi pada saat pemeriksaan.

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		produksi tidak selalu beroperasi.		OBA nya yang sudah terhenti sejak bulan November 2024						
		Capaian kinerja 114,94% atau Tidak Dapat Disimpulkan disebabkan target yang rendah	Usulan perubahan target indikator kinerja pada tahun mendatang	Usulan perubahan target tahun 2026 melalui pembahasan Monev Desember 2025 dan pada Laporan Kinerja 2025	Selesai			T		
8	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Hingga Februari 2025, belum terdapat realisasi kegiatan inspeksi sarana produksi pangan olahan	Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan menyampaikan tindak lanjut	Telah dilakukan pemeriksaan 7 sarana produksi pangan olahan dan pengujian sampel mikrobiologi yang diambil di sarana	Selesai			T		
		satu dari 7 sarana yang diperiksa di TW I, Tindak lanjut belum dapat diterbitkan karena menunggu hasil pengujian mikrobiologi untuk sampel yang diambil di sarana (Realisasi 85,71%)	Setelah hasil uji mikrobiologi keluar, segera membuat surat tindak lanjut ke sarana produksi AMDK di Kaur	Membuat Tindak Lanjut berupa surat peringatan ke sarana (AMDK di kaur) pada bulan April 2025	Selesai			Y	S-05	Kepatuhan pelaku Usaha terhadap Pemenuhan aspek CPPOB masih rendah
		Realisasi s.d Desember 2025 sebesar 94,29%, melampaui target yang ditetapkan (85%) dengan capain 110,93% (Tidak dapat disimpulkan)	Mengusulkan untuk penyesuaian target tahun berikutnya	Menhitung kembali baseline tahun 2025 untuk pertimbangan usulan penyesuaian target tahun berikutnya	Selesai			T		
9	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Realisasi dan capaian pemeriksaan sarana triwulan 1 Tahun 2025 tidak tercapai. Realisasi 87,85%,	Melakukan pengusulan ke Pusat dan Realokkasi target pemenuhan sampel ke Triwulan II	Realokasi pemenuhan target sampel Triwulan 1 ke Triwulan 2	Selesai			Y	O-05	Cakupan wilayah Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tidak dapat dipenuhi untuk target

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	sesuai ketentuan	target 96,88%, Capaian 90,68% (Baik) dalam level rendah hampir mendekati CUKUP								seluruh sarana yang ada sesuai dengan target kajian risiko sarana yang ditetapkan
		Hingga Agustus 2025, Realisasi persentase sarana distribusi kosmetik masih rendah 92,65% (36 diperiksa dari target 51) dibanding sarana distribusi Obat dan OBA &SK yang sudah 100%	Melakukan pemenuhan target inspeksi sarana distribusi kosmetik	Pelaksanaan inspeksi sarana distribusi kosmetik setiap bulan untuk memenuhi target	Selesai			Y	O-05	Cakupan wilayah Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tidak dapat dipenuhi untuk target seluruh sarana yang ada sesuai dengan target kajian risiko sarana yang ditetapkan
10	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Hingga Februari 2025, indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum memberikan realisasi karena efisiensi	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan pada bulan Maret 2025				T		
		Capaian pada triwulan I sebesar 133.33% dan capaian terhadap target menengah renstra sebesar 126.58 % dikhawatirkan akan terjadi anomali capaian kinerja	Melakukan revisi target indikator kinerja sesuai baseline	Melakukan dan telah disetujui revisi target indikator kinerja dari 75% menjadi 90%, terlaksana pada bulan Agustus 2025	Selesai			T		
11	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	Belum ada target jumlah dan mutu hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan	Koordinasi dengan Badan POM Kedeputan I-III data mengenai besaran	Penyusunan perencanaan perjalanan dan target per bulan pengawasan iklan sediaan farmasi dan	Selesai			Y	O-06	Capaian Target pengawasan iklan luar ruang tidak terpenuhi

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
	diawasi sesuai ketentuan	pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, terutama target iklan luar ruang yang memerlukan perjalanan dinas pengumpulan bahan iklan	target jumlah iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang harus diawasi, dilakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan dimaksud	pangan olahan, terutama untuk perolehan iklan luar ruang yang membutuhkan usaha lebih melalui perjalanan dinas dan pemotretan/pendokumentasian iklan						
		Target Tahun 2025 sebesar 87.8 % sudah tercapai bulan Januari sd Juli 2025 (Realisasi = 99,73% ; capaian = 113,59%) dan trend yang telah melampaui target akhir tahun yang memungkinkan capaian kinerja terlalu tinggi sehingga hasilnya tidak dapat disimpulkan.	Melakukan penyesuaian target pada renstra untuk kemudian dituangkan pada Revisi PK Kepala Balai Tahun 2025, dimana pada saat ini target tersebut masih dalam proses reviu Biro Perencanaan dan Keuangan .	Pengusulan perubahan target bulan Agustus - Desember dari 87,8% menjadi 91,0%	Selesai			T		
		Banyaknya iklan Obat bahan alam di media elektronik lokal yang tergolong menyesatkan atau tidak objektif dengan klaim berlebihan	Melakukan revisi anggaran untuk penyelenggaraan Bimtek Iklan OBA bagi pengelola media elektronik	Pelatihan/Bimtek terkait iklan Bat Bahan Alam atau Obat Tradisional (13 Nov tahun 2025) kepada pelaku usaha penyiaran lokal (radio 10), 2 TV lokal dan 2 Koran lokal dan beberapa media online.	Selesai			T		
12	12.Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	IKU ini adalah IKU baru ditahun 2025 dan penetapan IKU baru disahkan sekitar bulan Juli 2025 serta di tengah relaksasi anggaran ditetapkan	Percepatan sampling produk tembakau untuk menutup kekurangan pada bulan Semester I tahun 2025	Pelaksanaan pengawasan penandaan label rokok setiap bulan dengan target 12 label/bulan	Selesai	-	-	T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		target pemenuhan 12 label per bulan								
		Perubahan secara cukup signifikan sesuai petunjuk surat dari Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif nomor B-PW.01.15.3.02.25.62 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penyampaian Penyesuaian Target Pengawasan Zat Adiktif Badan POM Tahun 2025, terjadi perubahan jumlah target dari 12 label/bulan menjadi 7 label perbulan. Dalam monitoring bulan Januari yang dilakukan pengawasan 12 label/bulan menyebabkan realisasi sampling Februari hanya ditarget 2 label. Pelaksanaan pengawasan kemudian mengalami relaksasi pada bulan April dimana target kembali 12 label/bulan	Melakukan penyesuaian target mengikuti Surat Deputi I BPOM Nomor B-PW.01.15.3.02.25.62 tanggal 7 Februari 2025 untuk bulan April dan seterusnya, terutama target April - Mei 2025 agar kumulatif terpenuhi 12 per bulan	Melakukan penyesuaian target mengikuti Surat Deputi I BPOM Nomor B-PW.01.15.3.02.25.62 tanggal 7 Februari 2025 untuk bulan April dan seterusnya. Target pengawasan bulan April 2025 menjadi 18 label dan Mei 2025 (20 label).	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Perubahan waktu timeline penginputan pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang awalnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya menjadi setiap tanggal 5 bulan berikutnya, merujuk pada Surat Nomor B-PW.01.15.35.05.25.738 tanggal 19 Mei 2025 perihal Undangan Desk Pembahasan Usulan Target Indikator Pengawasan Label Produk Tembakau dan Rokok elektronik 2025-2029 di UPT BPOM yang baru disampaikan pada bulan Mei 2025. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan bulan Januari 2025 (13 dari 13), April (15 dari 18), Mei (8 dari 20). Hasil perhitungan ketepatan pelaporan 40%	Pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau sesuai dengan Surat dari Direktur KMEI yang barum sebelum tanggal 5 bulan berikutnya	Pelaporan oleh petugas dan monitoring oleh ketua tim hasil pengawasan label produk tembakau sesuai dengan Surat dari Direktur KMEI yang baru, dilakukan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya	Selesai	-	-	T		
13	13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	Belum adanya SE pemangku kebijakan (kepala daerah) di Kab/Kota tentang pengendalian AMR	Berkoordinasi dengan substansi infokom untuk melakukan advokasi ke Kepala Daerah dalam rangka	Telah dilakukan Advokasi terkait penerbitan SE Pengendalian AMR kepada Walikota Bengkulu, Bupati Bengkulu Tengah, Bupati				T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		guna mendukung penilaian IKU AMR pada komponen advokasi lintas sektor	percepatan penerbitan SE pengendalian AMR	Bengkulu Utara, Bupati Kaur, Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Seluma secara langsung serta penyampaian Draft SE pengendalian AMR.						
		Adanya efisiensi anggaran dan belum dianggarkannya pelaksanaan Bimtek AMR tahun 2025 (minimal 1 kegiatan pada tahun 2025) Kurangnya pemahaman implementasi AMR bagi sarana pelayanan kefarmasian dan pemangku kepentingan / lintas sektor	Berkoordinasi dengan Ketua Tim Pemeriksaan untuk dapat merevisi anggaran untuk pelaksanaan Bimtek AMR tahun 2025 sehingga dapat terlaksana di tahun 2025	Telah dilakukan revisi anggaran untuk pelaksanaan Bimtek AMR secara Hybrid dengan narasumber dari pusat dan Balai POM di Bengkulu pada tgl 16 September 2025, peserta meliputi apotek, Dinkes, IAI, dan IBI	Selesai			T		
		Belum dilakukan advokasi ke Bupati Mukomuko guna penerbitan SE pengendalian AMR karena keterbatasan anggaran	mengirimkan surat dan draft SE ke bupati Mukomuko dalam rangka penerbitan SE AMR	Mengirimkan surat dan draft SE pengendalian AMR ke bupati Mukomuko	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
14	14.Persentase IPemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	Kurangnya kompetensi personil terkait perkembangan Metode sesuai pedoman sampling baru yang juga belum diverifikasi yaitu identifikasi steroid dalam kosmetik dan Tropikamide dalam tetes mata	Melakukan pelatihan secara in House dengan mengundang narasumber PPPOMN : identifikasi steroid dalam kosmetik dan Tropikamide dalam tetes mata	Pelaksanaan In House training Verifikasi Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT Verifikasi Metode Tropikamida dalam sediaan tetes mata secara KCKT pada bulan Juli 2025	Selesai			Y	S-06	Jumlah MA yang terverifikasi masih rendah (17 %) dari target yang ditetapkan
		Salah satu pemenuhan nilai SKL yaitu Persentase Metode Terverifikasi dengan baseline yang masih sangat rendah sekitar 21 %	1.Membuat program verifikasi metode untuk seluruh pengujian 2. Melakukan verifikasi metode sekaligus mengerjakan sampel rutin khususnya untuk sampel yang pengerjaannya sederhana 3. Mengadakan Pelatihan (Inhouse training) khususnya terkait Verifikasi Metode Pengujian	Pelaksanaan verifikasi metode hingga triwulan IV tahun 2025 terealisasi : NAPPZA : 11; OBA SKK : 3; Kosmetik : 8; Pangan : 10; Mikrobiologi : 6	Selesai			Y	S-06	Jumlah MA yang terverifikasi masih rendah (17 %) dari target yang ditetapkan
15	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tergolong baru ditetapkan pada triwulan III tahun 2025, sehingga belum ada catatan isian tools pada	Advokasi ke Pemerintah Kota Bengkulu melibatkan Dinas DPMPSTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu.	Advokasi ke Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 12 September 2025 Yang dihadiri oleh Dinas DPMPSTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu. Dalam kegiatan advokasi ini disampaikan manfaat dari	Selesai	-		T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Kabupaten/Kota yang akan didampingi termasuk kab/kota mana yang tergolong siap		penilaian mandiri dan melihat komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.						
		Isian Tools pendampingan Kota Bengkulu belum dipahami OPD Dinas Perikanan sehingga belum terdapat data dukung yang memadai	Dilakukan pendampingan ke Dinas perikanan dalam pengisian tools dan penyiapan data dukung	Pendampingan ke Dinas Perikanan pada tanggal 23 September 2025 dalam hal pengisian tools dan penyiapan dakung : - Program terlatih PSAI - Pembinaan dan monitoring pangan segar perikanan	Selesai			T		
		Nilai sementara pasca advokasi lintas sektor Tools pemenuhan Kab/Kota pangan aman masih rendah sebesar 41	Pendampingan secara intensif terhadap OPD Dinas DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu.	Pendampingan secara intensif kepada OPD di Kota Bengkulu: Dinas DPMPTSP (24 Sept 2025), Dinas Kesehatan (9 Sept 2025), Dinas Perikanan (23 Sept 2025), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu (29 September 2025) serta Bappeda Kota Bengkulu (25 September 2025).	Selesai			T		

Sasaran Strategis 2 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Tabel 3.12 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	01. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kebijakan pemblokiran anggaran, sehingga saat itu hanya tersisa anggaran untuk pemeriksaan satu sarana. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi di Provinsi Bengkulu ada 8 sarana, akan tetapi target di POK hanya 3 Sarana sehingga mengakibatkan tidak akan tercapai pada akhir tahun .	Melakukan penyusunan renlak pemeriksaan sarana fortifikasi untuk triwulan berikutnya	Menyusun renlak pelaksanaan pemeriksaan di triwulan berikutnya Melakukan konsultasi ditwas produksi untuk penambahan target sarana	Selesai			T		
		Capaian sarana fortifikasi yang telah melakukan perbaikan (CAPA) baru 1 dari 2. Sudah dievaluasi PT Agromega (Close), PUSKUD belum mengirim CAPA	Menagih CAPA pelaku usaha	Menagih CAPA pelaku usaha PT PUSKUD Garam Melakukan evaluasi CAPA PT PUSKUD	Selesai			Y	F-01	Kepatuhan pelaku Usaha terhadap Pemenuhan aspek CPPOB masih rendah
		Terdapat kekurangan target 1 sarana fortifikasi yang belum diperiksa	Melakukan pemeriksaan sarana fortifikasi garam KAEM	Pemeriksaan sarana produksi Pangan fortifikasi Garam Kaem di Kota Bengkulu pada bulan September 2025	Selesai			Y	F-01	Kepatuhan pelaku Usaha terhadap Pemenuhan aspek CPPOB masih rendah

Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Tabel 3.13 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1.	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kesibukan Tokoh Masyarakat Ibu HJ Eko Kurnia Ningsih, menyebabkan penentuan waktu pelaksanaan KIE TOMAS sulit dilakukan	Koordinasi dengan tim ahli Tokoh masyarakat Pembentukan Tim panitia KIE Tomas sekaligus penjadwalan KIE perdana	Sosialisasi KIE Bersama Bu Hj. Eko Kurnia Ningsih Anggota DPR RI tentang BPOM dan Keamanan Produk kepada Masyarakat Desa Bumi Harjo dan Desa Sumber Mulia Bengkulu Utara, 24 Mei 2025, 800 peserta	Selesai			Y	S-07	Jumlah responden yang ditarget utk pengisian survei Efektifitas KIE tidak tercapai
		Dari target 2000 peserta, KIE Tomas baru terealisasi 800 peserta di tengah kesibukan Tokoh masyarakat	Penjadwalan KIE Tomas selanjutnya dengan Ibu HJ Eko Kurnia N	KIE Tomas 20 Agustus 2025 di Desa Karang Tengah (Gedung Seni dan Budaya) dan 21 Agustus 2025 di Desa Air Pandan (Balai Pertemuan Desa). 800 peserta	Selesai			Y	S-07	Jumlah responden yang ditarget utk pengisian survei Efektifitas KIE tidak tercapai
		Triwulan I tahun 2025, didapatkan nilai eff KIE secara tatap muka sebesar 98,38, dan eff KIE melalui media sebesar 97,90 (Kategori sangat efektif)	Dilakukan standarisasi materi KIE dengan bahasa yang ringkas sederhana, agar mudah dipahami oleh audiens yang beragam ditunjukkan dengan keberhasilan jumlah dan kualitas (materi dimengerti) isian responden	Pelaksanaan KIE dan survei evaluasi TW II telah dilakukan dengan total responden sebanyak 793	Selesai			Y	S-07	Jumlah responden yang ditarget utk pengisian survei Efektifitas KIE tidak tercapai

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Tingkat efektivitas KIE Triwulan II tahun 2025, indeks final 94,11 (efektif) dengan rincian KIE tatap muka (90,32) dan KIE melalui media (97,89), dengan isu pemahaman 89,36 dan manfaat 87,98 (tatap muka)	Melakukan metode tatap muka lebih interaktif (diskusi/studi kasus), materi yang lebih visual dan integrasi pesan antara media dan tatap muka	Pelaksanaan KIE dan survei Evaluasi TW III sudah berjalan dengan total responden 1.765	Selesai			T	S-07	Jumlah responden yang ditarget utk pengisian survei Efektifitas KIE tidak tercapai
		Tingkat efektivitas KIE Triwulan III Tahun 2025 pada Target perbaikan pemahaman/manfaat tatap muka belum tercapai, didapatkan nilai indeks 92,22, dimana nilai efektivitas KIE tatap muka sebesar 87,67 (pemahaman 85,37, manfaat 84,32), dan nilai efektivitas KIE melalui media sebesar 96,76	dilakukan perbaikan antarlain penyederhanaan materi dan dilakukan evaluasi lanjutan dampak/manfaat	survei tingkat efektivitas KIE sampai dengan TW IV 2025 telah selesai dilakukan dengan total responden sebanyak 2.188	Selesai			T	S-07	Jumlah responden yang ditarget utk pengisian survei Efektifitas KIE tidak tercapai

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
2	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Adanya pemotongan anggaran yang sangat signifikan dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan intervensi sekolah pembudayaan keamanan pangan yang semula ditargetkan di Kab Kaur tidak dapat terlaksana disebabkan waktu tempuh yang jauh.	Penyesuaian target intervensi sekolah pembudayaan keamanan pangan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Penyesuaian target dari semula Kab Kaur menjadi Seluma Penetapan target sekolah yang diintervensi : 2 SMP dan 9 SD yaitu : SD Negeri 88 Seluma, SD Negeri 04 Seluma, SD Negeri 158 Seluma, SD Negeri 83 Seluma, SD Negeri 81 Seluma, SD Negeri 55 Seluma, SD Negeri 66 Seluma, SD Negeri 140 Seluma, dan SD Negeri 43 Seluma sementara ada 2 tingkat SLTP yaitu SMP Negeri 23 Seluma, SMP Negeri 17 Seluma,	Selesai	-		Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2025 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu
		Hingga Triwulan I tahun 2025, belum dilakukan tahapan awal pelaksanaan pembudayaan sekolah keamanan pangan disebabkan efisiensi anggaran yang akan direlaksasi pada April 2025	Perencanaan persiapan tahap awal pembudayaan sekolah berupa pertemuan advokasi lintas sektor dengan pemda seluma	pertemuan advokasi lintas sektor dengan pemda seluma, realisasi April 2025	Selesai			Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2025 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Anggaran sosialisasi keamanan pangan dan Bimtek kader kurang memadai untuk dilakukan ke 11 sekolah yang ditetapkan untuk diintervensi	Sosialisasi keamanan pangan ke 11 sekolah dan Bimtek Kader di Selama dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi / zoom	Sosialisasi keamanan pangan dan Bimtek Kader ke 11 Sekolah secara Hybrid di Kab. Selama dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimtek Kader (Mei 2025)	Selesai			Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2025 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu
		Belum dilaksanakan pengawalan yang memadai terhadap sekolah yang diintervensi tahun 2024 di Kab Rejang Lebong	pengawalan sekolah di Kab. Rejang Lebong sudah dilakukan dengan menggunakan subsidi silang anggaran	pengawalan sekolah di Kab. Rejang Lebong sudah dilakukan dengan menggunakan subsidi silang anggaran	Selesai			Y	O-07	Program prioritas nasional Desa, pasar, sekolah yang sudah diintervensi (2024) tidak berkelanjutan
		Belum dilaksanakan pengawalan yang memadai terhadap sekolah yang diintervensi tahun 2024 di Kota Bengkulu	pengawalan sekolah di Kota Bengkulu	pengawalan sekolah intervensi Kota Bengkulu (September 2025)	Selesai			Y	O-07	Program prioritas nasional Desa, pasar, sekolah yang sudah diintervensi (2024) tidak berkelanjutan
		Hingga triwulan III Tahun 2025, belum dilakukan Monev Kader keamanan pangan terhadap sekolah intervensi 2025	Monev Kader keamanan pangan terhadap sekolah intervensi 2025	Monev Kader keamanan pangan terhadap sekolah intervensi 2025 (Oktober 2025)	Selesai			Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2025 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Hingga triwulan III Tahun 2025, belum dilakukan Sertifikasi Sekolah Intervensi PJAS Tahun 2025	Sertifikasi Sekolah Intervensi PJAS Tahun 2025.	Sertifikasi Sekolah Intervensi PJAS Tahun 2025 (November 2025)	Selesai			Y	S-08	Tidak tercapainya target 100% tahapan PN-PJAS aman disekolah yang diintervensi Tahun 2025 yang akan mempengaruhi kinerja BPOM Bengkulu
3	03 - Jumlah desa pangan aman	Penetapan target desa intervensi tahun 2025 sebanyak 3 desa yang awalnya direncanakan di kabupaten Kaur tidak dapat terlaksana disebabkan efisiensi anggaran	Usulan dilakukan kesepakatan bersama tim PMPUPO agar jumlah target desa yang diintervensi menjadi hanya 1 desa intervensi dan dilakukan di Kabupaten Seluma, dan apabila terjadi pembukaan dana blokir akan dilakukan intervensi tambahan 2 desa lainnya di tahap 2 mulai Juli - desember 2025	Pelaksanaan intervensi Desa Pangan aman pada Desa Purbosari, Seluma	Selesai			Y	O-07	Program prioritas nasional Desa, pasar, sekolah yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan
		Juklak pelaksanaan desa pangan aman baru turun pada bulan April 2025 sehingga pelaksanaan Desa Pangan Aman belum dapat berjalan pada triwulan I tahun 2025	Melakukan tahap awal kegiatan desa pangan aman berupa advokasi GKPD segera setelah juklak terbit	Telah dilaksanakan tahap awal berupa kegiatan advokasi Gerakan keamanan Pangan Desa bulan April 2025	Selesai			Y	O-07	Program prioritas nasional Desa, pasar, sekolah yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Belum dilaksanakan tahapan ke-2 dan 3 GKPD berupa pelatihan kader dan bimtek komunitas	Melakukan Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas	Telah dilaksanakan pelatihan kader, bimtek komunitas dan pengawalan di Bulan Mei 2025	Selesai			T		
		Kurangnya anggaran berkenaan dengan target semula 3 desa yang diintervensi bilamana terdapat buka blokir anggaran	1. Melaporkan ke Kepala Balai atas kekurangan anggaran GKPD. 2. Melakukan perhitungan atas kekurangan biaya 3. Melakukan penyisiran anggaran terhadap KRO lainnya, untuk dilakukan revisi anggaran lisntas KRO	Sudah dilakukan rapat pembahasan kekurangan anggaran pada tanggal 8 Oktober, dengan sisa anggaran yang masih ada pada KRO AEA.001	Selesai			T		
		Balai POM di Bengkulu sesuai Nodin Nomor nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 belum dapat merevisi target RO serta kondisi anggaran masih dalam status Blokir, sementara dengan anggaran yang ada hanya terealisasi 1 desa	Mengusulkan penyesuaian jumlah target desa yang diintervensi menjadi hanya 1 desa intervensi dan dilakukan di Kabupaten Seluma.	Mengirim surat kepada Direktur PMPUPO dan Kepala Roren BPOM Nomor : B-HM.03.01.2B.01.26.34 Tanggal 09 Januari 2026 perihal perubahan target desa pangan aman tahun 2025 dan untuk mendorong dukungan kebijakan serta penguatan sumber daya, agar perluasan intervensi Desa Pangan Aman pada periode berikutnya dapat dipenuhi secara lebih realistis dan berkelanjutan. Akan tetapi didapatkan	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
				jawaban bahwa untuk kegiatan Pro PN tidak ada terjadi penurunan target.						
4	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	penetapan target pasar yang akan diintervensi program PPABK sebanyak 1 pasar belum ditetapkan sesuai juknis	Penetapan Pasar yang akan diintervensi terintegrasi dengan program GKPD dan PJAS	Penetapan Pasar yang akan diintervensi terintegrasi dengan program GKPD dan PJAS (Realisasi : Pasar Purbosari, Kab Seluma)	Selesai			Y	O-08	Program prioritas nasional pasar pangan aman berbasis komunitas yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan
		Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) belum berjalan disebabkan JUKLAK belum terbit	Berkoordinasi dengan Badan POM dan memulai perencanaan giat PPABK Melakukan langkah awal tahap PPABK	Menyusun perencanaan kegiatan advokasi kegiatan Pro PN (PJAS, pasar Aman dari BB, dan Gerakan Keamanan Pangan Desa) Telah dilakukan giat awal berupa advokasi PPABK pada bulan April 2025	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress (Jika status tidak selesai)	Tim eline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Realisasi indikator kinerja masih tergolong rendah 25% dengan baru dilakukannya advokasi PPABK	Melakukan tahapan kegiatan PPABK selanjutnya berupa: 1. Bimtek penyuluhan komunitas pasar, 2. Sosialisasi KP, 3. Pengawasan pangan dan monitoring	Melakukan tahapan kegiatan PPABK berupa: 1. Bimtek penyuluhan komunitas pasar, 2. Sosialisasi KP, 3. Pengawasan pangan dan monitoring	Selesai			Y	O-08	Program prioritas nasional pasar pangan aman berbasis komunitas yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan
		Belum dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi PPABK	Melakukan tahap akhir PPABK berupa Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi PPABK	Melakukan tahap akhir giat PPABK berupa Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi PPABK	Selesai			Y	O-08	Program prioritas nasional pasar pangan aman berbasis komunitas yang sudah diintervensi tidak berkelanjutan
		Dengan telah sepenuhnya PPABK terlaksana dengan target 1 pasar, diperoleh capaian kinerja bulan berjalan terlalu tinggi 133,3% tidak dapat disimpulkan	Melakukan penyesuaian target pada bulan-bulan berikutnya	Revisi target bulan berjalan menjadi: Agustus 2025 : 100% September 2025 : 100% Oktober 2025 : 100% November 2025 : 100%	Selesai			T		

Sasaran Strategis 4 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 3.14 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress	Timelime	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1.	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Belum tersedia target yang ditetapkan terkait pendampingan UMKM Pangan olahan, OBA dan kosmetik	Menentukan target pendampingan dalam dokumen surat keputusan Kepala Balai POM	Pembuatan SK Kepala Balai POM di Bengkulu tentang target pendampingan Sarana UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan, Pelaksanaan Bimtek, Pendampingan dan Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi				T		
		Belum terdapat data UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan yang memiliki minat untuk mendaftarkan produknya dengan izin BPOM	Melakukan pemetaan dan penjarangan data UMKM Pangan olahan, Kosmetik dan OBA	Dilakukan pemetaan dan penjarangan UMKM Pangan Olahan, UMKM OBA dan Kosmetik yang berkeinginan mendaftarkan produknya dan mendapatkan NIE melalui koordinasi dengan lintas sektor dan melihat data sebelumnya				Y	S-11	Pelaku usaha terkendala dalam memenuhi persyaratan pemenuhan standar produksi
		Hingga triwulan I tahun 2025, baru terealisasi 2 UMKM Pangan Olahan yang memperoleh sertifikat IP CPPOB	1. Komunikasi intensif dengan pelaku usaha agar segera menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan 2. Mengajukan pendampingan kepada unit Pusat untuk bersama - sama melakukan pendampingan	Melakukan Sosialisasi KIE Keamanan Pangan dan Bimbingan teknis CPPOB pada bulan Mei 2025				Y	S-11	Pelaku usaha terkendala dalam memenuhi persyaratan pemenuhan standar produksi

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress	Timeli ne	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Kegiatan pendampingan baru sebatas dilakukan terhadap UMKM produksi pangan olahan	Melakukan pendampingan terhadap UMKM produksi OBA dan kosmetika	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator serta dilanjutkan Sertifikasi UMKM Kosmetika dilakukan lebih cepat dari target terealisasi pada bulan Juni 2025				Y	S-11	Pelaku usaha terkendala dalam memenuhi persyaratan pemenuhan standar produksi
		Capaian kinerja terhadap bulan berjalan diperoleh hasil jauh melebihi 120% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. Proyeksi pada bulan berikutnya tidak jauh berbeda. Realisasi agustus 2025 : 74,64%, capaian kinerja bulan berjalan : 114,8% ; capaian tahun 2025 : 528,6%	Melakukan penyesuaian target bulan Agustus - November 2025	Penyesuaian target bulan berjalan menjadi: Agustus : 65% September : 66% Oktober : 70% November 78%				T		
		Dari komponen pencapaian indikator, realisasi terendah pada pendampingan UMKM Kosmetik (90%)	Melakukan monitoring dan pelaporan pendampingan UMKM Kosmetik	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendampingan UMKM Kosmetik periode September - Desember 2025				Y	S-11	Pelaku usaha terkendala dalam memenuhi persyaratan pemenuhan standar produksi

Sasaran Strategis 5 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Tabel 3.15 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1.	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilakukan penindakan terhadap Sdr EW tanggal 23 April 2025, namun pada prosesnya tidak melibatkan pihak lingkungan yang berpotensi pada kelengkapan berkas penyidikan	1. Mengadakan Gelar kasus dan Gelar perkara untuk menentukan apakah ksus bisa diangkat ketahap projusticia, dengan meminta tanggapan Korwas PPNS, pimpinan penyidik, dan seluruh staf Penindakan BPOM Bengkulu, 2. Mempercepat proses penyidikan, menyiapkan SPDP ke Korwas Polda dan Kejaksaan Tinggi serta melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya segera penyerahan berkas perkara	1. Melaksnakan Gelar kasus dan Gelar Perkara untuk melihat kecukupan alat bukti untuk di tindak lanjuti ketahap penyidikan. 2. Melakukan kooordinasi dengan JPU terkait pemberkasan Perkara dan penyerahan berkas perkara (Tahap I) tanggal 14 Mei 2025	Selesai			Y	H-01	Terjadi proses Praperadilan terhadap penyidik BPOM Bengkulu dalam penanganan Perkara (kewenangan upaya paksa, penetapan TSK, tangkap tahan, penggeledahan)
		Pada operasi penindakan bulan Januari 2025, terdapat intervensi dari aparat penegak hukum yang berupaya agar hasil kegiatan tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan	Melakukan koordinasi dengan pimpinan tinggi di Kepolisian Daerah Bengkulu guna perlindungan atas risiko intervensi dari APH	Telah dilakukan koordinasi secara langsung ke WAKALPOLDA Bengkulu, Brigjen Pol Dicky Sondani SIK, MH tanggal 5 Agustus 2025	Selesai			Y	O-08	Intervensi dari pihak lain yang memiliki kekuatan terhadap Kasus dan Perkara yang sedang di tangani menyebabkan rencana penyidikan berjalan tidak Optimal

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progress	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Terdapat kekurangan kelengkapan berkas perkara tersangka EW berdasarkan P-19 Jaksa yang belum dapat dilengkapi	Melakukan perbaikan berkas perkara sesuai arahan jaksa seperti BAP ke-2 tersangka, dll pada triwulan III tahun 2025	Melakukan perbaikan berkas perkara tersangka EW sesuai arahan jaksa dan mengirimkan berkas perkara perbaikan ke Kejati	Selesai			T		
		Terdapat 3 Perkara CarryOver dari Tahun 2013, 2018 dan 2022 dengan ditetapkannya DPO dan belum SP3 yang akan mempengaruhi Kinerja Penindakan BPOM di Bengkulu	Melakukan kajian bersama Direktorat penyidikan BPOM perihal kemungkinan perkara dapat dihentikan Dalam hal disetujui, perlu diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	Telah dilakukan SP3 atas perkara IS Bin Y bulan April 2025 (tidak cukup bukti) Telah dilakukan SP3 atas perkara A Bin Z bulan Oktober 2025, disebabkan perkara Kedaluwarsa	Selesai			Y	S-12	Terdapat 3 Perkara CarryOver dari Tahun 2013, 2018 dan 2022 dengan ditetapkannya DPO dan belum SP3 yang akan mempengaruhi Kinerja Penindakan BPOM di Bengkulu
		Terdapat kekurangan kelengkapan formil dan materiil berkas perkara tersangka RW yang sudah diserahkan (Tahap 1 tanggal 14 Juli 2025) berdasarkan P-19 Jaksa	Melakukan perbaikan berkas perkara sesuai arahan jaksa seperti BAP ke-2 tersangka, dll	Melakukan perbaikan berkas perkara tersangka RW sesuai arahan jaksa dan mengirimkan berkas perkara perbaikan ke Kejati tanggal 4 Agustus 2025 sesuai Surat Nomor R-PD.03.03.2B.08.25.743 melampirkan jawaban atas P-19	Selesai			T		

Sasaran Strategis 6 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Tabel 3.16 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana aksi yang sudah selesai	Status	Progress	Timelime	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pada tahun 2025, terjadi pengurangan alokasi anggaran utk KRO AEA cukup besar yaitu sebesar 80 %, sementara untuk target tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 14 laporan. Hal ini berimplikasi terhadap Pelaksanaan Verifikasi Akun untuk tindak lanjut profiling akun siber, pengumpulan bahan keterangan untuk laporan analisis, koordinasi dengan Criminal Justice System dan pada kegiatan penggalangan Stakeholder untuk Cegah Tangkal kejahatan Obat dan makanan pada tahun 2025.	Melakukan pelaporan dengan target 14 Laporan sesuai arahan dan rincian dari pusat meliputi : 1. Laporan analisis (1) 2. Laporan Cegah tangkal (1) 3. Laporan bulanan Patroli siber (12)	Telah terlaksana dan sudah melaporkan capaian output hingga bulan Desember 2025 sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 1 laporan Rekomendasi TL Cegah tangkal dan 1 laporan analisis. Disamping itu BPOM Bengkulu juga secara rutin melaporkan tiap bulannya laporan profiling melalui aplikasi ADP dan laporan Patroli Siber melalui aplikasi Crawler.	Selesai			T		

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana aksi yang sudah selesai	Status	Progress	Timelime	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		OOT Dextromethorphan yang ditemukan saat pengawasan di jasa pengiriman masih sering ditemukan dan jumlah pengedar yang teridentifikasi cenderung meningkat	Melakukan koordinasi dengan pihak marketplace dalam upaya cegah tangkal dan percepatan permintaan informasi data yang diperlukan	Telah dilakukan koordinasi secara zoom dengan perwakilan pimpinan Shopee dan jasa pengiriman SPX tanggal 31 Oktober 2025 perihal Tindak lanjut peredaran OOT mengandung DMP di Provinsi Bengkulu	Selesai			Y	S-13	Peredaran OOT Dextrometorfan Kombinasi melalui jalur online Ke Bengkulu sangat tinggi menyebabkan angka kerawanan kejahatan penyalahgunaan OOT DMP Kombinasi di Bengkulu meningkat dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir.
		Tingginya pengiriman OOT Dextromethorphan juga disebabkan oleh dalam peraturan terkait pengawasan daring, OOT DMP belum termasuk ke dalam daftar obat yang dilarang atau minimal dibatasi	Melakukan usulan reviu kepada Deputi I BPOM untuk mempertimbangkan memasukkan sediaan farmasi obat mengandung Dextromethorphan ke dalam daftar sediaan farmasi yang dilarang atau diatur secara ketat diedarkan secara daring	Telah disampaikan surat resmi Nomor T-PD.01.02.2B.07.25.686 tanggal 23 Juli 2025 perihal Permohonan reviu Regulasi terkait Peredaran Obat-Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan (OOT) mengandung Dextromethorphan	Selesai			Y	S-13	Peredaran OOT Dextrometorfan Kombinasi melalui jalur online Ke Bengkulu sangat tinggi menyebabkan angka kerawanan kejahatan penyalahgunaan OOT DMP Kombinasi di Bengkulu meningkat dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir.

Sasaran Strategis 7 - LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Tabel 3.17 – Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi sebelumnya pada Sasaran Strategis LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	terdapat target nilai UPP sebesar 4.7, dimana hasil PEKPP 2025 : indeks pelayanan publik 4.82/A (pelayanan prima)	Dilakukan kegiatan UPP yang meliputi aspek: 1. kebijakan pelayanan : dilakukan pengembangan layanan dan monev, hasil FKP dimasukkan ke standar, persiapan layanan SKI dan SKE (kompetensi dan akun e-BPOM), perbaikan format laporan FKP serta penambahan hasil tindak lanjut tahun sebelumnya, pemisahan maklumat dan standar pelayanan sesuai alur PP 96/2012. 2. Profesionalisme SDM : belum terdapat layanan 24 jam 3. Sistem informasi : lakukan integrasi sistem informasi dengan SIPPN, lakukan pemutakhiran informasi layanan setiap saat dan dilakukan pemutakhiran harian berita internal subsite 4. Konsultasi dan pengaduan : buat laporan singkat permintaan informasi dan pengaduan secara keseluruhan	Telah dilakukan penetapan maklumat, pengembangan SDM. peningkatan sarana prasarana dan peningkatan inovasi pelayanan publik, serta pemutakhiran berita internal setiap hari kerja	Selesai	pengembangan standar pelayanan publik menjadi 9 jenis layanan (Belum terdapat layanan SKI SKE), integrasi SIPPN, laporan pengaduan menyeluruh dan rencana inovasi terukur			O-09	Masih terdapat kelemahan pada aspek kebijakan pelayanan dan konsultasi pengaduan yang mempengaruhi pencapaian nilai Pelayanan Publik (2024 : 4,93 dari nilai mutlak 5)

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Belum dilakukan evaluasi yang memadai atas kinerja pelayanan publik tahun 2024 dan on going 2025 triwulan I	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dijadwalkan maksimal Triwulan II 2025 (Juni 2025) menghadirkan pemangku kepentingan pengguna layanan	Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan pada Kamis, 8 Mei 2025, bertempat di Aula Rafflesia Balai POM di Bengkulu, dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri dari unsur penyelenggara layanan, pengguna layanan (Polres Kota Bengkulu, Dir Narkoba Polda Bengkulu, BNN Kota Bengkulu), akademisi (UNIB, Poltekkes Kemenkes), OPD terkait (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, Disperindag, DPMPSTSP, Diskominfo), Ombudsman Perwakilan Bengkulu, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta media massa	Selesai			Y	O-09	Masih terdapat kelemahan pada aspek kebijakan pelayanan dan konsultasi pengaduan yang mempengaruhi pencapaian nilai Pelayanan Publik (2024 : 4,93 dari nilai mutlak 5)
		Terdapat rumusah hasil evaluasi pelayanan publik berdasarkan FKP yang belum ditindaklanjuti	Pelaksanaan TL hasil FKP berupa inovasi Ruang Tamu Virtual untuk konsultasi UMKM, permintaan informasi, dan pengaduan masyarakat;	Peluncuran inovasi Ruang Tamu Virtual untuk konsultasi UMKM, permintaan informasi, dan pengaduan masyarakat (Mei 2025)	Selesai			Y	O-09	Masih terdapat kelemahan pada aspek kebijakan pelayanan dan konsultasi pengaduan yang mempengaruhi pencapaian nilai Pelayanan Publik (2024 : 4,93 dari nilai mutlak 5)

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	terdapat target nilai pembangunan ZI senilai 90,72	fokus pada penguatan kualitas implementasi, konsistensi bukti, monev dan pengendalian risiko penurunan nilai,	Rencana kerja setiap pokja telah terlaksana				Y	S-14	Rencana kerja Pembangunan ZI tidak dilakukan berkelanjutan.
		Pelaksanaan audit oleh auditor internal baru sebatas kegiatan operasional	Melaksanakan audit keuangan oleh auditor internal	Pelaksanaan inovasi SIGAP berupa audit pertanggungjawaban keuangan oleh auditor internal pada bulan Maret 2025				T		
		Pengelolaan barang temuan yang semakin tinggi dengan adanya intensifikasi pengawasan DMP di jasa pengiriman menjadikan risiko kesalahan pencatatan dan penyimpanan	Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengelola barang temuan dan barang bukti	Launching dan implementasi aplikasi SIBAKTI, sistem pengelolaan barang bukti pada bulan Maret 2025				T		
		Pelaksanaan monitoring evaluasi realisasi rencana kerja POKJA ZI dilakukan setiap 3 bulan yang menyebabkan evaluasi belum cukup optimal dalam mendeteksi adanya kegiatan yang belum berjalan	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi program kerja pokja ZI setiap bulan				Y	S-14	Rencana kerja Pembangunan ZI tidak dilakukan berkelanjutan.

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres s	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		Terdapat perubahan / rotasi pegawai yang membuat pakta integritas perlu diperbaharui serta mempertimbangkan kondisi kebutuhan kebijakan ZI terkini seperti risiko penggunaan medsos	Menyusun dan menandatangani pakta integritas yang memuat : - Pro aktif mencegah KKN - Tidak meminta bantuan, suap, hadiah dll - Bersikap transparan, jujur, objektif - menghindari benturan kepentingan - menggunakan media sosial dengan bijak - dll	Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai Balai POM di Bengkulu (ASN, PPPK) serta tenaga pendukung (outsourcing) pada bulan Januari 2025				Y	S-14	Rencana kerja Pembangunan ZI tidak dilakukan berkelanjutan.
		Terdapat perubahan Kepala Balai POM dari Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt menjadi Kodon Tarigan, S.Si , Apt per September 2025 yang belum diperbaharui pakta integritasnya	Penyusunan dan penandatanganan pakta integritas oleh Kepala Balai POM yang baru	Penandatanganan pakta integritas Kepala Balai POM di Bengkulu a.n Kodon Tarigan, S.Si, Apt				Y	S-14	Rencana kerja Pembangunan ZI tidak dilakukan berkelanjutan.
		Belum dilakukan sosialisasi komitmen pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu yang memadai kepada pemangku kepentingan	Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan perihal komitmen pembangunan ZI	Sosialisasi komitmen pembangunan ZI kepada stakeholder : 1. Bimtek OSS RBA Juni 2025 di Bengkulu Utara 2. Bimtek CPPOB Bulan April 2025 3. Pelatihan Inkubasi bagi UMKM di Bengkulu Utara, Juli 2025 4. Bimtek AMR di Kota Bengkulu, September 2025 5. Kegiatan Sosialisasi CDOB, Desember 2025				Y	S-14	Rencana kerja Pembangunan ZI tidak dilakukan berkelanjutan.

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres s	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
				https://tinyurl.com/sosialisasiZistakeholder						
2	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Dengan berakhirnya periode Renstra 2019-2024, belum ada renstra Balai POM di Bengkulu selanjutnya sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan	Penetapan Tim Renstra dan penyusunan Renstra BPOM Bengkulu 2025-2029	Terbitnya SK Tim Renstra Nomor Tanggal Penyusunan Renstra BPOM Bengkulu 2025-2029 yang kemudian disahkan pada bulan Desember 2025		-		Y	O-14	Rendahnya Nilai komponen pelaporan kinerja pada LHE SAKIP 2024
		Terdapat beberapa indikator kinerja baru yang belum termuat dalam PK Kepala Balai POM tahun 2025 (terbit 12 Februari 2025)	Melakukan Revisi PK Kepala Balai POM di Bengkulu tahun 2025, sebagaimana Nodin sestama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Perminataan Revisi PK dan RAPK	Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai POM di Bengkulu, tanggal 29 Agustus 2025	Selesai			Y	O-14	Rendahnya Nilai komponen pelaporan kinerja pada LHE SAKIP 2024
		Belum seluruh personil mengetahui dan memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Perintah dalam Nota dinas mengikuti pelatihan SAKIP pada IDEAS bagi seluruh pegawai Balai POM di Bengkulu	Seluruh pegawai mengikuti pelatihan SAKIP pada IDEAS sesuai Nodin Nomor PB.02.01.2B.03.25.06 tgl 24 Maret 2025, pada rentang bulan April-Mei 2025 dan mengunggah sertifikat pelatihan pada link https://drive.google.com/drive/folders/1kZLwJ949zRPNG	Selesai			T		

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres s	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
				UcLAmsJSnBZupSdmsJD						
3	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 menyebabkan banyak anggaran dihilangkan/blokir dan membuat banyak kegiatan tidak dapat terlaksana	Pelaksanaan efisiensi anggaran melalui: a. Penghematan penggunaan listrik b. Pengurangan perjalanan dinas c. Pembatalan kontrak pengadaan alat	a. Penghematan listrik signifikan di kantor BPOM Jl Batanghari diikuti migrasi pegawai untuk berkantor ke kantor Jl DP Negara b. Pengurangan/penundaan perjalanan dinas dan pemanfaatan teknologi informasi pada pengawasan c. Pembatalan kontrak pengadaan alat Lab	Selesai			Y	K-01	Penyerapan Realisasi Anggaran tidak maksimal
		Pagu anggaran sebagian besar telah kembali/turun dan dapat dipergunakan karena buka blokir yang dilakukan pada bulan April 2025	Melakukan percepatan pengadaan alat Laboratorium yang memiliki nilai realisasi sangat tinggi	Percepatan pengadaan alat lab yang akan berkontribusi pada pembayaran (realisasi anggaran): a. Fume Hood (lemari asam) dan Polarimeter, senilai Rp. 537.083.000, bulan Mei 2025 b. HPLC senilai Rp. 1.690.458.640, bulan Juni 2025				Y	K-01	Penyerapan Realisasi Anggaran tidak maksimal
		Persen deviasi belanja Modal (53) bulan Juli 2025 sangat besar (24,91%) dan berkontribusi banyak pada penurunan Nilai	Monitoring dan evaluasi kembali kesesuaian perencanaan anggaran dan penyerapannya	Melakukan perbaikan perencanaan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan berlangsung				Y	K-01	Penyerapan Realisasi Anggaran tidak maksimal

	Indikator	Kendala / Kondisi Permasalahan Tw sebelumnya	Rekomendasi Tw sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Tw sebelumnya	Status	Progres s	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko? (Y/T)	Kode risiko	Peristiwa Risiko
		IKPA Balai POM di Bengkulu bulan Juli sebesar 94,62% dari bulan Juni sebesar 100%								
4	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Terdapat Gap 0,4 poin pada pencapaian target tahun 2025 (3,25) jika dibandingkan dengan capai tahun 2024 (2,817).	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan baseline capaian pada tahun 2024, dari 3,25 menjadi 2,88	Telah dilakukan penyesuaian target pada bulan Juni 2025	Selesai			Y	S-15	Terdapat gap sebesar 0,4 poin untuk pencapaian target Nilai Maturitas Manrisk pada tahun 2025 (target 3.25)
		Belum sepenuhnya seluruh pegawai memiliki pemahaman yang setara perihal manajemen risiko serta kurangnya update manrisk terkini	Melakukan Bimtek resosialisasi implementasi manajemen risiko	Pelaksanaan Bimtek Penguatan Implementasi Maturitas Manajemen Risiko melalui Bimtek oleh Inspektorat I tanggal 15 Januari 2025 secara daring	Selesai			T		
		Belum dilakukan pengumpulan data dukung untuk uji pengendalian identifikasi risiko semester 1 tahun 2025 yang telah disusun	Pengumpulan data dukung pengujian aktivitas pengendalian dan dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi uji pengendalian	Dilakukan pengujian aktivitas pengendalian terhadap 11 risiko oleh auditor internal pada bulan September 2025	Selesai			T		
		Belum dilakukan pemantauan atas 2 risiko yang memerlukan tindakan mitigasi yaitu risiko pengujian sampel KLB dan peredaran DMP yang tinggi di Propinsi Bengkulu	Melakukan Pemantauan / reuiu tindakan mitigasi oleh auditor internal	Pemantauan / reuiu tindakan mitigasi oleh auditor pada bulan Juli 2025 dengan hasil simpulan efektif	Selesai			T		

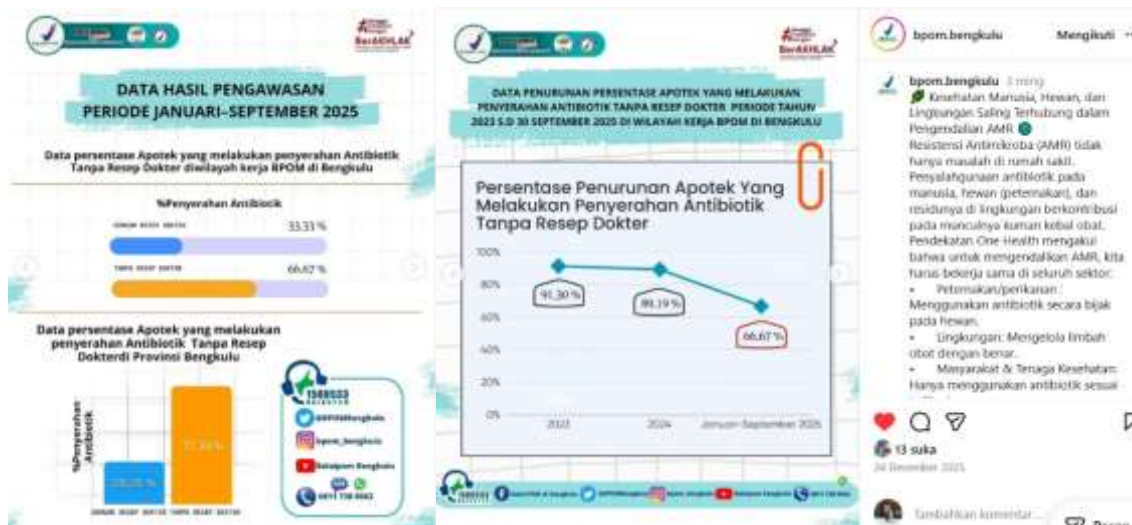
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Atas rekomendasi evaluasi implementasi SAKIP tahun 2024 secara menyeluruh digunakan sebagai pondasi penyempurnaan perbaikan kinerja tahun 2025. Hal ini tergambar dari telah terlaksananya tindak lanjut secara keseluruhan atas rekomendasi dimaksud.

Penggunaan hasil pengukuran, trend data capaian kinerja, dan analisis yang lahir dari pelaksanaan monitoring & evaluasi berkala yang termuat pada laporan kinerja interim maupun laporan kinerja tahunan disajikan dalam pembahasan masing-masing indikator kinerja dan secara ringkas telah dimanfaatkan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hingga triwulan II tahun 2025, dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan melalui pertimbangan atau reviu pencapaian kinerja selanjutnya agar tercapai secara optimal dan realistis sesuai situasi, kondisi dan isu yang berkembang. Penetapan target kinerja menjadi lebih baik melalui proses usulan revisi atas target beberapa indikator kinerja Balai POM di Bengkulu. Perubahan ini tercermin pada revisi Perjanjian Kinerja Kepala Balai POM di Bengkulu yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2025 mencakup:
 - a. Perubahan target indikator kinerja:
 - i. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 85,75% menjadi 86,5%
 - ii. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 96,88% menjadi 95,75%
 - iii. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 75% menjadi 90%
 - iv. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari 87,8% menjadi 91%
 - v. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dari 80% menjadi 14,12%
 - b. Penambahan indikator kinerja baru pada sasaran kegiatan 1:
 - i. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
 - ii. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT
 - iii. Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium

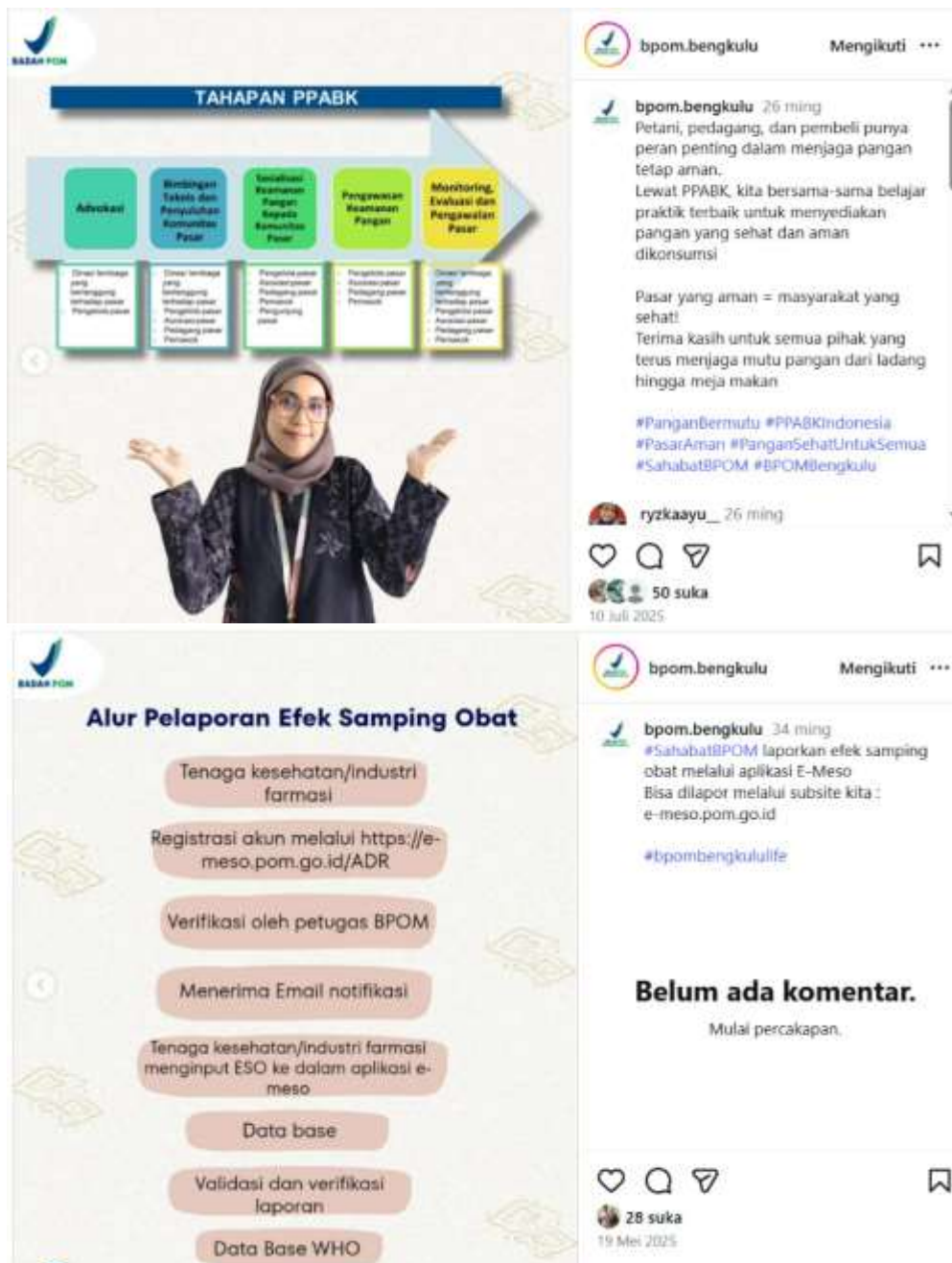
- iv. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
2. Berdasarkan analisa keseluruhan indikator yang telah termuat dalam pembahasan masing-masing indikator, telah dituangkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan capaian kinerja yang lebih baik pada setiap periode laporan kinerja interim.
 3. Informasi capaian kinerja yang termuat dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan dan disajikan dalam penyebarluasan informasi melalui akun media sosial instagram dan facebook Balai POM di Bengkulu, diantaranya :
 - a. Informasi kinerja hasil Pengawasan resistensi antimikroba periode Januari-September 2025, tanggal terbit 24 Desember 2025, memuat data dan grafik:
 - i. Persentase Penyerahan Antibiotik dengan dan tanpa resep dokter
 - ii. Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotic tanpa resep dokter





Gambar 3.46 Informasi capaian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi kinerja Balai POM di Bengkulu melalui media sosial

- b. Informasi kinerja hasil Indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan III tahun 2025
- c. Bahan sosialisasi tahapan proses pencapaian kinerja, diantaranya tahapan PPABK (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas), 10 Juli 2025
- d. Sosialisasi kepada pelaku usaha mekanisme pelaporan E-MESO dalam mendukung kinerja



Gambar 3.47 Pemanfaatan informasi kinerja sebagai penyusunan kembali strategi pencapaian indikator kinerja melalui sosialisasi tahapan proses dan pemenuhan capaian

4. Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam pengendalian manajemen risiko melalui penyusunan identifikasi risiko, analisis risiko, penentuan tindakan mitigasi dan monitoring risiko yang diperbaharui setiap 6 bulan. Hal ini terlihat dari:
 - a. Penetapan Risk Event mempertimbangkan capaian kinerja dengan nilai rendah pada periode semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025.

- b. Penentuan hambatan atau kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian kinerja
 - c. Penentuan adanya peningkatan dan/atau penurunan level nilai risiko residu berdasarkan peningkatan/penurunan capaian kinerja serta penanganan hambatan/kendala yang dialami
 - d. Penentuan jenis dan intensitas tindakan mitigasi mempertimbangkan capaian kinerja berjalan guna menurunkan kemungkinan risiko muncul
5. Informasi kinerja tahun 2025 sebagai periode awal Renstra 2025-2029 telah dimanfaatkan dan melatarbelakangi dibentuknya inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, diantaranya:
- a. Inovasi SIBAKTI (Sistem Pengelolaan Barang Bukti) <https://sibakti.biz.id/> pada bulan Maret 2025 yang lahir dari tingginya pelaksanaan patroli siber dengan melibatkan pihak jasa pengiriman untuk mendukung indikator kinerja Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan. Hal ini membuat peningkatan temuan barang ilegal yang menuntut pengelolaan barang temuan dan barang bukti dengan baik, tertib dan tertelusur.
 - b. Inovasi SIARAN (Sistem Administrasi Risiko Sampling dan Penandaan) <https://bpombengkulu.com/siaran> pada bulan Desember 2025 berupa aplikasi untuk memudahkan petugas sampling dalam menentukan ketepatan sampling berdasarkan level risiko dari sediaan farmasi obat yang disampling serta mempermudah pelaksanaan administrasi sampling. Hal ini turut mendukung indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan secara berkelanjutan hingga tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3.48. Tampilan depan aplikasi SIBAKTI dan SIARAN yang lahir dari pemanfaatan informasi kinerja secara berkala

6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk optimalisasi anggaran, aktivitas dan strategi dalam pencapaian target kinerja secara umum. Berdasarkan hasil pengukuran dan capaian kinerja Tahun 2025 yang dimonitoring secara bulanan, terdapat kegiatan yang berjalan hasil dari penyesuaian anggaran diantaranya:
 - a. In House Training Laboratorium untuk menunjang standar kemampuan laboratorium
 - b. Bimtek monitoring efek samping obat (MESO) atau farmakovigilans untuk mendukung pemenuhan jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan/KTD dan Efek samping Obat (ESO)
 - c. Advokasi ke kepala daerah untuk mewujudkan penerbitan Surat Edaran Walikota/Bupati terkait pengendalian resistensi antimikroba
7. Pemanfaatan informasi kinerja juga digunakan untuk upaya optimalisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Kondisi pada tahun 2024, belum ada fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaporkan KTD/ESO. Hal ini melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan KIE farmakovigilans untuk mendorong pemahaman dan pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kondisi efisiensi anggaran, kegiatan dapat terlaksana secara hybrid dengan 45 peserta (22 luring, 23 daring). Tidak lama setelah pelaksanaan KIE, tercatat 3 fasilitas melaporkan adanya KTD/ESO yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesediaan melaporkan.

Kegiatan berlanjut dengan pelaksanaan monitoring bulanan melalui grup WA, resosialisasi kembali bersamaan dengan pelaksanaan inspeksi rutin dan pemberian apresiasi bagi para pelapor KTD/ESO. Pemanfaatan informasi ini membuat KTD/ESO yang dilaporkan meningkat menjadi 12 laporan pada Desember 2025 dan turut berkontribusi pada realisasi indikator **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar 26,67%, melebihi target yang ditetapkan (26%) dengan capaian 102,58% (sangat baik).**

8. Pemanfaatan informasi kinerja digunakan untuk penyesuaian strategi pencapaian Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu agar sesuai dengan Standar kemampuan Laboratorium (SKL). Pada monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan, teridentifikasi beberapa kekurangan dalam aspek pemenuhan SKL serta hal-hal yang dapat ditingkatkan (*continuous improvement*) yang selanjutnya ditindaklanjuti pada periode (bulan/triwulan) berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja telah berkontribusi pada pelaksanaan pemenuhan SKL pada aspek:
 - a. Pelaksanaan verifikasi metode analisis tercapai 38 metode analisis (MA) tahun 2025

NAPPZA	: 11 MA
OBA SKK	: 3 MA
Kosmetik	: 8 MA
Pangan	: 10 MA
Mikro	: 6 MA
 - b. Peningkatan kompetensi personil melalui In House Training:
 - i. IHT Pengujian Kosmetik dengan judul Verifikasi Metode Analisa Identifikasi Steroid pada sediaan Kosmetik secara KCKT pada bulan Juli 2025
 - ii. IHT Obat dengan judul Verifikasi Metode Tropikamida dalam sediaan tetes mata secara KCKT dan verifikasi metode Dextrose dalam sediaan infus secara polarimetri pada bulan Juli 2025
 - iii. IHT VERIFIKASI METODE ANALISIS MIKROBIOLOGI BERDASARKAN ISO 16140-3:2021 PENGUJIAN MIKROBIOLOGI
 - iv. Workshop: Refreshment ISO 17025 dan Provider Uji Banding Antar Laboratorium Mikrobiologi
 - v. IHT Verifikasi Metode Analisis Penetapan Kadar Arsen (As) dalam Susu Secara Spektrofotometri Serapan Atom-Hydride Vapour Generator (HVG-AAS)16/PA/MA PPPOMN/19.

- c. Pengadaan Alat Laboratorium berupa HPLC, Lemari asam dan polarimeter yang sebelumnya tertunda karena blokir anggaran dan perintah pembatalan kontrak, kembali diajukan kembali setelah adanya pembukaan blokir.

Pemanfaatan informasi kinerja melalui penyesuaian strategi ini berkontribusi pada pemenuhan Standar Metode Terverifikasi yang naik menjadi 24,6 %. Secara keseluruhan, mampu menjadikan **indikator Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Bengkulu sesuai dengan Standar kemampuan Laboratorium (SKL) bernilai sangat baik dengan capaian 102,53%** yang diperoleh dari realisasi 76,9% melebihi target 75,0%.

9. Pemanfaatan informasi kinerja juga digunakan untuk pelaksanaan revisi anggaran dan penyesuaian strategi pemenuhan indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja Balai POM di Bengkulu. Revisi anggaran dilakukan dengan menghasilkan output kegiatan advokasi lintas sektor ke kepala Daerah guna menerbitkan Surat Edaran kepala daerah terkait AMR dan pelaksanaan bimbingan teknis AMR bagi tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, lintas sektor (Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan Dinas Kesehatan) yang terlaksana secara hybrid tanggal 16 September 2025. Kedua hal tersebut merupakan komponen penilaian pengendalian AMR selain penggunaan tools antibiotik yang sudah berjalan saat inspeksi dan publikasi yang juga telah secara berkala disosialisasikan melalui media sosial Balai POM di Bengkulu. Advokasi dilaksanakan dengan adanya penyesuaian strategi kolaborasi substansi pemeriksaan dan Infokom melalui penyampaian contoh draft SE yang telah disusun oleh petugas Balai POM di Bengkulu untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian. Melalui penyesuaian anggaran dan strategi ini, telah terbit 6 Surat Edaran pengendalian AMR pada 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Hal ini turut berkontribusi positif pada **terpenuhinya target 100% indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan capaian 100% (Baik).**
10. Pemanfaatan informasi kinerja digunakan untuk melakukan penyesuaian target dan strategi pemenuhan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Penetapan target sebanyak 11 sekolah yang akan mendapatkan intervensi PJAS tahun 2025 dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan melalui Tahapan PJAS semula ditargetkan pada sekolah yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan adanya pemotongan anggaran yang sangat signifikan dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 Tahun 2025, terdapat

penyesuaian target menjadi 6 sekolah yang kemudian dikembalikan lagi menjadi 11 sekolah dengan penyesuaian strategi intervensi pada sekolah yang berada di wilayah dekat ke Kota Bengkulu yaitu Kab. Seluma. Setelah dilakukan survey, ditetapkan kembali target sekolah terdiri dari 2 SMP dan 9 SD yaitu SD Negeri 88 Seluma, SD Negeri 04 Seluma, SD Negeri 158 Seluma, SD Negeri 83 Seluma, SD Negeri 81 Seluma, SD Negeri 55 Seluma, SD Negeri 66 Seluma, SD Negeri 140 Seluma, dan SD Negeri 43 Seluma serta 2 tingkat SLTP yaitu SMP Negeri 23 Seluma, SMP Negeri 17 Seluma. Semua Sekolah telah mendapatkan sertifikat PJAS Aman yang telah membudayakan Budaya Keamanan Pangan dan turut memberikan hasil **realisasi 100% pada indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, mencapai target (100%) yang ditetapkan dengan kriteria Baik.**

11. Pemanfaatan informasi kinerja digunakan untuk penyesuaian strategi identifikasi pelaku tindak pidana kejahatan obat dan makanan. Pada Februari-Maret tahun 2025 saat dilakukan efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan operasi penindakan sempat terhenti dan terdapat rencana penurunan target dari 2 menjadi 1 perkara. Efisiensi anggaran dimanfaatkan dengan optimalisasi kegiatan intelijen dengan anggaran yang sangat minim memanfaatkan jejaring yang ada di jasa pengiriman. Terbatasnya anggaran pada realitanya tetap memberikan masukan informasi adanya pengiriman produk ilegal dan tanpa izin edar. Pada saat anggaran dibuka pada April 2025, kegiatan kembali dapat berjalan dengan target kembali menjadi 2 perkara dan informasi yang sebelumnya terhimpun dapat dimatangkan dengan cepat. Hal ini turut memberikan kinerja yang baik melalui diperolehnya perkara pertama pada tanggal 23 April 2025 dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat bahan alam tanpa izin edar. Dalam tempo yang tidak lama, pada bulan Juni 2025 diperoleh perkara ke-2 sehingga pada triwulan III seluruh perkara terselesaikan hingga putusan sidang. Informasi kinerja yang diketahui melalui Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2025 dimana telah terpenuhinya target perkara tahun 2025 melalui tahap awal penyidikan pengiriman SPDP, mendorong dilakukannya **penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja untuk tahapan pengukuran kinerja berikutnya.** Tahapan pengukuran selanjutnya adalah kegiatan pemberkasan, tindak lanjut atas P-19 jaksa, serta perjalanan dinas untuk persidangan. **Hal ini turut memberikan dampak positif pada tercapainya indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 105,26% (sangat baik).**

Selain itu, pelaksanaan penyesuaian anggaran juga dilakukan melalui:

- Kegiatan Intensifikasi Pengawasan produk ilegal di jasa pengiriman untuk memperoleh informasi awal pengedar lain yang belum teridentifikasi
- Penambahan frekuensi kegiatan lain seperti keberlanjutan kegiatan operasi intelijen dan operasi penindakan untuk tetap menjamin sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman.

Melalui penyesuaian anggaran ini, kegiatan Operasi Intelijen yang dapat dilakukan Balai POM di Bengkulu menjadi 17 kegiatan di luar kota dan 13 di dalam kota Bengkulu dan menghasilkan **23 Laporan Intelijen** dengan level informasi A1 ke aplikasi dashboard penindakan <https://penindakan.pom.go.id/> yang seluruhnya telah ditindaklanjuti ke operasi Penindakan. Jumlah laporan ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 14 laporan intelijen level A1.

12. Pemanfaatan informasi kinerja digunakan untuk pelaksanaan revisi anggaran dan penyesuaian strategi sebagai bagian dari pencegahan permasalahan keracunan pangan di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2025, kinerja indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar baru terlihat pada triwulan III tahun 2025 dimana terjadi KLB pada kegiatan hajatan yang melibatkan jasa catering di Kota Bengkulu (Juli 2025). Pada mulanya, pemanfaatan anggaran ditujukan pada pengadaan alat, reagensia, dan pemeliharaan peralatan secara berkala, pelaksanaan sampling dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan. Dalam monev bulanan Juli 2025 yang dilaksanakan pada minggu ke-1 Agustus 2025, untuk mencegah kejadian serupa dilakukan revisi anggaran untuk penyelenggaraan Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan siap saji yang menyediakan jasa catering untuk hajatan masyarakat. Kegiatan teralisasi dengan jumlah peserta 22 pelaku usaha pada tanggal 14 Agustus 2025 di aula kantor Balai POM di Bengkulu dengan mengundang Dinas Kesehatan sebagai narasumber materi Sertifikat Laik Sehat. Hal ini berdampak positif dengan nihilnya kejadian KLB KP yang bersumber dari catering hajatan masyarakat hingga akhir tahun 2025. Hal ini cukup menghadirkan sisi positif dengan **terpenuhinya capaian kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100%**.
13. Pemanfaatan informasi kinerja digunakan untuk penyesuaian perencanaan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat anggota Komisi IX DPR RI Ibu Eko Kurnia Ningsih. Melalui perencanaan yang matang, KIE sebanyak 10 titik dengan total peserta sebanyak 2000 orang berhasil terlaksana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 650.057.022 (realisasi 100%). Hal ini turut sangat berkontribusi positif pada Survei efektivitas KIE yang terealisasi pada 2.188 responden (1.925 tatap muka dan 263 media) dengan Indeks Rata-Rata Final 93,16. Pada akhirnya, Tingkat

efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu tercapai sangat baik (106,7%).

14. Pemanfaatan informasi kinerja dan evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2024 telah diuraikan secara mendalam pada Forum Konsultasi publik tanggal 8 Mei 2025 dengan melibatkan pemangku kepentingan pengguna layanan Polres Kota Bengkulu, Dir Narkoba Polda Bengkulu, BNN Kota Bengkulu), akademisi (UNIB, Poltekkes Kemenkes), OPD terkait (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, Disperindag, DPMPTSP, Diskominfo), Ombudsman Perwakilan Bengkulu, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta media massa. Dalam FKP, disimpulkan perlunya layanan yang lebih menjangkau pengguna layanan di tengah keterbatasan jarak. Hal ini melatarbelakangi hadirnya inovasi layanan **ruang tamu virtual** yang telah dimanfaatkan untuk konsultasi UMKM, permintaan informasi, dan pengaduan masyarakat. Melalui ruang tamu virtual, pelayanan public Balai POM di Bengkulu menjadi sangat dirasakan bagi pengguna layanan utamanya UMKM untuk memperoleh kejelasan tahapan sekaligus pendampingan untuk memperoleh rekomendasi IP CPPOB. Pada akhirnya, ruang tamu virtual ikut berkontribusi dalam **tercapainya Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Bengkulu sebesar 102,55% (sangat baik)**.
15. Pemanfaatan informasi kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan II melatarbelakangi pelaksanaan revisi anggaran dan penyesuaian strategi indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Revisi anggaran dilakukan dengan menghasilkan output kegiatan Bimbingan teknis/Pelatihan terkait iklan Obat bahan alam kepada pelaku usaha penyiaran lokal (radio 10), 2 TV lokal dan 2 Koran lokal dan media online tanggal 13 November 2025. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut koordinasi antara Balai POM di Bengkulu dan KPID Provinsi Bengkulu, menyusul masih ditemukannya pelanggaran iklan obat bahan alam pada beberapa media penyiaran lokal berdasarkan hasil pengawasan petugas Balai POM di Bengkulu. Hal ini turut berkontribusi positif pada **terpenuhinya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan capaian 109,8% (Sangat Baik)**.
16. Pemanfaatan informasi kinerja dalam penyesuaian strategi pemenuhan kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Indikator kinerja ini baru terbentuk pada triwulan III tahun 2025 dengan output jumlah kabupaten/kota yang berhasil didampingi dalam pangan aman, melalui isian data tools self assessment atau penilaian mandiri. Penyesuaian strategi dilakukan melalui revisi anggaran dan kolaborasi antara substansi pemeriksaan selaku penyedia anggaran dengan Infokom yang menjalankan kegiatan. Melalui koordinasi yang baik, kegiatan berjalan diawali dengan advokasi ke Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 12 September 2025 yang dihadiri oleh Dinas DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu. Dalam kegiatan advokasi ini disampaikan manfaat dari penilalan mandiri dan melihat komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kegiatan berlanjut dengan pendampingan melalui kunjungan ke OPD terkait diantaranya:

- Dinas kesehatan tanggal 09 September 2025, fokus penilaian pada ketersediaan petugas terlatih di bidang PIRT, POSS, implementasi Keputusan Walikota Nomor : 233 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman di Kota Bengkulu, Tempat pengolahan pangan (TPP) dalam memenuhi kesehatan lingkungan, regulasi dalam penatalaksanaan KLB keracunan pangan di Kota Bengkulu
- Dinas Perikanan tanggal 23 September 2025, dengan fokus penilaian pada petugas terlatih di bidang PSAI dan keberlangsungan kegiatan pembinaan dan monitoring pangan segar asal ikan
- DPMPTSP tanggal 24 September 2025 dengan fokus penilaian pada tersedianya anggaran pelayanan publik tahun 2024 dan 2025 terkait perizinan berusaha di bidang PSAT, PSAH, PIRT dan POSS yang berada dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Bappeda Kota Bengkulu tanggal 25 September 2025, fokus penilaian pada perencanaan program pengawasan keamanan pangan dalam dokumen perencanaan daerah, ketersediaan inovasi pemerintah Kota Bengkulu terkait keamanan pangan di bidang PSAT (Menangkap Ikan Gebur, D'REM Ceting/Daun Remungai cegah stunting), PSAH (Kelok Nekek, Yanduan/pelayanan terpadu hewan, Insang/Inseminator sang petualang), PSAI (Pikkir dulu, Si Manja Lusi, Pokdakan tinile), PIRT (Sibute ungu, dewa braksi, pdajo, unpeco), POSS (Mekar Bengkulu, Mabagusi, Penyu Kantin, Masbing) serta penghargaan yang diterima pemerintah daerah Kota Bengkulu terkait keamanan pangan dan kesehatan
- Dinas Kominfo Kota Bengkulu tanggal 26 September 2025, dengan fokus penilaian pada Pemberdayaan masyarakat oleh Balai POM di Bengkulu telah secara aktif mendapat respon yang baik dari masyarakat, ditunjukkan dengan dukungan peran serta kader yang mensosialisasikan keamanan pangan, serta adanya akses informasi dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat melalui media sosial di 9 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu
- Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bengkulu tanggal 29 September 2025, fokus penilaian pada ketersediaan petugas terlatih di bidang PSAH, akses kerjasama pengujian keamanan dan mutu pangan dengan laboratorium pengujian swasta dan pemerintah dalam hal ini BPOM di Bengkulu, dan program pembinaan pelaku usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan.

Melalui kegiatan pendampingan yang terencana, terstruktur dan berorientasi hasil, terjadi peningkatan nilai pemenuhan tools Kabupaten/Kota Pangan Aman dari 41 menjadi 96. Hal ini kemudian mendorong terpenuhinya **indikator**

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100% (Baik).

17. Pemanfaatan informasi kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan identifikasi risiko yang dilanjutkan dengan analisis risiko. Pada tahun 2025, penyusunan daftar risiko telah lebih baik dibanding tahun 2024 dengan diawali pembekalan Bimtek Penguatan Implementasi Maturitas Manajemen Risiko dengan narasumber dari Inspektorat I Badan POM pada tanggal 15 Januari 2025 secara daring serta penyusunan penyesuaian isu internal dan eksternal sesuai perkembangan terkini. Selain itu, daftar risiko juga telah diperbaharui berkala atas dasar Laporan kinerja interim triwulan I dan II tahun 2025 berupa penambahan risiko. Pelaksanaan monitoring risiko melalui pengujian aktivitas pengendalian dan tindakan mitigasi juga terlaksana oleh auditor internal. Hal ini turut berkontribusi positif dengan terpenuhinya **Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Bengkulu dengan capaian 100,9% (sangat baik).**
18. Pemanfaatan informasi kinerja yang terhubung dengan laporan keuangan digunakan sebagai masukan penyesuaian strategi dalam pengelolaan keuangan. Pada tahun 2025, dinamika penyesuaian anggaran sangat tinggi dengan adanya blokir dan relaksasi. Beberapa hal yang dilakukan terkait hal ini diantaranya:
- a. Percepatan pengadaan alat laboratorium setelah pembukaan blokir anggaran pada akhir Maret 2025 yang berkontribusi pada pembayaran (realisasi anggaran) alat Fume Hood (lemari asam) dan Polarimeter, senilai Rp. 537.083.000, bulan Mei 2025 serta HPLC senilai Rp. 1.690.458.640 bulan Juni 2025.
 - b. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi diikuti perbaikan perencanaan penyerapan anggaran per bulan sesuai dengan kegiatan yang akan berlangsung. Perbaikan yang dilakukan diantaranya pada triwulan III tahun 2025 dimana persen deviasi belanja Modal (53) bulan Juli 2025 sangat besar (24,91%) dan berkontribusi banyak pada penurunan Nilai IKPA Balai POM di Bengkulu dari Juni 2025 (100%) ke Juli 2025 (94,62%). Hal ini berdampak baik pada penurunan persen deviasi belanja modal (53) dari 24,91% menjadi 4,6% pada bulan Agustus 2025.
 - c. Monitoring berkala dalam pengelolaan keuangan hingga diperoleh:
 - a. Ketepatan Waktu Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan (100.00). Pengelolaan administrasi belanja pihak ketiga dilakukan secara disiplin sesuai *timeline* yang ditetapkan.
 - b. Kepatuhan tinggi terhadap batas waktu pengajuan tagihan akhir tahun.
 - d. Mengukur ketepatan waktu dan kepatuhan pertanggungjawaban UP/TUP, dengan komponen utama: ketepatan waktu GUP/PTUP, persentase GUP disebulankan, dan setoran TUP melalui aplikasi My INTRESS, terutama pelaporan SPJ dengan nilai yang cukup besar
- Hal ini turut mendorong terpenuhinya **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Bengkulu dengan capaian 100% (Baik).**

19. Pemanfaatan informasi kinerja pada Laporan Kinerja interim triwulan II digunakan sebagai upaya penyesuaian strategi dalam pemenuhan keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha. Dalam Laporan kinerja interim Triwulan II, Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh pelaku usaha obat merupakan yang terendah dibanding pelaku usaha lain sebesar 86,67%. Hal ini mendorong pelaksanaan jemput bola ke pelaku usaha obat melalui sambungan telepon dan chat Whatsapp yang diikuti pendampingan penyusunan CAPA serta monitoring penyelesaian CAPA bersamaan dengan pelaksanaan inspeksi. Kegiatan yang dilakukan berdampak baik dengan meningkatnya Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh pelaku usaha obat dari 86,67% menjadi 93,15% pada Laporan Kinerja interim triwulan III. Pada akhir tahun 2025, Keseluruhan indikator **persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh stakeholder tercapai sebesar 109,79% (Sangat Baik).**
20. Pemanfaatan informasi kinerja pada Laporan kinerja triwulan I dan II menjadi dasar dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 75% menjadi 90%. Pada Laporan Kinerja interim triwulan I, Capaian indikator kinerja ini sebesar 133.33% dan capaian terhadap target tahun 2027 sebesar 126.58% dikhawatirkan akan terjadi anomali capaian kinerja. Monitoring berlanjut pada Triwulan II diperoleh capaian tidak berbeda jauh yaitu 130,16%. Pada triwulan III, dilakukan penyesuaian target menjadi 90% sehingga capaian pada laporan kinerja interim triwulan III sebesar 108,62% (sangat baik) yang menunjukkan penyesuaian target telah relevan dengan kondisi hasil inspeksi. **Pada penghujung tahun 2025, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 109,24% (Sangat Baik).**

3.4. REALISASI ANGGARAN

Dinamika Pergerakan Anggaran BPOM di Bengkulu

Postur APBN BPOM di Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp26.079.443.000 (Dua puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Pagu anggaran ini telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA BPOM di Bengkulu Nomor: SP DIPA-063.01.2.432991/2025 tanggal 2 Desember 2024. Adapun rincian postur anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel Alokasi Anggaran BPOM di
Bengkulu Tahun 2025*

JENIS BELANJA	ANGGARAN
Belanja Pegawai	5.974.051.000
Belanja Barang	13.745.567.000
Belanja Modal	6.359.825.000
Jumlah	26.079.443.000

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara (Automatic Adjustment)

Dalam pelaksanaannya, postur anggaran BPOM di Bengkulu mengalami dinamika berupa **pemblokiran anggaran**. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara serta tindak lanjut atas **Arahan Presiden** pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 mengenai efisiensi belanja birokrasi, khususnya pada komponen perjalanan dinas.

Detail penyesuaian anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Target Pemblokiran: Belanja Barang, khususnya pada Akun Perjalanan Dinas.
- Nilai Nominal Blokir: Rp2.583.446.000,-

Dengan adanya pemblokiran sebesar Rp2.583.446.000, maka alokasi Belanja Barang yang bersifat efektif (dapat segera digunakan) berubah dari Rp13.745.567.000 menjadi Rp11.162.121.000.

Kondisi ini menuntut BPOM di Bengkulu untuk melakukan strategi penajaman prioritas dan optimalisasi sumber daya yang ada. Fokus utama tetap diarahkan pada efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Bengkulu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan metode kerja yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Efisiensi dan Realisasi Anggaran BPOM di Bengkulu

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 perihal *Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025*, BPOM di Bengkulu telah melakukan penyesuaian postur anggaran.

Berdasarkan kebijakan tersebut, total pemblokiran anggaran pada BPOM di Bengkulu ditetapkan sebesar Rp12.544.954.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang: Pemblokiran sebesar Rp8.548.827.000
2. Belanja Modal: Pemblokiran sebesar Rp3.996.127.000

Memasuki Triwulan II Tahun Anggaran 2025, postur anggaran BPOM di Bengkulu mengalami dinamika positif berupa relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp2.735.382.000,-. Kebijakan ini didasarkan pada surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-203/AG/AG.4/2025 tanggal 9 April 2025 perihal *Revisi III: Revisi Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran Badan POM TA 2025*.

Relaksasi ini difokuskan pada pemulihan kapasitas operasional melalui pembukaan blokir pada sejumlah Rincian Output (RO) strategis. Anggaran pada RO tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah pagu anggaran awal, termasuk di dalamnya pemulihan alokasi untuk **akun perjalanan dinas** guna mendukung pengawasan lapangan.

Adapun sebaran Rincian Output yang mendapatkan relaksasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. 3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
2. 3165.QCD.U60 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU
3. 3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
4. 3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
5. 3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
6. 3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT
7. 3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Pembukaan blokir pada tujuh Rincian Output utama ini memberikan ruang gerak bagi BPOM di Bengkulu untuk mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi krusial, terutama pada sisi:

- **Pengujian Laboratorium:** Memastikan akurasi hasil uji sampel sesuai standar.
- **Penegakan Hukum:** Melanjutkan proses penyidikan perkara obat dan makanan yang sempat terkendala efisiensi.
- **Pengawasan Lapangan:** Mengaktifkan kembali pemeriksaan sarana produksi dan distribusi melalui dukungan akun perjalanan dinas yang telah direlaksasi.

Masih dalam periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025, postur anggaran BPOM di Bengkulu kembali mengalami dinamika penyesuaian melalui pengurangan pada pos Belanja Pegawai. Kebijakan ini didasarkan pada surat Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal *Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025*.

Adapun detail penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- **Besaran Pengurangan:** **Rp548.158.000,-** (Lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga pagu anggaran belanja pegawai TA 2025 menjadi Rp5.425.893.000.
- **Tujuan Kebijakan:** Penyesuaian ini dilakukan secara terpusat oleh Sekretariat Utama Badan POM RI guna melakukan redistribusi pagu antar-satuan kerja. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai *existing* dan pengalokasian anggaran bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2025 secara tepat sasaran di seluruh unit kerja Badan POM.

Selanjutnya pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025, postur anggaran BPOM di Bengkulu kembali mengalami dinamika penyesuaian melalui penambahan pada pos Belanja Pegawai sebesar Rp58.068.000,- (Lima puluh delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga pagu anggaran belanja pegawai TA 2025 menjadi Rp5.483.861.000.

Kebijakan penambahan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI Nomor KU.02.03.2.21.10.25.340 tanggal 15 Oktober 2025 hal Tindak Lanjut Hasil Monev Belanja Pegawai Satker Pagu Minus TW III TA 2025.

Penambahan ini dilakukan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang mengidentifikasi adanya potensi pagu minus pada akun belanja pegawai.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, postur anggaran BPOM di Bengkulu kembali mengalami dinamika relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp24.928.000,- pada kegiatan Rincian Output Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT.

Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 hal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025.

Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPOM di Bengkulu telah mengelola total pagu anggaran sebesar Rp25.594.035.000. Berdasarkan dinamika penyesuaian anggaran yang terjadi sepanjang tahun, terdapat kebijakan pemblokiran anggaran sebesar Rp9.784.644.000, sehingga total pagu efektif (setelah blokir) yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp15.809.391.000.

Capaian realisasi anggaran secara keseluruhan menunjukkan performa yang sangat optimal dengan total serapan mencapai Rp15.805.718.783 atau sebesar 99,98% dari pagu setelah blokir dan sebesar 61,76% dari pagu sebelum blokir.

Berikut adalah rincian capaian realisasi pada masing-masing komponen belanja:

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	BLOKIR	PAGU SDH BLOKIR	REALISASI	% SETELAH BLOKIR	% SEBELUM BLOKIR
Belanja Pegawai	5.483.861.000	-	5.483.861.000	5.482.010.135	99,97	99,97
Belanja Barang	13.750.349.000	5.788.517.000	7.961.832.000	7.960.052.008	99,98	57,89
Belanja Modal	6.359.825.000	3.996.127.000	2.363.698.000	2.363.656.640	100,00	37,17
Jumlah	25.594.035.000	9.784.644.000	15.809.391.000	15.805.718.783	99,98	61,76

NO	Rincian Output (RO)		OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/cx100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/fx100)$	$i=(e/hx100\%)$	$j=1$	$k=(h-1)/1$	<i>l</i>
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100.00	44,885,000	44,884,000	100.00	1.00	1	0.00	EFISIEN
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	304	761	250.33	30,885,000	30,800,900	99.73	2.51	1	1.51	TIDAK EFISIEN
3	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	2,778	3,306	119.01	712,440,000	712,420,122	100.00	1.19	1	0.19	EFISIEN
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1.00	100.00	34,333,000	34,329,256	99.99	1.00	1	0.00	EFISIEN
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	17	18	105.88	23,022,000	23,016,176	99.97	1.06	1	0.06	EFISIEN
6	3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100.00	57,115,000	57,073,640	99.93	1.00	1	0.00	EFISIEN
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	10	100.00	79,500,000	79,500,000	100.00	1.00	1	-	EFISIEN
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0.00	0	0	0.00	0.00	1	-	-

NO	Rincian Output (RO)		OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/cx100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/fx100)$	$i=(e/hx100\%)$	$j=1$	$k=(h-1)/1$	<i>l</i>
9	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1.00	100.00	1,940,006,000	1,939,852,622	99.99	1.00	1	0.00	EFISIEN
10	3165.QCD.U60	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Bengkulu	2	2	100.00	229,080,000	229,035,415	99.98	1.00	1	0.00	EFISIEN
11	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	11	11	100.00	50,628,000	50,616,400	99.98	1.00	1	0.00	EFISIEN
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	3	1	33.33	88,164,000	88,156,750	99.99	0.33	1	- 0.67	TIDAK EFISIEN
13	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100.00	28,560,000	28,554,500	99.98	1.00	1	0.00	EFISIEN
14	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100.00	11,717,000	11,712,900	99.97	1.00	1	0.00	EFISIEN
15	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	14	14	100.00	4,872,000	4,863,160	99.82	1.00	1	0.00	EFISIEN
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	307	307	100.00	416,808,000	416,758,903	99.99	1.00	1	0.00	EFISIEN

NO	Rincian Output (RO)		OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/c \times 100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/f \times 100)$	$i=(e/h \times 100\%)$	$j=1$	$k=(h-1)/1$	<i>l</i>
17	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	715	715	100.00	515,395,000	515,273,582	99.98	1.00	1	0.00	EFISIEN
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	36	36	100.00	24,915,000	24,911,777	99.99	1.00	1	0.00	EFISIEN
19	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi 3165.QIC.003 yang diperiksa oleh UPT	3	3	100.00	4,170,000	4,164,975	99.88	1.00	1	0.00	EFISIEN
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	289	289	100.00	374,383,000	374,131,214	99.93	1.00	1	0.00	EFISIEN
21	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100.00	2,227,083,000	2,227,083,000	100.00	1.00	1	-	EFISIEN

NO	Rincian Output (RO)		OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/c \times 100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/f \times 100)$	$i=(e/h \times 100\%)$	$j=1$	$k=(h-1)/1$	<i>l</i>
22	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	0.00	0	0	0.00	0.00	1	-	-
23	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1.00	100.00	8,911,430,000	8,910,809,556	99.99	1.00	1	0.00	EFISIEN

Berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian output yang tersaji, secara umum BPOM di Bengkulu menunjukkan kinerja yang sangat efisien. Dengan pengelolaan sumber daya (dana) yang terukur, instansi mampu menghasilkan output yang optimal guna mendukung pencapaian sasaran kegiatan organisasi.

Mayoritas dari 23 Rincian Output (RO) yang dikelola berada pada kategori "EFISIEN". Hal ini tercermin dari rasio antara realisasi anggaran (input) dan capaian fisik (output) yang terjaga.

- Pemanfaatan Sumber Daya: BPOM di Bengkulu mampu membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang dalam mencapai target. Strategi efisiensi ini terlihat dari nilai Indeks Efisiensi (IE) yang mayoritas berada di angka 1,00 atau lebih.
- Kinerja Optimal: Beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target, seperti pada sektor Layanan Publik dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Obat dan Makanan.

Secara keseluruhan, Progres Capaian Rincian Output (PCRO) BPOM di Bengkulu menunjukkan rentang performa yang sangat dinamis, berkisar antara 33% hingga 250%. Variasi angka ini merefleksikan efektivitas strategi perencanaan yang adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan di lapangan.

Berikut adalah rincian terhadap capaian tersebut:

1. Capaian Tertinggi dicapai pada RO Keputusan/Sertifikat Layanan Publik dengan angka signifikan sebesar 250,33%, angka ini menunjukkan tingkat responsivitas yang luar biasa dari BPOM di Bengkulu terhadap permintaan layanan masyarakat yang melebihi estimasi awal. Total realisasi sebanyak 761 layanan, yang terdiri dari:
 - 744 layanan pengujian sampel (PNBP).
 - 17 layanan sertifikasi (mencakup 15 sertifikasi pangan, 1 sertifikasi kosmetika, dan 1 sertifikasi obat tradisional).
2. Capaian Terendah pada RO Desa Pangan Aman, dengan realisasi sebesar 33,3% (1 desa dari target 3 desa). Rendahnya capaian ini bukan disebabkan oleh dampak dari efisiensi anggaran. Ketersediaan dana pada tahun berjalan tidak mencukupi untuk membiayai pelaksanaan intervensi di ketiga desa yang ditargetkan, sehingga dilakukan prioritas pada satu desa terpilih.

Fluktuasi capaian ini membuktikan bahwa BPOM di Bengkulu berhasil melakukan pengawalan target melalui manajemen risiko dan perencanaan yang fleksibel.

- Di satu sisi, instansi mampu mengakomodasi lonjakan permintaan layanan publik (sertifikasi/sampel).
- Di sisi lain, instansi tetap mampu melakukan langkah taktis dalam mengelola keterbatasan anggaran pada program kewilayahan tanpa menghentikan program tersebut sepenuhnya.

Meskipun secara umum berkinerja baik, terdapat catatan khusus mengenai efisiensi pada 2 RO yang anggaran operasionalnya diblokir 100% (pagu nol), yaitu:

1. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan (3185.CBV.001)
2. Layanan BMN (6394.EBA.958)

Tidak diukurnya realisasi pada kedua poin di atas disebabkan oleh kebijakan pemblokiran anggaran, sehingga capaian output secara otomatis berada di angka 0%. Meskipun mayoritas indikator menunjukkan performa yang baik, terdapat 2 (dua) Rincian Output (RO) yang tercatat dalam kategori "TIDAK EFISIEN". Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara realisasi anggaran dengan capaian fisik yang dihasilkan:

1. Keputusan/Sertifikat Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (3165.BAH.001)
RO ini memiliki capaian output yang sangat tinggi, yaitu 250,33% (761 realisasi dari target 304). Dalam sistem penilaian ini, kategori "Tidak Efisien" pada RO ini muncul karena nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1,51. Hal ini mengindikasikan bahwa output yang dihasilkan jauh melampaui target secara signifikan sementara anggaran terserap hampir sepenuhnya (99,73%). Kondisi ini "tidak efisien" secara administratif karena terjadi *over-achievement* yang ekstrem dibandingkan perencanaan anggaran awal.
2. Desa Pangan Aman (3165.QDB.002)
RO ini hanya mencapai output sebesar 33,33%, yaitu realisasi 1 desa dari target 3 desa. Berbeda dengan poin sebelumnya, RO ini masuk kategori "Tidak Efisien" karena penyerapan anggaran sudah maksimal mencapai 99,99% (Rp88.156.750 dari pagu Rp88.164.000), namun output fisik yang dihasilkan belum mencapai target yang ditentukan. Ketimpangan antara biaya yang habis terjatuh dengan hasil fisik yang rendah menghasilkan nilai TE negatif (-0,67).

Secara keseluruhan, BPOM di Bengkulu telah berhasil menjalankan amanat anggaran dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Keberhasilan mencapai target di tengah kendala pemblokiran beberapa pos anggaran menunjukkan kemandirian dan efektivitas manajerial yang baik.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Capaian Output SS	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Input SS	IE	TE	%TE	Kriteria
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,82	Rp5,510,307,000.0	Rp5,509,723,998.0	99,99	1,07	0,07	100%	EFISIEN
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00	Rp4.170.000	Rp4.164.975	99,88	1,00	0,00	100%	EFISIEN
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	106,70	Rp879.792.000	Rp879.747.772	99,99	0,85	-0,15		TIDAK EFISIEN
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	116,64	Rp4.872.000	Rp4.863.160	99,82	1,17	0,17	100%	EFISIEN
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,26	Rp229.080.000	Rp229.035.415	99,98	1,05	0,05	100%	EFISIEN
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	111,11	Rp44.885.000	Rp44.884.000	100,00	1,11	0,11	100%	EFISIEN
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	102,55	Rp30.885.000	Rp30.800.900	99,73	1,03	0,03	100%	EFISIEN
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	97,57	Rp9.105.400.000	Rp9.104.728.000	99,99	0,98	-0,02	100%	TIDAK EFISIEN

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi per Indikator kinerja tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Dukungan RO	Capaian Output IKU			CAPAIAN INPUT SS			TE PER IKU			Kriteria
					T	R	%	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	%TE	
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1,1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIA.002	86,50	94,67	109,45	Rp515.395.000,0	Rp515.273.582,0	99,98	1,09	0,09	100%	Efisien
		1,2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	3165.QDC.001	26,00	26,67	102,58	Rp11.717.000,0	Rp11.712.900,0	99,97	1,03	0,03	100%	Efisien
		1,3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIA.001	80	91,53	114,41	Rp166.723.200,0	Rp166.703.561,2	99,99	1,14	0,14	100%	Efisien
		1,4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	3165.QIA.001	100	100	100,00	Rp83.361.600,0	Rp83.351.780,6	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
		1,5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIA.001	85	95	111,76	Rp83.361.600,0	Rp83.351.780,6	99,99	1,12	0,12	100%	Efisien
		1,6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	3165.QIC.001	91	99,91	109,79	Rp7.474.500,0	Rp7.473.533,1	99,99	1,10	0,10	100%	Efisien
		1,7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.001	87	100	114,94	Rp4.983.000,0	Rp4.982.355,4	99,99	1,15	0,15	100%	Efisien
		1,8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.001	85	94,29	110,93	Rp12.457.500,0	Rp12.455.888,5	99,99	1,11	0,11	100%	Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Dukungan RO	Capaian Output IKU			CAPAIAN INPUT SS			TE PER IKU			Kriteria
				T	R	%	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	%TE	
		1,9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.004	95,75	100	104,44	Rp112.314.900,0	Rp112.239.364,2	99,93	1,05	0,05	100%	Efisien
		1,10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.004	90	98,32	109,24	Rp112.314.900,0	Rp112.239.364,2	99,93	1,09	0,09	100%	Efisien
		1,11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3165.QIC.004	91,00	99,92	109,80	Rp74.876.600,0	Rp74.826.242,8	99,93	1,10	0,10	100%	Efisien
		1,12 .Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	3165.QIC.004	90,00	86,81	96,46	Rp37.438.300,0	Rp37.413.121,4	99,93	0,97	-0,03		Tidak Efisien
		1,13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	3165.QIC.004	100,00	105,99	105,99	Rp37.438.300,0	Rp37.413.121,4	99,93	1,06	0,06	100%	Efisien
		1,14 Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	3165.PDD.001 & 3165.RAB.001	75,00	76,9	102,53	Rp4.167.089.000,0	Rp4.166.935.622,0	100,00	1,03	0,03	100%	Efisien
		1,15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3165.QIA.001	14,29	14,29	100,00	Rp83.361.600,0	Rp83.351.780,6	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Dukungan RO	Capaian Output IKU			CAPAIAN INPUT SS			TE PER IKU			Kriteria
					T	R	%	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	%TE	
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	2,1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.003	50	50	100,00	Rp4.170.000,0	Rp4.164.975,0	99,88	1,00	0,00	100%	Efisien
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3,1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3165.BDC.001	87,31	93,16	106,70	Rp712.440.000,0	Rp712.420.122,0	100,00	1,07	0,07	100%	Efisien
		3,2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3165.QDB.001	11	11	100,00	Rp50.628.000,0	Rp50.616.400,0	99,98	1,00	0,00	100%	Efisien
		3,3	Jumlah desa pangan aman	3165.QDB.002	3	1	33,33	Rp88.164.000,0	Rp88.156.750,0	99,99	0,33	-0,67		Tidak Efisien
		3,4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3165.QDB.003	1	1	100,00	Rp28.560.000,0	Rp28.554.500,0	99,98	1,00	0,00	100%	
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4,1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3165.QDG.001	14,12	16,47	116,64	4.872.000,00	4.863.160,00	99,82	1,17	0,17	100%	Efisien
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah	5,1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3165.QCD.U60	95	100	105,26	229.080.000,00	229.035.415,00	99,98	1,05	0,05	100%	Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Dukungan RO	Capaian Output IKU			CAPAIAN INPUT SS			TE PER IKU			Kriteria
					T	R	%	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	%TE	
	kerja UPT													
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu	6,1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	3165.AEA.001	90	100	111,11	44.885.000,00	44.884.000,00	100,00	1,11	0,11	100%	Efisien
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	7,1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3165.BAH.001	4,7	4,82	102,55	30.885.000,00	30.800.900,00	99,73	1,03	0,03	100%	Efisien
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8,1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	3165.BMB.001	90,72	88,52	97,57	Rp23.022.000,0	Rp23.016.176,0	99,97	0,98	-0,02		Tidak Efisien
		8,2	Nilai AKIP UPT BPOM	3165.BKB.001 & CAB	80,59	78,33	97,20	Rp91.448.000,0	Rp91.402.896,0	99,95	0,97	-0,03		Tidak Efisien
		8,3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	6384.EBA.	5	5	100,00	Rp8.911.430.000,0	Rp8.910.809.556,0	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
		8,4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3165.CAN.001	2,88	2,906	100,90	Rp79.500.000,0	Rp79.500.000,0	100,00	1,01	0,01	100%	Efisien

Pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator kegiatan yang merupakan indikator kinerja Utama (IKU). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) sasaran kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,15 sampai 0,17 sedangkan TE indikator kinerja -0,67 sampai 0,17. Analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan dengan indikator kinerja yang dapat diukur pada tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Pagu anggaran setelah adanya pemblokiran untuk SK I Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar Rp5,510,307,000.0 dan realisasi anggaran sebesar Rp5,509,723,998.0 atau sebesar **99.99%**. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 15 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 1 menghasilkan kriteria **“Efisien”** dengan nilai TE 0,07. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan sempurna antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja sasaran. Dengan demikian, tata kelola anggaran pada Sasaran Kegiatan I tahun 2025 dinilai sangat akuntabel, tepat sasaran, dan memiliki tingkat kebocoran anggaran yang minimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2025 dalam mendukung efisiensi anggaran adalah:

- a. Pemanfaatan media teknologi informasi pada triwulan I tahun 2025 atau saat periode blokir anggaran pada kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha secara hybrid (luring dan daring) diantaranya pada Bimtek Farmakovigilans pada tanggal 19 Februari 2025. Pemanfaatan anggaran ini berkontribusi pada peningkatan jumlah pelapor KTD/ESO yang semula nihil menjadi 3 pelapor dan terus meningkat menjadi 12 pelapor pada akhir tahun.
- b. Percepatan pengadaan alat laboratorium setelah pembukaan blokir anggaran pada akhir Maret 2025 yang berkontribusi pada pembayaran (realisasi anggaran) alat Fume Hood (lemari asam) dan Polarimeter, senilai Rp. 537.083.000, bulan Mei 2025 serta HPLC senilai Rp. 1.690.458.640 bulan Juni 2025.
- c. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi diikuti perbaikan perencanaan penyerapan anggaran per bulan sesuai dengan kegiatan yang akan berlangsung. Perbaikan yang dilakukan diantaranya pada triwulan III tahun 2025 dimana persentase deviasi belanja Modal (53) bulan Juli 2025 sangat besar (24,91%) dan berkontribusi banyak pada penurunan Nilai IKPA Balai POM di Bengkulu dari Juni 2025 (100%) ke Juli 2025 (94,62%). Hal ini berdampak

- baik pada penurunan persen deviasi belanja modal (53) dari 24,91% menjadi 4,6% pada bulan Agustus 2025.
- d. Kolaborasi lintas sektor melalui sinergitas tujuan keamanan pangan sehingga terlaksana kegiatan dengan pemanfaatan anggaran pemangku kepentingan. Bersama Badan Gizi Nasional, Balai POM di Bengkulu melaksanakan Bimbingan teknis sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan bimtek penjamah makanan untuk 2100 SPPG se-provinsi Bengkulu pada bulan Oktober 2025.
 - e. Pelaksanaan perjalanan dinas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan sinergitas antar indikator sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran. Pelaksanaan yang dilakukan diantaranya dengan penggabungan perjalanan dinas untuk tujuan dengan lokasi yang jauh, pelaksanaan inspeksi bersama dengan koordinasi ke kepala daerah guna penerbitan Surat Edaran AMR dan penyalahgunaan obat, koordinasi penggunaan DAK Non Fisik serta monitoring tindakan perbaikan hasil inspeksi.

Berdasarkan hal-hal di atas, disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah efisien sepenuhnya mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu.

2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pagu anggaran sesudah blokir Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar **Rp. 4.170.000** dan realisasi anggaran sebesar **Rp4.164.975,00** atau sebesar **99.88%**. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 15 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 2 menghasilkan kriteria “**Efisien**” dengan nilai TE 0,0001 yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2025 adalah:

- a. Pelaksanaan program dan **kegiatan inspeksi sarana fortifikasi** yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang berlaku
- b. Pelaksanaan **kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan** dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku (Peraturan BPOM Nomor Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020).

- Penetapan jenis temuan dan tindak lanjut dilakukan secara tepat dan berkesinambungan, serta didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perbaikan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Terhadap 3 (tiga) sarana produksi pangan fortifikasi, seluruh sarana atau 100 persen telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan hingga seluruh temuan dinyatakan selesai (*close*)
- c. Pengambilan sampel produk pangan fortifikasi di sarana produksi dan dilanjutkan dengan pengujian laboratorium

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Pagu anggaran setelah blokir Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar **Rp. 879.792.000** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 879.747.772** atau sebesar **99.99%**. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 4 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 3 menghasilkan kriteria “**Tidak Efisien**” dengan nilai **TE -0,15** yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Ketidakefisien pada sasaran kinerja ini disebabkan adanya capaian indikator Jumlah desa pangan aman yang tidak tercapai, dari 3 target yang ditetapkan hanya 1 yang terealisasi sehingga capaian hanya 33,3%. Rendahnya 1 IKU berdampak pada capaian sasaran kegiatan 3 yang dibentuk hanya dari 4 IKU yang pada akhirnya memberikan output 85,01% sedangkan anggaran terserap maksimal (99,9%).

Namun, berbagai Upaya telah dilakukan dalam mendorong efisiensi pada Tahun 2025 pada sisi yang lain diantaranya:

- a. Penyesuaian anggaran
Pada POK awal 2025 kegiatan KIE pada MAK 3165.BDC. melalui skema pemberdayaan masyarakat melalui KIE dengan tokoh masyarakat semula dirancang sebanyak 30 kegiatan dengan 300 peserta kegiatan sehingga total sasaran mencapai 9.000 peserta. Volume kegiatan kemudian direstrukturisasi menjadi 10 kegiatan dengan 200 peserta per kegiatan (total sasaran menjadi ± 2000 peserta). Penyesuaian ini diikuti dengan rasionalisasi belanja perjalanan dinas dan paket meeting, serta pengurangan frekuensi kegiatan masal.
- b. Dilakukan pemanfaatan anggaran dimana pada POK terdapat 3 paket kegiatan KIE stunting, menjadi 7 paket kegiatan KIE stunting dengan

- melakukan kerjasama bersama Pemerintah desa pada kegiatan posyandu desa dengan total peserta sebanyak 269 orang dan total anggaran sebesar Rp. 25.746.000,-
- c. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat (Tomas) Komisi IX DPR RI Ibu Eko Kurnia Ningsih, sebanyak 10 titik dengan total peserta sebanyak 2000 orang yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 650.057.022 (realisasi 100%)
 - d. Pelaksanaan indikator kegiatan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, semula direncanakan di Kabupaten Kaur, seiring dengan efisiensi anggaran dilakukan perubahan menjadi Kabupaten Seluma yang cenderung lebih mudah dijangkau. Penyesuaian target dari semula Kab Kaur menjadi Seluma. Selanjutnya dilakukan penetapan target sekolah yang diintervensi meliputi 2 SMP dan 9 SD yang hingga akhir tahun seluruhnya tercapai 100%.
 - e. Pelaksanaan indikator kegiatan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, melalui beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 rangkaian, yaitu Bimtek penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi Keamanan pangan dan Pengawasan pangan dan monitoring evaluasi pada bulan Mei 2025. Hal ini turut berkontribusi pada capaian IKU semula rendah (25%) meningkat pada bulan Mei 2025 menjadi 55%.
4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pagu anggaran sesudah blokir Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar **Rp. 4.872.000** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.863.160** atau sebesar **99.82 %**. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 1 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 4 menghasilkan kriteria “**Efisien**” dengan nilai **TE 0,17** yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- a. Pembuatan SK Kepala Balai POM di Bengkulu tentang taget pendampingan Sarana UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan, Pelaksanaan Bimtek, Pendampingan dan Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi
- b. sosialisasi keamanan pangan pada awal Maret 2025 sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan persyaratan keamanan pangan
- c. Pelaksanaan Bimtek CPPOB pada akhir April 2025 untuk memberikan pemahaman teknis mengenai persyaratan sarana produksi, sanitasi,

- dokumentasi, dan sistem jaminan mutu. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dengan materi teori, diskusi, serta contoh penerapan di sarana produksi.
- d. Bimtek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait persyaratan teknis sesuai jenis produk yang dihasilkan
 - e. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator serta dilanjutkan Sertifikasi UMKM Kosmetika dilakukan lebih cepat dari target September 2025, terealisasi pada bulan Juni 2025.
5. Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Pagu anggaran sesudah blokir Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar **Rp. 229.080.000** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 229.035.415** atau sebesar **99.98%**. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 1 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 5 menghasilkan kriteria “**Efisien**” dengan nilai TE 0,05 yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan dan penelitian, pelaksanaan operasi intelijen, Pelaksanaan Operasi Penindakan, Pemberkasan dan Penyelesaian berkas Perkara hingga tahap persidangan di Pengadilan kab/kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran ini juga terwujud melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala yang ditindaklanjuti dengan **revisi anggaran**. Sehubungan dengan 2 tindak pidana yang diperoleh bersumber dari kabupaten yang tergolong dekat yaitu Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara, pelaksanaan revisi anggaran telah berkontribusi pada pemanfaatan anggaran yang lebih fleksibel dan mendukung efisiensi melalui:

- e. Penambahan frekuensi kegiatan lain seperti keberlanjutan kegiatan operasi intelijen dan operasi penindakan untuk tetap menjamin sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman
- f. Kegiatan cegah tangkal berupa penggalangan pemangku kepentingan, meliputi Babinkamtibmas, Babinsa, Polres dan Polsek, Kepala Desa dan sekolah yang diselenggarakan di Kabupaten Seluma sebagai wilayah terbanyak penyaluran Obat-Obat Tertentu.

- g. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan produk ilegal di jasa pengiriman untuk memperoleh informasi awal pengedar lain yang belum teridentifikasi
 - h. Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas penindakan melalui Forum Komunikasi Intelijen dan Bimbingan Teknis Siber
6. Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Balai POM di Bengkulu

Pagu anggaran Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar Rp. 44.885.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.884.000 atau sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 1 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 6 menghasilkan kriteria **“Efisien”** dengan nilai TE 0,11 yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Pemanfaatan anggaran pada indikator ini diantaranya Pembelian bahan untuk penyusunan laporan analisis kejahatan, Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait yaitu jasa pengiriman, serta kegiatan penggalangan dengan perangkat pemerintahan daerah, penegak hukum, pelajar dan masyarakat.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran ini juga terwujud melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala yang ditindaklanjuti dengan **revisi anggaran**. Melalui fleksibilitas penggunaan anggaran, telah dilakukan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan efisiensi diantaranya:

- d. Penambahan frekuensi kegiatan koordinasi dan pengumpulan bahan keterangan di jasa pengiriman. Hal ini turut memperkuat data kerawanan kejahatan di Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya dianalisis lebih mendalam.
- e. Optimalisasi frekuensi dalam kegiatan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Melalui pemanfaatan anggaran yang efisien dengan kualitas yang sudah menjawab rekomendasi, pemanfaatan anggaran dapat dipergunakan untuk mendorong kegiatan lain yang menjadi komponen penilaian indikator ini yaitu penggalangan dan pengumpulan bahan keterangan data kerawanan.
- f. Pelaksanaan Kegiatan cegah tangkal berupa penggalangan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Bengkulu tanggal 16 Mei 2025 yaitu Kapolda Bengkulu beserta jajaran (Direktur Reserse Narkoba, Direktur Propam dan Direktur Reserse Kriminal Khusus), kepala Organisasi perangkat daerah dan pimpinan jasa pengiriman. Melalui kegiatan ini yang diikuti pemusnahan

barang bukti, seluruh pemangku kepentingan menjadi lebih terbuka terkait permasalahan peredaran produk ilegal dan sediaan farmasi OOT.

7. Sasaran Kegiatan 7 Layanan Publik UPT Balai POM di Bengkulu yang prima

Pagu anggaran Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar Rp. 44.885.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.884.000,00 atau sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 1 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 7 menghasilkan kriteria **“Efisien”** dengan nilai TE 0,03 yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendorong efisiensi anggaran adalah:

1. Inovasi Ruang Tamu Virtual untuk konsultasi UMKM, permintaan informasi, dan pengaduan masyarakat oleh masyarakat atau pelanggan tanpa perlu datang ke kantor. Ruang Tamu virtual memanfaatkan media teknologi informasi daring Zoom meetings yang selalu standby pada saat jam kerja. Inovasi ini juga merupakan hasil rekomendasi Forum Konsultasi Publik.
2. Adanya persiapan yang memadai dalam upaya peningkatan layanan terkait SKI dan SKE, termasuk kesiapan akun dan proses pada sistem yang relevan, dan akan mengirimkan petugas untuk peningkatan kompetensi dalam pelayanan SKI SKE.
3. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik tahun 2025 diantaranya rehabilitasi mushola untuk layanan publik.

8. Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pagu anggaran setelah blokir Tahun 2025 yang mendukung sasaran kegiatan ini sebesar Rp. 9.105.400.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.104.728.628 atau sebesar 99,99%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada 4 indikator kinerja pada sasaran ini, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 1 menghasilkan kriteria **“Tidak Efisien”** dengan nilai TE -0,01 yang sekaligus menggambarkan pencapaian realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian kinerja sasaran.

Penyebab tidak efisiennya sasaran kegiatan 8 disebabkan oleh kegagalan efisiensi pada indikator kinerja:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Bengkulu (TE = -0,02). Pembangunan ZI belum maksimal dengan capaian output 97,57% sementara anggaran

terseap maksimal 99,99%. Hal ini disebabkan **belum adanya pemastian akuntabilitas dukungan anggaran** yang tepat terkait pembangunan ZI. Penggunaan anggaran kinerja ini juga masih memanfaatkan dari anggaran kegiatan substansi teknis. Pembangunan zona integritas belum sepenuhnya melebur dalam system manajemen terintegrasi sehingga dukungan anggaran belum memadai.

- b. Nilai AKIP UPT BPOM Bengkulu (TE -0,03). Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya pemanfaatan anggaran yang tepat dalam rangka mendukung peningkatan nilai AKIP.

Walaupun belum efisien, upaya-upaya yang mendukung efisiensi telah dilakukan sampai dengan Tahun 2025 sehingga dicapai TE yang relatif hampir menyentuh kriteria efisien (-0,01) meliputi:

- Monitoring berkala dalam pengelolaan keuangan hingga diperoleh:
 - b. Ketepatan Waktu Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan (100.00). Pengelolaan administrasi belanja pihak ketiga dilakukan secara disiplin sesuai *timeline* yang ditetapkan.
 - c. Kepatuhan tinggi terhadap batas waktu pengajuan tagihan akhir tahun.
- Mengukur ketepatan waktu dan kepatuhan pertanggungjawaban UP/TUP, dengan komponen utama: ketepatan waktu GUP/PTUP, persentase GUP disebulankan, dan setoran TUP melalui aplikasi My INTRESS, terutama pelaporan SPJ dengan nilai yang cukup besar
- Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek bagi internal pegawai, seperti sosialisasi korupsi dan gratifikasi oleh KPK pada bulan Agustus 2025 yang dilakukan secara hybrid dan minim anggaran. Kegiatan ini merupakan bentuk sinkronisasi dengan KPK dimana tidak terdapat belanja pegawai (narasumber) tetapi juga bentuk dukungan ke KPK selain sebagai pengawas juga sebagai unit pencegah korupsi.
- Peningkatan kompetensi memanfaatkan IDEAS PPSDM POM dan menyeluruh bagi semua pegawai, diantaranya manajemen risiko dan SAKIP.

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Bengkulu merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Hasil Kinerja 2025 menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Bengkulu diukur melalui hasil perhitungan total nilai pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan normalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja. Nilai pencapaian akhir kinerja Balai POM di Bengkulu mengalami koreksi 10% disebabkan oleh predikat nilai AKIP BB (Baik). Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Bengkulu tahun 2025 berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh sebesar 91,73% (BAIK)

Pencapaian kinerja tahun 2025 dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil 12 (dua belas) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria **“Sangat Baik”**, 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria **“Baik”**, 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria **“Kurang”**, dan 6 (enam) indikator kinerja target yang ditetapkan dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**

Melalui pengukuran kinerja sasaran strategis, maka disimpulkan pernyataan keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Balai POM di Bengkulu berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) 106,76% (Sangat Baik)
2. Balai POM di Bengkulu berhasil meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 100,0% (Baik)
3. Balai POM di Bengkulu belum sepenuhnya berhasil meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 85,01% (Cukup)
4. Balai POM di Bengkulu berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 116,64% yang dinormalisasi menjadi 110% (Tidak Dapat Disimpulkan)

5. Balai POM di Bengkulu berhasil Melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif pada wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 105,26% (Sangat Baik)
6. Balai POM di Bengkulu berhasil Melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada wilayah kerja Balai POM di Bengkulu dengan NSS 111,11% yang dinormalisasi menjadi 100% (Tidak Dapat Disimpulkan)
7. Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan layanan publik yang prima dengan NSS 102,55% (Baik)
8. Balai POM di Bengkulu berhasil mewujudkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan NSS 98,92% (Baik)

Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sangat Baik

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (109,45%)
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO (102,58%)
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti stakeholder (109,79%)
4. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti (104,44%)
5. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti (109,24%)
6. Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi (109,8%)
7. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT (105,99%)
8. Persentase Pemenuhan Lab Pengujian SF dan PO UPT sesuai standar (101,59%)
9. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (106,7%)
10. Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (105,26%)
11. Indeks Pelayanan Publik UPT Balai POM di Bengkulu (102,55%)
12. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM (100,9%)

Baik

1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT BPOM Bengkulu (100,00%)
2. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi (96,46%)
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kab/Kota Pangan Aman (100,00%)
4. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti (100,00%)

5. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (100,00%)
6. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (100,00%)
7. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (97,57%)
8. Nilai AKIP UPT BPOM (97,20%)
9. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Bengkulu (100,00%)

Kurang

1. Jumlah desa pangan aman (33,33%)

Tidak Dapat Disimpulkan

1. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (114,41%)
2. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (111,76%)
3. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti (114,94%)
4. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti (110,93%)
5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi (116,64%)
6. Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar (111,11%)

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengukuran kinerja adalah pada indikator kinerja Jumlah desa pangan aman dengan capaian 33,3%. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan indikator ini adalah adanya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 yang menyebabkan target 3 desa pangan hanya terealisasi 1 desa. Pelaksanaan pemenuhan 2 desa pangan aman berikutnya juga ikut terdampak dengan terkendala kurangnya anggaran.

Langkah yang telah dilakukan diantaranya dengan upaya revisi anggaran serta berkoordinasi dengan Badan POM perihal penurunan target. Koordinasi terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2025 dan permulaan tahun 2026 dengan menyampaikan surat kepada Direktur PMPUPO dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Nomor : B-HM.03.01.2B.01.26.34 Tanggal 09 Januari 2026 perihal perubahan target desa pangan aman tahun 2025, sekaligus untuk mendorong dukungan kebijakan serta penguatan sumber daya, agar perluasan intervensi Desa Pangan Aman pada periode berikutnya dapat dipenuhi secara lebih realistis dan berkelanjutan. Akan tetapi belum didapatkan jawaban bahwa untuk kegiatan tersebut pada tahun 2025 tidak ada terjadi penurunan target.

Permasalahan lain yang ada meliputi pengukuran kinerja dengan hasil **Tidak Dapat Disimpulkan**, pada indikator kinerja :

1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (114,41%)
2. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (111,76%)
3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti (114,94%)
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti (110,93%)
5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi (116,64%)
6. Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar (111,11%).

Permasalahan yang terjadi adalah **kurang tepatnya penyusunan target pemenuhan indikator kinerja** sehingga realisasi di atas 110%. Hal ini juga dipengaruhi oleh tahun 2025 **merupakan tahun pertama** pelaksanaan Renstra 2025-2029 sehingga masih terdapat **faktor yang belum teridentifikasi** dan dapat memberikan **risiko ketidaktepatan penetapan target**.

Langkah yang akan dilakukan diantaranya dengan upaya penyesuaian target kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2026. Untuk indikator kinerja yang realisasinya masih dapat meningkat, target kinerja tahun 2026 akan disamakan dengan realisasi tahun 2025. Sedangkan untuk indikator kinerja dengan realisasi telah sempurna (100%), dilakukan peningkatan target secara bertahap disertai dengan justifikasi memadai berupa kertas kerja.

KINERJA ANGGARAN

Postur APBN Balai POM di Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp. Rp26.079.443.000,00 yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai POM di Bengkulu Nomor : SP DIPA- 063.01.2.432901/2025 tanggal 24 November 2024.

Dalam pelaksanaannya, postur anggaran BPOM di Bengkulu mengalami dinamika berupa **pemblokiran anggaran sebagai** bentuk kepatuhan terhadap Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara serta tindak lanjut atas **Arahan Presiden** pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 mengenai efisiensi belanja birokrasi, khususnya pada komponen perjalanan dinas. Penyesuaian anggaran tersebut berupa pemblokiran Belanja Barang, khususnya pada Akun Perjalanan Dinas dengan Nilai Nominal Blokir Rp2.583.446.000,- sehingga alokasi Belanja Barang yang bersifat

efektif (dapat segera digunakan) berubah dari Rp13.745.567.000 menjadi Rp11.162.121.000. Dinamika anggaran masih berlanjut dengan adanya surat dari Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, terdapat total pemblokiran anggaran pada BPOM di Bengkulu ditetapkan sebesar Rp12.544.954.000, pada belanja barang dan belanja modal sehingga pagu yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 15.809.391.000. Dinamika tertinggi dialami pada akhir Maret 2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.174 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran Badan POM dimana untuk Balai POM di Bengkulu terdapat relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp2.735.382.000,00 untuk tujuan pemulihan kapasitas operasional melalui pembukaan blokir pada 7 (tujuh) Rincian Output (RO) strategis pada **akun perjalanan dinas** guna mendukung pengawasan lapangan.

Pelaksanaan revisi berlanjut sebagaimana dan merujuk pada:

- Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025,
- Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No KU.02.03.21.10.25.340 tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Tindak Lanjut Hasil Monev Belanja Pegawai Satker Pagu Minus TW III TA 2025 tanggal 15 Oktober 2025 dimana Balai POM di Bengkulu mendapat penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.57.968.000,00 atas kekurangan gaji dan uang makan pegawai tahun 2025.
- Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 03 November 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 dimana untuk Balai POM di Bengkulu sebesar Rp24.928.000,00.
- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Balai BPOM Bengkulu No T-KU.02.01.2B.12.25.1242 tanggal 12 Desember 2025 tentang Pemutakhiran data berkaitan dengan Revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.

Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPOM di Bengkulu telah mengelola total pagu anggaran sebesar Rp25.594.035.000. Berdasarkan dinamika penyesuaian anggaran yang terjadi sepanjang tahun, terdapat kebijakan pemblokiran anggaran sebesar Rp. 9.784.644.000. Hal ini menyebabkan total pagu efektif (setelah blokir) sebesar Rp15.809.391.000 dengan realisasi Rp15.805.718.783 atau sebesar 99,98% dari pagu setelah blokir atau sebesar 61,76% dari pagu sebelum blokir.

Efisiensi anggaran yang diperoleh berdasarkan pengukuran rincian output dan sasaran strategis menunjukkan bahwa Balai POM di Bengkulu telah memanfaatkan anggaran yang tersedia secara EFISIEN, didukung data pengukuran efisiensi berikut:

1. Berdasarkan Rincian Output, 19 dari 21 Rincian Output (90,5%) yang dapat diukur kategori EFISIEN
2. Berdasarkan Sasaran Kegiatan, 6 dari 8 Sasaran Kegiatan (75%) kategori EFISIEN
3. Berdasarkan Indikator Kinerja, 24 dari 28 Indikator Kinerja Utama kategori EFISIEN

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, perlu dilakukan langkah–langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya antara lain dengan cara sebagai berikut :

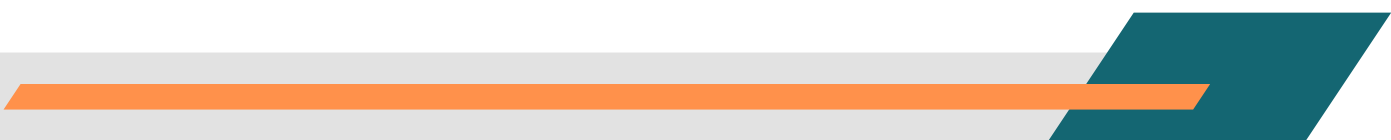
1. Melaksanakan reviu penetapan target kinerja tahun 2026 dengan mempertimbangkan data realisasi tahun 2025 sebagai baseline, tidak terbatas hanya pada indikator kinerja dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan.
2. Menyusun kertas kerja sebagai data dukung adanya penyesuaian penetapan kinerja. Kertas kerja selanjutnya diuraikan dalam pelaporan kinerja interim dan tahun 2026.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi berkala dengan pendokumentasian setiap hasil secara sistematis serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terhadap indikator kinerja yang mengalami keterbatasan anggaran dengan target output tidak berkurang.
4. Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang terdapat dalam pembahasan masing-masing indikator kinerja Laporan Kinerja Tahun 2025.
5. Berupaya dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia terhadap pemenuhan realisasi tahun selanjutnya agar diperoleh peningkatan capaian kinerja.



LAMPIRAN LAPORAN KINERJA



2025





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BENGKULU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI ABASO MATARAM

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Bengkulu


YOGI ABASO MATARAM

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BENGKULU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75 Persen
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.12 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Jumlah
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.72 Persen
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.59
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Persen
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.88 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25,536,067,000 (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14,905,392,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,630,675,000

Bengkulu, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

YOGI ABASO MATARAM

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	515,395,000
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - PENGADAAN REAGEN BLOKIR				232,342,000	232,342,000
			2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM,KOSMETIK,SUPLEMEN KESEHATAN				60,833,000	60,833,000
			3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL				222,220,000	222,220,000
			02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO											26	45,000,000
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/ PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans			051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans			A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/ TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (SARYANKES)				45,000,000	45,000,000
			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	166,723,200
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI			24,915,000	7,474,500	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,983,000	
		NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI			24,915,000	4,983,000	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,457,500	
		NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI			24,915,000	12,457,500	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	112,314,900
		NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					F - Training GMP Topik khusus bagi inspektur CPOTB			5,160,000	1,548,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			J - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN						35,878,000	10,763,400
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Perkuatan pengawasan produk tembakau untuk UPT						4,900,000	1,470,000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Forum Komunikasi Pengawasan Saran Distribusi dan Pelayananan ONPP						700,000	210,000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			P - Bimbingan teknis pengawas pangan fortifikasi						6,780,000	2,034,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan						330,000	99,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis pengawasan Mutu Obat beredar						5,160,000	1,548,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - Bimtek CPPOB						20,879,000	6,263,700
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK						2,510,000	753,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			O - Pembinaan dan Monitoring Kinerja DAK Non Fisik 2024 di Kantor BPOM Bengkulu						17,364,000	5,209,200
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			L - Forum komunikasi Inspektur Kosmetik						4,840,000	1,452,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - Pelatihan Sampling OT dan SK					5,160,000	1,548,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA					33,360,000	10,008,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			K - Peningkatan kompetensi Petugas UPT BPOM dalam pendampingan monitoring efek samping OBA, OK dan SK serta peningkatan peran tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat di daerah					5,160,000	1,548,000
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN					32,310,000	9,693,000
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN					61,260,000	18,378,000
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK					7,810,000	2,343,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OMKA PALSU, TIE , TINDAK LANJUT PUBLIC T WARNING					16,926,000	5,077,800
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			J - Penguatan aksi dan strategi penanganan pemberantasan obat dan bahan alam (OBA)					5,160,000	1,548,000
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN ROKOK					9,880,000	2,964,000
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - Forum koordinasi dan komunikasi perkuatan pengawasan dan pelayanan publik terkait pemasukan kosmetika dan sertifikasi CPKB					5,160,000	1,548,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				S - Pelatihan Fasilitator PKP dalam pendampingan penerapan CPPOB/ HACCP di UMKM				3,880,000	1,164,000			
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - PENGAWASAN PERIKLANAN OT, SK, KOSMETIKA				8,940,000	2,682,000			
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - PENGAWASAN PERIKLANAN PENANDAAN				10,955,000	3,286,500			
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - INTENSIFIKASI PANGAN MENJELANG - SETELAH HARI BESAR NASIONAL				23,800,000	7,140,000			
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				E - Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen				5,160,000	1,548,000			
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				I - RENCANA AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS				29,800,000	8,940,000			
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				N - Evaluasi sampling Kosmetik				5,160,000	1,548,000			
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				R - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator				1,000	300			
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	112,314,900
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - Pelatihan Fasilitator PKP dalam pendampingan penerapan CPPOB/ HACCP di UMKM			3,880,000			1,164,000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - Forum koodinasi dan komunikasi perkuatan pengawasan dan pelayanan publik terkait pemasukan kosmetika dan sertifikasi CPKB			5,160,000			1,548,000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - INTENSIFIKASI PANGAN MENJELANG - SETELAH HARI BESAR NASIONAL			23,800,000			7,140,000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN ROKOK			9,880,000			2,964,000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK			7,810,000			2,343,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			K - Peningkatan kompetensi Petugas UPT BPOM dalam pendampingan monitoring efek samping OBA, OK dan SK serta peningkatan peran tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat di daerah			5,160,000			1,548,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - Bimtek CPPOB			20,879,000			6,263,700
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			O - Pembinaan dan Monitoring Kinerja DAK Non Fisik 2024 di Kantor BPOM Bengkulu			17,364,000			5,209,200
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis pengawasan Mutu Obat beredar			5,160,000			1,548,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan			330,000			99,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN			KONTRIBUSI
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				J - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN				35,878,000			10,763,400
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN				61,260,000			18,378,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				N - Evaluasi sampling Kosmetik				5,160,000			1,548,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK				2,510,000			753,000
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - PENGAWASAN PERIKLANAN OT, SK, KOSMETIKA				8,940,000			2,682,000
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				D - Perkuatan pengawasan produk tembakau untuk UPT				4,900,000			1,470,000
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				J - Penguatan aksi dan strategi penanganan pemberantasan obat dan bahan alam (OBA)				5,160,000			1,548,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				L - Forum komunikasi Inspektur Kosmetik				4,840,000			1,452,000
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				P - Bimbingan teknis pengawas pangan fortifikasi				6,780,000			2,034,000
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				E - Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen				5,160,000			1,548,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - PENGAWASAN PERIKLANAN PENANDAAN				10,955,000	3,286,500		
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				R - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator				1,000	300		
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN				32,310,000	9,693,000		
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - Pelatihan Sampling OT dan SK				5,160,000	1,548,000		
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Training GMP Topik khusus bagi inspektur CPOTB				5,160,000	1,548,000		
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				I - RENCANA AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS				29,800,000	8,940,000		
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA				33,360,000	10,008,000		
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OMKA PALSU, TIE , TINDAK LANJUT PUBLIC T WARNING				16,926,000	5,077,800		
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Forum Komunikasi Pengawasan Saran Distribusi dan Pelayananan ONPP				700,000	210,000		
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	91	91	91	91	91	74,876,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sesuai ketentuan													
NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan				330,000	66,000				
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				K - Peningkatan kompetensi Petugas UPT BPOM dalam pendampingan monitoring efek samping OBA, OK dan SK serta peningkatan peran tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat di daetah				5,160,000	1,032,000				
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				L - Forum komunikasi Inspektur Kosmetik				4,840,000	968,000				
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN				61,260,000	12,252,000				
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				M - Forum koodinasi dan komunikasi perkuatan pengawasan dan pelayanan publik terkait pemasukan kosmetika dan sertifikasi CPKB				5,160,000	1,032,000				
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				N - Evaluasi sampling Kosmetik				5,160,000	1,032,000				
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				O - Pembinaan dan Monitoring Kinerja DAK Non Fisik 2024 di Kantor BPOM Bengkulu				17,364,000	3,472,800				
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA				33,360,000	6,672,000				
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN				32,310,000	6,462,000				
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika,				D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OMKA				16,926,000	3,385,200				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			PALSU, TIE, TINDAK LANJUT PUBLIC T WARNING							
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - Pelatihan Fasilitator PKP dalam pendampingan penerapan CPPOB/ HACCP di UMKM						3,880,000	776,000
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN ROKOK						9,880,000	1,976,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - PENGAWASAN PERIKLANAN OT, SK, KOSMETIKA						8,940,000	1,788,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			G - PENGAWASAN PERIKLANAN PENANDAAN						10,955,000	2,191,000
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - INTENSIFIKASI PANGAN MENJELANG - SETELAH HARI BESAR NASIONAL						23,800,000	4,760,000
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			R - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator						1,000	200
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			I - RENCANA AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS						29,800,000	5,960,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			J - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN						35,878,000	7,175,600
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Forum Komunikasi Pengawasan Saran Distribusi dan Pelayanan ONPP						700,000	140,000
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - Bimtek CPPOB						20,879,000	4,175,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Makanan yang Diperiksa oleh UPT												
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis pengawasan Mutu Obat beredar					5,160,000	1,032,000
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK					2,510,000	502,000
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			P - Bimbingan teknis pengawas pangan fortifikasi					6,780,000	1,356,000
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Perkuatan pengawasan produk tembakau untuk UPT					4,900,000	980,000
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen					5,160,000	1,032,000
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - Training GMP Topik khusus bagi inspektur CPOTB					5,160,000	1,032,000
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK					7,810,000	1,562,000
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - Pelatihan Sampling OT dan SK					5,160,000	1,032,000
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			J - Penguatan aksi dan strategi penanganan pemberantasan obat dan bahan alam (OBA)					5,160,000	1,032,000
		12 - Persentase label produk tembakau								90	90	90	90	90	37,438,300

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar													
NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		R - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator		1,000		100						
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		N - Evaluasi sampling Kosmetik		5,160,000		516,000						
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		P - Bimbingan teknis pengawas pangan fortifikasi		6,780,000		678,000						
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		J - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN		35,878,000		3,587,800						
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		E - Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen		5,160,000		516,000						
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		I - RENCANA AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS		29,800,000		2,980,000						
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		J - Penguatan aksi dan strategi penanganan pemberantasan obat dan bahan alam (OBA)		5,160,000		516,000						
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		H - INTENSIFIKASI PANGAN MENJELANG - SETELAH HARI BESAR NASIONAL		23,800,000		2,380,000						
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		G - PENGAWASAN PERIKLANAN PENANDAAN		10,955,000		1,095,500						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - Training GMP Topik khusus bagi inspektur CPOTB					5,160,000	516,000
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - Pelatihan Fasilitator PKP dalam pendampingan penerapan CPPOB/ HACCP di UMKM					3,880,000	388,000
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - Forum koodinasi dan komunikasi perkuatan pengawasan dan pelayanan publik terkait pemasukan kosmetika dan sertifikasi CPKB					5,160,000	516,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - PENGAWASAN PERIKLANAN OT, SK, KOSMETIKA					8,940,000	894,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN ROKOK					9,880,000	988,000
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK					7,810,000	781,000
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OMKA PALSU, TIE , TINDAK LANJUT PUBLIC T WARNING					16,926,000	1,692,600
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			L - Forum komunikasi Inspektur Kosmetik					4,840,000	484,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - Bimtek CPPOB					20,879,000	2,087,900
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN					32,310,000	3,231,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - Pelatihan Sampling OT dan SK						5,160,000	516,000
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA						33,360,000	3,336,000
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK						2,510,000	251,000
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN						61,260,000	6,126,000
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis pengawasan Mutu Obat beredar						5,160,000	516,000
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			K - Peningkatan kompetensi Petugas UPT BPOM dalam pendampingan monitoring efek samping OBA, OK dan SK serta peningkatan peran tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat di daerah						5,160,000	516,000
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			O - Pembinaan dan Monitoring Kinerja DAK Non Fisik 2024 di Kantor BPOM Bengkulu						17,364,000	1,736,400
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan						330,000	33,000
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Forum Komunikasi Pengawasan Saran Distribusi dan Pelayanan ONPP						700,000	70,000
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Perkuatan pengawasan produk tembakau untuk UPT						4,900,000	490,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	37,438,300
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI								
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Perkuatan pengawasan produk tembakau untuk UPT			4,900,000	490,000								
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN			61,260,000	6,126,000								
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA			33,360,000	3,336,000								
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN			32,310,000	3,231,000								
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OMKA PALSU, TIE , TINDAK LANJUT PUBLIC T WARNING			16,926,000	1,692,600								
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN ROKOK			9,880,000	988,000								
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - PENGAWASAN PERIKLANAN OT, SK, KOSMETIKA			8,940,000	894,000								
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - PENGAWASAN PERIKLANAN PENANDAAN			10,955,000	1,095,500								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - INTENSIFIKASI PANGAN MENJELANG - SETELAH HARI BESAR NASIONAL						23,800,000	2,380,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			I - RENCANA AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS						29,800,000	2,980,000
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			J - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN						35,878,000	3,587,800
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Forum Komunikasi Pengawasan Saran Distribusi dan Pelayananan ONPP						700,000	70,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan						330,000	33,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis pengawasan Mutu Obat beredar						5,160,000	516,000
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK						2,510,000	251,000
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen						5,160,000	516,000
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - Training GMP Topik khusus bagi inspektur CPOTB						5,160,000	516,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Pertemuan koordinasi Inspektur OT SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT dan SK						7,810,000	781,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - Pelatihan Sampling OT dan SK			5,160,000			516,000
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			J - Penguatan aksi dan strategi penanganan pemberantasan obat dan bahan alam (OBA)			5,160,000			516,000
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			K - Peningkatan kompetensi Petugas UPT BPOM dalam pendampingan monitoring efek samping OBA, OK dan SK serta peningkatan peran tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat di daerah			5,160,000			516,000
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			L - Forum komunikasi Inspektur Kosmetik			4,840,000			484,000
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - Forum koodinasi dan komunikasi perkuatan pengawasan dan pelayanan publik terkait pemasukan kosmetika dan sertifikasi CPKB			5,160,000			516,000
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			N - Evaluasi sampling Kosmetik			5,160,000			516,000
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			O - Pembinaan dan Monitoring Kinerja DAK Non Fisik 2024 di Kantor BPOM Bengkulu			17,364,000			1,736,400
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			P - Bimbingan teknis pengawas pangan fortifikasi			6,780,000			678,000
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - Bimtek CPPOB			20,879,000			2,087,900
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			R - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator			1,000			100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				S - Pelatihan Fasilitator PKP dalam pendampingan penerapan CPPOB/ HACCP di UMKM				3,880,000		388,000	
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					60	60	60	65	65	65	74.5	74.5	74.5	75	4,407,226,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium				A - Pemenuhan / Peremajaan Alat Laboratorium				2,404,405,000		2,404,405,000	
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				H - IN HOUSE TRAINING BIDANG KIMIA PANGAN				12,449,000		12,449,000	
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				I - IN HOUSE TRAINING BIDANG MIKROBIOLOGI				11,842,000		11,842,000	
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				J - IN HOUSE TRAINING BIDANG OBAT				44,484,000		44,484,000	
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			056 - Pemantauan/ evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				F - Workshop Regionalisasi				1,000		1,000	
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				N - PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN				48,000,000		48,000,000	
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				F - PELATIHAN ANALISIS INSTRUMEN PELATIHAN TEKNIS JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES DAN GMO				10,590,000		10,590,000			
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				G - MAGANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN (ke Balai Kalibrasi dan Vendor Alat)				15,468,000		15,468,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/ evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			E - Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024			1,000			1,000		
		10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			K - PENINGKATAN KOMPETENSI SDM LABORATORIUM/ PELATIHAN KE BALAI LAIN			2,000			2,000		
		11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			M - WORKSHOP REFRESHMENT ISO 17025 TERKAIT EVALUASI PROVIDER UJI BANDING LAB MIKRO			14,932,000			14,932,000		
		12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			A - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT GLASS			60,866,000			60,866,000		
		13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			L - MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			123,130,000			123,130,000		
		14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			A - PENGADAAN SUKU CADANG			641,576,000			641,576,000		
		15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			B - PENGADAAN GLASSWARE			66,000,000			66,000,000		
		16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			C - PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM			464,087,000			464,087,000		
		17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			H - PERLENGKAPAN K3 PERSONEL LABORATORIUM			10,800,000			10,800,000		
		18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			M - WORKSHOP REFRESHMENT ISO 17025 TERKAIT EVALUASI PROVIDER UJI BANDING LAB MIKRO			0			0		
		19.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			E - PENGADAAN REAGEN VERIFIKASI, KOLABORASI, DAN PROFISIENSI			63,650,000			63,650,000		
		20.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			E - PELATIHAN ANALISIS INSTRUMEN WORKSHOP PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/			10,590,000			10,590,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Laboratorium				BALAI POM - KIMIA PANGAN OLAHAN DAN AIR								
		21.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			N - PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN				0				0
		22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			C - REAKREDITASI KAN ISO 17025				50,637,000				50,637,000
		23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			D - PELATIHAN ANALISIS INSTRUMEN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI POM PENGUJIAN KIMIA KOBONAPPZA, OTSKK DAN KOSMETIK				30,070,000				30,070,000
		24.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - PENGADAAN TEST KIT				73,146,000				73,146,000
		25.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			C - PELATIHAN ANALISIS INSTRUMEN Bimbingan Teknis LRPII bahan kontak pangan olahan				10,590,000				10,590,000
		26.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			B - PELATIHAN ANALISIS INSTRUMEN				10,590,000				10,590,000
		27.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			I - UJI PROFISIENSI				4,500,000				4,500,000
		28.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			A - WORKSHOP REFRESHMENT ISO 17025 TERKAIT EVALUASI KETIDAKPASTIAN PENGUJIAN				23,857,000				23,857,000
		29.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			F - PENGADAAN REAGEN PREKURSOR				25,000,000				25,000,000
		30.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN FASILITAS KANTOR				62,815,000				62,815,000
		31.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/ evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			A - ADMINSTRASI KEGIATAN PNBPDengan ESTIMASI PENDAPATAN 195 JUTA				6,240,000				6,240,000
		32.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan	056 - Pemantauan/ evaluasi/koordinasi			B - PERTEMUAN TEKNIS KAN				6,680,000				6,680,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium									
		33.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			056 - Pemantauan/ evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat					1,000	1,000
		34.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - KAJI ULANG DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP/ PETA KEMAMPUAN					2,500,000	2,500,000
		35.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			056 - Pemantauan/ evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			D - Workshop Alat Laboratorium					1,000	1,000
		36.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			G - OPERASIONAL LABORATORIUM					97,726,000	97,726,000
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												14.29	83,361,600
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - PENGADAAN REAGEN BLOKIR					198,068,000	39,613,600
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL					139,554,000	27,910,800
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN					79,186,000	15,837,200
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		10	15	20	25	30	35	35	50	50	50	50	4,170,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika,			A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN					4,170,000	4,170,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				FORTIFIKASI					
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	87.31	3,010,454,000
		NO	RO			KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE DENGAN TOMAS RM			401,614,000		401,614,000		
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		B - KIE dalam upaya konvergensi pencegahan stunting dan penyebaran informasi obat dan makanan, dan inovasi percaya juara keren			46,557,000		46,557,000		
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		C - Penyebaran Informasi Obat dan Makanan Melalui Kegiatan Pameran dan CFD Poli Pintar			95,790,000		95,790,000		
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		D - KIE PENGAWASAN PABUKOAN DAN MOBIL LABORATORIUM KELILING			40,340,000		40,340,000		
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		E - OPERASIONAL PETUGAS SISTEM KERACUNAN (SIKER) RUMAH SAKIT			16,010,000		16,010,000		
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS			20,640,000		20,640,000		
		7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		A - Forum Konsultasi/Komunikasi Publik BPOM di Bengkulu			26,694,000		26,694,000		
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		B - Penyebaran informasi melalui media sosial dan cetak elektronik			48,083,000		48,083,000				
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		G - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE DENGAN TOMAS PNB			263,836,000		263,836,000				
10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		H - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE DENGAN TOMAS BLOKIR			2,050,890,000		2,050,890,000				
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	20	25	45	65	65	72.5	75	75	100	11	474,948,000	
		NO	RO			KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			G - PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSI PROGRAM PJAS 2023-2024						33,569,000	33,569,000		
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			A - KOORDINASI MANAJERIAL DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR DAERAH DALAM RANGKA KOMITMEN PROGRAM PJAS (JAN - APR)						60,058,000	60,058,000		
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			B - SURVEY SEKOLAH REKOMENDASI						16,210,000	16,210,000		
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			C - PAKET EDUKASI PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN (APR-NOV)						150,287,000	150,287,000		
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			D - BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH						43,439,000	43,439,000		
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN (sekolah intervensi 2024) (Sept-Nov)						0	0		
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			F - PELAKSANAAN SURVEILAN SERTIFIKASI SEKOLAH (SEPT-NOV)						15,280,000	15,280,000		
		8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			H - KOMITMEN DAN MONEV PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK USIA SEKOLAH (JULI - OKT)						25,283,000	25,283,000		
		9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			I - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN PJAS DI KAB						53,460,000	53,460,000		
		10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			J - PERLUASAN PENGAWALAN PJAS DILUAR KANTIN SEKOLAH						15,402,000	15,402,000		
		11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			K - Sosialisasi dan pembinaan Sekolah terkait Keamanan Pangan Usia Sekolah (Menyala BPOM KU dan BPOM CLASS / BPOM MENGAJAR dalam rangka Pembinaan Sekolah SMA)						31,454,000	31,454,000		
		12.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			E - MONEV PEMBERDAYAAN KADER PJAS DAN SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN (sekolah intervensi 2024) (Sept-Nov)						30,506,000	30,506,000		
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	5	25	60	60	70	100	100	100	100	3	505,661,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			A - OPERASIONAL GKPD						69,000,000	69,000,000	
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa			B - ADVOKASI LINTAS SEKTOR DAERAH DALAM RANGKA KOMITMEN PROGRAM DESA DAN PASAR						52,670,000	52,670,000	
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa			C - BIMBINGAN TEKNIS KOORDINATOR LAPANGAN DAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA						83,810,000	83,810,000	
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap			A - PEMANTAUAN DAN EVALUASI PADA DESA PROGRAM GKPD 2024						19,956,000	19,956,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
				intervensi desa sebelumnya											
	5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa			A - Pengambilan survey pre GKPD						24,295,000	24,295,000		
	6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa			C - INTENSIFIKASI DAN MONEV PADA DESA YANG DI INTERVENSI						45,831,000	45,831,000		
	7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa			B - PENDAMPINGAN PETUGAS BALAI DALAM RANGKA FASILITASI PENERAPAN KEAMANAN PANGAN DESA OLEH KADER GKPD						11,041,000	11,041,000		
	8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			B - Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan						17,590,000	17,590,000		
	9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa			D - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA OLEH PARA KADER KEAMANAN PANGAN						98,878,000	98,878,000		
	10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			C - PENGAWALAN GKPD						28,110,000	28,110,000		
	11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			B - KOORDINASI PROGRAM GKPD DENGAN PEMANGKU KEPENGTINGAN DAN PELAKSANAAN SURVEY DESA CALON DESA PAMAN						40,380,000	40,380,000		
	12.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa			A - FASILITASI PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER GKPD DI MASING2 DESA						14,100,000	14,100,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	5	25	60	60	70	100	100	100	100	1	143,383,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			A - BIMTEK PENGELOLA PASAR DAN PEDAGANG PASAR						43,122,000	43,122,000		
	2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			B - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA						17,560,000	17,560,000		
	3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			B - PELATIHAN FASILITATOR PASAR						26,961,000	26,961,000		
	4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi			A - MONITORING PENGAWALAN PROGRAM PASAR DENGAN MOBLING BEBAS DARI BAHAN BERBAHAYA						39,631,000	39,631,000		
	5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			A - PELAKSANAAN SAKA POM dan OPD DI PASAR CALON PASAR TRADISIONAL						12,869,000	12,869,000		
	6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi			B - PENGAWALAN PASAR PPABK						3,240,000	3,240,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																					
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																						
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	20	30	35	40	45	50	65	66	70	78	14.12	54,347,000																																																					
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td>A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM</td><td>19,860,000</td><td>19,860,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td>B - Sosialisasi Desk Registrasi Pangan Olahan</td><td>34,487,000</td><td>34,487,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM	19,860,000	19,860,000	2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Sosialisasi Desk Registrasi Pangan Olahan	34,487,000	34,487,000																																				
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																															
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM	19,860,000	19,860,000																																																															
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - Sosialisasi Desk Registrasi Pangan Olahan	34,487,000	34,487,000																																																															
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	30	60	60	60	60	80	90	95	95	95	95	229,080,000																																																					
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>051 - Operasi Intelijen</td><td>A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan</td><td>640,000</td><td>640,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>051 - Operasi Intelijen</td><td>B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan</td><td>51,260,000</td><td>51,260,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>051 - Operasi Intelijen</td><td>C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan</td><td>512,000</td><td>512,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>052 - Gelar Kasus dan Pelaporan</td><td>A - Gelar Kasus dan Pelaporan</td><td>1,344,000</td><td>1,344,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP</td><td>A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP</td><td>1,024,000</td><td>1,024,000</td></tr><tr><td>6.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>054 - Operasi Penindakan</td><td>A - Operasi Penindakan</td><td>59,524,000</td><td>59,524,000</td></tr><tr><td>7.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>054 - Operasi Penindakan</td><td>B - Penangkapan dan Penahanan</td><td>7,465,000</td><td>7,465,000</td></tr><tr><td>8.</td><td>DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU</td><td>055 - Pemberkasan</td><td>A - Pemberkasan</td><td>43,656,000</td><td>43,656,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	640,000	640,000	2.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	51,260,000	51,260,000	3.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	512,000	512,000	4.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,344,000	1,344,000	5.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,024,000	1,024,000	6.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	59,524,000	59,524,000	7.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	7,465,000	7,465,000	8.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	43,656,000	43,656,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																															
1.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	640,000	640,000																																																															
2.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	51,260,000	51,260,000																																																															
3.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	512,000	512,000																																																															
4.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,344,000	1,344,000																																																															
5.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,024,000	1,024,000																																																															
6.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	59,524,000	59,524,000																																																															
7.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	7,465,000	7,465,000																																																															
8.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	43,656,000	43,656,000																																																															

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		9.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU			055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				4,624,000	4,624,000
		10.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU			055 - Pemberkasan				C - Gelar Kasus dan Pelaporan				2,980,000	2,980,000
		11.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU			055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				5,400,000	5,400,000
		12.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU			055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				9,904,000	9,904,000
		13.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik				2,000	2,000
		14.	DR.3165.QCD.U60 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik				40,745,000	40,745,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	210,132,000
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				4,296,000	4,296,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				500,000	500,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				B - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				12,550,000	12,550,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				C - Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				3,742,000	3,742,000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan				33,270,000	33,270,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				6,000,000	6,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - Forum Koordinasi PPNS						5,900,000	5,900,000
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - Forum Koordinasi Intelijen						5,900,000	5,900,000
		9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM						4,250,000	4,250,000
		10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			F - Perkuatan Manajemen Operasi						5,900,000	5,900,000
		11.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			G - Evaluasi Operasi Siber dan Coaching Clinic						4,250,000	4,250,000
		12.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			H - Pelatihan PPNS						4,250,000	4,250,000
		13.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			I - Peningkatan Kompetensi Petugas Penindakan						10,400,000	10,400,000
		14.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			J - TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL						14,720,000	14,720,000
		15.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			K - KONSULTASI DAN KOORDINASI PETUGAS PENINDAKAN DENGAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM YANG ADA DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BENGKULU						24,715,000	24,715,000
		16.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			L - OPERASI INTENSIF BERSAMA LINTAS SEKTOR CJS (criminal justice system) DALAM PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL						34,878,000	34,878,000
		17.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			M - Penandatanganan MoU dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Operasi Penindakan						21,736,000	21,736,000
		18.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan						12,875,000	12,875,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	30,885,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/		051 - Pemeriksaan			A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN,						30,885,000	30,885,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			dalam rangka sertifikasi			AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI/ RESERTIFIKASI, PENDAMPINGAN CAPA						
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.72	4,208,805,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			I - PERTEMUAN REGIONAL LABORATORIUM					28,320,000	19,824,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - RAPAT EVALUASI NASIONAL					13,920,000	9,744,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Asistensi Penyusunan Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Laporan Keuangan dan Laporan DAK NF POM UPT					13,920,000	9,744,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			C - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)					19,980,000	13,986,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			D - BIMTEK ISO 45001:2018 STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA					19,630,000	13,741,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			E - SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN					15,950,000	11,165,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			F - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan					6,393,000	4,475,100
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			G - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I, TAHUNAN DAN TW III					18,240,000	12,768,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			H - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024					9,120,000	6,384,000
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			J - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029					4,560,000	3,192,000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			K - Sosialisasi Peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)					4,560,000	3,192,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			L - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak					4,560,000	3,192,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		M - Forum Koordinasi Analisis Anggaran BPOM							7,224,000	5,056,800
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		N - Forum Koordinasi Analisis Anggaran BPOM							4,524,000	3,166,800
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		O - Pelatihan Kepemimpinan							9,644,000	6,750,800
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - Rapat Koordinasi Nasional SDM							13,085,000	9,159,500
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)							4,524,000	3,166,800
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Workshop Pengadaan Barang/Jasa Badan POM							9,644,000	6,750,800
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		D - Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2025							4,524,000	3,166,800
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		E - PEMBINAAN SPIRITUAL (JASMANI ROHANI) PNS DAN PPNPN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL DI LINGKUNGAN BPOM BENGKULU							11,340,000	7,938,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		F - IMPLEMENTASI QMS ISO 9001:2015							44,558,000	31,190,600
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		G - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025							4,560,000	3,192,000
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		H - Pemutakhiran data semesteran dan tahunan							18,240,000	12,768,000
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		I - MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH TENAGA PENUNJANG							51,840,000	36,288,000
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		J - KOORDINASI MANAJERIAL							95,923,000	67,146,100
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		S - Sertifikasi Pelatihan Ahli K3 Umum							15,520,000	10,864,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		K - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026						4,560,000		3,192,000
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		L - Pengadaan CASN (PNS dan PPPK)						5,560,000		3,892,000
		29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		M - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L						18,240,000		12,768,000
		30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		N - Workshop Penguatan Anti Korupsi						7,062,000		4,943,400
		31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Pelatihan Teknis dan Fungsional non PFM						9,120,000		6,384,000
		32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		P - Pelatihan Lead Auditor						4,560,000		3,192,000
		33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - Diklat Pembuatan Aplikasi Web						18,020,000		12,614,000
		34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		R - Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik						31,640,000		22,148,000
		35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		U - IMPLEMENTASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENUJU WBK DAN WBBM						12,935,000		9,054,500
		36.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		A - PEMBANGUNAN PELAPIS TEBING DAN PAGAR BPOM DP						2,101,260,000		2,101,260,000
		37.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		B - Hydrant Instalation						1,463,081,000		1,463,081,000
		38.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		C - Renovasi Gedung Kantor Batanghari						93,464,000		93,464,000
		39.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		D - Rabat Beton Kantor Batanghari						154,800,000		154,800,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.59	169,800,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			P - Pelatihan Lead Auditor							4,560,000	1,368,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			Q - Diklat Pembuatan Aplikasi Web							18,020,000	5,406,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2025							4,524,000	1,357,200
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			E - PEMBINAAN SPIRITUAL (JASMANI ROHANI) PNS DAN PPNP DALAM RANGKA IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL DI LINGKUNGAN BPOM BENGKULU							11,340,000	3,402,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			F - IMPLEMENTASI QMS ISO 9001:2015							44,558,000	13,367,400
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			G - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025							4,560,000	1,368,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			H - Pemutakhiran data semesteran dan tahunan							18,240,000	5,472,000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			I - MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH TENAGA PENUNJANG							51,840,000	15,552,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			J - KOORDINASI MANAJERIAL							95,923,000	28,776,900
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			S - Sertifikasi Pelatihan Ahli K3 Umum							15,520,000	4,656,000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			K - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026							4,560,000	1,368,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			L - Pengadaan CASN (PNS dan PPPK)							5,560,000	1,668,000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			M - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/ L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L							18,240,000	5,472,000
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			N - Workshop Penguatan Anti Korupsi							7,062,000	2,118,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Pelatihan Teknis dan Fungsional non PFM							9,120,000	2,736,000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		R - Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik							31,640,000	9,492,000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		U - IMPLEMENTASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENUJU WBK DAN WBBM							12,935,000	3,880,500
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - RAPAT EVALUASI NASIONAL							13,920,000	4,176,000
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Laporan Keuangan dan Laporan DAK NF POM UPT							13,920,000	4,176,000
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)							19,980,000	5,994,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		D - BIMTEK ISO 45001:2018 STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA							19,630,000	5,889,000
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		E - SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN							15,950,000	4,785,000
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		F - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan							6,393,000	1,917,900
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		G - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I, TAHUNAN DAN TW III							18,240,000	5,472,000
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		H - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024							9,120,000	2,736,000
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		I - PERTEMUAN REGIONAL LABORATORIUM							28,320,000	8,496,000
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		J - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029							4,560,000	1,368,000
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		K - Sosialisasi Peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)							4,560,000	1,368,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		L - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak							4,560,000	1,368,000
		30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		M - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM							7,224,000	2,167,200
		31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		N - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM							4,524,000	1,357,200
		32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		O - Pelatihan Kepemimpinan							9,644,000	2,893,200
		33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - Rapat Koordinasi Nasional SDM							13,085,000	3,925,500
		34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)							4,524,000	1,357,200
		35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Workshop Pengadaan Barang/Jasa Badan POM							9,644,000	2,893,200
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	10,630,675,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA							162,912,000	162,912,000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - PEMELIHARAAN ALAT PENGOLAH DATA							45,950,000	45,950,000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - PEMELIHARAAN RUMAH DINAS NEGARA							5,005,000	5,005,000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN							2,128,079,000	2,128,079,000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - LANGGANAN DAYA DAN JASA							1,166,244,000	1,166,244,000
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS							175,742,000	175,742,000
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN							79,500,000	79,500,000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - JASA PENGEMUDI, KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR							1,433,350,000	1,433,350,000
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Balai							5,425,893,000	5,425,893,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN					
		10.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA					8,000,000		8,000,000			
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.88		80,000,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA					80,000,000		80,000,000			
													Total	25,536,067,000			

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Bengkulu, 29 August 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

YOGI ABAS MATARAM

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

1. Pengukuran Kinerja Hasil Penarikan Aplikasi SIMETRIS

No	Kode unit	Balai/UPT	Bulan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian	Capaian Dinormalisasi	Bobot Nilai AKIP	Capaian Final	Nilai NKO	Predikat NKO
A	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember										91,73	Baik
1	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,5	94,67	109,45	Sangat Baik	109,45	90	98,51		
2	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58	Sangat Baik	102,58	90	92,32		
3	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91,53	114,41	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
4	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik	100	90	90		
5	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	95	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
6	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	99,91	109,79	Sangat Baik	109,79	90	98,81		
7	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
8	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,29	110,93	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
9	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100	104,44	Sangat Baik	104,44	90	94		
10	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,32	109,24	Sangat Baik	109,24	90	98,32		
11	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,92	109,8	Sangat Baik	109,8	90	98,82		
12	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	86,81	96,46	Baik	96,46	90	86,81		
13	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,99	105,99	Sangat Baik	105,99	90	95,39		
14	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75	76,9	102,53	Sangat Baik	102,53	90	92,28		
15	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	14,29	100	Baik	100	90	90		
16	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	Baik	100	90	90		
17	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,31	93,16	106,7	Sangat Baik	106,7	90	96,03		
18	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	11	100	Baik	100	90	90		
19	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	3	1	33,33	Kurang	33,33	90	30		
20	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik	100	90	90		
21	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	14,12	16,47	116,64	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
22	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	100	105,26	Sangat Baik	105,26	90	94,73		
23	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan	110	90	99		
24	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,82	102,55	Sangat Baik	102,55	90	92,3		
25	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,72	88,52	97,57	Baik	97,57	90	87,81		
26	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,59	78,33	97,2	Baik	97,2	90	87,48		
27	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Baik	100	90	90		
28	2B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu	Desember	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,88	2,91	101,04	Sangat Baik	101,04	90	90,94		

2. Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan

NO	Rincian Output (RO)		Bulan	VOLUME OUTPUT			ANGGARAN			
				TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SETELAH BLOKIR	REALISASI	CAPAIAN SETELAH BLOKIR
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Oktober	14	11	78.57	210,132,000	44,885,000	44,753,500	99.71
			November		12	85.71			44,753,500	99.71
			Desember		14	100.00			44,884,000	100.00
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Oktober	304	573	188.49	30,885,000	30,885,000	2,550,000	8.26
			November		709	233.22			5,390,000	17.45
			Desember		761	250.33			30,800,900	99.73
3	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Oktober	2,778	3,306	119.01	2,935,677,000	712,440,000	669,565,400	93.98
			November		3,306	119.01			707,097,400	99.25
			Desember		3,306	119.01			712,420,122	100.00

NO	Rincian Output (RO)		Bulan	VOLUME OUTPUT			ANGGARAN			
				TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SETELAH BLOKIR	REALISASI	CAPAIAN SETELAH BLOKIR
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Oktober	1	0.83	83.33	566,000,000	34,333,000	26,834,071	78.16
			November		0.92	91.67			33,278,071	96.93
			Desember		1.00	100.00			34,329,256	99.99
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Oktober	17	17	100.00	74,777,000	23,022,000	23,016,176	99.97
			November		18	105.88			23,016,176	99.97
			Desember		18	105.88			23,016,176	99.97
6	3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Oktober	1	1	100.00	62,815,000	57,115,000	57,073,640	99.93
			November		1	100.00			57,073,640	99.93
			Desember		1	100.00			57,073,640	99.93

NO	Rincian Output (RO)		Bulan	VOLUME OUTPUT			ANGGARAN			
				TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SETELAH BLOKIR	REALISASI	CAPAIAN SETELAH BLOKIR
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Oktober	10	10	100.00	80,000,000	79,500,000	79,500,000	100.00
			November		10	100.00			79,500,000	100.00
			Desember		10	100.00			79,500,000	100.00
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan	Oktober	1	0	0.00	3,812,605,000	0	0	0
			November		0	0.00			0	0
			Desember		0	0.00			0	0
9	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Oktober	1	0.83	83.33	1,940,006,000	1,940,006,000	1,498,182,111	77.23
			November		0.92	91.67			1,618,330,322	83.42
			Desember		1.00	100.00			1,939,852,622	99.99
10	3165.QCD.U60	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Bengkulu	Oktober	2	2	100.00	229,080,000	229,080,000	179,956,550	78.56
			November		2	100.00			205,113,222	89.54
			Desember		2	100.00			229,035,415	99.98
11	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Oktober	11	11	100.00	474,948,000	50,628,000	46,133,000	91.12
			November		11	100.00			50,053,000	98.86
			Desember		11	100.00			50,616,400	99.98
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Oktober	3	1	33.33	505,661,000	88,164,000	88,139,750	99.97
			November		1	33.33			88,139,750	99.97
			Desember		1	33.33			88,156,750	99.99

NO	Rincian Output (RO)		Bulan	VOLUME OUTPUT			ANGGARAN			
				TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SETELAH BLOKIR	REALISASI	CAPAIAN SETELAH BLOKIR
13	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Oktober	1	1	100.00	143,383,000	28,560,000	28,535,500	99.91
			November		1	100.00			28,535,500	99.91
			Desember		1	100.00			28,554,500	99.98
14	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Oktober	45	45	100.00	45,000,000	11,717,000	11,712,900	99.97
			November		45	100.00			11,712,900	99.97
			Desember		45	100.00			11,712,900	99.97
15	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Oktober	14	14	100.00	54,347,000	4,872,000	2,040,000	41.87
			November		14	100.00			4,030,000	82.72
			Desember		14	100.00			4,863,160	99.82
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Oktober	307	242	78.83	416,808,000	416,808,000	315,614,614	75.72
			November		298	97.07			395,485,881	94.88
			Desember		307	100.00			416,758,903	99.99
17	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Oktober	715	667	93.29	515,395,000	515,395,000	390,907,473	75.85
			November		695	97.20			473,958,132	91.96
			Desember		715	100.00			515,273,582	99.98
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Oktober	36	34	94.44	24,915,000	24,915,000	22,909,000	91.95
			November		36	100.00			24,611,400	98.78
			Desember		36	100.00			24,911,777	99.99
19	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi 3165.QIC.003 yang diperiksa oleh UPT	Oktober	3	3	100.00	4,170,000	4,170,000	3,350,000	80.34
			November		3	100.00			3,350,000	80.34
			Desember		3	100.00			4,164,975	99.88
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Oktober	289	259	89.62	374,383,000	374,383,000	283,282,372	75.67
			November		277	95.85			322,710,965	86.20
			Desember		289	100.00			374,131,214	99.93
21	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Oktober	1	1	100.00	2,404,405,000	2,227,083,000	2,227,083,000	100.00
			November		1	100.00			2,227,083,000	100.00
			Desember		1	100.00			2,227,083,000	100.00
22	6384.EBA.956	Layanan BMN	Oktober	1	0	0.00	8,000,000	0	0	0
			November		0	0.00			0	0
			Desember		0	0.00			0	0
23	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Oktober	1	0.83	83.33	10,622,675,000	8,911,430,000	7,260,130,392	81.47
			November		0.92	91.67			7,984,299,521	89.60
			Desember		1.00	100.00			8,910,809,556	99.99

LAMPIRAN EFISIENSI															
No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Dukungan RO	Capaian Output IKU				CAPAIAN INPUT SS			TE PER IKU			Kriteria
					T	R	%		Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	%TE	
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1,1	Persentase sampel Sediaan Farmasi	3165.QIA.002	100	86,50	94,67	109,45	Rp515.395.000,0	Rp515.273.582,0	99,98	1,09	0,09	100%	Efisien
		1,2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	3165.QDC.001	100	26,00	26,67	102,58	Rp11.717.000,0	Rp11.712.900,0	99,97	1,03	0,03	100%	Efisien
		1,3	Persentase sampel Pangan Olahan	3165.QIA.001	40	80	91,53	114,41	Rp166.723.200,0	Rp166.703.561,2	99,99	1,14	0,14	100%	Efisien
		1,4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	3165.QIA.001	20	100	100	100,00	Rp83.361.600,0	Rp83.351.780,6	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
		1,5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	3165.QIA.001	20	85	95	111,76	Rp83.361.600,0	Rp83.351.780,6	99,99	1,12	0,12	100%	Efisien
		1,6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	3165.QIC.001	30	91	99,91	109,79	Rp7.474.500,0	Rp7.473.533,1	99,99	1,10	0,10	100%	Efisien
		1,7	Persentase sarana produksi Sediaan	3165.QIC.001	20	87	100	114,94	Rp4.983.000,0	Rp4.982.355,4	99,99	1,15	0,15	100%	Efisien
		1,8	Persentase sarana produksi Pangan	3165.QIC.001	50	85	94,29	110,93	Rp12.457.500,0	Rp12.455.888,5	99,99	1,11	0,11	100%	Efisien
		1,9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan	3165.QIC.004	30	95,75	100	104,44	Rp112.314.900,0	Rp112.239.364,2	99,93	1,05	0,05	100%	Efisien
		1,10	Persentase sarana distribusi Pangan	3165.QIC.004	30	90	98,32	109,24	Rp112.314.900,0	Rp112.239.364,2	99,93	1,09	0,09	100%	Efisien
		1,11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi	3165.QIC.004	20	91,00	99,92	109,80	Rp74.876.600,0	Rp74.826.242,8	99,93	1,10	0,10	100%	Efisien
		1,12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	3165.QIC.004	10	90,00	86,81	96,46	Rp37.438.300,0	Rp37.413.121,4	99,93	0,97	-0,03		Tidak
		1,13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah	3165.QIC.004	10	100,00	105,99	105,99	Rp37.438.300,0	Rp37.413.121,4	99,93	1,06	0,06	100%	Efisien
		1,14	Persentase Pemenuhan Lab Pengujian	3165.PDD.001	100	75,00	76,9	102,53	Rp4.167.089.000,0	Rp4.166.935.622,0	100,00	1,03	0,03	100%	Efisien
		1,15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota	3165.QIA.001	20	14,29	14,29	100,00	Rp83.361.600,0	Rp83.351.780,6	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	2,1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.003	100	50	50	100,00	Rp4.170.000,0	Rp4.164.975,0	99,88	1,00	0,00	100%	Efisien
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3,1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3165.BDC.001	100	87,31	93,16	106,70	Rp712.440.000,0	Rp712.420.122,0	100,00	1,07	0,07	100%	Efisien
		3,2	Jumlah sekolah yang melaksanakan	3165.QDB.001	100	11	11	100,00	Rp50.628.000,0	Rp50.616.400,0	99,98	1,00	0,00	100%	Efisien
		3,3	Jumlah desa pangan aman	3165.QDB.002	100	3	1	33,33	Rp88.164.000,0	Rp88.156.750,0	99,99	0,33	-0,67		Tidak
		3,4	Jumlah pasar pangan aman berbasis	3165.QDB.003	100	1	1	100,00	Rp28.560.000,0	Rp28.554.500,0	99,98	1,00	0,00	100%	

4. Indeks Pelayanan Publik UPT Balai POM di Bengkulu



INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BALAI BESAR/BALAI POM 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
28	Balai POM di Tasikmalaya	4,40	4,84	4,86	4,85	Pelayanan Prima
29	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,70	4,83	4,92	4,85	Pelayanan Prima
30	Balai POM di Tulang Bawang	4,05	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
31	Balai POM di Pangkal pinang	4,70	4,90	4,64	4,84	Pelayanan Prima
32	Balai POM di Balikpapan	4,20	4,87	4,74	4,84	Pelayanan Prima
33	Balai Besar POM di Padang	4,70	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
34	Balai POM di Bogor	4,20	4,80	4,96	4,84	Pelayanan Prima
35	Balai POM di Bengkulu	4,70	4,76	5,00	4,82	Pelayanan Prima
36	Balai POM di Manokwari	4,70	4,75	5,00	4,81	Pelayanan Prima
37	Balai POM di Surakarta	4,20	4,70	5,00	4,78	Pelayanan Prima
38	Balai Besar POM di Banjarbaru	4,70	4,75	4,83	4,77	Pelayanan Prima
39	Balai POM di Ende	4,40	4,74	4,81	4,76	Pelayanan Prima
40	Balai POM di Mamuju	4,60	4,66	5,00	4,75	Pelayanan Prima
41	Balai POM di Kediri	4,20	4,66	4,98	4,74	Pelayanan Prima
42	Balai POM di Tarakan	4,51	4,66	4,96	4,74	Pelayanan Prima
43	Balai POM di Palopo	4,20	4,66	4,87	4,71	Pelayanan Prima
44	Balai Besar POM di Jayapura	4,70	4,70	4,70	4,70	Pelayanan Prima
45	Balai POM di Bima	3,75	4,60	4,89	4,67	Pelayanan Prima
46	Balai POM di Indragiri Hulu	4,05	4,63	4,77	4,67	Pelayanan Prima
47	Balai POM di Baubau	4,51	4,51	4,92	4,61	Pelayanan Prima
48	Balai POM di Payakumbuh	4,20	4,57	4,53	4,56	Pelayanan Prima
49	Balai POM di Tangerang	4,20	4,47	4,74	4,54	Pelayanan Prima
50	Balai POM di Dumai	3,75	4,59	4,41	4,54	Pelayanan Prima
51	Balai POM di Tanjungbalai	4,20	4,21	4,91	4,38	Sangat Baik
52	Balai POM di Jember	4,20	3,89	4,89	4,14	Sangat Baik
53	Balai POM di Banyumas	3,75	3,90	4,70	4,10	Sangat Baik

Sumber : Paparan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM pada Bimtek SAKIP 4-6 ebruari 2026



Sumber : Pengukuran Indeks Pelayanan Publik melalui <https://evaluasi.kie.pom.go.id>

5. Tingkat Efektivitas KIE Balai POM di Bengkulu

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
1	Dit. PMPU OTSKK	90,63	-	90,63	89,34	101.44 %	Mencapai Target	Efektif
2	Dit. PMPU PO	89,36	-	89,36	86,42	103.4 %	Mencapai Target	Efektif
3	BBPOM di Banda Aceh	96,7	96,21	96,45	86,54	111.45 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
4	BBPOM di Bandar Lampung	91,69	93,74	92,71	89,6	103.47 %	Mencapai Target	Efektif
5	BBPOM di Medan	95,09	87,98	91,53	87,68	104.39 %	Mencapai Target	Efektif
6	BBPOM di Padang	89,99	89,04	89,51	88	101.72 %	Mencapai Target	Efektif
7	BBPOM di Palembang	93,68	90,32	92	89,09	103.27 %	Mencapai Target	Efektif
8	BBPOM di Pekanbaru	94,7	96,5	95,6	87,9	108.76 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
9	Balai POM di Batam	89,27	86,29	87,78	86,18	101.86 %	Mencapai Target	Efektif
10	Balai POM di Bengkulu	89,31	97,02	93,16	87,31	106.7 %	Mencapai Target	Efektif
11	Balai POM di Dumai	86,58	85,5	86,04	85,83	100.24 %	Mencapai Target	Efektif*
12	Balai POM di Indragiri Hulu	86,79	87,71	87,25	86,19	101.23 %	Mencapai Target	Efektif*
13	Balai POM di Jambi	88,21	89,28	88,75	88,21	100.61 %	Mencapai Target	Efektif
14	Balai POM di Pangkal Pinang	86,43	86,59	86,51	85,99	100.6 %	Mencapai Target	Efektif
15	Balai POM di Payakumbuh	87,08	87,38	87,23	85,26	102.31 %	Mencapai Target	Efektif
16	Balai POM di Tanjungbalai	87,4	88,22	87,81	86,75	101.22 %	Mencapai Target	Efektif
17	Balai POM di Tulang Bawang	90,85	92,43	91,64	86,16	106.36 %	Mencapai Target	Efektif
18	BBPOM di Bandung	86,65	93,13	89,89	86,94	103.39 %	Mencapai Target	Efektif
19	BBPOM di Jakarta	87,74	87,2	87,47	87,06	100.47 %	Mencapai Target	Efektif

Sumber : Paparan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM pada Bimtek SAKIP 4-6 Februari 2026

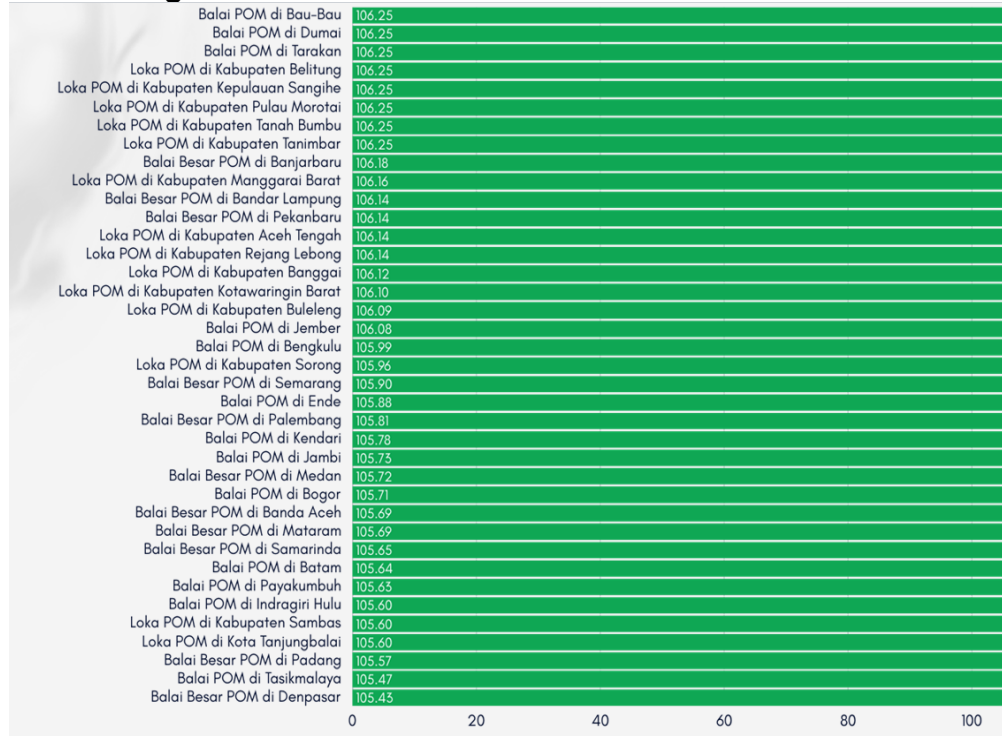
6. Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Bengkulu

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,00	3,13	6,13	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,35	2,59	4,94	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,45	4,25	8,70	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,27	3,91	8,18	MS

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,88	7,50	14,38	MS
	VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,61	3,76	8,37	MS
TOTAL PENGUNGKIT						50,69	MS
B.	Komponen Hasil		40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50	20,90				
I.	1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50	17,15			MS	
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00	3,75			MS	
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	16,93				
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50	16,93			MS	
TOTAL HASIL						37,83	
NILAI PMPZI						88,52	

Sumber: Nota Dinas Sestama BPOM NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.289 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai POM di Bengkulu

7. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT Balai POM di Bengkulu



Sumber : paparan Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada Bimtek SAKIP 4-6 Februari 2026

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

BALAI POM											
No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator	No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator
1	BPOMAMBON	104,9%	77,08%	91,0%	91,0%	16	BPOM SURAKARTA	100,0%	63,19%	80,0%	81,6%
2	BPOMBATAM	102,8%	79,17%	91,0%	91,0%	17	BPOM TANGERANG	100,0%	81,25%	80,0%	90,6%
3	BPOMBENGKULU	100,0%	73,61%	90,0%	86,8%	18	BPOM TASIKMALAYA	100,7%	79,86%	80,0%	90,3%
4	BPOMBOGOR	113,9%	50,00%	80,0%	81,9%	19	BPOM TARAKAN	100,7%	89,58%	91,0%	95,1%
5	BPOMJAMBI	102,8%	87,50%	91,0%	95,1%	20	BPOM BALIKPAPAN	96,4%	66,67%	80,0%	81,5%
6	BPOMJEMBER	100,0%	94,44%	91,0%	97,2%	21	BPOM BAUBAU	102,4%	100,00%	91,0%	101,2%
7	BPOMKENDARI	101,4%	72,22%	80,0%	86,8%	22	BPOM DUMAI	100,0%	96,43%	90,0%	98,2%
8	BPOMKEDIRI	102,8%	79,86%	91,0%	91,3%	23	BPOM TANJUNG BALAI	109,5%	90,48%	80,0%	100,0%
9	BPOMMAMUJU	100,0%	72,92%	80,0%	86,5%	24	BPOM BANYUMAS	100,0%	66,67%	84,0%	83,3%
10	BPOMMANOKWARI	101,4%	84,03%	85,0%	92,7%	25	BPOM BIMA	100,0%	91,67%	90,0%	95,8%
11	BPOMPALOPO	103,5%	84,03%	90,0%	93,8%	26	BPOM ENDE	104,8%	75,00%	80,0%	89,9%
12	BPOMPALU	102,8%	77,78%	90,0%	90,3%	27	BPOM INDRAGIRI HULU	100,0%	91,67%	80,0%	95,8%
13	BPOMPANGKAL PINANG	100,0%	68,06%	80,0%	84,0%	28	BPOM SANGGAU	111,6%	93,02%	91,0%	102,3%
14	BPOMPAYAKUMBUH	100,0%	90,97%	91,0%	95,5%	29	BPOM TABALONG	106,0%	80,95%	91,0%	93,5%
15	BPOMSOFIFI	105,6%	75,00%	90,0%	90,3%	30	BPOM TULANGBAWANG	100,0%	75,00%	80,0%	87,5%

Rata-Rata Realisasi Jumlah : 102,5%
 Rata-Rata ketepatan waktu pelaporan: 80,3%
 Rata-Rata Realisasi Indikator: 91,4%

[Activate \](#)
[Go to Setting](#)

Sumber : paparan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada Bimtek SAKIP 4-6 Februari 2026

Persentase Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT Balai POM di Bengkulu sesuai Standar kemampuan Laboratorium

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Banda Aceh	73	84,7	80,2	80	51,8	79,6	109,0
2	BBPOM di Padang	77	84,9	88,6	100	26,8	82,8	107,6
3	Balai POM di Batam	67,3	84,0	84,2	30	27,9	67,6	100,5
4	Balai POM di Bengkulu	75	80,1	91,8	80	24,6	76,9	102,5
5	BBPOM di Bandar Lampung	77,2	83,2	81,1	90	51,9	81,0	104,9
6	BBPOM di Palembang	69,7	80,1	84,0	70	31,5	74,0	106,2
7	Balai POM di Jambi	71	80,7	88,9	60	21,8	72,3	101,9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73,7	82,9	86,6	80	34,0	78,2	106,1
9	BBPOM di Bandung	81,7	88,4	89,9	90	70,8	87,2	106,8
10	BBPOM di Jakarta	82	85,5	88,9	100	78,4	88,3	107,7

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
11	BBPOM di Serang	71,5	86,3	92,2	50	31,9	74,8	104,6
12	BBPOM di Yogyakarta	77,5	85,2	92,2	80	50,3	82,1	105,9
13	BBPOM di Denpasar	81,4	84,4	85,8	100	59,8	85,3	104,8
14	BBPOM di Mataram	81,7	89,1	96,1	100	59,7	89,7	109,8
15	BBPOM di Kupang	72,5	80,5	88,6	70	51,6	77,1	106,4
16	BBPOM di Banjarbaru	71,5	76,7	80,4	80	20,2	72,4	101,3
17	BBPOM di Palangkaraya	72,5	80,5	78,6	90	26,2	76,6	105,7
18	BBPOM di Pontianak	73,4	82,3	93,7	60	26,1	74,5	101,5
19	Balai POM di Tarakan	39,1	38,6	44,4	70	5,8	42,8	109,3
20	BBPOM di Gorontalo	65,1	85,2	71,9	50	27,8	69,7	107,1
21	Balai POM di Palu	77	85,4	89,1	70	53,4	79,9	103,7
22	Balai POM di Sofifi	56	52,7	58,6	80	20,5	56,1	100,2
23	Balai POM di Ambon	73,9	82,4	73,3	70	47,9	74,6	101,0
24	Balai POM di Kendari	74,5	85,4	89,3	60	63,2	78,9	105,9
25	Balai POM di Mamuju	52	60,4	62,2	60	5,03	55,1	106,0
26	BBPOM di Jayapura	70	76,9	83,9	70	43,2	73,5	105,1
27	Balai POM di Manokwari	64,1	69,9	75,9	80	13,4	67,5	105,3
	Rata-rata		79,1	82,2	74,1	38,0	74,8	

Sumber : Surat Kepala PPPOMN Badan POM Nomor PR.10.01.10.12.25.574 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 Tahun 2025

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot 50%	Nilai Kualitas Analisis Bobot 25%	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot 25%	
20	BBPOM Semarang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
21	BBPOM Serang	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	97,92
22	BBPOM Surabaya	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
23	BBPOM Yogyakarta	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	97,22
24	BPOM Ambon	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
25	BPOM Balikpapan	100	92	44,44	50,00	23,00	11,11	84,11
26	BPOM Banyumas	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	95,22
27	BPOM Batam	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
28	BPOM Baubau	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	97,22
29	BPOM Bengkulu	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
30	BPOM Bima	87,5	100	100,00	43,75	25,00	25,00	93,75
31	BPOM Bogor	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	97,92
32	BPOM Dumai	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
33	BPOM Ende	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
34	BPOM Indragiri Hulu	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	97,92
35	BPOM Jambi	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	97,92
36	BPOM Jember	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	97,92
37	BPOM Kediri	95,83	100	77,78	47,92	25,00	19,44	92,36
38	BPOM Kendari	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	95,22
39	BPOM Mamuju	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
40	BPOM Manokwari	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
41	BPOM Palopo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
42	BPOM Palu	95,83	92	66,67	47,92	23,00	16,67	87,58

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber : Nota Dinas Direktur Cegah Tangkal Badan POM No : PR.09.02.61.01.26.21 tanggal 09 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko Balai POM di Bengkulu

Rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	45,00	46,50	1,50
Nilai Maturitas	2,813	2,906	0,093
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	

Sumber : NOTA DINAS Inspektur Utama NOMOR: PI.06.07.7.01.26.179 tanggal 15 Januari 2026 perihal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Balai POM di Bengkulu